



Radjimo Sastro Wijono



MODERNITAS DALAM KAMPUNG

Pengarah Kompleks Perumahan Sompok
terhadap Pemukiman Rakyat
di Semarang Abad ke-20

Editor:
Sulri Abdurrochman

MODEL R&D IT AS DALAM KAMPUNG



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

Buku ini tidak diperjualbelikan.

MODERNITAS DALAM KAMPUNG

**Pengaruh Kompleks Perumahan Sompok
terhadap Pemukiman Rakyat di Semarang Abad ke-20**

Radjimo Sastro Wijono

Editor:
Sukri Abdurrachman



LIPI Press

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2013 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB)

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Modernitas dalam Kampung, Pengaruh Kompleks Perumahan Sompok Terhadap Pemukiman Rakyat di Semarang Abad ke-20/Radjimo Sastro Wijono. – Jakarta: LIPI Press, 2013.

xxii + 215 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-743-4 (cetak)

978-602-496-303-3 (e-book)

1. Modernitas
3. Semarang

2. Perumahan

724

Editor : Sukri Abdurrachman
Copieditor : Fadly Suhendra
Penata Isi : Fadly Suhendra
Desainer Sampul : Junaedi Mulawardana

Cetakan Pertama : September 2013



Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Jln. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350
Telp. (021) 314 0228, 314 6942. Faks. (021) 314 4591
E-mail: bmlipi@centrin.net.id
lipipress@centrin.net.id
press@mail.lipi.go.id

Atas kerja sama:
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI)
dengan
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)

Buku ini merupakan karya buku yang terpilih dalam Program Akuisisi Pengetahuan Lokal Tahun 2021 Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.



Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	xi
A. Pendahuluan	xi
B. Kebijakan Kolonial Terhadap Masalah Perkotaan	xiii
C. Pengaruh Kebijakan Kolonial Belanda Terhadap Pemukiman Kota Semarang.....	xv
D. Kebijakan Perumahan di Era Jepang hingga Kemerdekaan	xix
 BAB I	
PENDAHULUAN: PEMUKIMAN, KAMPUNG, DAN KOMPLEKS PERUMAHAN	1
A. Pemukiman Sebagai Sejarah	2
B. Perkembangan Kota Semarang.....	7
C. Semarang: Pelopor Pembangunan Modern	10
D. Semarang dalam Catatan Sejarah	16
E. Pokok Bahasan	25
 BAB II	
SEORANG DARA YANG TERLUKA: MASALAH YANG DIHADAPI KOTA SEMARANG PADA AWAL ABAD KE-20	29
A. Kota Semarang.....	31
B. Semarang Berkembang Menjadi Kota Modern.....	34
C. Demografi Semarang Abad Ke-20.....	37
D. Masalah yang Dihadapi Kota Semarang pada Awal Abad ke-20.....	42
E. Kesehatan Lingkungan dan Higienitas yang Buruk	47
 BAB III	
PANAS DALAM YANG MENYEMBUHKAN: UPAYA-UPAYA GEMEENTE SEMARANG MEMECAHKAN MASALAHNYA	53
A. Struktur Pemerintah Gemeente Semarang	54
B. Pembahasan Permasalahan Kota Semarang.....	57
C. Para Tokoh Lain.....	62

BAB IV

MENYEMBUHKAN LUKA, MEMPERCANTIK KOTA:

Pembangunan Kompleks Perumahan Gemeente	71
A. Pembangunan Kompleks Perumahan di Semarang pada Abad ke-20	72
1. Faktor-Faktor Pendukung.....	72
a. Kebijakan pemerintah.....	72
b. Lingkungan	75
c. Tuntutan Pasar	77
2. Kondisi Pemukiman Sompok Sebelum Pembangunan Kompleks Perumahan	78
3. Penyediaan Tanah dan Penggunaannya	81
4. Pembangunan Kompleks Perumahan Sompok.....	83
B. Pembangunan Kompleks Perumahan di Mlaten.....	88
C. Badan Pengelola Kompleks Perumahan	89
D. Masalah yang Timbul Dalam Pembangunan Kompleks Perumahan	94
1. Tanah	94
2. Dana.....	100

BAB V

DARA YANG PERGI: DARI KAMPUNG-KAMPUNG

SEMARANG TAHUN 1930–1960	109
A. Masa Akhir Kolonial (1930–1942)	109
B. Masa Pendudukan Jepang (1942–1945).....	116
C. Masa Awal Republik Indonesia (1945–1960)	127

BAB VI

KOMUNITAS YANG BERUBAH: WARGA KOMPLEKS

PERUMAHAN SOMPOK	141
A. Memasuki Kompleks Perumahan, Memasuki Pemukiman Modern	141
B. Menjadi Warga Kompleks Perumahan, Menjadi Manusia Modern	149
C. Dalam Kompleks Perumahan Modern	156
1. Kehidupan kompleks perumahan	156
2. Sosialisasi Warga Perumahan dengan Wong Kampung Sekitar... ..	162

BAB VII

KOMUNITAS YANG BERBENAH: WONG KAMPUNG

DI SEKITAR KOMPLEKS PERUMAHAN SOMPOK.....165

A. Wong Kampung.....	167
1. Penguasa kampung.....	167
2. Stratifikasi Sosial.....	171
3. Keluarga Besar.....	172
4. Mata Pencarian	176
5. Sosial Budaya	188
B. Memandang Kompleks Perumahan Sompok.....	192

SIMPULAN197

DAFTAR PUSTAKA 205

BIODATA PENULIS215

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah penduduk Semarang tahun 1850–1961.....	40
Tabel 2. Kepadatan penduduk Kota Semarang tahun 1905–1961.....	41
Tabel 3. Angka kematian penduduk Semarang 1919 (per 1.000 jiwa)	49
Tabel 4. Modal pembangunan kota di Hindia Belanda tahun 1906.....	56
Tabel 5. Jumlah rumah yang dibangun oleh Gemeente Semarang Tahun 1916–1930.....	90
Tabel 6. Jumlah rumah di kompleks Sompok sampai Tahun 1929	147
Tabel 7. Macam-macam Rumah Semipermanen yang dibangun Gemeente Semarang (untuk orang Eropa).....	148
Tabel 8. Macam-macam Rumah Permanen yang dibangun Gemeente Semarang (untuk orang Eropa)	148
Tabel 9. Macam-macam Rumah untuk Pribumi yang dibangun Gemeente Semarang.....	148

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rumah gemeente di kampung Jeruk IV (Sompok).....	3
Gambar 2. Rumah gemeente di kampung Krakatau II (Mlaten).....	4
Gambar 3. MCK umum di kompleks perumahan Mlaten	13
Gambar 4. MCK umum di kompleks perumahan Sompok	13
Gambar 5. Rumah kumuh penduduk Semarang awal abad ke-20.....	49
Gambar 6. Rumah kumuh penduduk Semarang awal abad ke-20.....	50
Gambar 7. Pemetaan angka kematian karena wabah penyakit di kampung-kampung Semarang Tahun 1894–1904.....	59
Gambar 8. Perbukitan Candi dengan rumah-rumah sehatnya.....	63
Gambar 9. Rumah sehat untuk rakyat di perbukitan Candi.....	63
Gambar 10. Peta kompleks perumahan Sompok dan Semarang Timur ...	87
Gambar 11. Peta rencana perluasan kompleks perumahan Sompok tahun 1922.....	103
Gambar 12. Salah satu rumah di kampung gemeente Sompok.....	103
Gambar 13. Bagan rumah tipe 4.....	104
Gambar 14. Maket pembangunan kompleks perumahan Mlaten	104
Gambar 15. Proses pengurangan tanah di Mlaten dan kondisi rumah penduduk pribumi.....	105
Gambar 16. Proses pendirian rumah di kompleks perumahan Mlaten...	105
Gambar 17. Rumah tipe OO & O di Mlaten, & denah rancang bangunnya	106

Gambar 18. Rumah tipe O (toko-toko di tengahnya) & denah rancang bangunnya.....	106
Gambar 19. Rumah tipe I di kompleks perumahan Mlaten & denah rancang bangunnya.....	107
Gambar 20. Rumah tipe III di kompleks perumahan Mlaten & denah rancang bangunnya.....	107
Gambar 21. Rumah tipe IV di kompleks perumahan Mlaten & denah rancang bangunnya.....	108
Gambar 22. Landscape modern kompleks perumahan Sompok dan Mlaten (Tahun 1930 Skala 1: 10000)	111
Gambar 23. Sebuah iklan bedak kecantikan di zaman Jepang	117
Gambar 24. Peta letak interniran di Semarang	138
Gambar 25. Denah Inteniran Lamper Sari (Sompok)	139
Gambar 26. Denah Inteniran Halmahera (Mlaten)	139
Gambar 27. Suasana dapur umum di sebuah inteniran perempuan di Semarang.....	140
Gambar 28. Suasana dapur umum di sebuah inteniran perempuan di Semarang.....	140
Gambar 29. Rumah di Jalan Raya Sompok.....	143
Gambar 30. Suasana perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di kampung Lamper Mijen Tahun 1988.....	166
Gambar 31. Sebuah rumah di kp. Lamper Mijen yang akan dibenah dengan tradisi <i>sambatan</i>	194
Gambar 32. Pelaksanaan tradisi sambatan di kp. Lamper Mijen	195

PENGANTAR

Semarang, Kebijakan Pemukiman dan Relevansinya Terhadap Penataan Perkotaan

A. PENDAHULUAN

Hampir di semua negara-negara berkembang masalah pemukiman menjadi masalah penting dalam penataan sebuah kota (Nas, 1979). Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila membicarakan pembangunan sebuah kota, masalah pemukiman perlu diperhatikan karena berkaitan dengan persoalan perencanaan tata ruang, lingkungan dan persoalan-persoalan ekosistem lainnya. Inilah sebabnya mengapa pemukiman dianggap sebagai elemen penting dari perkembangan sebuah kota. Tidak ada komposisi yang ideal berkaitan dengan penataan pemukiman sebagaimana terjadi di negara-negara berkembang dewasa ini. Namun, umumnya dapat dikatakan bahwa luasnya pemukiman itu meliputi dua per tiga dari luas keseluruhan sebuah kota.

Seorang ahli pemukiman Johan Silas (2006) mengatakan bahwa di era global ini masalah pemukiman menjadi masalah yang signifikan. Hal ini dapat dimengerti karena masalah mobilitas manusia yang cepat akibat berbagai tekanan yang dialaminya menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk dari wilayah satu ke wilayah yang lainnya, khususnya di ke wilayah-wilayah perkotaan yang menjanjikan. Tentu ada daya penarik yang muncul untuk meraih rezeki dan dapat bertahan hidup ke dalam kehidupan yang lebih baik. Seperti pepatah yang mengatakan: “Di mana ada gula di situ ada semut.” Oleh karena itu, migrasi manusia dan pertumbuhan pemukiman

Buku ini tidak diperjualbelikan.

haruslah diantisipasi dalam penataan perkembangan sebuah kota. Karena masalah ini merupakan bagian dari proses modernisasi yang berlangsung sangat cepat dan apabila tidak diantisipasi dengan cepat akan semakin menambah persoalan-persoalan perkotaan yang sudah semakin kritis seperti masalah pemukiman kumuh yang sulit diatasi hingga sekarang ini. Modernisasi sebenarnya dapat mengubah tidak hanya kehidupan masyarakat perdesaan, tetapi juga kehidupan masyarakat perkotaan. Dalam hal ini dapat dilihat perubahan pada morfologi kota, yaitu dari situasi pedesaan menjadi semi perkotaan, maupun semi perkotaan menjadi perkotaan. Di pemukiman kota misalnya, dengan dibangunnya bentuk pemukiman baru berupa kompleks perumahan akhirnya dapat memunculkan sebuah komunitas sosial yang baru pula. Ketika komunitas perumahan berinteraksi dengan masyarakat kampung di sekitar perumahan, menyebabkan munculnya komunitas baru yang lebih luas. Komunitas sosial baru di pemukiman ini (kampung dan kompleks perumahan) berubah dalam perjalanan waktu. Oleh karena itu, dapat dimengerti perubahan sikap mereka ketika berhadapan dengan perubahan penguasa (akhir masa kolonial, zaman Jepang dan awal Republik Indonesia).

Oleh karena itu, untuk memahami masalah pemukiman yang berkembang sekarang ini tentu kita melihat masalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dahulu dalam mengembangkan kawasan pemukiman hingga akhirnya terwujudkan kemerdekaan masyarakat Indonesia dewasa ini. Penerapan kebijakan di masa lalu itu tampak berpengaruh terhadap berkembangnya kawasan-kawasan pemukiman di Indonesia hingga dewasa ini. Memang kebijakan kolonial dahulu tentu sesuai dengan perkembangan jiwa zaman pada saat itu. Namun, setelah berakhirnya kekuasaan kolonial dan munculnya negara-negara merdeka dan modern tampak tidak hanya pengaruh kolonial yang muncul, akan tetapi justru pengaruh-pengaruh luar lainnya yang disebut pengaruh global dari berbagai negara dan aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya luar semakin menyemangati perkembangan pemukiman itu. Persoalan pemukiman kemudian menjadi masalah

yang tidak terpisahkan dari proses modernisasi yang merambat ke dunia ketiga termasuk Indonesia. Oleh karena itu, memasuki abad ke-21 ini, dunia bukan saja semakin mengkota (*urbanized*), akan tetapi juga semakin mengglobal (Cf. Gist dan Fava, 1964). Itulah sebabnya, muncul berbagai pertanyaan tentang bagaimana dinamika kota di abad ini di antaranya apakah sebuah kota sudah *urbanized* atau belum dan apakah kota sudah mengglobal atau belum yang tampak ditentukan oleh keadaan dan mutu pemukimannya. Selain itu, juga disebutkan bahwa memasuki abad ke-21 pemahaman atau paradigma rumah, perumahan dan pemukiman telah berubah secara prinsipal, disebabkan berbagai faktor dan pengaruh yang berkembang di sebuah wilayah perkotaan.

B. KEBIJAKAN KOLONIAL TERHADAP MASALAH PERKOTAAN

Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan pemukiman di wilayah-wilayah di Asia Tenggara tidak terlepas dari pengaruh implementasi kebijakan negara-negara penjajah di masa lalu. (Ardhana, 2004 dan juga lihat: Nas, 1979). Misalnya dalam hal ini mungkin baik melihat komparasi perkembangan pemukiman di beberapa kota modern lainnya di Asia Tenggara seperti Singapura dan Kuala Lumpur di Malaysia atau Bangkok di Thailand yang sudah memiliki konsep yang jelas tentang masalah pemukiman ini. Bahkan kalau diperhatikan tentang perkembangan kota Bangkok, terkesan bahwa pengaruh kebijakan pemerintah Prancis masih tampak, misalnya bagaimana sudut bangunan kota di Paris tampak menginspirasi arsitektur bangunan-bangunan di kota Bangkok. Gambaran arsitektur yang menjadi simbol kota itu sangat berperan sebagai refleksi akan adanya pengertian struktur kekuasaan di dalamnya (Colombijn, 1994). Tentu ini tidak dapat terlepas dari adanya kesamaan kebijakan dari pemerintah kolonial Inggris di masa lalu, di Singapura dan Kuala Lumpur Malaysia berkaitan dengan bagaimana sebuah pemukiman dikembangkan sehingga pemukiman-pemukiman kumuh

tidak banyak yang tampak. Di samping itu, penerapan hukum (*law enforcement*) terhadap penduduk tampaknya konsisten sehingga siapa saja di depan hukum diperlakukan sama dalam arti bahwa pembangunan pemukiman haruslah memperhatikan koridor hukum yang berlaku. Ini tentu merupakan contoh yang baik sehingga kebijakan pemukiman perlu mendapat perhatian ke depan sebagai upaya peningkatan citra ke arah kota modern yang maju dalam arti tidak hanya menyangkut masalah fisik kota, tetapi juga masalah keteraturan, ketertiban, keamanan sehingga menjadi tempat yang nyaman tidak hanya bagi penduduk yang menempatinnya, tetapi juga bagi orang yang melaluinya (sebagai referensi lihat: Shepard, 1974). Dengan demikian, pemerintah tampak mempunyai kebijakan yang baik tentang penataan pemukiman di sebuah kota.

Ada beberapa aspek kebijakan yang perlu dilihat dari kekuasaan pemerintah kolonial di masa lalu. Pemilihan sebuah kota misalnya banyak mempertimbangkan aspek posisi strategis dari sudut politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Demikian pula dalam hal pengembangan kota terutama terhadap posisi pemukiman, pola-pola pemukiman dan sebagainya. Dapat dimengerti bahwa apabila dilihat kebijakan pemerintah kolonial terhadap masalah kota dan pemukiman tentu tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang dilakukan di negeri induknya di Belanda. Karena implementasi kebijakan politik kolonial Belanda di Indonesia, yang dahulu dikenal dengan Hindia Belanda, juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda pada umumnya.

Setelah berhasil dilakukannya ekspansi kolonial ke wilayah-wilayah di Nusantara dalam konteks *Pax Neerlandica* mengakibatkan terbentuknya pemerintahan Hindia Belanda yang menargetkan adanya perubahan di negeri jajahan dalam kaitannya dengan penerapan Politik Etis. Ada berbagai perubahan yang ditargetkan seiring dengan kebijakan Politik Etis yang diintroduksi sejak tahun 1901 terutama berkaitan dengan masalah pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Salah satu di antara kebijakan itu juga direfleksikan dalam bentuk intensifikasi politik kolonial, birokratisasi, komersialisasi

yang berdampak besar terhadap pembangunan wilayah dalam hal ini pembangunan pemukiman bagi penduduk pribumi.

C. PENGARUH KEBIJAKAN KOLONIAL BELANDA TERHADAP PEMUKIMAN KOTA SEMARANG

Bagaimana dampak kebijakan pemerintah kolonial di tingkat mikro di daerah yang jauh dari pusat kekuasaan, seperti Batavia terhadap masalah pemukiman ini? Rajimo Sastro Wijono dalam studinya yang berjudul “Modernitas Dalam Kampong: Pengaruh Kompleks Perumahan Sompok Terhadap Pemukiman Rakyat di Semarang Abad ke-20”, membahas dengan baik bagaimana dinamika pembangunan pemukiman di Jawa Tengah dengan mengambil studi kasusnya di Semarang pada abad ke-20. Dalam karyanya itu ia menjelaskan bahwa penerapan kebijakan pemerintah kolonial di masa lalu dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap persoalan-persoalan pemukiman yang berkembang sekarang di Semarang. Dari hasil kajian yang dilakukannya itu dapat dikemukakan beberapa hal penting sebagai berikut.

Pembangunan pemukiman perumahan di Semarang itu awalnya dimulai dari kawasan Candi Baru yang berlokasi di sebelah selatan Kota Semarang. Dari sudut geografis wilayah ini memiliki ketinggian 80 m di atas permukaan laut. Tentu banyak faktor yang mempengaruhi mengapa wilayah itu berkembang menjadi perkampungan. Misalnya dampak kebijakan pemerintah kolonial yang berpengaruh terhadap wilayah itu yang kemudian menjadi perkampungan. Karena lokasinya yang strategis, kemudian setelah adanya proses pembangunan setelah berakhirnya masa ekspansi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 maka dimulailah dengan adanya penataan masalah perkotaan. Hampir di seluruh wilayah yang disebut Hindia Belanda itu diadakan reorganisasi pemerintahan termasuk kemudian terjadinya masalah pembangunan pemukiman itu sendiri (Ardhana, 2005).

Di Semarang misalnya dapat dikatakan bahwa pada tahun 1916–1942 pemerintah kolonial Belanda mengubah perkampungan mereka itu menjadi perumahan. Ini berarti, bahwa pemerintah kolonial Belanda mempunyai kebijakan yang berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pribumi. Di samping itu, memang pemerintah kolonial Belanda tetap menginginkan penduduk dalam kerangka pengaruh kebijakan pemerintah kolonial. Terdapat beberapa keberhasilan yang dilakukan oleh penguasa kolonial terhadap pembangunan pemukiman ini.

Sebagaimana dapat dilihat perkembangan pemukiman di Kota Semarang yang dianggap menjadi pelopor pembangunan kota pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda. Keberhasilan pembangunan pemukiman di Kota Semarang ini dapat dilihat dari penataan tata ruang kota menjadi teratur, pembagian zona menjadi lebih jelas, dalam hal ini berada di kompleks-kompleks perumahan dan perkampungan. Dari kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah kolonial dapat disebutkan bahwa telah muncul upaya pengaturan secara lebih baik masalah pemukiman pada saat itu. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun penghuni yang menempati pemukiman itu dibedakan berdasar pada kelas sosial ekonomi, tetapi pemukiman dihuni oleh berbagai ras sosial jadi bersifat multietnis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembangunan masalah pemukiman memang didasari atas wilayah yang berdasarkan pada kepentingan strategis tertentu, seperti sentra-sentra perniagaan, pusat pengembangan wilayah industri, dan pusat-pusat pembangunan wilayah perkantoran. Selain itu, dapat dilihat adanya *pen-zoning-an*, tampaknya berbasis pada pertimbangan kebijakan strategis misalnya saja sebagai pusat perdagangan dan pasar maka dibangun oleh *gemeente*. Sebagai basis masyarakat modern di perkotaan, pemerintahan Gemeente Semarang mengembangkan industri modern, di samping tetap mengupayakan agar industri pribumi yang berskala kecil tetap dapat berjalan dengan baik. Pada tahun 1909 masih tercatat berbagai industri pribumi berkembang misalnya masih dapat dilihat dengan adanya industri batik di Kampung Batik. Untuk

penggunaan pewarna biru dan pembuatan alat-alat logam dapat dilihat perkembangannya di Kampung Sayangan dan Kampung Pandean. Untuk pembuatan alat-alat gerabah dapat disaksikan di Kampung Pekunden, kemudian untuk penyamakan kulit dapat dilihat di Kampung Kulitan, sementara untuk pembuatan pakaian dan gong dapat dilihat di Kampung Kuningan. Tambahan pula dapat dilihat adanya perkembangan yang cukup pesat berkaitan dengan industri-industri pabrik yang menggunakan mesin uap, gas, dan listrik. Disebutkan bahwa pada tahun 1905 di Semarang terdapat 22 jenis industri pabrik dengan mesin-mesin modern. Sementara perkantoran pemerintah, sebagai mesin operasi birokrasi negara modern dibangun di tengah-tengah kota dahulu pusatnya di Bojong, sekarang berubah menjadi Jalan Pemuda.

Dari deskripsi yang dikemukakan itu dapat dilihat bagaimana kebijakan pemerintah kolonial Belanda telah mampu mengadakan perubahan-perubahan pada kehidupan masyarakat pribumi saat itu. Dalam hal ini proses perubahan sosial secara lambat laun juga terjadi. Misalnya saja perubahan yang cukup signifikan dapat dilihat akan adanya dampak pembangunan kompleks perumahan Kota Semarang terhadap penataan Kota Semarang itu sendiri. Ini berarti bahwa perubahan itu tidak hanya berlangsung pada perubahan bentuk fisik kota, namun sarana-sarana kota yang tersedia kemudian. Dampak sosial yang muncul akibat pembangunan perumahan di Kota Semarang itu sendiri adalah terbentuknya sebuah komunitas sosial baru di berbagai elemen masyarakat Semarang. Dapat dijelaskan bahwa apabila sebuah komunitas baru terbentuk di sebuah kawasan, maka muncullah kemudian dengan apa yang disebutkan dengan kelahiran sebuah gaya hidup yang baru (*life style*). Perubahan-perubahan seperti inilah yang tampak terjadi misalnya di kompleks perumahan Sompok, dan kompleks perumahan yang lain pada awal abad ke-20. Selain itu, dapat dijelaskan bahwa dengan munculnya berbagai properti komersial dan residensial yang terbangun sebagai hasil tuntutan pembangunan di awal abad ke-20 oleh pemerintah Gemeente Semarang dapat terwujud dengan

adanya gaya hidup yang lahir di kompleks-kompleks perumahan sebagai sebuah gaya hidup baru yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

Selain itu, Rajimo juga menjelaskan bahwa adanya komunitas sosial yang lebih luas lahir di kompleks perumahan Sompok sebenarnya merupakan kombinasi antara bertahannya kehidupan masyarakat tradisional dan mulai masuknya unsur-unsur baru dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam hal ini dapat dilihat menyebarnya pengaruh-pengaruh modernisasi secara lambat laun antara kehidupan masyarakat kampung dan kompleks perumahan yang baru didirikannya itu. Antara kedua nilai budaya itu tampaknya telah menghasilkan sebuah budaya baru yang dapat diterima secara bersama. Untuk kasus pembangunan pemukiman di Kota Semarang ditunjukkan dengan berlakunya sikap "*teposliro*" yang artinya dapat menerima kelebihan dan kekurangan antarbudaya. Kelebihannya misalnya ada unsur-unsur inovatif dalam kehidupan masyarakat, namun kekurangannya sering kali masalah budaya tradisional yang mengalami perubahan dan tidak jarang menjurus ke kepunahannya. Dengan demikian, dalam hal kekurangannya misalnya dapat disebutkan bahwa tidak jarang telah terjadi perpindahan yang disebabkan oleh faktor internal seperti pertumbuhan penduduk dan eksternal misalnya penambahan penduduk di kampung Lamper Mijen yang pada akhirnya telah menghilangkan tradisi *sambatan* dan bentuk rumah *joglo limasan*.

Berbagai aspek dapat dilihat dari pengaruh kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap tatanan kehidupan masyarakat Jawa pada saat itu. Masyarakat telah dibentuk menjadi masyarakat atau komunitas produksi sebagaimana dapat dilihat dalam pola produksi kapitalis yang dikembangkannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan pula apabila kemudian diketahui bahwa dengan keseragaman yang menghayati percampuran budaya masyarakat itu, masyarakat yang berada dalam pola produksi kapital besar hanya menjadi bagian modal tersebut. Di sini tampak bahwa masyarakat memang dapat memproduksi atau berkarya, akan tetapi tidak dapat

memiliki mesin produksi dan hasil produksinya. Masyarakat berada dalam industri modern di mana mereka hanya berperan sebagai buruh atau birokrat, yang perannya tidak bisa dianggap marjinal dalam pengembangan kapitalisme dan kapitalisnya. Dengan kerja keras masyarakat itu, berarti telah memberikan kontribusi pula pada perbaikan sistem kapitalis dalam upaya memperkaya para pemilik kapital. Akibatnya, para kapital itu berhasil mengembangkan usaha mereka. Namun, perlu dicatat bahwa kemungkinan sekali para pemilik kapital itu mengorbankan ratusan kampung, laut, udara, air, dan hutan. Atau dengan kata lain mereka telah mengeksplotasi buruh di kampung-kampung dengan upah murah. Inilah dimensi-dimensi perubahan yang terjadi pada masyarakat Jawa Tengah pada masa kekuasaan kolonial Belanda.

D. KEBIJAKAN PERUMAHAN DI ERA JEPANG HINGGA KEMERDEKAAN

Apabila dibandingkan dengan masa selanjutnya, terutama ketika okupasi Jepang di Indonesia pada umumnya dan di Jawa Tengah pada khususnya, suasana tampak berbeda. Saat itu, suasana diwarnai oleh kondisi dan semangat Perang Dunia II. Oleh karena itu, dibandingkan dengan masa sebelumnya tampak pemerintah Belanda lebih memberikan perhatian ke arah masalah pemukiman, sementara pada masa Jepang energi lebih banyak dikonsentrasikan untuk kepentingan perang. Ini berarti bahwa pada tahun 1942–1945 masyarakat Semarang berada di bawah kekuasaan besar pendudukan Jepang yang sangat keji dan “mengganggu” kehidupan perkampungan penduduk. Upaya serius untuk menyukupi kebutuhan akan papan tampaknya mulai dilakukan oleh pemerintah Kotapraja Semarang ketika kemudian berada di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Ini misalnya dapat dilihat dengan adanya agenda pemukiman untuk rakyat dalam program kerjanya. Implementasinya diwujudkan dalam bentuk pelegalan undian untuk mendapatkan dana pembangunan program pemukiman untuk rakyat.

Kondisi seperti itu dapat dilihat dari perkembangan pada tahun 1945–1960. Di era itu masyarakat berada di bawah kekuasaan rezim anak negeri sehingga dalam pelaksanaan kebijakannya dapat memberikan keleluasaan lebih kepada warga kampung untuk mengurus masalah pemukimannya. Generasi-generasi yang muncul kemudian akhirnya memiliki lahan-lahan sendiri pula yang dipelihara dan dijaga kesuciannya. Misalnya dapat dilihat bagaimana kehidupan seorang tukang becak dengan prasarana jalan sebagai ladangnya, penjual tempe dengan pasar sebagai ladangnya, kehidupan seorang tukang dengan tempat-tempat yang dibangunnya sebagai ladangnya. Berkat menjaga kesucian lahan barunya, mereka dapat menghadapi zaman dan mengharapkan agar generasi penerusnya dapat memiliki lahan baru yang lebih baik pula. Mereka pun harus tetap berharap, karena zaman telah berganti lagi agar ladang-ladang yang tidak dirampas oleh penguasa sebelumnya, seperti tanah yang dahulu mereka garap dapat dibangunnya kembali. Inilah proses yang cukup panjang sehingga kemudian dapat dilihat munculnya berbagai pemukiman perumahan di wilayah sekitarnya.

Hal ini dapat dilihat lebih jauh bahwa dengan dibangunnya kompleks pemukiman perumahan di Semarang misalnya perumahan di Candi Baru, Pekunden, Peterongan, Sompok, Kintelan, Lemponsari, Pendrikan, Seteran, Semarang Timur, Ngaglik dan Bulu tampak telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan pemukiman di wilayah itu. Adanya pembangunan pemukiman-pemukiman itu telah sejalan dengan perkembangan masyarakat Indonesia dari kehidupan tradisional ke kehidupan modern. Ini dapat dilihat adanya perubahan dari masyarakat tradisional ke modern misalnya dengan konsep modern itu maka pasar tradisional direnovasi dan dibangun pula pasar-pasar modern. Adanya perubahan sikap penduduk yang demikian itu memberikan implikasi pada perubahan lingkungan fisik kota. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dengan adanya pembangunan pemukiman sebenarnya telah membangun kehidupan masyarakat yang memperhatikan azas higienitas.

Dalam konteks pembangunan pemukiman atau perumahan dewasa ini dapat disebutkan bahwa memang pembangunan kompleks perumahan sebagai sesuatu yang ideal apabila pengembangan sebuah kota dilakukan. Tidak hanya tuntutan akan kehidupan yang higienis, namun juga bagaimana mereka berinteraksi sesuai dengan tuntutan dunia modern. Sebagaimana halnya dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, masalahnya masih saja sekitar belum tersedianya lahan yang memadai. Ini berarti penggunaan lahan tanpa mengganggu lahan yang subur di bidang pertanian dan perkebunan yang merupakan basis perkembangan pembangunan secara menyeluruh. Apabila persoalan ini dapat diatasi maka akan dapat meminimalisasi persoalan terhadap penyediaan lahan pemukiman yang mana kebutuhan akan pemukiman dirasakan semakin meningkat dari tahun ke tahun (Silas, tt., 1). Selain itu, sering terbentur masalah peraturan tentang tata ruang kota, masalah lingkungan dan akses-akses yang tersedia bagi kelompok penduduk yang menghuni pemukiman itu dan fasilitas-fasilitas modern lainnya.

Meskipun berbagai kendala dihadapi, tampaknya pembangunan pemukiman itu sudah banyak dilakukan hingga saat ini. Untuk itu, belajar dari pengalaman kolonial di masa lalu perlu lebih dikedepankan masalah kebijakan yang melibatkan lintas sektoral, dalam hal ini manajemen pembangunan pemukiman perumahan mengkaitkan keterlibatan peran serta masyarakat secara aktif sehingga persoalan pembangunan perumahan dapat diwujudkan secara tepat sasaran.

I Ketut Ardhana

REFERENSI:

- Ardhana, I Ketut. 2004. "Denpasar: Perkembangan dari Kota Kolonial Hingga Kota Wisata", Makalah dipresentasikan pada the First International Conference on Urban History di Universitas Airlangga pada 22–25 Agustus.
- Ardhana, I Ketut. 2005. *Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915–1950*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Colombijn, Freek. 1994. *Patches of Padang: The History of an Indonesia Town in the twentieth Century and the Use of Urban Space*. Leiden: Research School CNWS.
- Gist, N. P. dan S. F. Fava. 1964. New York: *Urban Society*.
- Johan Silas, "Perancangan Perumahan Rakyat Terpadu: Pendekatan Empirik & Lingkungan", dalam [http:// www.mukimits.com/rusun.htm](http://www.mukimits.com/rusun.htm), hlm. 1.
- Nas, P. J. M. 1979. *Kota di Dunia Ketiga*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Sastro Wijono, Radjimo. 2006. "Modernitas dalam Kampoeng: Pengaruh Kompleks Perumahan Sompok Terhadap Pemukiman Rakyat di Semarang Abad ke-20", (Proyek Kerjasama Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI) dengan Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).
- Shepard, John. 1974. *Sociology: Structure: Interaction and Change*. NY: Harper Row Publiahers.

BAB I

Pendahuluan: Pemukiman, Kampung, dan Kompleks Perumahan

Oleh bergeraknya zaman, berubahnya jumlah penduduk, serta cara hidupnya, padang ilalang di belakang rumah kami juga berubah (Dini, 2002:67).

Pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda, suatu masa ketika rel-rel kereta api mulai ada, jalan-jalan raya mulai dibangun dengan aspal, lampu listrik dan jaringan telepon telah dapat dinikmati oleh segelintir orang, maka pemerintah dan pihak swasta pun marak membangun kompleks perumahan di Semarang. Hal itu merupakan tuntutan logis bagi pertumbuhan kota modern sektor pemukiman sebagai pemenuhan kebutuhan pokok manusia telah menjadi bagian integral pembangunan kota. Kompleks perumahan seolah-olah harus ada, guna mengiringi tuntutan perkembangan kota yang terus melaju. Padahal, sebelumnya, kebanyakan warga kota bermukim mengelompok dalam sebuah kampung.

Proses modernitas di Hindia Belanda hampir sama dengan di Eropa. Di Hindia Belanda diawali dengan pengembangan teknologi transportasi, komunikasi, dan diadakannya pameran dagang (*Koloniale Tentoonstelling*) di Semarang pada tahun 1914. Sebelumnya modernitas Eropa sudah dimulai pada abad ke-17, namun praktiknya transformasi sosial dan ekonomi yang mendunia terjadi pada abad ke-19 dan ke-20. Perwujudannya di akhir abad ke-19 dibuktikan dengan telah menjalarnya jaringan rel kereta api, terusan laut, teknologi dan bank, serta dilangsungkannya pekan raya dunia global pertama kali, yang dikenal dengan “Eksibisi London Raya” pada tahun 1851 di Istana Kristal.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Di Hindia Belanda, modernitas dijalankan seiring dengan perkembangan politik etis: zaman baru dalam politik kolonial Hindia Belanda. Semboyan zaman baru itu adalah “kemajuan”. Dalam bahasa Belanda “kemajuan” sepadan dengan *voornitgang, opvoeding* (kemajuan), tambahan kata di belakangnya adalah *bervoederig van welvaart* (memajukan kesejahteraan). Dalam konteks ini semangat yang dimaksud adalah “kemajuan menuju modernitas”, “kemajuan” dalam arti perkembangan di bawah kontrol Belanda dan “modernitas” seperti yang ditunjukkan Belanda di Hindia: peradaban Barat. Tepat sekali Furnivall menamakan zaman baru ini: “ekspansi”, “efisiensi”, dan “kesejahteraan”. Sementara itu, wilayah Nusantara berada di bawah kontrol Belanda (*rust en orde*) (Shirasahi, 1997: 35–38). Pengaruh pelaksanaan politik etis ini membawa perubahan di Hindia Belanda, termasuk pembangunan sektor pemukiman rakyat.

A. PEMUKIMAN SEBAGAI SEJARAH

Pemukiman pada akhirnya ialah suatu peristiwa, juga suatu sejarah. Tanah, rumah, rencana pembangunan, komposisi ruang dan bangunan, tata letak, fasilitas yang ada, aktivitas warga, dan lain-lain yang ada di sana merupakan elemen-elemen pentingnya. Akan tetapi, kombinasi semua itu termasuk kehadiran masyarakat pendatang dan campur tangan pemerintah di dalamnya, belum tentu dapat menjelaskan peristiwa sejarah itu secara utuh. Hal ini dikarenakan pemukiman sebagai proses dapat saja berlangsung seperti dialektika antara hal-hal yang diharapkan dengan sesuatu yang tidak diduga-duga. Bahkan menurut Lea Jellinek, sesuatu yang tidak diramalkan dan tidak menentu merupakan ciri utama kehidupan di pemukiman kampung (Jellinek, 1994: xvii).

Sebuah bangunan rumah yang tata letaknya acak-acakan mungkin dapat berdampak baik dan berkembang. Tingkah-laku warga pemukiman yang aneh mungkin malah dapat memunculkan respons positif dari warga lainnya. Mengetahui proses praktik rencana

berjalan mulus berarti menyadari sebuah kebenaran yang tidak baru: rencana pembangunan sebagai praperistiwa. Yang sering kali kita tak menyadarinya, walau si perencana menginginkan hasil rencana berjalan mulus, tanpa kendala, adalah praktik pelaksanaannya selalu ada peristiwa-peristiwa yang berjalan di luar dugaan. Barangkali ini sifatnya tidak hakiki.

Pemukiman sebagai suatu satuan kawasan tempat tinggal lengkap dengan prasarana lingkungan, prasarana umum, dan fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan kehidupan: wadah beraktivitas sosial, budaya, dan ekonomi dapat berupa kampung atau kompleks perumahan (Blaang, 1986:28). Pemukiman kampung maupun kompleks perumahan seperti pada Gambar 1 dan 2, sejak mula-buka merupakan sebuah proses membangun secara evolusioner, terus-menerus dan inkremental. Sama sekali bukan suatu hasil akhir yang *mandeg* (Budihardjo, 1986:56). Seperti pembangunan kompleks perumahan Sompok pada dekade awal abad ke-20.



Sumber: Koleksi pribadi peneliti; Mei 2004

Gambar 1. Rumah gemeente di kampung Jeruk IV (Sompok)¹

¹ Wawancara Jong Kie Tio (72 th), 14-4-2005; Tasiman (75 th), 2-5-2004; Bisirkulin (78 th), 5-6-2004.



Sumber: Koleksi pribadi peneliti (September 2005)

Gambar 2. Rumah gemeente di kampung Krakatau II (Mlaten)²

Semasa pemerintahan Hindia Belanda yang telah terdesentralisasi itu, area yang awalnya difungsikan sebagai sawah, baik milik individu maupun komunal, dengan intervensi pemerintah berubah menjadi sebuah pemukiman yang lengkap dengan elemen-elemen pentingnya, menyesuaikan dengan standar hidup modern. Di sini pemerintah yang semula tampak tidak berperan, tiba-tiba menjadi sangat berkuasa (Jellinek, 1994: xvii). Perkembangan pemukiman Sompok sebagai proses yang terus berjalan sampai kini, mengalami perubahan yang terjadi yang tampaknya menarik untuk disimak sebagai sebuah peristiwa dalam rentang waktu yang menghadapi masa pergantian kekuasaan, walau mungkin disadari bahwa kisahnya tidak utuh.

Memang tidak mudah untuk mengetahui secara tepat kapan awal-mula sebuah pemukiman berkembang, atau tepatnya kapan sejarah pemukiman dimulai. Pemukiman Sompok merupakan

² Wawancara Pajo [70 th], 23-4-2005; Jong Kie Tio [72 th], 14-4-2005.

tindak-lanjut dari program *Gemeente* Semarang dalam pengadaan rumah bagi warganya, sebelumnya Candi Baru (1914), dan tahun 1924 program pengadaan rumah di Kota Semarang meluas ke Kampung Mlaten. Dapat dikatakan awal-mula pemukiman dimulai pada tahun 1918, yaitu saat pembangunan rumah secara massal dibangun, yaitu sebanyak 33 unit pada tahun 1918 dan 81 unit pada tahun 1919. Kompleks perumahan Sompok meliputi: Sompok Lama, Sompok Baru, Lamper Sari, Manggis, Jeruk, Rambutan yang dibangun oleh *Gemeente* Semarang, dan Mangga, Nangka, Cempedak, yang merupakan perluasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang. Melihat pemukiman ini sekarang tentunya ada proses yang terjadi di dalamnya (Gambar 1 dan 2). Termasuk pembentukan komunitas warga kompleks perumahan yang berinteraksi dengan komunitas kampung di sekitarnya.

Pembangunan kompleks perumahan *gemeente* ini berbeda dengan kampung penduduk pribumi pada umumnya yang dimiliki oleh orang Jawa. Dapat diperkirakan kehidupan masyarakat di kampung dengan masyarakat di kompleks perumahan berbeda, apalagi dalam sebuah rezim pemerintahan yang memberlakukan kelas sosial berdasar ras: peruntukkan rumah tinggal juga ditentukan berdasarkan golongan. Pastinya, baik masyarakat yang tinggal di kompleks perumahan maupun masyarakat yang tinggal di kampung sekitarnya memiliki kebudayaan atau gaya hidup yang berbeda. Dimungkinkan, pada awal abad ke-20, tampak perbedaan kehidupan mereka sangat kontras. Boleh dikatakan, masyarakat penghuni kompleks perumahan, bila diukur dengan gaya hidup modernitas ala Barat, lebih maju ketimbang masyarakat penghuni (*wong*) kampung di sekitar kompleks. Ketika mereka berinteraksi, dimungkinkan terjadi pengaruh-memengaruhi. Proses saling memengaruhi ini pada perkembangannya membentuk suatu komunitas yang terus berinteraksi: identitas baru di sebuah komunitas sosial.

Dalam bahasa Melayu “kampung” berasal dari kata *compound*, dan mengalami perkembangan makna dalam beberapa waktu. Di Malaysia, kampung didenotasikan sebagai lingkungan desa atau

tempat tinggal di pedesaan, tetapi di Indonesia kata ini lebih sering dipakai untuk menyebut pemukiman di kota. Penggunaan istilah kampung untuk pemukiman di perkotaan sudah berlaku sejak awal abad ke-20. Sebuah desa yang terletak di wilayah kota bisa disebut kampung, yang mungkin bisa dikaitkan dengan “kamp” di Eropa (Flieringa, 1930:164). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “kampung” diartikan: kelompok rumah yang merupakan bagian kota di mana keadaannya kurang bagus, desa, dusun, kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu, terletak di bawah kecamatan; kiasannya: terbelakang atau belum modern, tidak tahu sopan santun, tidak terdidik, kurang ajar, kampungan (Tim Penyusun, 1989: 383).

Sebagai bagian dari kota, istilah kampung oleh pakar yang berkompeten dimaknai berbeda. Pakar kota asal Semarang Eko Budiharjo mendefinisikan kampung sebagai pemukiman marginal, sebagai salah satu elemen pembentuk marginalitas perkotaan. Marginalitas dalam tumbuh dan berkembang tanpa standar yang berlaku (normatif). Kampung tumbuh secara organik, di lingkungan masyarakat mapan yang berpenghasilan rendah dan menengah, dengan sarana dan prasarana seadanya (Yudhohusodo, 1991:12). Pakar kota lain, A. Bagoes Wiryomartono (1995: 171) dalam bukunya *Seni Bangunan dan Seni Bina Kota* mendefinisikan kampung sebagai pemukiman yang tumbuh di area urban, yang terbentuk tanpa perencanaan infrastruktur dan jaringan kota. Pakar lainnya, Herlianto (1995:192–195) mendefinisikan “kampung” sebagai pemukiman pada ruang kota yang merupakan keselarasan masyarakat yang homogen. Kampung juga dia artikan sebagai nama untuk suatu desa guna menyebut daerah kota yang mempunyai ciri-ciri kepadatan bangunan tinggi dan berpenduduk padat. John Sullivan mengartikannya sebagai entitas komunitas masyarakat yang mencakup unit administrasi dan komunitas sosialnya (Sullivan, 1986). Jadi, kampung merupakan ruang lingkup kesatuan hidup yang lahir dari ikatan antarkelompok sosial dengan tempat tinggalnya, yang didukung rasa bangga, rasa cinta akan identitasnya serta rasa

kesatuan dan persatuan (sesama warganya saling kenal, ramah), serta tidak ada perbedaan yang menyolok antarwarga, dan sebagian besar kehidupan kemasyarakatan dapat menghayati hidupnya. Kampung yang ada di sekitar kompleks perumahan Sompok meliputi: Lamper Lor, Lamper Kidul, dan Peterongan, dan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah: Lamper Lor (Lamper Mijen) dan Peterongan (Gang Waas).

Setiap masa dalam sejarah bersifat transisi, terlebih pertengahan abad ke-20 yang ditandai dengan masa akhir supremasi Hindia Belanda, berlangsungnya okupasi Jepang, dan munculnya gerakan nasionalisme dengan mengikis supremasi asing, Belanda dan Jepang. Akan tetapi, pelaku-pelaku sejarah bukan orang-orang peralihan, mereka mempunyai pandangan bagaimana menjalani hidup. Demikian pula halnya dengan masyarakat di kampung-kampung. Didasari atas pemahaman ini, penelitian ini dapat melihat kembali kehidupan masyarakat kampung dan masyarakat kompleks perumahan yang berubah dalam lintas zaman. Artinya, penelitian ini tidak hanya melihat dampak keberadaan kompleks perumahan dari segi fisik kota (morfologi kota), tetapi juga pengaruh yang terjadi terhadap masyarakatnya.

B. PERKEMBANGAN KOTA SEMARANG

Dalam *De Zorg, voor Volkhuysvesting in de Stadgemeenten in Nederlandsch Oost Indie in Het Bijzonder in Semarang*, Flieringa menggambarkan tentang perkembangan perumahan-perumahan yang dibangun di Hindia Belanda, khususnya mengenai perkembangan perumahan di Semarang. Perkembangan ini berkaitan erat dengan sejarah perkembangan Kota Semarang. Flieringa menyetujui pendapat Dr.Ir.W.B. Peteri, yang menorehkan kajiannya dalam 20-an artikel mingguan. Artikelnya itu dimuat dari tanggal 18 Juli 1925 sampai dengan 30 Januari 1926 di salah satu harian yang terbit di Semarang.

Dalam kajian sejarah Kota Semarang, terutama ditinjau dari sudut pandang pembangunan kota, Peteri memberikan suatu kajian

yang cermat tentang perkembangannya, sejak sekitar tahun 1618. Menurut Peteri, pemerintahan Belanda di Semarang dimulai pada tanggal 15 Januari 1678. Dengan hadirnya pemerintahan Daendels, maka mulailah menyentuh urusan perkotaan (Flieringa 1930:158). Selama di Semarang, Daendels mengambil tindakan untuk memperbaiki kota. Ia menunjuk seorang komisaris untuk mengelola proyek kota dan proyek lainnya. Adipati Semarang disertai tugas untuk memerhatikan tenaga kuli yang harus membersihkan kota dan lingkungan sekitarnya. Seorang ahli ukur tanah disumpah dan diangkat untuk mengeluarkan surat ukuran atas petak-petak yang dijual. Sementara itu, untuk membiayai proyek penataan kota, Daendels menjual tanah-tanah kepada pihak swasta.

Tentang pemukiman awal di Kota Semarang, pada tahun 1828 di kota dan sekitarnya terdapat 1492 rumah batu dan 109 rumah kayu, pada tahun 1832 jumlah rumah batu tumbuh menjadi 2153. Jadi, dalam waktu empat tahun seluruh rumah bambu diganti dengan batu. Penduduk pada tahun 1832 terdiri atas 1533 orang Eropa, 349 orang Arab, 1590 orang Bugis, 3957 orang Cina, 19317 orang Jawa dan sekitar 40 ribu orang Jawa siap kerja (Flieringa 1930:158). Untuk mengetahui perkembangannya dapat diketahui dengan menghitung jumlah rumah-rumah, keluarga dan penduduk dalam kurun waktu selanjutnya. Pada tanggal 1 Januari 1929, jumlah rumah 34914 buah, jumlah keluarga 45255 yang terbagi dalam 11978 orang Eropa, 23874 orang Cina, 148070 orang pribumi, 1695 orang Timur Asing, sehingga jumlah seluruhnya 185.717 orang.

Sampai tahun 1870 menurut Peteri di Semarang tidak ada lagi perubahan pada jaringan jalan, pertumbuhan perdagangan, lalu-lintas dan industri swasta. Kampung di pusat kota lama diubah menjadi jalan-jalan, pertokoan dan perdagangan, dan penduduk harus meninggalkan kota lama sebagai sebuah pusat perkembangan, lalu tinggal di bagian kota lebih dalam. Perluasan bagian utara kota ini dan pembangunan bangunan-bangunan di tempat itu pengaruhnya besar terhadap perkembangan Kota Semarang pada masa selanjutnya.

Untuk memahami perkembangan kompleks perumahan yang diusahakan pemerintah, dapat dilihat tulisan Flieringa yang menulis tentang sebuah kawasan Candi Baru, mulai dari pembelian tanah sampai pembangunan rumah-rumah, bahkan ia pun menganalisis pengaruh pembangunan di Candi Baru terhadap perkembangan pemukiman di sekitarnya. Kawasan Candi Baru dalam kurun waktu seratus tahun sebelumnya merupakan daerah perbukitan. Di sana ditemukan berbagai sumber mata air, yang bisa memenuhi kebutuhan air penduduk Eropa, tetapi dengan penemuan itu tidak serta-merta telah siap menjadi kawasan hunian, karena masih belum ada jalan, di samping masih adanya kuburan Cina, dan jarak yang jauh dari kota hilir. Dengan pembangunan bertahap, masalah-masalah itu dapat diselesaikan.

Pada akhir tahun 1914, jalan Candi Baru bisa dibuka untuk umum. Pertengahan kedua tahun 1916 rencana pembangunan pada tahap kedua yang diajukan oleh direktur proyek kota praja bekerjasama dengan Ir. Thomas Karsten. Di tahun yang sama Karsten menyelesaikan rencana pembangunan kompleks perumahan di Sompok. Bangunan rumah di daerah perbukitan diperuntukkan bagi orang Eropa. Daerah lembah akan dijadikan tempat peralihan menuju kota hilir. Kompleks-kompleks perumahan baru kemudian dibangun, yaitu: Ngaglik, Kintelan dan Lempongsari yang berada di sebelah utara dan kampung Kalilangse dan Kagok yang berada di sebelah selatan. Pembangunan kawasan Candi Baru dan kompleks perumahan di sekitarnya merupakan program kerja yang sukses dari pemerintah daerah Kota Semarang, bahkan menjadi kebanggaan Semarang. Buku yang terbit tahun 1930 ini tidak saja menjelaskan tentang pembangunan kompleks perumahan Candi Baru yang telah berdampak pada pembangunan kompleks perumahan di sekitarnya. Akan tetapi, Flieringa juga menuliskan tentang perkembangan pembangunan kompleks perumahan yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, termasuk perkembangan Sompok dan Mlaten.

Dalam perjalanannya, dengan memberi contoh pemukiman Candi Baru, kampung di sekitar dan kompleks perumahan yang dibangun pemerintah terjalin interaksi, termasuk antarmasyarakat penghuninya. Bahkan, pembangunan dan perkembangan kompleks perumahan, seolah merespons pembangunan pemukiman di sekelilingnya. Berdasar temuan dalam buku tersebut, penelitian ini memfokuskan beberapa permasalahan dengan melihat dampak pembangunan kompleks perumahan di kawasan Sompok, yaitu pertama: bagaimana pengaruh kehadiran kompleks perumahan terhadap pemukiman di Kota Semarang, kedua: apa dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat sekitar kompleks perumahan?, ketiga: dengan adanya perubahan pergantian rezim pemerintahan, bagaimana perkembangan pemukiman dan masyarakat selanjutnya?

C. SEMARANG: PELOPOR PEMBANGUNAN MODERN

Pembahasan dalam buku ini menyoroti perkembangan sebuah kawasan pemukiman di Semarang, yang pada awal abad ke-20 menjadi sorotan perkembangan kota-kota di Hindia Belanda, bahkan telah menjadi sebuah kota pelopor pembangunan modern di masa akhir kolonial. Dalam pembahasan dilihat dua kompleks, yaitu Kompleks perumahan Sompok sebagai objek kajian utama dan kompleks perumahan Mlaten sebagai pembandingnya. Dampak kompleks perumahan kolonial terhadap kampung sekitar, yakni kampung Lamper Lor (Lamper Mijen) sebagai kampung lama dan kampung Peterongan juga dijadikan objek kajian. Hal ini sangat penting untuk melihat pengaruh hal-hal baru, modernitas kompleks perumahan (*colonizer*) terhadap kampung (*colonised*). Mungkin dibandingkan dengan pemukiman di kota atau negeri lain maupun periode yang lain, di Sompok-Semarang ini bukan merupakan suatu masalah yang ekstrem. Kompleks Sompok dipilih sebagai objek karena proyek kolonial ini merupakan sesuatu yang baru pada awal abad ke-20 dalam bidang perumahan untuk rakyat. Penduduk yang pernah mengalami

Buku ini tidak diperjualbelikan.

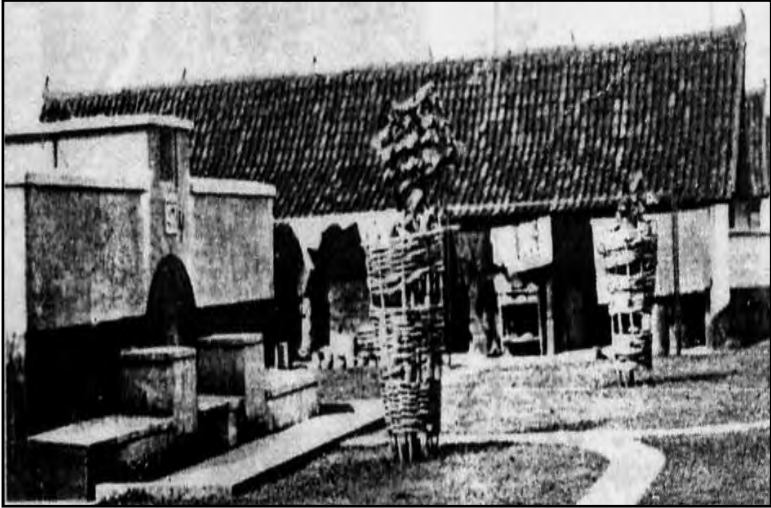
masa ini menyebut hasil proyek pembangunan kolonial di bidang perumahan ini dengan nama rumah/kampung *gemeente* (seringnya kata *gemeente* dilafalkan *guminte*). Dalam hal ini Gemeente Semarang sebagai bagian administratif negara kolonial telah melakukan upaya pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya di bidang papan. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan permasalahan sekarang, di mana negara dan swasta berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan papan, yang ternyata sampai sekarang tidak beres. Paling tidak dengan melihat apa yang dikerjakan pemerintah kolonial ini, kita dapat berkaca bagaimana rumah untuk rakyat diupayakan oleh negara sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya.

Pemukiman di Semarang ini dipilih sebagai objek kajian bukan semata-mata mengungkap masalah pelik perkotaan pada awal abad ke-20 yang berdampak pada munculnya kebijakan perkotaan, melainkan juga sebagai suatu gejala yang khas dari perkembangan sosial: perubahan sosial di sebuah pemukiman yang di dalamnya dibangun kompleks perumahan (modernitas). Untuk melihat dialektika antara nilai dua konsep yang berbeda: modern dan tradisional, dalam suatu perspektif sejarah telah ada beberapa ahli yang melakukan kajian sebelumnya: Peter M. J. Nas, (ed.), *The Indonesian town revised*, (Munster: Lit & Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1997). Freek Colombijn, *Patches of Padang: the history of an Indonesian town in 19 th century and the use of urban space*, (Leiden: Research School CNSW, 1994), Brenda S.A. Yeoh, *Contesting space in colonial Singapore: Urban relation and the built environment*, (Singapore: Singapore University Press, 2003), Djoko Soekiman, *Kebudayaan Indis dan gaya hidup masyarakat pendudukan di Jawa (abad XVIII-medio Abad XX)*, (Yogyakarta: Bentang, 2000), dan Abidin Kusno, *Behind the poscolonial: Architecture, urban space and political cultures in Indonesia*, (London & New York: Routledge, 2000).

Menurut Djoko Soekiman, kehadiran orang Belanda di Indonesia yang kemudian menjadi penguasa mempengaruhi gaya hidup, contohnya bentuk bangunan rumah tradisional, dan fungsi ruangnya. Demikian halnya dengan isi perabotan rumah

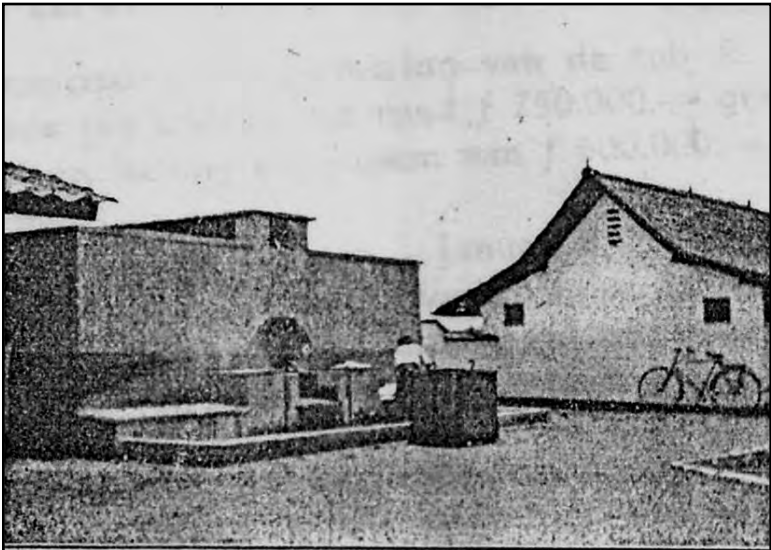
yang berupa alat perlengkapan rumah tangga tradisional Jawa yang dipergunakan penghuninya sehari-hari dan mengalami perubahan. Dengan demikian, pengaruh kebudayaan Barat dalam gaya hidup berumah tangga sehari-hari serta keseluruhan tujuh unsur kebudayaan. Percampuran kedua kebudayaan ini dinamakan “kebudayaan Indies”, yang masing-masing mempunyai pengikutnya.

Kebudayaan campuran berbentuk bangunan rumah contohnya adalah rumah-rumah di kompleks perumahan Candi, Sompok, Mlaten, dan lain sebagainya, yang dipelapori Ir. Thomas Karsten. Bentuk bangunan Joglo, sebagai ciri khas rumah Jawa, tampak kuat. Akan tetapi, unsur-unsur modernitas (yang dibawa Barat) juga tampak kuat. Oleh Berlage (1910:11) bangunan rumah campuran kedua kebudayaan ini dinamakan *IndoEuropeesche bouwkunst*. Contoh kebudayaan campuran lainnya adalah dalam kebiasaan sehari-hari. Setiap pagi, bangsa pribumi Jawa pergi ke kali. Dengan kebiasaan ini menjadikan letak jamban berada di luar rumah. Hal ini menjadi inspirasi bangunan rumah-rumah orang Belanda atau keturunan yang tinggal di Hindia Belanda. Di antaranya, rumah Schurueder membuat tempat mandi (*badhuisje*) di tepi sungai: *speelhuis* yang di bawahnya (arah aliran sungai) terdapat *washbok* (bilik tempat mencuci dan mandi yang terbuat dari bambu atau batubata. Kamar mandi yang terletak di dalam rumah sudah dikenal orang pada tahun 1870, dengan bentuk sederhana. Pada sisi belakang ruangan terdapat *washuys* yang diisi dengan *waschbalie of bad*, sebuah tong besar dan orang dapat mandi dengan menggunakan gayung. Sebelumnya, 1840, kamar mandi di dalam rumah masih jarang dimiliki di Batavia (Soekiman 2000:150–152). Oleh Thomas Karsten, perpaduan budaya ini ia terapkan dalam rancangan pembangunan di kompleks perumahan Sompok dan Mlaten. Setiap kurang lebih 10–15 bangunan rumah dibuat tempat mandi, cuci, dan kakus. Salah satu alasan MCK dibangun di luar adalah penghematan biaya pembangunan, karena rumah-rumah itu diperuntukkan bagi pegawai rendah (Gambar 3 dan 4).



Sumber: *Locale Tehniek Januari 1932*

Gambar 3. MCK umum di kompleks perumahan Mlaten



Sumber: *De zorg voor de volkhuysvesting ... (Flieringa 1930:145).*

Gambar 4. MCK umum di kompleks perumahan Sompok

Walaupun berbeda dalam struktur kekuasaan, antara pribumi dengan orang Eropa (maupun pribumi yang bergaya hidup Eropa): jelata dengan penguasa, ternyata keduanya saling pengaruh dan mempengaruhi, dalam kebudayaan khususnya. Di dalam penelitian ini dikaji lebih lanjut, apa-apa saja yang pengaruh-mempengaruhi yang terjadi dalam pemukiman abad ke-20, antara masyarakat kampung dan kompleks perumahan. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang sebuah kampung Jellinek seorang peneliti dari Australia membutuhkan waktu yang tidak sedikit dalam melakukan studinya tentang perubahan sosial di kampung. Ia berhasil mengungkap awal mula-buka sampai hancurnya sebuah pemukiman kampung di Jakarta. Dari pengamatannya, dominasi kemiskinan tidak tampak. Justru yang terlihat adalah usaha-usaha keras para wira-swastawan kecil untuk memenuhi segala keperluan hidup mereka.

Intervensi negara menjadi penting dalam tumbuh dan kembang sebuah kampung. Kampung Kebun Kacang yang berada di jantung Jakarta, sampai tahun 1970-an, tampaknya pemerintah tidak pernah hadir di sana. Pada tahun 1970-an, seseorang dapat tinggal dalam lingkungan itu selama berbulan-bulan tanpa menyadari kehadiran pemerintah ada di dekatnya. Penduduk memenuhi kebutuhan pokok mereka sendiri mengenai perumahan, pekerjaan, dan berbagai keperluan menurut cara mereka sendiri. Namun, pada pertengahan tahun 1970-an, program kesejahteraan pemerintah mulai berpengaruh (Jellinek, 1994:144). Hal ini berbeda dengan di perkampungan Sompok, Semarang, yang sudah mengalami intervensi pemerintah sejak tahun 1911, saat pembelian lahan untuk rencana pembangunan perumahan telah dirampungkan. Hal ini berakibat pada beberapa lahan persawahan masyarakat berubah kepemilikan: terjadi perubahan matapencaharian, dari agraris menjadi non-agraris. Selain itu, kehadiran pembangunan kompleks perumahan telah menghadirkan sesuatu yang baru di perkampungan ini, sehingga dapat dikatakan mula-buka kampung Sompok adalah dengan hadirnya intervensi pemerintah di bidang perumahan, sebagai pemenuhan kebutuhan pokok warganya. Yang membedakan di sini: kampung Kebun

Kacang mula-bukanya di tahun 1930-an dengan datangnya penduduk dari berbagai daerah sekitar Jakarta, yang mencari kehidupan baru di kota, sementara di Sompok mula-buka sebelum tahun 1920-an, dengan berubahnya fungsi lahan dan datangnya penduduk untuk bertempat tinggal. Hal ini berlangsung setelah mereka mendapatkan kehidupan di kota. Di sini, pada awalnya penduduk kampung Kebun Kacang tidak memiliki harapan positif terhadap pemerintah, tetapi sebaliknya dengan penduduk pendatang di kompleks perumahan Sompok, yang menaruh harapan besar dengan bermukim di Sompok. Ketidakadaan harapan positif masyarakat kampung Kebun Kacang, tampaknya hal yang sama dirasakan oleh penduduk asli di sekitar kompleks perumahan Sompok.

Perjalanan waktu dalam kaitannya dengan angka tahun di sini tidak hanya sebatas catatan angka, tetapi oleh masyarakat dianggap sebagai masa kekuasaan pemerintah, yang dengan kewenangannya telah ikut memaksa masyarakat dalam sebuah komunitas pemukiman harus berubah. Masyarakat memaknai setiap masa kekuasaan berbeda-beda. Dalam kurun akhir masa kekuasaan Hindia Belanda masyarakat mengalami zaman normal, mereka menjalani hidup dengan daur kehidupan dengan nyaman. Walau ada permasalahan, mereka dapat melaluinya di bawah kepastian. Boleh dikatakan, untuk masyarakat kalangan bawah ber-*sendiko dawuh* artinya siap tuan terhadap kebijakan pemerintah. Masuk masa kekuasaan Jepang, pemerintahan yang dibentuknya melakukan perubahan-perubahan dengan mengeliminir kebudayaan Barat, dan memaksakan arah kehidupan ala Jepang. Pada awalnya, masyarakat menerima kehadiran Jepang. Akan tetapi, seiring ketidakpastian di bawah kekuasaan Jepang ini, mereka menjalani kehidupan dengan penolakan. Berkuasnya anak negeri sendiri dalam tampuk kekuasaan khususnya di masa awal pemerintahan Republik Indonesia, sebenarnya belum ada perubahan ke arah kebaikan buat kehidupan buat rakyat. Di sini, dalam masa-masa kekuasaan yang berubah, masyarakat pun harus berubah, demi hidupnya. Tulisan ini mencari lebih lanjut tentang bagaimana perubahan yang dialami masyarakat, baik warga

kampung maupun warga kompleks perumahan, dalam konteks intervensi pemerintah dalam lingkungan pemukiman.

D. SEMARANG DALAM CATATAN SEJARAH

Dalam memahami perubahan pemukiman dan masyarakatnya penelitian dilakukan menggunakan metode sejarah kritis. Sebuah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman serta peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1986:32). Pencarian sumber tertulis dilakukan di beberapa perpustakaan dan lembaga arsip, termasuk koleksi pribadi maupun lembaga. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sejarah lisan. Sejarah lisan merupakan rekonstruksi peristiwa yang dibangun oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, sejarah lisan sangat membantu.

Data-data tertulis diperoleh di beberapa tempat. Di Arsip Nasional, Jakarta, diperoleh arsip-arsip berkenaan dengan kongres Volkhuysvesting, Arsip Karesidenan Semarang, Arsip Gemeente Semarang. Tersedianya arsip di ANRI ini sangat membantu penulis di samping tersedianya pula data-data yang ada di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Deposit Jawa Tengah. Di dua tempat tersebut penulis mendapatkan data tentang perkembangan Kota Semarang dan sejarah pemukimannya dari laporan tahunan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan lokal saat itu, yaitu: *Kolonial Verslag*, *Staatsblad van Nederlandch Indie*, *Verslag van den toestand der Gementee Semarang*, dan sebagainya. Pilihan untuk memilih data-data yang sudah tercetak ini karena penulis rasakan akan lebih mudah membaca dan memahaminya. Selain menggunakan sumber-sumber tertulis dari pemerintah, penulis juga menggunakan data-data tertulis dari majalah, koran, dan buku sezaman.

Hosein Djajadiningrat, dalam tulisan terakhirnya membahas arti penting sejarah lokal, sebagai sumber sejarah. Menyocokkan data yang terdapat dalam sejarah lokal dengan sumber yang ditulis kolonial ternyata sangat mendukung, guna merekonstruksi peristiwa masa lalu (Soedjatmoko, 1995:57–58). Muncul pertanyaan dalam sebuah

penelitian, bagaimana ketika keduanya tidak ada, baik babad (salah satu sejarah lokal) maupun laporan-laporan kolonial. Tentunya harus dicari jalan keluarnya. Termasuk dalam penelitian ini, beberapa keterangan tidak ditemui dalam catatan kolonial dan babad (catatan sejarah lokal). Untuk itu, penulis menggunakan sejarah lisan dalam meneliti sejarah kampung. Meskipun data kolonial dan sejarah lokal tidak ditemui untuk mengetahui sejarah kampung, namun masih terdapat saksi hidup, yang dapat menjelaskan apa yang terjadi berdasarkan pengalamannya. Kekurangan sejarah lisan yang disampaikan oleh masyarakat memang ada, tetapi paling tidak ada cerita masa lalu yang dapat digunakan untuk merekonstruksi (setelah melalui proses kritik).

Salah satu keterangan yang tidak terdapat dalam catatan sejarah kolonial dan sejarah lokal adalah asal-muasal kampung. Untuk itu, penulis berusaha mencari informasi di masyarakat kampung, dengan menanyakan asal muasal nama kampung sebagai pembuka wawancara. Hal ini didasari pada asumsi, biasanya masyarakat mempunyai tradisi lisan berkaitan dengan toponomi daerahnya. “Pintu masuk” nama sebuah kampung ini selanjutnya menjadi pertanyaan yang harus dikembangkan dalam wawancara. Dengan mewawancarai orang-orang tua di kampung akan didapatkan cerita yang berasal dari tradisi lisan. Keberadaan cerita asal muasal kampung, mengisyaratkan keberadaan kampung berusia lebih tua dari mereka, dalam hal ini kampung ada sebelum narasumber lahir.

Dalam mencari sejarah kampung di sekitar kompleks perumahan Sompok peran lembaga-lembaga formal tidak dapat diharapkan terlalu banyak, karena kebanyakan yang menjadi pegawai bukan orang asli kampung setempat. Kisah asal-muasal kampung didapatkan dari masyarakat biasa, dari *sesepuh* (orangtua dan yang dituakan) masyarakat setempat. Misalnya di kampung Lamper Lor dan Peterongan, cerita sejarah kampung didapatkan dari keluarga dukun anak yang ada di kedua kampung tersebut. Kisah asal-muasal Lamper Lor (Lamper Mijen) didapatkan putra dari almarhumah dukun bayi Lasinah, Tasiman (75 th). Asal-muasal kampung

Peterongan pun didapatkan dari anak-cucu dukun bayi Badrah, Kasiyem (60 th). Kisah yang mereka sampaikan kemudian dikroscek dengan cerita dari orang-orang tua sekampung dan atau orang yang mempunyai informasi bersangkutan. Misalnya, cerita asal-muasal Lamper Lor yang disampaikan Tasiman (75 th) dibandingkan dengan kisah yang disampaikan Soejono (75 th), Tohir (76), Masripah (94 th), Rubai (77 th) dan narasumber lainnya. Cerita asal-muasal kampung Peterongan yang dikisahkan oleh Kasiyem dikroscekan dan/atau dibandingkan dengan kisah yang disampaikan Kemisem (80 th), Legiman (75 ht), Tarman (75 th), Suharjo (67 th), Suwito (64 th), dan narasumber lainnya.

Kisah yang mereka sampaikan terkadang mengandung mitos, tidak diketahui kepastian tahun, dan tidak runtut. Contoh cerita yang mengandung mitos adalah kesaktian seseorang (*dhanyang*). Walau mengandung mitos, cerita mereka pun menunjukkan kenyataan yang sekarang masih ada. Buktinya nama sebuah tempat dan letaknya memang ada. Di sini kita diharuskan mengkritisi kisah-kisah yang mereka sampaikan tentang sejarah awal kampung mereka, terkadang ada yang dapat dijadikan sumber sejarah, dan ada pula yang tidak dapat dijadikan sumber sejarah.

Cerita rakyat lisan (*folktale*) berupa kisah anonim yang tidak terikat pada ruang dan waktu yang beredar secara lisan di masyarakat biasanya ditandai dengan alat pembantu pengingat (*mnemonic device*). Bentuknya meliputi dongeng, teka-teki, peribahasa, dan nyanyian. Cerita rakyat merupakan bagian dari cerita prosa/sastra lisan (Budiman, 1979:19). Cerita dalam sastra lisan dapat digunakan sebagai bahan untuk memperhatikan kondisi, situasi, bahkan perilaku masyarakat yang mempunyai cerita. Variasi cerita di dalamnya banyak dimanfaatkan sebagai kreasi yang khas oleh pencerita, maupun spesifikasi cerita itu sendiri. Kreasi berguna sebagai penanda jatidiri masyarakat pengkisah. Hal ini membuat cerita dalam sastra lisan dapat diperhatikan dari unsur-unsur tokoh, perilaku tokoh, dan lokasi sebagai latar cerita (Fooley, 1986:12). Salah satu sastra lisan yang

berkaitan dengan nama kampung Lamper adalah cerita tentang kali Lamper.

Singkat ceritanya demikian. Ada dua orang murid Kyai Darat, yang sangat rajin, dengan hidup serba kekurangan. Pada suatu hari, sepulang dari mengunjungi Kyai Darat di daerah Genuk, kedua murid ini kelelahan. Keduanya istirahat. Melepaskan capek yang belum hilang, lewat Sunan Tembayat yang sedang mengunjungi Semarang. Sunan Tembayat melihat dua santri yang kelelahan itu lalu memberikan petuah agar jangan *nglamper*, tidak istirahat di tepi sungai. Entah karena petuah sunan yang sakti itu mengandung kekuatan, atau capeknya telah hilang, kedua santri itu menjadi orang yang kuat untuk melanjutkan perjalanan pulang dengan menyebrangi sungai yang lebar dan arusnya kuat. Keduanya melangkah ke arah selatan. Kekuatan kedua pemuda yang tidak melewati jembatan darurat membuat orang-orang yang melihat di pinggiran sungai berdecak kagum. Orang-orang yang melihatnya berteriak-teriak, khawatir akan keselamatan mereka. Namun keduanya justru selamat, dapat mengalahkan arus sungai yang kuat. Dari kejadian hari itu, kedua pemuda murid Kyai Darat menjadi terkenal, karena *nglampernya*. Selanjutnya kampung tempat tinggalnya dinamakan dengan kampung Nglamper. Lama kelamaan bunyi sengau di depan ‘nglamper’ hilang, seiring seringnya dilafalkan. Kampung itu kemudian dinamakan dengan kampung Lamper (Yusuf, 1996:22).

Membandingkan sastra lisan yang beredar di masyarakat dengan kenyataan yang ada sekarang, ternyata ada cerita yang *sinambung* dengan letak kanal Lamper, yang arah arusnya dari selatan (perbukitan) ke utara menuju laut. Cerita lain yang beredar di masyarakat berkenaan penghuni kampung dan penamaan kampung Sompok:

Awal Lamper niku termasuk Lamper Mijen niku namine dhanyange Nyai Toban. Nyai Toban kaleb Kyai Toban niki dateng dereng pisah, sampun niku duwe sejarah Nyai Toban niku ditinggal mancing, Nyai ngidam pecel lele. Pak Kyai niku teng nggon Kabluk mancing, dereng nganti entuk iwak pun enten susulan gajah putih ngamuk teng Cirebon. Terus loro karone perang, mati sampyuh bareng. Niku, terus niki mas nyai niku, wah niku dereng obong-obongan alang-alang niku. Ha

pertamane obong-obongan alang-alang riyen kaleh Mbah Gosang. Mbah Gosang obong-obongan alang-alang kalih Nyai Lamper. Trus, gosang kalah. Wilayabe lamper mijen mriki termasuk ombo banget, batese dugi (wektu niku) lamper mubeng, lam.... Lamper Mijen, Lamper Sari, Lamper Lor, Lamperkidul terus Lamper Krajan. Niku waune wilayah lamper mijen sedaya niku...

... Lha niki dugine jeneng Sompok niku keSompoken. Nggih terus perang krutug niku kaya plincung niko to. Ha... niko kemrutug teng gunung krutug (gunung krutug niku Kedung Mundu).

Awal (sejarah kampung) Lamper, termasuk Lamper Mijen, dari pasangan Nyai Toban dan Kyai Toban. Saat Nyai Toban ditinggal memancing suaminya di Kabluk, dan belum mendapatkan ikan untuk memenuhi keinginannya makan pecel lele, Kyai Toban mendapatkan berita bahwa gajah putih mengamuk di Cirebon. Ia kemudian menyusul, dan mengadakan perlawanan (perang tanding): diakhiri keduanya mati bareng. Cerita bakar-bakaran alang-alang antara Mbah Gosang dengan Nyai Lamper, diakhiri kekalahan Mbah Gosang. (Bakar-bakaran dimaksudkan untuk menentukan batas wilayah-pen). Dengan kalahnya Mbah Gosang berarti wilayah Lamper meliputi daerah yang luas sekali. Seputar Lamper yaitu: Lamper Mijen, Lamper Sari, Lamper Lor, Lamperkidul terus Lamper Krajan (termasuk daerah Kabluk dan Pandean Lamper).

..untuk penamaan Sompok asalnya dari kesompoken. Karena perang lempar-lemparan tanah/batu (peluru—pen) dengan alat lempar kayu (senapan—pen). Tanah/batu itu menghujani sampai ke gunung Krutuk, di Kedungmundu.³

Penamaan kampung Lamper Mijen berasal dari cerita tentang keberhasilan dua orang santri melewati sungai yang arusnya deras, yang sebelumnya mereka *nglamper*, beristirahat. Kata mijen berasal dari kata *wijen* (benih), dalam perkembangan pelafalan selanjutnya istilah ini menjadi mijen. Perubahan lafal ini sama yang terjadi pada penamaan kampung Mangkang, Semarang Barat. Mangkang berasal dari kata *wangkang* (perahu). Kampung-kampung sekitarnya kemudian dinamakan berdasar letak dengan kampung awal ini. Sebelah utara kampung Lamper, dinamakan kampung Lamper Lor (utara); sebelah selatan kampung Lamper dinamakan kampung

³ Wawancara Tasiman (75 th), 2-5-2004.

Lamper Kidul; sebelah tengah kampung Lamper dinamakan Lamper Tengah.

Tasiman (75 th) mengutarakan kepadatan kampung Lamper Mijen, “*Awal Lamper niku termasuk Lamper Mijen niku namine dhanyange Nyai Toban. Nyai Toban kaleh Kyai Toban niki dateng dereng pisah, sampun niku duwe sejarah Nyai Toban niku ditinggal mancing, Nyai ngidam pecel lele. Pak Kyai niku teng nggon Kabluk mancing, dereng nganti entuk iwak pun enten susulan gajah putih ngamuk teng Cirebon. Terus loro karone perang, mati sampyuh bareng. Niku, terus niki mas nyai niku, wah niku dereng obong-obong-an alang-alang niku*”. Dari cerita yang disampaikan tersebut dapat dipahami bahwa awal ramainya kampung dihuni oleh sepasang suami istri (*Nyai Toban kaleh Kyai Toban*), yang beranak-pinak (*Nyai ngidam pecel lele*). *Nyidam* artinya ia sedang hamil, dan menginginkan makan pecel lele. Suaminya meninggal (*mati sampyuh*) saat mencari makanan yang diinginkan istrinya.

Mahluk halus dipandang sebagai penguasa asli atas wilayah yang mereka huni, sebelum manusia menghuninya. Para pionir (pembuka), cikal-bakal penduduk suatu desa meningkatkan kekuatan diri sebelum berhadapan, mengalahkan atau paling tidak minta izin kepada para *dhanyang* (roh yang berkuasa pada wilayah tertentu). *Sesepuh* kampung menganggap *dhanyang* sebagai pelindung kampung. Oleh karena itu, mereka menyelenggarakan tradisi bersih desa (Budi, 1999:24).

Selanjutnya, Tasiman bercerita tentang bakar-bakaran alang-alang (rumput gajah) antara Mbah Gosang dengan Nyai Lamper (Nyai Toban). Cerita ini menurut Soejono (75 th) berkaitan dengan prosesi untuk mencari batas-batas desa. Saat itu (tidak diketahui kapan tahunnya), dari hasil bakar-bakaran menghasilkan batas wilayah administratif Lamper Lor yang mencakup: Lamper Lor, Lamper Mijen, Lamper Krajan, Lamper Sari, Sompok, Pandean Lamper II, dan Kabluk (sebuah wilayah yang berada jauh dari kelima wilayah tersebut). Wilayah kampung Kabluk berada menyebrangi sungai Pandean dan jalan raya Majapahit. Wilayah ini masuk dalam Lamper Lor karena saat dilakukan prosesi bakar

alang-alang, terdapat alang-alang yang terbang ke wilayah kabluk.⁴ Dari hasil prosesi tersebut kemudian dijadikan landasan untuk membatasi desa, yang oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda kemudian dijadikan wilayah administratifnya. Batas-batas administratif ini berakhir pada masa Orde Baru, saat Pemerintah Kotamadya melakukan pengaturan batas-batas desa. Dikarenakan batas-batas desa yang dibuat pembuka kampung dianggap tidak begitu jelas tandanya, baik berupa bentang alam seperti sungai maupun buatan seperti jalan.

Penulisan sejarah kritis selain harus bersifat diakronis, juga memerlukan interpretasi dan analisis secara sinkronis. Oleh karena itu, selain berdasarkan metode sejarah, penulisan sejarah kritis menggunakan pendekatan ilmu sosial: sosiologi, politik, ekonomi, dan antropologi. Teori-teori dalam ilmu tersebut memperjelas dalam memahami kondisi kausal suatu fenomena sejarah, dan dapat memperkuat analisis permasalahan yang dihadapi.

Pendekatan sosiologi diperlukan karena kota yang masyarakatnya menghadapi perubahan sosial merupakan objek studi ilmu ini. Dengan pendekatan ini, maka aspek lokasi, ukuran, dan pertumbuhan kota mencakup infrastruktur dan dinamika kehidupan, menjadi objek kajian (1966:20). Pendekatan sosiologi-politik digunakan untuk memahami kekuasaan dan dominasinya, yang relasinya terdapat di setiap aspek kehidupan (Fakih, 2003:193). Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan negara (gubernur jenderal, dewan kota, walikota, residen, dan lurah). Dengan menggunakan pendekatan ini akan dapat dipahami pengaruh kekuasaan terhadap perubahan masyarakat. Pendekatan ekonomi diperlukan untuk memahami permasalahan yang menyangkut aspek ekonomi: seberapa besar pengaruh perubahan aspek ekonomi terhadap perubahan-perubahan aspek lain atau sebaliknya dapat dipahami.

Pendekatan antropologi mengkaji manusia sebagai objek pembahasannya, sementara penduduk kota adalah manusia-manusia yang perlu juga dikaji. Pendekatan ini membantu menguraikan apa

⁴ Wawancara Soejono (75 th), 15-9-2004.

yang sesungguhnya terjadi dengan manusia-manusia di dalam berbagai situasi hidup dalam kaitan dengan waktu dan ruang (Menno dan Alwi: 28). Kajian tentang komunitas telah menjadi bagian sosiologi dan antropologi sejak pertengahan abad ini, dan akhir-akhir ini kedua ilmu ini mulai memandang kota sebagai kumpulan komunitas atau kampung-kampung kota. Menjadi tantangan bagi sejarawan adalah bagaimana mengkaji terciptanya, bertahannya, dan hancurnya komunitas-komunitas tersebut (Burke, 2003: 82).

Pembentukan sebuah komunitas dalam wilayah yang baru akan juga berinteraksi dengan komunitas-komunitas yang sudah ada di sana, dan diperkirakan akan terjadi sejumlah perubahan dalam praktik-praktik kehidupan masyarakat yang ada di situ: perubahan sosial. Masuknya penghuni kompleks perumahan di Sompok dalam perkembangannya akan membentuk sebuah komunitas warga perumahan, yang memiliki gaya hidup sendiri. Dalam perjalanannya, komunitas ini berinteraksi dengan komunitas kampung di sekelilingnya (Peterongan, Lamper Mijen, dan Lamper Lor). Sementara itu, terbentuknya komunitas warga perumahan tidak semudah memasuki rumah baru yang dibangun sendiri. Mereka harus menyesuaikan dengan struktur bangunan dan fasilitas yang ada. Yang terjadi di kompleks perumahan pada awal abad ke-20, adalah masuknya penghuni yang kebanyakan masih awam dengan bangunan dan fasilitas rumah modern. Benturan ini mengharuskan penghuni menyesuaikan gaya hidupnya dengan rumah barunya. Mereka harus terbiasa menggunakan listrik, air ledeng, MCK umum dan barang-barang modern lainnya. Dalam hal ini mereka menuju gaya hidup modern. Bagi komunitas *wong* kampung, yang tidak menikmati langsung modernitas perumahan, hanya dapat menyaksikan.

Dalam perubahan kekuasaan, interaksi antara komunitas kampung dengan komunitas warga perumahan modern mengalami perubahan. Kebijakan negara memengaruhi bagaimana masyarakat mengakses modernitas. Masa akhir kolonial (1930–1940), komunitas kampung memandang kompleks perumahan dipandang sebagai sesuatu yang tak tersentuh (*untouchable*). Mereka hanya dapat melihat,

yang terkadang menjadi bahan pembicaraan. Akan tetapi, datangnya pasukan *kate* (jenis ayam yang bentuknya kecil) Jepang komunitas kampung merasakan sedikit kemodernan yang selama ini hanya dilihat. Dijadikannya kamp tahanan di kompleks perumahan Sompok menjadikan komunitas kampung mudah memasuki kawasan ini. Bahkan, interaksi yang selama ini beku menjadi cair. Orang Eropa yang diintendir memiliki interaksi yang intens dengan *wong* kampung sekitar. Orang Eropa menukari barang-barangnya dengan makanan milik *wong* kampung. Apa yang terjadi dalam komunitas yang terbentuk dalam kompleks perumahan Sompok merupakan sebuah perubahan sosial.

Perubahan sosial dapat berupa perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan sosial dikatakan dikehendaki (*intended change*) apabila bersumber pada perilaku individu-individu yang memiliki kehendak atau tujuan tertentu. Perubahan sosial yang terjadi di pemukiman kampung Sompok-Semarang dapat dikatakan demikian. Artinya, dijadikannya pemukiman kampung menjadi pemukiman kompleks perumahan modern merupakan kehendak pemerintah Gemeente Semarang. Jadi, individu-individu yang menghendaki perubahan bersumber dari kekuasaan (negara).

Namun, perubahan sosial yang terjadi di pemukiman Sompok juga dapat dikatakan sebagai perubahan yang tidak dikehendaki (*unintended change*). Artinya, masyarakat komunitas kampung juga mempunyai pola pandang sendiri terhadap pemukimannya, yang berbeda dengan pemerintah Gemeente Semarang. Mereka terpaksa mengikuti pola perubahan yang diinginkan penguasa.

“lemah seng saiki didadekeke gedong magrong-magrong kae sak jane mbiyen ameh dikeke anak dan nak dulur Nyai Rus. Termasuk bapakku mungkin yo sebagian”.

Lahan (sawah) yang sekarang menjadi rumah-rumah mewah itu (di Jalan Sompok—pen) dulunya akan dibagikan kepada anak-anak dan sanak saudara Nyai Rus. Dan, mungkin bapak saya akan sebagian.⁵

⁵ Wawancara Tohir (75 th), 19-5-2004.

Harapan yang terlihat dari kutipan wawancara di atas menandakan bahwa mereka terpaksa harus mengikuti perubahan yang diinginkan oleh penguasa. Pada tahun 1911, lahan yang diperuntukkan bagi perumahan skala besar itu telah selesai pembebasannya.

Perubahan sosial yang terjadi di kampung-kampung ini merupakan proses kontinuitas kehidupan manusia. Dalam melihat perubahan sosial di pemukiman Sompok, penelitian ini juga melihat masyarakat pemukiman Mlaten sebagai perbandingan. Kompleks perumahan Mlaten ini letaknya lebih dekat dengan Kota Lama (Semarang Utara). Pembangunannya dilakukan setelah kompleks perumahan Sompok, 1924. Kajian perbandingan biasa dilakukan dalam dua jenis: kajian dalam skala kecil dan skala besar. Dalam kajian perbandingan skala kecil berada pada satu wilayah geografis dan memiliki keterkaitan historis. Kajian dalam skala besar mencakup sejumlah objek yang tidak memiliki hubungan historis. Dalam penelitian ini kajian perbandingan yang dilakukan adalah perbandingan dalam skala kecil. Pilihan ini memiliki keuntungan, yakni dapat dilakukan dengan teknik penelitian tradisional, dan masyarakat yang berada dalam satu wilayah geografis memiliki kemiripan struktural. Akan tetapi, keuntungan ini mempunyai potensi memojokkan. Artinya, apakah yang kita dikaji merupakan satu kasus tunggal yang terfragmentasi, ataukah beberapa kasus yang muncul secara bebas.

E. POKOK BAHASAN

Ada dua analisis dalam buku ini. *Pertama*, tentang sejarah perkembangan pemukiman di Kota Semarang, dan *kedua* tentang sejarah masyarakat pemukim Kota Semarang dalam lintas orde. Dalam analisis pertama terdapat pada bab dua sampai dengan bab empat. Analisis kedua terdapat pada bab lima sampai bab tujuh.

Buku ini diawali dengan *Pendahuluan: Pemukiman, kampung dan kompleks perumahan*, yang menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, metode dan kerangka teoretis dan sistematika penelitian. Kampung di sini sebagai perwujudan kebudayaan pribumi, kompleks

perumahan sebagai perwujudan Barat, bisa dianggap sebagai pembaratan (modernitas). Ketika keduanya bertemu, terjadi proses penyatuan yang menghasilkan sesuatu komunitas di pemukiman: bagaimana proses pembangunan dan apa dampaknya terhadap masyarakat sekitar.

Pada bab kedua berisi gambaran umum Kota Semarang dan masyarakatnya, yang mengisahkan keadaan geografis, perkembangan kota menuju masa modern yang ditandai dengan perubahan kebijakan pemerintah kolonial, desentralisasi. Dengan desentralisasi ini, Semarang menjadi salah satu kota terdepan dalam pembangunan-pembangunan di Hindia Belanda. Dibahas pula demografi dan masalah-masalah yang dihadapi Kota Semarang. Bab kedua berjudul *Seorang dara yang terluka*. Hal ini didasari pada gambar logo Gemeente Semarang: seorang dara (gadis), tetapi dia terluka: masalah-masalah yang dihadapinya ibarat luka yang didera si dara. Bab ini menjelaskan mengapa pemerintah gemeente Semarang mengupayakan perumahan untuk rakyatnya.

Bab ketiga berisi tentang upaya-upaya Gemeente Semarang untuk mencari penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi. Sanitasi yang buruk, kesehatan lingkungan yang memprihatinkan, dan masalah permukiman yang kumuh menjadi agenda besar dalam rapat-rapat yang digelar. Bab ini berjudul *Panas dalam yang menyembuhkan*, artinya rapat-rapat dalam pemerintah daerah terjadi pembahasan dan perdebatan sangat seru, sengit, dan intens (sebuah situasi yang panas), tetapi konstruktif (menghasilkan sesuatu untuk dijadikan solusi masalah).

Bab keempat berisi proses awal pembangunan perumahan oleh pemerintah daerah yang berbentuk gemeente, dikemukakan beberapa contoh pembahasan yang terjadi, dan beberapa tokoh yang berperan besar terhadap upaya mencari penyelesaian masalah Kota Semarang. Langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah, di antaranya membangun kompleks perumahan, sebagai solusi tiga isu utama masalah Kota Semarang. Setelah sukses dengan pembangunan kompleks perumahan di kawasan Candi Baru, pemerintah melanjutkan

pembangunan kompleks perumahan lainnya: Sompok dan Mlaten. Kedua kompleks perumahan ini diperuntukkan bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah. Selain menggambarkan teknis pembangunan, juga dibahas jaringan kompleks perumahan ini dengan Kota Semarang.

Bab kelima, menjelaskan perubahan zaman, relasi masyarakat dengan penguasa, hadirnya Jepang mengakhiri masa kewenangan Gemeente Semarang yang mempunyai logo bergambar seorang dara. Artinya, dara dalam logo itu juga pergi (seiring henggangnya Belanda di Hindia Belanda). Bab ini berjudul *Dara yang pergi*. Pendudukan Jepang sebagai zaman transisi menuju kepemimpinan anak negeri. Dalam masa transisi ini banyak terjadi perubahan, hal apa saja yang dilakukan pemerintahan pendudukan Jepang dibahas dalam bab ini. Juga kebijakan pemerintah anak negeri dalam bidang pemukiman di Kota Semarang.

Masalah lain yang tidak dapat diabaikan dalam membahas permukiman adalah pemukim. Faktor terpenting dalam sejarah ini terdapat dalam bab keenam, yang berisi kehidupan masyarakat kompleks perumahan. Oleh karena perpindahan tempat tinggal mereka harus berubah. Selain perubahan tempat tinggal juga perubahan masa kepemimpinan. Perubahan tempat tinggal memunculkan budaya baru dalam bertempat tinggal, dan dalam konteks perubahan zaman, mereka dianggap sebagai pembawa utama kebudayaan baru, modern.

Bab ketujuh berisi kehidupan masyarakat kampung yang berbenah. Pembangunan kompleks perumahan di sekitar kampungnya telah menghadirkan sesuatu yang baru. Perubahan zaman tidak mengubah status mereka, tetapi mereka harus mengubah sikap terhadap pemerintah (yang telah memasuki ranah hidupnya). Mereka harus berbenah, agar dapat bertahan hidup: walau statusnya tidak berubah, tetap rakyat jelata. Inti bab ini adalah menjelaskan bagaimana dampak pembangunan kompleks perumahan Sompok terhadap kampung di sekitarnya.

Bab terakhir berisi simpulan, bahwa pembangunan kompleks perumahan di perkampungan Sompok dan Mlaten, telah memengaruhi morfologi kota: kota menjadi lebih rapi dan jaringan kota semakin meluas. Kehadiran kompleks perumahan bagi masyarakat telah memperlihatkan mereka tentang hidup yang lain, yang katanya lebih modern. Mereka berbaur dalam bidang tertentu. Pembauran mereka menjadikan terbentuknya komunitas baru dalam pemukiman di Semarang, dan mungkin di Indonesia.[]

BAB II

SEORANG DARA YANG TERLUKA

Masalah yang Dihadapi Kota Semarang pada Awal Abad ke-20

Ada lautan waktu.
Ada lautan ruang.
Lautan angkasa.
Lautan bilangan.
Lautan kata.
Lautan ... lautan ...
Dalam lautan-lautan, di mana kau?
(Jatman, 1985:83).

Kota berkembang seiring kebutuhan masyarakatnya. Menjelang abad XX kota-kota kolonial di Indonesia berkembang menuju tatanan modern yang kapitalistik, termasuk Kota Semarang. Tata guna lahan bergeser fungsi menjadi ruang komersial, guna melengkapi sarana dan prasarana kota. Pada awal abad ke-20 tuntutan Semarang menjadi kota dagang dan industri yang maju dapat terwujud dalam waktu cepat. Artinya, penentu kebijakan telah berhasil memberikan sentuhan terhadap pembangunan kotanya. Oleh warganya, kemajuan Kota Semarang kala itu digambarkan sebagai berikut:

Adalah sebuah gambar yang cantik untuk melukiskan kenangan perjalanan di kota yang bercahayakan matahari: letaknya antara laut dan gunung-gunung. Pegunungan itu bagaikan latar belakang yang indah untuk vila-vila putih dan merah yang berderet bagai jamur di Candi Baru ...

Di sana orang menemukan kesibukan dari pagi hingga larut malam, dan melihat perbedaan antara daerah perdagangan yang menjadi urat nadi kehidupan barat dan timur. Di kanal penuh dengan perahu-perahu dan kapal-kapal pribumi dengan bentuknya yang indah. Di sana seluruhnya terselimuti dengan kesibukan perdagangan dan kehidupan. Dari gudang-gudang meluncur kereta-kereta kecil pulang-balik membawa barang-

barang menuju perahu-perahu yang akan menyebarluaskan barang-barang itu ke ujung barat dan timur.

Jika pada malam hari udara berwarna merah sisa sinar matahari terbenam, di tempat itu ramai dengan pejalan-pejalan yang menikmati pemandangan indah kota dan laut. Ungu-biru, bersinar merah jambu, gunung-gunung menjulang di udara malam, bukit-bukit, rumah-rumah ... Vanesa di Timur—penuh keindahan (Kakebeeke 1931:17–18).

Pas seb cilik, Nyai Rus wes ngedol tanah neng Manggistan, kuwi nggon kono akeh Londo. Nyai Rus dodolan tempe nang Pasar nDargo. Aku melu mbek mlaku. Pasar wektu iku wes rame. Dalan-dalan wes apik, nameng sepi motor. Ono siji, loro ...

Saben dino mlaku ketoke yo adoh. Nameng seng mlaku wong akeh dadi ora kesel. Numpak tram opo becak kuwi larang.

Ketika saya masih kecil, Nyai Rus (nenek saya,—pen) telah menjual tanah Manggistan (kompleks Perumahan Gemeente Sompok), yang menjadi tempat tinggal orang Belanda itu. Nyai Rus adalah pedagang Tempe di Pasar Dargo.¹ Saya ikut dengan berjalan kaki dari rumah. Pasar Dargo saat itu sudah ramai. Jalan-jalan sudah bagus, tetapi masih sepi kendaraan. Ada satu atau dua ...

Setiap hari berjalan (berjualan) menempuh jarak jauh. Tetapi karena yang berjalan itu orang banyak jadi tidak terasa capek. Naik tram atau becak itu mahal.²

Majunya Kota Semarang dalam bidang ekonomi, sosial dan politik ini menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk bertempat tinggal penduduknya. Dalam hal ini sebagai sebuah tempat yang ideal dalam melangsungkan hidup dengan daur lahir, kawin, dan mati. Selain itu, kota ini juga menjadi penarik penduduk di sekitar Semarang untuk mengadu nasib. Keterkaitan timbal balik antara aktivitas ekonomi dan konsentrasi penduduk: penduduk akan

¹ Pasar Dargo terletak di Jalan Dr. Cipto. Pembangunan jalan dari Pecinan (Timur Kebun Cina) sampai Peterongan dilakukan pada awal tahun 104, yang dinamakan Jalan Karenweg (sekarang Jalan Dr. Cipto).

² Wawancara Marsipah (94 th), 27-7-2003.

cenderung datang kepada pusat kegiatan ekonomi, sebagai tempat yang lebih mudah memperoleh kesempatan pekerjaan.

A. KOTA SEMARANG

Semarang merupakan sebuah kampung nelayan yang kecil, sebelum kedatangan pendatang³. Penduduknya bermata pencaharian sebagai penangkap ikan dan bercocok tanam. Wilayah ini terus berkembang, pada dasawarsa pertama abad ke-16 penduduknya telah berjumlah 3000 orang, dan terkenal sebagai sebuah kota pelabuhan penting di Pulau Jawa, yang memperdagangkan beras dan rempah-rempah (Budiman, 1976). Semarang mempunyai bentang alam yang khas, ada kota atas dan kota bawah. Kota bawah meliputi daerah dataran muara sungai, sampai daerah perbatasan perbukitan; dari kampung Melayu di dekat pelabuhan sampai kampung Peterongan (pasar Kambing). Bagian kota yang terdapat bangunan kota lama ini termasuk daerah pantai, suhunya agak panas. Kota atas meliputi perbatasan perbukitan sampai perbatasan Kota Ungaran; dari kampung Jomblang (Gang Semal) sampai perbatasan kota. Daerah yang terdapat perumahan Gemeente Semarang Candi Baru ini berhawa sejuk, dan memiliki pemandangan panorama alam yang indah.

Perpaduan daerah perbukitan dan dataran rendah, yang langsung menghadap ke laut, menjadikan Kota Semarang memiliki panorama yang indah dan mengesankan. Bahkan, *Encyclopedia Americana* tahun 1972, vol. 24 mencatatnya sebagai salah satu kota percontohan terbaik di Timur Jauh. Sayangnya, contoh yang baik ini tidak mampu bertahan lama. Kebijakan-kebijakan pemerintahan yang

³ Menurut *Serat Kandaning Ringgit Purwa Naskah KBG NR.7*, lahirnya Kota Semarang diawali pada tahun 1638 saka (1476 M), dengan datangnya utusan Kerajaan Demak (Ki Pandan Arang) yang mengemban tugas pengislaman di wilayah barat Kerajaan Demak, di semenanjung Pulau Tirang (sekarang daerah Mugas dan Bergota, Semarang). Sesampainya di daerah ini, ia mendirikan pesantren. Di daerah yang subur ini tumbuh pohon asam (jw: *asem*) yang masih jarang (jw: *arang*). Muridnya dari waktu ke waktu semakin banyak, dan tempat itu kemudian semakin dikenal banyak orang: daerah asem-arang, Semarang (Liem, 1931:2).

mengelolanya tidak mencerminkan keberlanjutan dengan pembangunan dari pemerintahan sebelumnya. Bahkan, sejak tahun 1980-an muncul berbagai kasus lingkungan yang menyelimuti kota ini. Misalnya, melubernya air laut karena reklamasi pantai di kawasan pantai (Kasus PT Kayu Lapis Indonesia), maraknya kasus pencemaran lingkungan karena limbah pabrik (kasus kali Tapak), hilangnya daerah resapan air kota di Kecamatan Mijen, (kasus Perumahan Bukit Semarang Baru), dan kasus-kasus lingkungan lainnya.⁴

Letak Kota Semarang cukup strategis: dimulai dari pantai Laut Jawa bagian tengah, yang membujur ke arah selatan. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal (jalur darat menuju Kota Jakarta); sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak (jalur darat menuju Kota Surabaya); sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang (jalur darat menuju Kota Yogyakarta dan Surakarta); dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa. Terdapat pelabuhan modern yang dapat menghubungkan dengan pulau-pulau lain. Luas Kota Semarang meliputi areal seluas 99,40 km persegi.⁵

Dengan kekhasan bentang alam tersebut, Kota Semarang memiliki bermacam kondisi kemiringan dan tonjolan (relief). Di bagian utara, di daerah pantai dan dataran rendah kemiringannya berkisar antara 1–2%, dengan ketinggian masing-masing berkisar antara 0–0,75 m (daerah pantai) dan 0,75–3,5 untuk dataran rendah, dengan luas 50,80 km persegi. Di daerah selatan merupakan daerah dataran tinggi, memiliki kemiringan yang sangat bervariasi antara

⁴ Semarang dikenal sebagai kalinya yang sering banjir (sebuah lagu Gambang Semarang memulai liriknya dengan bait *Semarang kaline bajor, jo sumelang, jo dipikir* [Semarang kalinya banjir, jangan dibalang, jangan dipikir]). Bahkan, kini banjir tidak hanya di kali tetapi juga di jalan-jalan di pusat kota bawah, setiap hujan datang. Di kota-kota atas yang memiliki relief (kemiringan dan tonjolan) juga terancam longsor, setiap hujan datang.

⁵ Setelah pemekaran kota tahun 1976 wilayahnya menjadi luas, dari 99,4 km² menjadi 373,28 km², dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Dati II Kendal sebelah timur (Kecamatan Tugu dan Kecamatan Mijen), dan sebagian wilayah Dati II Kabupaten Demak bagian barat (Kecamatan Genuk), serta sebagian wilayah Dati II Kabupaten Semarang (Kecamatan Gunung Pati).

2–40%, dengan ketinggian antara 90–259 m di atas permukaan laut dan luas 48,60 km². Permukiman Sompok merupakan daerah yang berada persis di bawah lereng perbukitan. Artinya, Sompok merupakan daerah yang berada di tengah-tengah antara pantai dan perbukitan.

Kota Semarang banyak dilintasi sungai, baik sungai besar maupun kecil. Sungai (Kali Semarang) yang berada di tengah kota pada zaman dahulu berfungsi sarana transportasi perdagangan laut. Seiring majunya perkembangan teknologi transportasi, aktivitas manusia, dan perubahan alam, kali Semarang sekarang hanya berfungsi sebagai irigasi di tengah kota. Di Teluk Bergota terdapat sebuah sungai dengan cabang-cabangnya. Pada hulu sungai dinamakan Kali Garang dan pada hilirnya dinamakan Kali Banjir Kanal Barat. Sungai ini bersumber dari kaki gunung Ungaran (2050 m), dan anak cabangnya: Kali Kreo dan Kripik. Sedimentasi di kali ini sangat tinggi. Karena berlansung sangat lama, terjadi pendangkalan di muara sungai dan penambahan luas daratan.

Di perkampungan, sungai difungsikan tidak hanya sebagai irigasi, tetapi sebagai modal alam perekonomiannya (proto-industri). Seperti sungai Bajak (Kanal Lamper), yang melewati perkampungan Tandang, Mrican, Lamper Mijen, Pandean Lamper, masyarakat setempat memanfaatkannya untuk proses pembuatan tahu, tempe dan tauge. Masyarakat Lamper Mijen memanfaatkan kali ini untuk proses pembuatan tempe (sejak tahun 1930-an sampai akhir 1970-an), penggalian pasir kali (awal 1970-an sampai pertengahan 1980-an).⁶ Di wilayah yang masih terdapat sawah dan tambak, kali dimanfaatkan sebagai irigasi sawah maupun tambak. Selain sebagai basis ekonomi, sungai di perkampungan juga dijadikan sebagai tempat aktivitas sehari penduduk (mandi, cuci, dan kakus).

⁶ Wawancara Soejono (75 th), 17-11-2004.

B. SEMARANG BERKEMBANG MENJADI KOTA MODERN

Di bawah kekuasaan Kerajaan Demak, Kota Semarang berfungsi sebagai kawasan perniagaan dan penyebaran agama Islam: pelabuhannya digemari para pedagang. Saat itu, pusat pemerintahan berada di daerah Bubakan (sekarang menjadi pusat perdagangan kawasan Jln. Mataram). Secara perlahan pelabuhan Semarang ‘tampil di muka’, dan baru berhasil mengungguli tetangganya (Jepara lama), saingannya pada abad ke-18 (Lombard, 2000:39). Dalam perkembangan yang lambat itu, di bawah Kerajaan Pajang, selanjutnya Mataram, pelabuhan Semarang berhasil menarik datangnya bangsa-bangsa asing, antara lain: Cina (sejak awal abad ke-15), Hindia, Arab/Persia (abad ke-16) dan Belanda (abad ke-17) menjadikan kota ini berpenghuni multietnis.

Kerajaan Demak runtuh, pusat pemerintahan berpindah ke Kerajaan Pajang (selanjutnya ke Kerajaan Mataram). Kota Semarang mengikuti arus perubahan politik tersebut, sebagai bagian dari Kerajaan Pajang dan selanjutnya Kerajaan Mataram (1586). Tak lama di bawah kekuasaan Mataram, di pusat pemerintahan terjadi pemberontakan Trunojoyo. Untuk menumpasnya, Sunan Amangkurat II berutang jasa kepada pihak asing. Raja Mataram itu membalas dengan menggadaikan wilayah Kota Semarang dan beberapa daerah pesisir lainnya, 15 Januari 1678. Tergadainya Kota Semarang merupakan kerugian besar bagi kerajaan Islam ber-corak agraris yang berpusat di Yogyakarta itu. Berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan wilayah penting kerajaan ini, dan tak berhasil. Bahkan, karena panasnya perpolitikan elite di pusat Kerajaan Mataram, Kota Semarang terpaksa beralih ke tangan asing. Dengan perjanjian tertanggal 5 Oktober 1705, setelah Suksesi Jawa I, Sunan Paku Buwono menyerahkan Kota Semarang. Raja Mataram ini memakai tahta dalam suksesi yang penuh berlumpuran darah (Budiman, 1976).

Akibat tergadainya Kota Semarang ke tangan VOC, maka fungsi kota berubah menjadi pertahanan militer dan perniagaan. Kawasan Semarang mulai menampakkan dirinya sebagai sebuah kota, di bawah kekuasaan pihak asing. Pada tahun 1682, pihak Belanda melantik Bupati Kyai Adipati Suro Adimenggolo I sebagai bupati ke-12, dan pusat pemerintahan Kabupaten Semarang berada di daerah Kanjengan. Pusat pertahanan militer berpindah dari Jepara ke Semarang, 1708. Jalur darat, menuju Mataram yang semula melewati Tegal, beralih ke Semarang. Bahkan, VOC menjadikan Semarang sebagai Batavia kedua: sebagai kota administrasi pemerintahan (Gubernur Jenderal Jawa Utara), kota perniagaan dan kota pertahanan militer. Pada tahun 1758 tembok benteng pertahanan *de Europeesche Buurt* dibongkar untuk mengantisipasi perkembangan kota, orang-orang Belanda memulai membangun vila-vila di Bojong dan Randusari. Pribumi membangun perkampungan di daerah Poncol, Randusari, Depok, dan lain-lainnya. Pemerintah mulai membangun jalan-jalan baru dan infrastruktur lainnya. Kota Semarang di bawah kolonialisme Belanda mengalami perkembangan ke arah kota modern, dengan dibangunnya sarana dan prasarana untuk kepentingan kolonialismennya. Pada tanggal 16 Juni 1864 mulai dibangun jaringan kereta api, jalur dari Semarang ke Solo, kemudian menuju ke Yogyakarta dan selanjutnya menuju juga ke Surabaya. Pada tahun 1884 mulai melakukan hubungan telepon dengan Jakarta dan Surabaya, dan 1862 dibuka Kantor Pos, serta memodernkan pelabuhan pada tahun 1875. Pada tahun 1906 kota ini mendapatkan kepercayaan untuk mengelola keuangannya sendiri (*Decentralitatie Wet*).

Pada tahun 1904, industrialisasi digalakkan di Hindia Belanda. Industrialisasi, yang mencatat keberhasilan di Eropa dan Amerika Serikat, digulirkan oleh para politisi yang beraliran liberal sebagai jalan keluar untuk mengentaskan permasalahan perkotaan di Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menyetujui industrialisasi sebagai jalan keluar. Pada tahun 1904 mereka membentuk *Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel* (Departemen Pertanian, Industri

dan Perdagangan). Penggalakannya, pada bulan September 1915 Gubernur Jenderal Idenburg menyetujui pembentukan Komisi untuk Pengembangan Industri yang bertugas memajukan industrialisasi di Hindia Belanda. Sebelumnya, Menteri Daerah Jajahan mengutus H. H. van Kol (anggota parlemen Belanda) mengadakan penelitian industrialisasi di Jepang, yang hasilnya akan diterapkan di Hindia Belanda (Yuliati, 1997: 284).

Semarang pun ditetapkan sebagai salah satu kota industri. Pabrik dengan teknologi modern marak dibangun, yang dimodali oleh pihak swasta maupun pemerintah. Sementara itu, industri kecil milik pribumi masih banyak yang beroperasi. Mereka mampu bersaing dengan perkembangan industri modern. Pada tahun 1909 para pengrajin yang masih eksis antara lain: pengrajin batik, pewarna biru, pembuatan alat-alat logam, pembuatan periuk/belanga dari tanah liat, kulit, pakaian, dan pembuatan gong. Pertumbuhan industri tersebut terdapat di kota. Industri yang dikelola pemodal swasta pertumbuhannya sangat pesat. Pada tahun 1905 terdapat 22 jenis; tahun 1915 terdapat 25 jenis; 1923 terdapat 36 jenis; dan 1925 terdapat 48 jenis industri. Pemerintah Gementee Semarang memegang usaha-usaha yang menyangkut pelayanan publik: Perusahaan Air Bersih (1909), Perusahaan Pemadam Kebakaran (1908), Perusahaan Listrik (1913), Jasa Kebersihan Kota, Pasar, Toko dan Restoran (1919–1920), Jasa Tram Kota (1921), Dinas Pemotongan Hewan (1929) dan Perumahan Rakyat (menanam modal di *NV Volkshuisvesting* tahun 1925) (Yuliati, 1997: 288).

Cita-cita mewujudkan kota industri dan kota dagang dapat terwujud: terciptalah Kota Semarang sebagai kota kapitalis yang modern. Akan tetapi, keberhasilan pembangunan kota ini tidak mampu menyelesaikan kependudukan baru. Industri yang membuka kesempatan bekerja, mendorong para tenaga kerja dari daerah di luar Semarang untuk mengadu nasibnya di kota.

C. DEMOGRAFI SEMARANG ABAD KE-20

Dalam membahas pengaruh perubahan politik, sosial dan ekonomi terhadap perkembangan demografis, yang perlu dipahami sebagai sarana pertumbuhan berkaitan dengan (dan barangkali menyebabkan) perubahan-perubahan adalah keluarga. Perkawinan merupakan awal yang resmi dari sebuah keluarga baru (Boomgaard, 2004: 8).

Sekitar tahun 1900 orang Jawa menganggap hidup membujang setelah usia tertentu (setelah *aqil balik*) sebagai hal yang tidak tepat atau bahkan tidak kodrati. Hanya pasangan menikah yang diandalkan bisa melaksanakan semua kewajiban sosial, ekonomi dan politik terhadap komunitas lokal dan negara. Konsep ini sebagian didasari pada kenyataan bahwa sejumlah kegiatan sosial dan ekonomi dianggap sebagai tugas khusus berkaitan dengan jenis kelamin. Hanya pasangan menikah yang bisa membentuk sejumlah satuan ekonomi yang mampu mencukupi kebutuhannya (Boomgaard, 2004: 245).

Status menikah didorong oleh penguasa Jawa dan Belanda. Pada tahun 1808 pemerintah Kolonial Hindia Belanda, merumuskan perintah untuk para bupati, agar memperlihatkan dan mengawasi orang-orang yang masih membujang. Peran negara maupun komunitas desa menganggap perkawinan sebagai hal yang sangat penting bagi suatu masyarakat yang tertata baik, harmonis, dan produktif. Negara tertarik dengan warganya yang mempunyai pekerjaan tetap, membayar pajak, dan mapan. Komunitas desa menginginkan satuan-satuan ekonomi yang bertanggung jawab, yang dapat memenuhi kewajiban mereka (Boomgaard, 2004: 246). Dalam komunitas desa, perkawinan dikaitkan dengan pengelolaan tanah desa/komunal.

... yang biasa dikenakan oleh penganten² perempuan di kampung² di kota Semarang pada masa itu, yaitu dengan mengenakan model “Gagak Item”

... memang itulah nama dari salah satu model² pakaian yang lazim dikenakan oleh para penganten perempuan di kota Semarang di antara tahun 1930 sampai 1940-an dan termasuk salah satu model yang sangat digemari.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sebagai timpalan bagi penganten perempuan yang mengenakan Gagak Item itu, penganten lelakinya akan mengenakan pakaian “coro kaji”. Bukan “coro kaji coro Kudus”, tetapi justru “coro Kaji coro Semarang tempo doeloe”.

Sebelum penganten lelaki ditemukan, terlebih dahulu ia akan diarak oleh barisan sinoman, terbangun dan bantenan—*all things*—khas Semarang, dengan dikawal oleh sepasang pengapit dengan pakaian khas Beduwi. Seperti halnya dengan penganten² di daerah lain, ia juga akan dipayungi dengan payung manten, sementara di depannya ada dua orang pembawa kembang mangar yang akan direbutkan beberapa saat sebelum penganten lelaki itu ditemukan.

Setelah “temon”, kedua penganten itu kemudian didudukkan ditempat pelaminan yang disebut kuwade atau pade².

Untuk memeriahkan perayaan peraltan perkawinannya, orang² Semarang asli yang mempunyai duwit, pada masa tempo doeloe senang sekali memanggil gambus padang, atau dengan menyajikan rodhatan (Budiman, 1976).

Ilustrasi Amen Budiman tentang prosesi resepsi pernikahan masyarakat kampung di Semarang pada awal abad ke-20 di atas menggambarkan bahwa pernikahan merupakan tradisi yang sakral, penting dalam daur hidup. Namun, warisan tradisi ini tidak *sinambung* dengan masa sekarang. Saat ini, prosesi pernikahan masyarakat kampung Semarang seperti ilustrasi di atas telah banyak ditinggalkan, berganti menjadi adegan-adegan perkawinan seolah-olah mewah: meniru tradisi kraton. Perkawinan diselenggarakan dengan ritus-ritus yang berpedoman pada kepada tradisi Solo maupun Yogyakarta. Akan tetapi, prosesi yang sakral tersebut tidaklah selalu diikuti manisnya bahtera keluarga. Kawin-cerai menjadi bagian kehidupan keluarga masyarakat kampung, yang seolah-olah dianggap biasa waktu itu. Tak jarang, kawin-cerai mereka lakukan setelah berlangsungnya pernikahan di usia yang tidak muda lagi. Artinya, mereka telah memiliki anak. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan penduduk bertambah besar, karena mereka yang bercerai menikah lagi dan menghasilkan keturunan.

Memang tidak semua pasangan yang sudah menikah tetap dalam status perkawinannya. Raffles mencatat, pada abad ke-19 perceraian di Jawa mudah dan sering dilakukan. Perceraian ini diakibatkan karena usia dini perkawinan dan paksaan dari orangtua. Alasan tempat tinggal pun menjadi faktor tingginya angka perceraian. Biasanya pasangan yang baru menikah tinggal serumah dengan orangtua salah satu pihak, dan dalam satu rumah ini percetakan sering terjadi (Boomgaard, 2004:253–254). Sayangnya, data angka perkawinan, perceraian dan cerai-kawin lagi tidak cukup tersedia untuk mengetahui hubungan timbal balik (hipotesis) antara harta milik/tanah. Akan tetapi, sebagai ilustrasi adanya kawin-cerai dapat diketahui dari catatan pribadi Soejono (75 th), yang menggambarkan betapa pertumbuhan penduduk waktu itu besar karena maraknya kawin-cerai.

Dengan ini saya tulis dengan seingat saya yang berhubungan dengan kehidupan saya sehari-hari. Soejono (saya) dilahirkan di kampung Lamper Mijen Semarang dari keluarga yang sederhana ...

Saya lahir dari ibu Asnah bapak Saman Notohadi Suwiryo. Ibu kelahiran Semarang. Bapak kelahiran Kebumen. Ibu saya jualan tempe di pasar warga Semarang sampai akhir hayatnya pada 1966. Bapak pekerjaannya kondektur trem Jomlang-Bulu Semarang pada $\pm$ 1930-an. Trem adalah alat transportasi jaman tahun itu.

Di Jomlang (... tanah putih disitu tempatnya) dibulu/deket pas Bulu sekadang) ada setasiunnya trem tsb. ...

Kehidupan orang tua saya tidak mulus dalam perjalanan (cerai). Saya umur 4 tahun saya ikut ibu dengan adik saya perempuan (Soekima) dalam ceritanya perceraian kedua orang tua saya. Bapak saya sering tidak pulang (keluarga dari ibu tidak menyetujui).

Ibu dari Soejono kemudian menikah lagi, dan mempunyai satu orang anak. Bapak dari Soejono pun menikah lagi, tetapi tidak diketahui berapa lagi ia punya anak. Tak jauh dari kerabat keluarga Soejono, adiknya Soekima (68 th), pun mengalami bahtera keluarga kawin-cerai. Dari hasil perkawinan pertamanya ia mempunyai dua

anak, dan pernikahannya kedua mempunyai enam anak. Suami pertamanya, setelah bercerai menikah lagi dengan mempunyai lima anak. Memang, perceraian tidak saja dialami oleh masyarakat kampung, tetapi, penduduk perkotaan (perkampungan) lebih cenderung bercerai dibandingkan dengan di perdesaan (Boomgaard, 2004:8). Hubungan tertentu antara sumber daya ekonomi dan perceraian bisa diasumsikan bahwa orang yang bercerai (janda/duda) tidak tetap hidup membujang dalam waktu lama.

Jika secara alami diketahui faktor yang memengaruhi pertambahan penduduk adalah perkawinan. Maka faktor lain yang memengaruhi pertambahan penduduk kota adalah urbanisasi. Semarang telah menjadi kota tujuan urban, seiring majunya perdagangan & industri, pada awal abad ke-20. Dalam tahun 1900 jumlah penduduk Jawa dan Madura kira-kira 28,4 juta jiwa; tahun 1920 bertambah menjadi 34,4 juta jiwa; dan pada tahun 1930 menjadi 40,9 juta jiwa (Ricklefs, 1981: 147).

Akibat Semarang yang terbuka terhadap pendatang, penduduk yang menempatnya pun terdiri dari berbagai etnis: Jawa, Cina, Arab, Melayu, India, dan orang Eropa. Gambaran heterogenitas penduduk Semarang dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah penduduk Semarang tahun 1850–1961

Suku Bangsa/ Th	1850	1890	1905	1920	1930	1941	1951	1961
Pribumi	20.000	53.974	70.000	126.628	175.457	221.000	317.360	*
Cina	4.000	12.104	14.000	19.720	27.423	40.000	10.246 (termasuk nonCina)	*
Timur asing	1.850	1.543	1.500	1.530	2.329	2.500		
Eropa	1.550	3.565	5.100	10.151	12.587	16.500	3.453	*
Jumlah	29.000	71.186	96.000	158.036	217.796	280.000	331.059	503.153

Sumber: berbagai sumber yang diolah.
 (Indisch Verslag 1940, Semarang Beeld van Een Stad, Kantor Statistik Jawa Tengah)
 Keterangan: * tidak ada catatan pembagian berdasar suku.

Dari tahun 1905–1920 terjadi peningkatan jumlah penduduk yang tinggi. Hal ini diduga karena banyaknya migrasi penduduk yang mencari pekerjaan di kota. Orang Eropa ke Hindia Belanda yang mencari pekerjaan mengalami peningkatan hampir 100%, hal ini dikarenakan sektor perkebunan orang Eropa di Hindia Belanda mengalami peningkatan hasil produksi, yang pengolahan dan distribusinya dilakukan di kota dagang dan industri. Tak hanya orang Eropa yang mencari pekerjaan, orang-orang pribumi pun ikut mencari pekerjaan di kota, Semarang sebagai tujuannya. Pertambahan penduduk pada kurun tahun lima puluhan juga disebabkan semakin banyaknya migran ke kota. Selain untuk mencari pekerjaan, juga karena dukungan situasi kota yang lebih aman (Tim Penyusun, 1984: 12). Peningkatan jumlah penduduk juga terjadi pada tahun 1950-an. Jika dibandingkan dengan tahun 1930, maka jumlahnya dua kali lipat. Hal ini juga disebabkan karena pendatang yang datang ke Semarang tidak kembali setelah keadaan tenang. Keenganan mereka untuk pulang ke desanya karena mereka telah mendapatkan pekerjaan di Semarang. Selain itu, banyak juga para pejuang kemerdekaan yang datang ke Semarang ingin membangun kehidupan baru di Semarang (Soekirno, 1952: 70).

Penduduk selalu bertambah, tetapi wilayah tidak bertambah. Dari jumlah penduduk dan luas wilayah Kota Semarang dapat diketahui angka kepadatan penduduk.

Tabel 2. Kepadatan penduduk Kota Semarang tahun 1905–1961

Tahun	Jumlah Penduduk	Kepadatan/Km ²
1905	96000	965
1920	156.036	1.569
1930	217.796	2.191
1940	280.000	2.816
1951	331.059	3.330
1961	503.153	5.061

Sumber: berbagai sumber yang diolah.
(*Indisch Verslag 1940, Semarang Beeld van Een Stad, Kantor Statistik Jawa Tengah*)

Dari Tabel 2 tersebut terjadi perubahan yang paling menyolok pada kurun waktu 1905–1920 dan 1940–1951. Seperti disebutkan di atas bahwa penduduk Semarang mengalami peningkatan maka berakibat pada semakin padatnya kota.

D. MASALAH YANG DIHADAPI KOTA SEMARANG PADA AWAL ABAD KE-20

Saat Semarang ditetapkan sebagai kota otonom, permasalahan telah bermunculan. Pemerintahan Gemeente Semarang tidak otomatis dapat menyelesaikan permasalahan kependudukan perkotaan saat itu. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan maraknya migrasi berimbas pada masalah permukiman, kesehatan lingkungan dan higienitas. Franscois Valentijn yang berkunjung ke Semarang pada awal abad ke-18 menggambarkan kondisi permukimannya: rumah Bupati Semarang adalah bangunan rumah besar dan tinggi yang melintasi sungai (sebelah barat kali Semarang); terdapat masjid dan pasar. Sementara pedagang Eropa dan pembantunya menempati permukiman yang luas, dengan benteng yang berbentuk segi lima, berpagar tonggak-tonggak runcing, dan dinding papan nama lima sudut: Raamsdonk, Bunschoten, Zeeland, Amsterdam, dan Utrecht. Rumah mereka terbuat dari batu yang bagus.

Dalam perkembangannya, permukiman orang Eropa pertama di Kota Semarang ini dikenal sebagai *Oude Stad* (kota lama) atau *Europesschebuurt* (permukiman Eropa). Permukiman Eropa ini bersebelahan dengan permukiman Cina (sebelah timur). Tidak jauh dengan rumah bupati Semarang, terdapat kampung Melayu (perkampungan pendatang), perkampungan Cina yang berseberangan dengan perkampungan Jawa, berada di sebelah timur kali Semarang (Yuliati, 2003: 115).

Permukiman Eropa dengan benteng segilimanya ini muncul setelah perjanjian antara Raja Mataram Amangkurat II dengan VOC, Oktober 1677 dan Januari 1678. Penyerahan wilayah strategis yang kemudian disesali oleh pihak Kerajaan Mataram ini,

dalam perkembangannya setelah tahun 1708, memperluas wilayah permukiman warganya. Di sebelah timur benteng muncul permukiman baru yang dihuni oleh pegawai-pegawai VOC (Eropa) dan warga kota lainnya. Perkembangan permukiman mewah ini bagaikan “mangkuk slada”, terjadi percampuran beragam budaya dalam struktur bangunan: Belanda, Portugis, Perancis, Nusantara, dan Cina. Hal ini dapat terlihat pada bentuk bangunan rumah (Yuliati, 2003: 117–118).

Bangkrutnya VOC tidak memengaruhi struktur pemukiman di Semarang. Bahkan, penggantinya memperkuat karakter kebijakan yang diskrimatif. Kebijakan yang tidak adil oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda tampak dalam perbedaan ras penduduk. Ada tiga kelompok ras utama yang dibedakan, yaitu: ras orang Eropa, ras orang Timur Asing dan terakhir pribumi. Perlakuan diskriminatif diwujudkan pula dalam tata ruang permukiman.

Pada abad ke-19 pengelolaan Kota Semarang berorientasi pada politik dan ekonomi, sehingga, pusat-pusat strategis kota masih dihuni oleh kelompok ras pertama/penguasa (Eropa). Mereka menghuni di *Zeestraat* (sekarang Jalan Kebon Laut): Poncol, Pendrikan, kawasan Kota Lama (timur jembatan Berok). Seorang Pendeta Kristen, Domine Baron van Hoevell, yang pernah mengunjungi Semarang tahun 1847 mengatakan bahwa permukiman orang Eropa di timur jembatan Berok seperti Kota Kecil di Eropa (Budiman, 1976). Di tempat indah yang terdapat kurang lebih 300–400 rumah itu dekat dengan sarana perdagangan dan industri, dekat dengan pelabuhan dan pasar Pedamaran, serta dekat dengan tempat pembuatan kerajinan tangan.

Kelompok ras kedua: Cina dan orang Timur Asing menempati kampung-kampung yang telah ditetapkan. Cina di kampung Pacinan, India (Koja) di kampung Pakojan, dan Arab di kampung Kauman. Selain di tempat khusus tersebut, masyarakat kelompok ras kedua ini juga berbaur dengan penduduk pribumi, tapi dalam pengawasan. Kondisi permukiman mereka berbeda dengan permukiman kelompok ras pertama. Walau rumah mereka terbuat dari

tembok permanen, tetapi kondisinya sangat memprihatinkan: lingkungan kotor (banyak kotoran hewan dan manusia), dan kekurangan air bersih.⁷

Ras mayoritas yang diposisikan di kelompok ketiga tinggal di pinggiran kota, tetapi dekat dengan akses jalan raya. Misalnya di kampung Lamper Lor, Lamper Tengah, Lamper Kidul, Lamper Sari, Lamper Mijen, Peterongan, Sompok, Jomblang, Karang Sari, Pandean, Sayangan, Plampitan, dan lain-lainnya. Pribumi dari luar Jawa, yang bekerja sebagai nelayan dan pedagang, tinggal di dekat tempat mereka bekerja (pelabuhan), yakni di kampung Melayu (Darat). Rumah penduduk pribumi ini berdinding semi permanen dan non-permanen (kayu dan *gedhek*). Di dekat dengan pusat kota yang strategis rumah mereka berhimpitan, sehingga di awal abad ke-20 karena sanitasi yang buruk muncul berbagai wabah.⁸

Lingkungan industri menyatu dengan permukiman penduduk. Misalnya: kampung Petudungan, Plampitan, Pekunden, Sayangan, Pandean, Gabahan, dan daerah lainnya. Penggunaan lahan kota yang diperuntukkan sesuai kepentingan penguasa dan pemodal, berpengaruh terhadap pembangunan fisik bagi kesehatan lingkungan tidak diperhatikan dan tata kota terlihat acak. Perkampungan penduduk pribumi mempunyai sanitasi buruk, suplai air minum yang kurang, cahaya dan ventilasi udara segar berkurang, serta bahaya banjir di musim hujan.

Dalam buku *Sejarah Sosial Kota Semarang (1900–1950)* sebelum abad ke-20 permukiman Semarang dibagi dalam 5 daerah/ zona (1984, 24–26):

a) Zona Daerah Dalam

Permukiman mulai ada sejak pembentukan kota kabupaten. Pola permukimannya berbentuk L yang membesar pada kakinya, dengan pintu masuknya di dekat jalan setapak kali Semarang. Upaya merekonstruksi perkampungan awal wilayah Kota

⁷ Lihat: *Slompret Melajoe* 19-6-1875; *De Locomotief* 10-4-1913.

⁸ Lihat: *De Locomotief* 14-6-1915; 3-7-1915; 24-7-1915.

Semarang ini sangat sulit, karena artefak bangunan yang ada hilang seiring perkembangan pusat perbelanjaan pasar Johar. Permukiman diperkirakan berada di sekitar daerah Kauman, Masjid Agung, Pasar Johar, Jurnatan/Kanjengan, dan Bubakan.

b) Zona Kota Benteng

Pusatnya berawal di Benteng VOC Ujung Lama (benteng de Vijfhoek) di daerah Sleko, yang didirikan sejak akrabnya hubungan dengan Sunan Amangkurat I, 1646. Setelah itu, permukiman yang dihuni orang Eropa ini meluas sampai daerah Jalan Raden Patah dan Tawang.

c) Zona Kampung Cina

Pendatang yang kebanyakan pedagang ini bertempat tinggal di daerah Jurnatan Bubakan, sampai kampung Welahan, Peto-longan, dan Bustaman. Pemberontakan Cina tahun 1971–1972 mengakibatkan politik pemusatan permukiman Cina ini. Mereka yang bertempat tinggal menyebar harus memusat di daerah antara Benteng sampai di tepi kali Semarang.

d) Zona Kampung Jawa

Orang Jawa mendiami daerah kiri dan kanan kali Semarang dan cabang-cabangnya, yaitu: kampung Gandek Puspo, Gajahan, Petudungan, Poncol, Randusari dan sekitar Kanjengan. Saat itu, kehidupan mereka sebagai petani dan nelayan.

e) Zona Kampung Melayu dan Arab

Para pendatang yang kebanyakan sebagai pedangan dan nelayan. Di perkampungan ini mereka bertempat tinggal berdasar asal daerahnya, misalnya: orang Cirebon mengumpul menjadi satu. Oleh karena itu, di perkampungan ini penamaan perkampungan didasari pada asal penghuni: kampung Cirebonan, kampung Banjar, kampung Pencikan, dan kampung Sumenepan. Selain berdasar pada nama asal pendduduk, penamaan kampung juga didasari pada aktivitas penduduk dan karakteristik wilayahnya: Darat (tempat bongkar muat barang dari kapal), Ngilir (tempat mengalirnya air), Pulo Petekan (tempat yang menyerupai pulau) (Madiasworo, 2001:121).

Abad kedua puluh permukiman di Semarang perkembangannya pesat. Kebanyakan orang Eropa kaya di Semarang memiliki rumah yang bagus di tepi jalan besar dengan halaman yang luas, dan fasilitas yang komplit. Kontras dengan rumah orang pribumi kebanyakan: di kampung-kampung yang becek, jalan yang sempit dan kotor, berdebu di musim kemarau, dan menjadi rawa di musim hujan. Rumah mereka terbuat dari bambu, dengan sanitasi sederhana, sumur umum, dan tanpa fasilitas memadai (Ingelsson, 1986: 404). Orang Eropa yang tertarik dengan pesatnya perkembangan kota membeli tanah-tanah di sepanjang jalan utama (tanah domein pemerintah), yang semula perkampungan penduduk pribumi. Sementara penduduk yang tanahnya terpaksa dijual harus berpindah, ke kampung lain (Wertheim, 1958: vii). Tanah kampung penduduk pribumi yang pertama kali terpaksa disewakan (kemudian dibeli) kepada pengusaha Eropa adalah kawasan Bojong (sekarang Jalan Pemuda), sedangkan penduduknya pindah ke arah selatan, di kawasan Bulu. Kawasan Bulu ini selanjutnya menjadi padat. Selain dibangun villa, rumah mewah (*gedong*) yang berhalaman luas, kawasan Bojong juga dibangun perumahan bagi pegawai Eropa (Broomer, 1995: 18).

Politik etis dalam abad ke-20 merupakan zaman baru dalam politik kolonial. Pelaksanaan politik etis ini membawa perubahan menuju modernisme Barat di hampir semua sektor kehidupan masyarakat, tak terkecuali perkampungan rakyat.

H. F. Tillema, seorang anggota *gemeentestraad* atas biaya sendiri mengadakan penelitian terhadap kondisi kesehatan dan fisik kampung-kampung di Semarang tahun 1913. Ia memotret kondisi kampung-kampung. Hasilnya: rumah-rumah penduduk dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan sebagai tempat tinggal. Rumah-rumah itu terbuat dari bambu, berlantaikan tanah, tanpa ventilasi yang memadai, tanpa penerangan, dan letakknya tidak teratur. Jarak WC dengan sumur sangat berdekatan. Sehingga, penduduk kampung meminum air sumur yang terletak di dekat WC. Kepadatan penduduk mencapai 400–1000 orang per hektare

(Tillema, 1913; 33–54; Yulianti, 2003: 333). Dengan hasil temuannya Tillema membuat perencanaan perbaikan rumah dan kampung: halaman harus menghadap ke jalan untuk memudahkan lalu lintas dan masuknya udara segar. Jalan-jalan besar harus dibangun searah dengan arah angin. Jarak bangunan antara rumah berkisar antara 500–1.000 meter.

E. KESEHATAN LINGKUNGAN DAN HIGIENITAS YANG BURUK

Pada taon 1901 di Semarang telah bertjaboel penjakit cholera heibat, kamoedian di-soesoel dengan penjakit-penjakit dysenterie dan typhus, hingga pembesar jang ber-koeadjiban merasa iboek sekali aken tjegah mendjalarnja ini penjakit jang men-jerang keras sekali. Sampe taon 1902 ini keada'an jang djelek belon bisa dihindar-ken, maka pembesar negri, teroetama dokter-dokter, ada bekerdja keras, aken tindes ini penjakit. Pendoedoek jang banjak djadi korban adalah pendoedoek kampoeng, lantaran kakoerangan aer minoem jang bersih, lagian tempat-tempat itoe ada begitoe mesoem, hingga gampang sekali wabah penjakit berserang (Liem Thian Joe, 1931:111).

Kondisi lingkungan kampung yang buruk, telah mendatangkan wabah penyakit pes. Gemeente Semarang melaporkan bahwa sejak Oktober 1916 sampai Desember 1917 terdapat 31 orang terjangkit penyakit pes. Adapun kampung-kampung yang terkena wabah pes: Karangturi, Lemahgempal, Bugangan, Gambiran, Bojongpejambon, Kembangsari, Randusari, Widoharjo, Lamper Kidul, Genuk, Bandarharjo, Rejosari, Barusari, Bulustalan, Pederesan, Bulu Lor, Pendrian Kidul, dan Kentangan. Kondisi memprihatinkan ini dapat dilihat pada Gambar 5 dan 6.

Angka kematian di Semarang sangat tinggi, jauh melebihi angka kelahiran. Maraknya urbanisasi ke kota, cukup menjadikan jumlah penduduk kota stabil. Di beberapa wilayah, angka kematian mencapai angka 10% dari jumlah penduduk, bahkan di waktu-

waktu selanjutnya mengalami kenaikan mencapai 11% (Kakebeeke, 1931:43–44).

Selain pes, wabah penyakit yang menjangkiti warga Kota Semarang adalah kolera. Pada awal tahun 1901, warga yang meninggal 2480 jiwa, setahun setelahnya (1902) warga yang meninggal 1020 jiwa.⁹ Setelah adanya Gemeente Semarang, wabah kolera tak menyurut memakan korban. Tahun 1910 warga yang menjadi korban 3163 orang, tahun 1915 menjadi 3575 orang, dan tahun 1920 turun menjadi 5519 orang.¹⁰

Penyakit kolera menyerang penduduk yang tinggal di perkampungan yang kumuh dan tidak tersedia air bersih. Masyarakat kampung tidak menggunakan sumur, tetapi menggunakan sungai sebagai sumber air untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Karena tidak mendapat sosialisasi hidup sehat, dan mereka terbiasa mandi, cuci, dan buang kotoran di sungai membuat masyarakat kampung yang terjangkiti kolera terus bertambah (Tillema 1915–6a: 20–21). Korban pertama yang meninggal akibat terjangkiti penyakit kolera adalah dua orang kuli borongan.¹¹ Di waktu-waktu selanjutnya, penyakit ini terus menelan korban. Karena keganasan penyakit ini masyarakat menyebutnya sebagai *Kyai Samber Nyowo* (Kyai pencabut nyawa).¹² Dari penelitian Dr. De Vogel, dokter kesehatan pertama di Indonesia, mengatakan bahwa wabah malaria menjangkit sangat hebat secara periodik, pun wabah kolera yang ganas. Masalah kesehatan penduduk kampung sama sekali tidak terurus. Dari penelitian Westerveld terbukti bahwa di kampung-kampung kondisi permukiman begitu menyedihkan (Tillema, 1931: 28). Penyakit lain yang memperlihatkan buruknya kondisi kesehatan di Kota Semarang adalah cacar air. Penyakit ini muncul pertama di perkampungan Tionghoa, yang cepat menyebar ke perkampungan

⁹ Lihat: Arsip Karesidenan Semarang No. 4385.

¹⁰ Lihat: Arsip Karesidenan Semarang No. 4385.

¹¹ Lihat: *Selompret Melajoe* 3-8-1901.

¹² Lihat: *Selompret Melajoe* 5-9-1901.

Tabel 3. Angka kematian penduduk Semarang 1919 (per 1.000 jiwa)

Daerah	Triwulan I	Triwulan II
Semarang Kulon	48	67
Semarang Kidul	32	57
Semarang Wetan	59	72
Semarang Tengah	45	49
Genuk	24	64
Pedurungan	26	90
Srondol	13	23
Mranggen	26	151
Karangun	24	115
Kebonbatu	20	98
Rata-rata	31,2	78,6

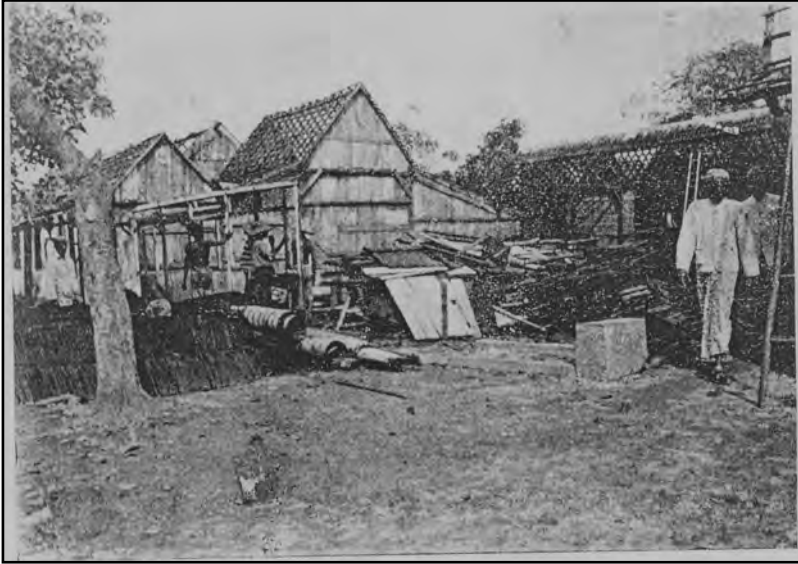
Sumber: Laporan Resmi Kotapraja Semarang dalam *Di bawah lentera merah* (Sho Hok Gie 1990: 9).



Sumber: *Verslag Gemeente Semarang 1917*

Gambar 5. Rumah kumuh penduduk Semarang awal abad ke-20

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sumber: *Verslag Gemeente Semarang 1917*

Gambar 6. Rumah kumuh penduduk Semarang awal abad ke-20

lain. Pada tahun 1908–1909 penyakit disentri telah menelan korban 41 orang, dan menjangkiti 121 orang. Di tahun yang sama, 240 orang terjangkiti penyakit tipus.

Akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, Kota Semarang memiliki permasalahan wabah penyakit yang tak kunjung akhir. Selain karena faktor lingkungan permukiman yang kumuh, kondisi geografis dan budaya masyarakat menjadi faktor mewabahnya bibit penyakit. Juga, pemberlakuan pelayanan kesehatan dari pemerintah yang diskriminatif, yang lebih mementingkan orang Eropa. Tenaga dokter pribumi sangat terbatas, sedangkan mantri kesehatan hanya diberi tugas memberikan vaksin cacar (Suryo, 1989: 216). Kondisi kesehatan yang buruk ini baru ditangani secara serius oleh pemerintah dengan mengeluarkan regulasi dalam *Staatsblad* 1914 No. 552, yang isinya: Jika dalam suatu daerah muncul suatu penyakit yang disahkan oleh dokter, maka kepala daerah harus memberitahukannya kepada kepala pemeliharaan kesehatan, kepala

Buku ini tidak diperjualbelikan.

residen, dan pejabat dinas kesehatan di daerah terkena bencana. Selain kepada pejabat, laporan bencana juga disampaikan kepada pers. Langkah awalnya, kepala daerah menyosialisasikan hidup sehat dan mekanisme pelaporan kepada kepala desa setempat (Kakebeeke, 1931:24).

Pada tahun 1920–1930, menurut *Memori Serah Jabatan Tahun 1920–1930*, Residen Semarang melaporkan bahwa secara umum kondisi kesehatan di wilayahnya sudah baik. Wabah-wabah penyakit yang berbahaya sudah tidak menjangkiti lagi. Selain memberantas sumber penyakit, pemerintah juga mengupayakan perbaikan permukiman dan kampanye hidup sehat kepada penduduk. Pemberantasan penyakit malaria dengan menyediakan pil kinine. Dengan perantara agen kesehatan (kepala desa, guru, mantri pasar, dan warung), pil kinine dijual kepada penduduk seharga 8–10 sen per tabung (10 biji). Bahkan, di pabrik-pabrik gula dan perusahaan-perusahaan obat yang mujarab ini dibagikan secara gratis (ANRI, *Memori serah jabatan 1921–1930 (Jawa Tengah, 1977: XLI)*).

Kondisi permukiman yang kumuh, kesehatan lingkungan dan higienitas yang buruk ini menjadi perhatian yang cukup intens dari Gemeente Semarang untuk dicari solusinya.[]

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB III

PANAS DALAM YANG MENYEMBUHKAN Upaya-Upaya Gemeente Semarang Memecahkan Masalahnya

..terbukti, bahwa hari-hari pertama kehadiran Gemeente Semarang tidak selalu berjalan dengan mulus.¹

Semarang di awal abad ke-20 memasuki babakan kota yang lebih rapi dan otonom. Di bawah pemerintahan kotapraja (*Stadsgemeente van Semarang*) ini menjadikan Semarang terlepas dari pemerintahan kabupaten (tradisional), dan memiliki batas kekuasaan pemerintah yang otonom (modern). Kota Semarang berbenah dengan sistem administrasi pembangunan yang terstruktur dan teratur rapi, dengan didukung sumber daya manusia yang handal. Tidak dipungkiri, bahwa pada masa *Stadsgemeente* ini pembangunan kota tidak hanya mengutamakan dan menekankan pada penertiban sistem administrasi pemerintahan, tetapi juga pembangunan fisik kota secara menyeluruh.

Praktek pembangunan kota mengutamakan pengembangan pemukiman rakyat yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap, antara lain lapangan olahraga, taman kota, jaringan jalan baru, drainase di Banjir Kanal Timur dan Barat, Siranda Kanal dan CBZ Kanal, Peterongan Kanal, dan saluran air lainnya. Pembangunan sarana pelabuhan, stasiun keretaapi, kantor-kantor niaga dan fasilitas kota modern terus dilaksanakan. Fungsi kota menjadi meluas, di samping

¹ Lihat: Pranger, "Eenige...", dalam *Gedenkboek der Gemeente Semarang 1906-1931*, (Semarang: N.V. Dagblad de Locomotief, 1931), hlm. 38.

sektor perdagangan, militer, pemerintahan, juga di sektor pendidikan dan pariwisata. Hasil keputusan dan keseriusan penataan kota oleh Gemeente Semarang ini membawa kota yang panoramanya indah ini menjadi rujukan pembangunan kota di Hindia Belanda. Selain itu, birokrat dan teknokratnya banyak diminta menjadi konsultan atau praktisi pembangunan kota lain di Hindia Belanda maupun menjadi pejabat pemerintah pusat di Batavia.

A. STRUKTUR PEMERINTAH GEMEENTE SEMARANG

Undang-Undang Desentralisasi (*Decentralitatie Wet*) yang ditandatangani Gubernur Jendral J.B. van Heutsz, 21 Februari 1906 mulai berlaku tanggal 1 April 1906, bersamaan dengan beberapa kota lain: Bandung, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Magelang dan Palembang.² Sebuah peraturan *Afzondering van Geldmiddelen van Nederlandsch Indie* tentang hak otonomi untuk mengatur keuangannya sendiri³ dasar keputusannya adalah pasal 128 *Indische Staatsregeling (IS)* yang menyebutkan:

Apabila keadaan mengijinkan, maka untuk suatu wilayah dapat diberikan pemisahan dalam keuangannya (dari keuangan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda).

Pemberlakuan Semarang sebagai kota yang otonom berarti mengakhiri sistem pemerintahan sentralistik di Semarang, kecuali pemerintahan bumiputra (yang dijalankan secara sentralistik oleh *inlandsbestuur* [bupati, wedono, asisten wedono, dan lurah]). Sebagai pemegang pemerintahan tertinggi di kota ini adalah *burgermeester* (walikota, 1916) dengan *college van burgermeester en wethouders* dan *Gemeenteraad*. Anggota *wethouders* berjumlah 4 orang (2 orang Belanda, sisanya Bumiputra dan Asia-Asing), sedangkan anggota *stadgemeente-raad* berjumlah 23 orang (15 orang Belanda, 5 orang

² Lihat: *Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1906, No. 121–126.

³ Lihat: *Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1906, No. 120.

Bumiputra, dan 3 orang Asia-Asing). Sampai dengan tahun 1916, *burgermisteer* yang memegang pemerintahan masih *Gemeenteraad* yang dipimpin oleh *Hoofd van Plaatselijke* (Pemda Semarang, 1979:66).

Regulasi ini membawa Semarang menjadi kota yang otonom. Otonomi kota di Hindia Belanda merupakan persoalan yang telah bergulir lama, dalam menyikapi kekuasaan monopolistik Gubernur Jenderal. Masalah ini menguat pada dasawarsa 1880-an, yang dipelopori oleh para pengusaha Belanda yang sukses bergerak di berbagai bidang di Hindia Belanda. Jumlah pengusaha ini tidak sedikit, dan mereka telah membentuk komunitas yang menyebar di berbagai kota, antara lain: Batavia, Bandung, Semarang, Surabaya, Makasar, Medan dan Padang. Pengguliran masalah otonomi tidak hanya berkaitan dengan kepentingan dunia usahanya, tetapi juga kepentingan bidang politik pemerintahan. Mereka berhasil merubah etatisme dalam pertanian dan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam rangka *kultuurstelsel*, menjadi usaha-usaha perkebunan dan perdagangan. Isu otonomi yang mereka gulirkan berkaitan dengan kesempatan untuk berbicara dalam proses-proses pembuatan kebijakan pemerintahan (*medezeggenschap*). Argumen yang mereka gunakan adalah perkembangan di berbagai daerah Hindia Belanda sangat cepat dan permasalahan semakin rumit yang tidak mungkin diselesaikan dari jauh, di pusat kekuasaan (Wignjosebroto, 2004:3–4). Berbarengan dengan kota Bandung, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Magelang dan Palembang, Semarang mendapat modal pembangunan sebesar f 196.700. Jumlah modal untuk mengatur kotanya itu merupakan angka paling besar dibandingkan dengan kota lainnya.

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan politik etis, pemerintah menyiapkan ordonasi khusus untuk menanggapi perkembangan kehidupan golongan pribumi di desa. *De Indische Gemeente Ordonantie* (IGO) yang diundangkan tahun 1906, termaktub dalam *Staatsblad van Nederlandsch Indie 1906 No.83*, pemerintah Hindia Belanda mulai mengatur langsung urusan pengelolaan berikut kepentingan rumah tangga komunitas-komunitas perdesaan pribumi

Tabel 4. Modal pembangunan kota di Hindia Belanda tahun 1906

No.	Kota	Jumlah
1	Semarang	f 196.000,-
2	Bandung	f 46.775,-
3	Palembang	f 31.800,-
4	Magelang	f 16.225,-
5	Cirebon	f 14.300,-
6	Pekalongan	f 12.100,-
7	Tegal	f 11.000,-

Sumber: *Staatsblad van Nederlandsch Indie 1906*

di Jawa dan Madura. Ordonasi ini memuat 20 pasal yang terbagi dalam empat bagian, gunanya untuk mengatur urusan organisasi dan pendapatan desa, administrasi desa, pengelolaan harta milik desa, serta penyelenggaraan kerja-kerja untuk kepentingan negara.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto (2004:3–4), IGO merupakan *pemutihan* (formalisasi dalam perundang-undangan) apa yang sebenarnya telah dipraktikkan sebagai bagian dari kehidupan rakyat di perdesaan Jawa. Artinya, eksistensi kepala desa semakin tegas dan desa telah terintegrasi dalam struktur pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Dengan demikian, desa mudah terkontrol dalam sebuah sistem patronase yang hierarkis di bawah penguasa. Para pejabat dan atau badan pemerintah kolonial akan lebih leluasa untuk turun tangan langsung lebih jauh guna mengontrol jalannya proses desentralisasi.

Senada dengan pendapat Wignjosoebroto, RA Kern menginventarisir ada sembilan asas hukum dari IGO (Wignjosoebroto, 2004:37–38), yaitu: *pertama*, kedudukan kepala desa diakui oleh pemerintah; *kedua*, jabatan kepala desa harus dipilih melalui pemilihan; *ketiga*, pendapatan kepala desa dan fungsionari desa akan didapatkan dari tradisi yang berlaku; *keempat*, pengelolaan pemerintahan desa diserahkan kepada kepala desa berdasarkan aturan-aturan yang menjamin pelaksanaannya dengan baik; *kelima*, ada sejumlah orang yang diajak berembug mengenai persoalan desa, *keenam*, kepala desa akan mewakili desanya di luar maupun di dalam setiap perkara hukum; *ketujuh*, harta komunal harus dijaga; *kedelapan*,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

berlaku kerja wajib untuk desa; dan *kesembilan*, pejabat di atas kepala desa berhak mengatur hal-ikhwal urusan desa.

B. PEMBAHASAN PERMASALAHAN KOTA SEMARANG

Masalah angka kematian tinggi, merebaknya wabah pes, dan buruknya kondisi permukiman Semarang menjadi pembicaraan yang alot dalam pembahasan pada rapat-rapat Dewan Kotapraja Semarang. Beberapa keputusan besar telah dihasilkan, tetapi tidak terlaksana karena kekurangan dana. Pada umumnya anggota dewan masih tergantung pada pemerintah pusat di Batavia. Anggota dewan kota yang memunyai pandangan maju adalah Dr. De Vogel dan Dr. Boersman. Pada rapat Dewan Kotapraja 29 Januari 1909, Dr. De Vogel, mengusulkan perencanaan permukiman di daerah perbukitan. Ia beralasan bahwa Kota Semarang termasuk kota yang paling tidak sehat bila dibandingkan dengan dua ibu kota di Jawa. Sebagai seorang dokter yang humanis, ia tidak tega melihat pemandangan sanak keluarga warga Semarang meratapi mayat keluarganya yang meninggal karena wabah penyakit. Ia merasa telah melakukan kejahatan dengan pembiaran berlangsungnya pemandangan tragis itu (Kakebeeke, 1931: 23–26).

Dr. De Vogel dengan gigih membuat perencanaan perumahan di daerah perbukitan. Ia tidak mengenal lelah untuk menyosialisasikan dan menjelaskan program perumahan yang akan memunyai makna bagi Kota Semarang. Berikut potongan pidatonya yang dimuat dalam *Gemeentebled tahun 1909*.

Tuan-tuan yang terhormat,

Dalam rapat hari Selasa, 17 November 1908 masalah usulan pembangunan perumahan belum selesai. Saya akan menjelaskan mengapa masalah ini berlarut-larut, selama 2,5 tahun. Bahwa belum selesainya masalah ini karena tidak dilibatkannya permasalahan secara jernih...

Alasan terpenting pengambilan keputusan tentang perumahan penduduk: Semarang termasuk kota yang paling tidak sehat bila dibandingkan dengan ke tiga kota di

Buku ini tidak diperjualbelikan.

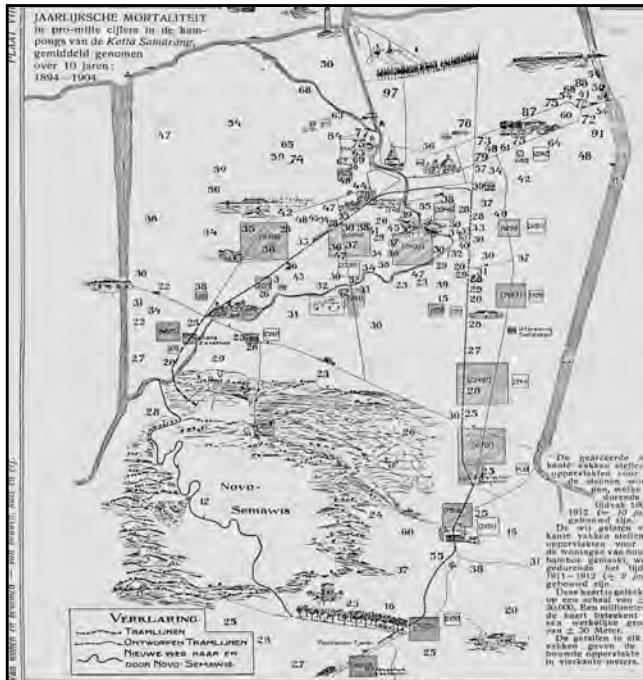
Java. Angka kematian rata-rata di dalam kota mencapai 45–60, bahkan 70 per 1.000 penduduk. Di bagian kota tertentu bahkan mencapai 280–300 per 1.000 jiwa. Masalah ini tentunya mengharuskan kita semua melakukan upaya pemecahan.

Kami yang bergerak di bidang medis paling mengetahui masalah ini. Karena sering mendapat panggilan kalau ada orang sakit, dan kami lebih sering melibat mereka kehilangan sanak keluarganya atau tetangganya. Kami merasa, adalah suatu tindakan kriminal jika kita tidak mengusabakan tempat permukiman yang kondisi lingkungannya lebih sehat...

Keinginan untuk mendirikan perumahan yang terencana dengan baik di perbukitan dirasakan semakin mendesak. Suatu perencanaan yang bermula dari kesadaran bahwa perluasan kota harus diatur dengan sebaik-baiknya, dengan maksud tidak memindahkan kota bawah ke atas. Memang kita dihadapkan pada posisi melanggar kebebasan pribadi dan atau menerapkan peraturan demi kepentingan kota. Tidak bermaksud membatasi kebebasan pribadi, yang diperlukan kini adalah tersedianya perumahan yang sehat...

Masa awal bagi pemerintahan kota yang otonom atau masa transisi dari sentralisasi ke desentralisasi berlangsung sekitar lima tahun (1906–1911). Dalam masa transisi ini telah dihasilkan rencana pembangunan kompleks perumahan di perbukitan selatan Kota Semarang. Setelah masa transisi ini, dimulailah periode pembangunan kota (1911–1922): utang-utang telah dilunasi, pekerjaan-pekerjaan besar dimulai, termasuk pembangunan perumahan rakyat (Kakebeeke, 1931: 11).

Pembangunan pemukiman di daerah perbukitan yang terencana dengan baik dirasakan sebagai kebutuhan mendesak. Sebagai seorang yang sadar hak asasi, De Vogel tahu bahwa rencana pembangunan ini pasti akan menghadapi tantangan. Pihak yang tidak sependapat dengan rencananya adalah masyarakat Tionghoa Semarang, karena wilayah perbukitan itu telah dimanfaatkan sebagai makam keluarga mereka. Tantangan lainnya, pendapat yang tidak senada dari beberapa anggota Dewan Kotapraja Semarang, yang menganggap bahwa rencana besar dokter humanis itu akan mengakibatkan pemindahan kota, dari kota bawah ke kota atas.



Sumber: Van wonen ... (Tillema 1913)

Gambar 7. Pemetaan angka kematian karena wabah penyakit di kampung-kampung Semarang Tahun 1894–1904

Gagasan Dr. Vogel mendapat dukungan dari Dr. Tersburgh. Hasil pengamatan Dr. Tersburgh, selaku dokter, menyimpulkan bahwa daerah perbukitan Semarang, tanpa perbaikan ekstra telah siap dijadikan tempat bermukim, yang bebas malaria. Di daerah dataran bawah Semarang, merambatnya wabah kolera sangat cepat. Penduduk menyerah dengan kondisi ini, dan tidak dapat berbuat banyak untuk menanggulangnya. Dengan pemindahan permukiman penduduk ke kota atas, wabah kolera di daerah perbukitan dapat dilakukan penanggulangannya.

Pro-kontra tentang rencana pembangunan perumahan di Candi telah memakan waktu yang lama. Pembicaraan yang panjang ini akhirnya menyepakati pembangunan kota di Candi (perbukitan

Semarang). Makam Cina yang diperdebatkan kemudian dipindahkan ke daerah Kedungmundu, Gemah, Terguwo & Sendang. Pada tahun 1909 kawasan Candi Baru menjadi tempat tinggal yang indah dan sehat, serta berfasilitas lengkap (listrik, air ledeng, dan transportasi) (Liem, 1931:190–194). Usaha keras ini mengakhiri perdebatan panjang pembangunan perumahan yang berkisar tentang pendanaan. Tak salah jika kemudian namanya dijadikan nama jalan utama di kawasan perumahan Candi Baru. Mereka yang mendukung pembangunan perumahan di Candi Baru dapat dikatakan sebagai pelopor perjuangan ke arah agar otonom sebenar-benarnya, juga berandil besar terhadap pembangunan Kota Semarang. Dalam perkembangannya, juga lahir tokoh-tokoh yang memunyai kepedulian yang tinggi terhadap bagaimana menemukan solusi masalah Kota Semarang di awal abad ke-20, terkhusus di bidang permukiman. Mereka di antaranya adalah Tillema, Thomas Karsten, dan lain-lainnya.

Kompleks perumahan kawasan Candi Baru dirasakan belum menyukupi kebutuhan rumah di Kota Semarang di awal abad ke-20. Selain letaknya yang jauh dengan pusat kota, juga belum adanya transportasi dan jalan raya belum memadai, dan harga sewa rumah-rumah di sana dirasakan pun mahal. Sebuah tugas baru yang dilaksanakan oleh dewan kota adalah pengadaan perumahan rakyat baru. Dalam sidangnya pada tanggal 28 Maret 1916 dewan kotapraja membahas usul bagi pendirian kompleks perumahan rakyat pertama atas tanggungan kotapraja. Lontaran usul muncul dari anggota dewan B. Wolff bersama dengan anggota dewan lainnya, yang mengusulkan dana sebesar f35 ribu untuk pembangunan kompleks 120 rumah. JAHS. Hanozet Gordon sebagai ketua dewan belum bisa mengabulkan usulan ini. Ketua dewan menginginkan memulai proyek besar dengan dasar yang berbeda. Ia tidak setuju usulan membangun puluhan rumah melalui percobaan.

Ketua dan inspektur dinas perumahan Westmaas, berpendapat bahwa percobaan dapat dilakukan dengan pembangunan tipe rumah tertentu. Akan tetapi, B. Wolff dan kawan-kawan mengusulkan berbeda: untuk segera memulai dengan percobaan bersama tiga

tipe yang berbeda. Sementara anggota dewan kota lainnya, van Wijngaarden menanggapi perdebatan tentang kedua usulan itu dengan menyatakan bahwa kemajuan perumahan rakyat merupakan persoalan terpenting, yang oleh dewan harus lebih diperhatikan. Di samping pembangunan yang diikuti oleh eksploitasi rumah, masih ada kemungkinan dengan memberikan uang muka pembangunan untuk mendorong penduduk yang akan dilaksanakan menurut aturan-aturan dan di bawah pengawasan kotapraja dalam ukuran besar dengan pembangunan perumahan. Apabila diputuskan bahwa kotapraja mulai berminat untuk membangun perumahan rakyat, anggota dewan menganggap tidak benar untuk menyediakan rumah-rumah ini dengan atau di bawah biaya produksi. Anggota dewan kota Dr. Joekes dalam perdebatan itu mengingatkan bahwa dana dua kali seratus ribu gulden menjadi bagian dari dua juta Jeening kedua, yang disediakan untuk memperbaiki perumahan rakyat. Ia menganggap percobaan dengan 30-an rumah yang jumlahnya dapat diperluas dengan percobaan 120 rumah. Setelah para anggota dewan mengungkapkan pandangannya masing-masing, keputusan diambil lewat pemungutan suara, dengan hasil 10 berbanding 3 suara untuk kemenangan usulan B. Wolff. Keputusan dewan ini telah membuka jalan bagi proyek terbesar yang dilakukan oleh Gemeente Semarang di bidang perumahan rakyat. Sejak itu, kompleks-kompleks perumahan (kampung gemeente) mulai dibangun (Kakebeeke, 1931:66).

Dengan Keputusan Dewan tanggal 31 Maret 1916 nomor 64/R ditetapkan membangun 30 rumah semi-permanen dan 10 rumah tipe A dan tipe B serta 120 rumah tipe D. Rumah-rumah ini telah diberikan baik untuk disewa maupun dibeli.⁴ Selanjutnya diputuskan untuk membangun lagi rumah-rumah semi-permanen sampai maksimal 120 sesuai dengan kebutuhan yang dibagi dalam berbagai tipe.

Meskipun keputusan ini diambil pada akhir Maret 1916, pembangunan 30 rumah pertama baru dimulai jauh kemudian,

⁴ Lihat: *Verslag Gemeente Semarang 1917*.

mengingat mereka belum memiliki tanah yang diperlukan untuk pembangunan itu. Di kampung Ngaglik telah dimulai pembangunan delapan rumah tipe B. Setelah kepemilikan atas pekarangan di kampung Kintelan, pada bulan Desember 1916, 22 rumah lainnya dibuka di sana. Meskipun tujuannya adalah membangun rumah oleh dinas pengawasan dan pembangunan rumah (*dienst van het Bouw-en Woningtoezicht*), tetapi karena kurangnya aparat pengawas dalam dinas ini semua dibatalkan, dan pembangunan kemudian dilimpahkan kepada dinas proyek kota (*dienst van Gemeentewerken*). Rumah-rumah yang dirancang oleh dinas setelah selesai dieksploitasi oleh pengawasan bangunan dan perumahan.

C. PARA TOKOH LAIN

Penggagas pembangunan perumahan sehat tidak hanya Dr. De Vogel, melainkan diikuti oleh H.F. Tillema (1870–1952), seorang ahli farmasi, penulis, fotografer, dan pelapor perfilman. Salah satu epos yang sangat bagus dibuatnya adalah *Kromoblanda*, yang melampirkan ratusan foto dengan narasi yang menarik. *Kromoblanda* merupakan cetak biru bagi pribumi dan Belanda yang hidup bersama dan sehat (Mrizek, 2004: 177). Selain *Kromoblanda*, pengusaha air bersih kemas ini juga membuat publikasi sebagai kampanye tentang hidup sehat, reformasi sanitasi, *Riolina* (1911) dan *Van wonen en bewonen, van bouwen, huis en erf* (1913). *Riolina* berisi tentang rekomendasi sistem pembuangan kotoran, dan air bersih buat perkotaan. Publikasi yang terbit tahun 1913 mengungkapkan tentang bagaimana cara mengurangi kematian tinggi, yaitu dengan kelengkapan sarana rumah sehat, konstruksi bangunan rumah, dan taman rumah: yang harus memerhatikan higienitas.⁵

Puluhan gambar hasil karyanya dari hampir 10.000 rekaman fotografis tentang Hindia Belanda yang direkamnya sendiri maupun

⁵ Lebih jauh tentang ini dapat dilihat: Joost Coote, “Toward an Architecture of Association. H.F. Tillema, Semarang and the discourse on the colonial slum”, dalam Peter J.M. Nas, *The Indonesian town revisited*, (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 1997), hlm. 232–233.



Sumber: www.kitlv.nl

Gambar 8. Perbukitan Candi dengan rumah-rumah sehatnya



Sumber: *Verslag Gemeente Semarang 1918*

Gambar 9. Rumah sehat untuk rakyat di perbukitan Candi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dipesannya dari pemotret lain—seperti ingin membuktikan bahwa Tillema memang berhak menyandang julukan “Multatuli Fotografi”. Seperti Multatuli yang lebih tua setengah abad, Tillema datang ke Hindia Belanda dengan mereguk ketenaran dan kekayaan. Seperti Multatuli yang berkulit putih, Tillema juga seperti merasa mengemban tugas sebagai “gembala” bagi pribumi yang terbelakang. Lalu, seperti Multatuli yang naif, Tillema tidak ada yang janggal menjadi humanis sekaligus kolonis—sesuatu yang belakangan dibayarnya dengan kekecewaan.

Setelah pensiun menjadi orang kaya pada usia 40 tahun, ia terdorong menyoroti buruknya kondisi para *inlander*. Bapak saleh ini, yang ketiga putranya menjadi dokter, merasa malu setelah sekian lama bangsanya berkuasa di negeri jajahan tidak mampu memberikan kakus, rumah yang bersih, dan air bersih. Tillema mulai menggugat, lewat medium visual. Pada awalnya, ia hanya menugasi fotografer membuat foto di sekitar jamban umum, lorong-lorong sempit, barak tentara, pingir-pinggir kali dan pabrik-pabrik di Semarang. Kemudian, ia memulai memotret sendiri dan menjelajah sampai ke pedalaman Kalimantan dan Papua. Seperti Multatuli yang membukukan kisahnya, ia mengoleksi foto-fotonya. Bagusnya lagi, ia menerbitkannya secara gratis, mirip dengan bentuk pamflet, ke berbagai pejabat di Batavia dan Den Haag. Isi fotonya berbeda dengan hasil jepretan fotografer Eropa yang datang ke Hindia Belanda saat itu. “Orang kecil” ia visualkan dengan bocah cacingan di tepi kali, bukan penari *blanda*, yang terbit 6 volume, dan *Zonder Tropen—Geen Europa!* (Tanpa negara tropis tidak ada Eropa) adalah kesaksian visual Tillema tentang perbedaan nasib si pribumi dan *si londo*.⁶

H.F. Tillema menyetujui usulan Dr. De Vogel tentang pemecahan masalah kondisi perkampungan yang menyedihkan, yaitu: penyediaan air yang baik, perbaikan lingkungan kesehatan, pembersihan kota, dan pemindahan permukiman ke daerah perbukitan.

⁶ Sebagai contoh lihat: *Tempo*, 14-5-1994.

Salah satu bukti nyata penyelesaian masalah kekumuhan kampung yang Tillema lakukan adalah mengupayakan air leding. Walau dengan biaya yang tinggi untuk pengadaan air leding, ia mengusulkan penggunaannya tidak hanya untuk air minum saja, tetapi termasuk mandi, memasak, dan mencuci bagi penduduk kampung. Ia berhasil melobi redaktur *de Locomotief*, J. E. Stovkis untuk menyediakan rubrik khusus tentang aspirasi warga. Dengan pembaca yang luas di koran ini, usaha menyosialisasikan air leding berhasil, dan usulannya disetujui untuk direalisasikan oleh Dewan Kota (Kakebeeke, 1931: 28).

Tillema memunyai gaya yang khas, memadukan dua gambar yang pesannya berseberangan. Misalnya, foto gambar kampung yang kumuh, dengan kampung yang tertata rapi (bersih). Contoh lainnya, si embok yang berjongkok di depan gubuk reyot dijejerkan dengan dengan potret tuan dan nyonya Belanda di belakang rumah taman yang luas dan bersih. Maka, orang kecil yang dipotretnya tetap saja orang kecil: yang pasrah, yang menjadi korban, yang jongkok di samping tuan-tuan Belanda. Tragis menjadi akhir kisah manusia penuh peran ini. Menjadi fotografer yang tidak terlalu buruk ini: bukan seorang radikal atau revolusioner. Teknologi modern yang digunakannya terbentur pada nilai-nilai humanisme yang sudah ketinggalan.

Boleh dikatakan sebelum datangnya Thomas Karsten perencanaan Kota Semarang adalah dewan kota, yang reaktif terhadap permasalahan yang dihadapinya. Masalah kesehatan lingkungan permukiman menjadi prioritas utama. Seiring diangkatnya seorang walikota, dan datangnya Thomas Karsten perencanaan kota Semarang menjadi lebih rapi, 1916. Tahun 1903 ia datang ke Hindia Belanda, tahun 1916 diangkat menjadi penasihat otoritas lokal perencanaan Kota Semarang. Thomas Karsten membagi kelas masyarakat berdasar pada kelas ekonomi. Hal itu dapat dilihat dari terkonsentrasinya suatu suku ataupun ras yang ada Semarang dalam sebuah kawasan. Penyebutan Kampung Melayu, Pecinan, Pekojan, dan Kota Benteng menegaskan pembagian tersebut. Sistem inilah

yang lantas ditentanginya. Karsten lebih memilih pembagian berdasarkan kelas ekonomi dengan menerapkan pendekatan terhadap penghasilan, perkembangan, dan persyaratan lainnya.

Selain mendobrak tradisi lama tersebut, Karsten juga salah satu arsitek yang mendukung integritas antara unsur-unsur lokal dengan Barat. Hal itu terlihat dalam karya arsitekturnya pada gedung PT KA Daop IV Semarang di Jalan Thamrin, Sobokartti di Jalan Dr. Cipto, SMA Ibu Kartini di Jalan Sultan Agung, beberapa pasar tradisional dan lainnya. Ia menyusun paket: perencanaan kota (*town-plan*), rencana detail (*detail-plan*) dan peraturan bangunan (*building regulation*) untuk Kota Semarang, yang merupakan pengalaman praktisnya pertama sebagai perencana kota. Prinsip yang diterapkan dalam perencanaan Kota Semarang adalah tidak meninggalkan perencanaan kota yang telah ada, penzoningan, tingkatan jalan-jalan (seperti di Eropa), dan memerhatikan tradisi masyarakat lokal. Walaupun rumah sebagai tempat tinggal yang dibangun di Kompleks Perumahan Sompok diproduksi secara masal, Thomas Karsten tidak meninggalkan batasan-batasan teknis, fisiologis, dan kesehatan.

Dalam merancang rumah-rumah di Candi Baru perencanaan dengan memerhatikan topografi, kemiringan dan belokan-belokan yang ada. Pembagian jalan ada dua, utama dan sekunder (Sumalyo 1993: 46–47). Setelah merancang permukiman Candi Baru, selanjutnya merancang pengembangan daerah Pekunden dan Peterongan. Tahun 1919 bersama ahli lain ia mengembangkan kompleks perumahan Sompok.

Ia lahir tahun 1884 dengan nama Herman Thomas Karsten, berasal dari keluarga terdidik di Amsterdam, ayahnya seorang profesor dalam ilmu filsafat dan wakil ketua Chancellor di Universitas Amsterdam. Ia seorang aktivis yang progresif dalam perkumpulan mahasiswa sosial demokratis. Pada tahun pertama setelah masuk universitas, ia menjadi anggota STV atau *Social Technische Vereeniging va Democratische Ingenieurs en Architecten*, sebuah kelompok mahasiswa teknik arsitektur berhaluan demokrasi. Tahun 1908 Karsten menjadi

anggota pengurus bagian perumahan dari organisasi yang memegang peranan penting dalam masalah perumahan dan perencanaan kota.

Sebagai akibat revolusi industri, keadaan perumahan terutama kaum buruh di berbagai negara Eropa sangat buruk sehingga menjadi permasalahan pemerintahan dan para perencana. Diadakan proyek-proyek perbaikan perumahan dan pengembangan kota, antara lain di Inggris timbul gerakan *garden city* atau kota taman. Gerakan ini banyak mendapat perhatian dan diterapkan di negara-negara Eropa lainnya seperti di Jerman. Dalam Kongres Perumahan Internasional tahun 1913, di Scheveningen Belanda, H.F. Tellima menguraikan buruknya kondisi perumahan terutama dalam sistem penghawaan dan pencahayaan di Indonesia. Kondisi seperti itu dikemukakan dengan mengetengahkan kasus kampung-kampung di Semarang. Pengalaman Karsten dalam organisasi termasuk kunjungannya di Berlin (sebuah kota yang sangat maju dalam perencanaan kota dan perumahan), berpengaruh besar pada karya-karyanya di Indonesia.

Bersyukur Kota Semarang pernah disinggahi oleh seorang arsitek pejuang yang gigih dalam prinsip berkehidupan. Menangani Rencana Perluasan Kota Semarang (1916–1930) dan menyusun Peraturan Bangunan (1936) merupakan pekerjaan Karsten pada waktu itu dan tampak jelas di beberapa lokasi di Semarang, antara lain daerah Candi Baru dan RS.Elizabeth adalah salah satu karyanya. Selama tahun-tahun tersebut Karsten tinggal di daerah Candi Baru, sebuah daerah berbukit dibagian Selatan Kota Semarang, lahan seluas 50 ha dibagi menjadi tiga zona sesuai dengan karakteristik topografi dan flora, sedangkan tipe bangunan, ia menerapkan konsep pengelompokan berdasar tingkat ekonomi. Kawasan-kawasaan lain yang dikembangkan oleh Karsten di antaranya, Pekunden, Peterongan, Batan, dan Wonodri (1919), Sompok (1919), daerah Semarang Timur (1919), dan daerah Mlaten (1924). Selain merancang kawasan-kawasan perumahan, Karsten juga merancang gedung De Koloniale Tentoonsteling (1914), kantor Van de Pol (1917),

kompleks bangunan Van Deventer School, sekarang SMK Kartini (1923), Rumah Pemotongan Hewan Pandean Lamper Kabluk (1925), Kantor Joana Stoomtram Mij, sekarang Kantor PT Kereta Api Indonesia Daops IV (1930), dan gedung teater rakyat Sobokarti (1930).

Di Semarang ia ikut mendirikan perkumpulan kesenian Jawa Sobokarti, dan sekaligus merancang gedung teater Sobokarti yang saat ini kondisi fisik bangunannya sangat memprihatinkan dan penuh sengketa. Duduk menjadi anggota Dewan Kesenian dan Kebudayaan, juga anggota komisi Purbakala. Dengan memperhatikan detail bangunan karyanya tampak bahwa Karsten begitu tekun, teliti, tajam dalam analisis dan brilian dalam memecahkan problem bangunan maupun lingkungan. Selain di Semarang dalam kapasitas yang sama, Karsten juga meletakkan dasar-dasar perencanaan dan pengembangan terhadap kota-kota lain, di antaranya Kota Bandung, Batavia, Magelang, Malang, Bogor, Madiun, Cirebon, Jatinegara, Yogyakarta, Surakarta, dan Purwokerto. Sementara di Pulau Sumatera, Karsten turut mengambil bagian dalam perencanaan dan pengembangan Kota Palembang, Padang, dan Medan. Balikpapan adalah satu-satunya kota yang turut merasakan sentuhan pemikiran Karsten di Pulau Kalimantan. Karsten menjadi salah satu bagian dari kelompok kecil orang-orang Belanda yang menghendaki pembebasan rakyat Indonesia. Di samping itu, dia juga menganggap penting bagi para ahli teknik untuk meningkatkan kemampuan dalam hal perencanaan kota. Sayang, kiproahnya tak lama. Seiring dengan invasi tentara Jepang, dia ditangkap dan dimasukkan dalam kamp internir Jepang di Cimahi hingga ajal menjemputnya di tahun 1945.

Kehadiran tokoh-tokoh pengubah tersebut di atas telah membawa Kota Semarang sebagai pelopor pembangunan kota di Hindia Belanda pada tiga dekade awal abad ke-20: pembaratan yang lebih cepat dibanding dengan daerah yang lain. Praktik rencana pembangunan Kota Semarang tidak bebas hambatan. Selalu ada masalah yang menghadang, di antaranya: dana, kerjasama dengan

penduduk pribumi (pemilik tanah), minimalnya kemampuan tenaga lapangan dan kesekretariatan. Akan tetapi, walau ada aral-melintang, rencana-rencana yang telah tersusun dapat berjalan, walau tidak mulus. Hal ini dapat kita lihat dalam *Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over 1914–1932*.[]

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB IV

MENYEMBUHKAN LUKA, MEMPERCANTIK KOTA Pembangunan Kompleks Perumahan Gemeente

Siapa yang mengenal Semarang,
dengan jalan-jalan utamanya
yang bagus beserta rumah-rumah besar bertaman,
tidak akan merasa kecewa,
karena kondisi waktu lampau dapat dipertahankan
dengan kehidupan modern (Ny. P., 1931:14).

Pembangunan perumahan rakyat merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, selain pendidikan, kesehatan, sandang dan pangan. Pembangunan perumahan rakyat ditujukan untuk mewujudkan pemukiman yang fungsional, ditata menurut pola tata ruang dalam pengembangan wilayah oleh pemerintah untuk kepentingan rakyatnya.

Sampai sekarang di Indonesia, permasalahan perumahan rakyat masih belum tuntas, dan seakan semakin berat dengan berlakunya sistem pasar. Dalam sistem ekonomi kapitalis ini, masalah rumah berubah menjadi *economic cost*: rumah tidak lagi dipandang sebagai fasilitas yang harus diselenggarakan sebagai tanggungjawab bersama (*public domain*), tetapi menjadi sebuah komoditas yang layak jual (*marketable*). Rumah untuk rakyat kecil masuk dalam kategori perdagangan dalam industri properti. Padahal, rakyat kecil hanya mampu membeli rumah semurah-murahnya, tetapi tidak ada rumah yang dijual murah oleh penjaja komoditi di industri properti. Kondisi ini mengakibatkan rakyat kecil seperti menanti jatuhnya bangunan dibalik gencarnya pembangunan *mall*, apartemen mewah, dan komoditas laris lainnya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

A. PEMBANGUNAN KOMPLEKS PERUMAHAN DI SEMARANG PADA ABAD KE-20

1. Faktor-Faktor Pendukung

Pembangunan kompleks perumahan di Semarang awal abad ke-20 dapat terjadi karena beberapa faktor pendukung, di antaranya:

a. Kebijakan pemerintah

Selain kebijakan-kebijakan di bidang perumahan yang dikeluarkan oleh Gemeente Semarang, sebelumnya pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang menuju arah penciptaan pemadatan pemukiman di perkotaan, “kampungisasi”. Kebijakan pemerintah ini perlu dikaji mengingat dampaknya menyangkut kepentingan umum (*public policy*). Hal penting dalam memahami kebijakan publik adalah perlunya melihat suatu sistem hukum (*system of law*), yang terdiri dari: isi hukum (*content of law*), tata laksana hukum (*structure of law*), dan budaya hukum (*culture of law*). Sistem hukum itu merupakan satu kesatuan yang terdiri dari tiga hal yang dalam prosesnya mencakup tiga tahap. Tahap pertama adalah proses legislasi dan yuridifikasi yang menghasilkan isi hukum (perundangan). Tahap kedua menyangkut proses politik dan birokrasi yang menghasilkan struktur hukum. Tahap ketiga adalah proses sosialisasi dan mobilisasi yang menghasilkan budaya hukum (Topatimasang, 2000:41).

Salah satu kebijakan yang berpengaruh pada pemukiman kota kolonial dan munculnya kampung-kampung di perkotaan, yang secara tidak langsung juga mempengaruhi pembangunan kompleks perumahan adalah *agrarische wet*. Kebijakan yang membawa perubahan besar di akhir abad ke-19 ini lahir pada 9 April 1870 yaitu setelah mengalami perubahan, memuat pernyataan *domeinverklaring* (Topatimasang, 2000:41), melalui *Agraris Besluit (algemeene Maatregel van Bestuur)* 20 Mei 1870 Nomor 15 Staatsblad No. 118. Dalam pasal 51 dari *wet op de Indische Staatsregeling*, terkandung hubungan negara dengan rakyat: negara memfasilitasi rakyat untuk mendapatkan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

hak *eigendom*. Akan tetapi, pemerintah berpihak pada rakyat bermodal (karena pemerintah adalah pemodal itu sendiri), dengan menyewakan tanah rakyat untuk pengusaha-pengusaha perkebunan.¹ Dengan otoritas negara, melalui lurah desa, tanah-tanah milik rakyat disewakan kepada pengusaha untuk usaha perkebunan.

Masyarakat desa yang tidak lagi memiliki tanah, pergi dari desanya untuk mencari penghidupan di kota. Di kota mereka tinggal di kampung yang menjadi tempat penampungan bagi mereka yang terlempar dari sektor pertanian. Kampung di perkotaan selanjutnya menjadi ruang pertemuan antara dua kegiatan yang terpisah: kegiatan pertanian yang kehilangan harapan karena tidak berlahan dan pertambahan mulut yang harus disuapi dengan kegiatan industri yang karena kecanggihannya sering memupuskan harapan bagi mereka yang lemah bersaing.

Onghokham mengatakan bahwa kampungisasi di perkotaan Hindia Belanda ada sejak adanya kebijakan Sistem Tanam Paksa, yang melahirkan gejala “gelandangan” di kota-kota di Jawa yang disebut *lelana* dengan ciri-ciri tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. Para *lelana* ini terdiri atas batur yaitu mereka yang bekerja sebagai pengangkutan barang perdagangan dari satu kota ke kota lain, buruh pemecel kayu, seniman *mbarang* (pengamen) dan lain-lainnya (1996). Bahkan, Johan Silas mengungkapkan bahwa kampungisasi terjadi sejak jaman kerajaan, atau sebelum datangnya intervensi asing. Kampung kota merupakan desa agraris yang mengalami aglomerasi (proses pemadatan dan perluasan) yang mengerombol (Silas, 2005:5).

Setelah sekian lama mengkoloni, pada tahun 1854 pemerintah Belanda mengeluarkan *Regeerings-Reglement* (RR). Salah satu isi dari aturan pokok pemerintahan di Hindia Belanda itu mengenai desa. Pemerintah Belanda mulai menyadari arti penting lembaga

¹ Kapitalisasi perkebunan dengan mengorbankan rakyat, dapat dibaca dalam Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi* (1990) & Ricardo Simarmata, *Kapitalisasi Perkebunan*, (2002).

masyarakat yang telah mengenal prinsip-prinsip musyawarah (demokrasi) dan otonomi di negeri koloninya. Pasal 71 RR isinya: (1) desa berhak memilih kepala desanya; (2) desa berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri; (3) desa yang terletak dalam satu kota dihapuskan. Pelaksanaan pasal 71 RR butir ketiga tersebut pemerintah mengeluarkan *Inlandse Gemeente Ordonantie (IGO)*,² sebagai pengakuan adanya desa di Jawa dan Madura. Selain mengeluarkan regulasi IGO pemerintah juga mengeluarkan Ordonansi Pemilihan Kepala Desa.³ Pada tahun 1941 pemerintah mengeluarkan *Desa Ordonantie*,⁴ yang merupakan perpaduan antara IGO dan peraturan pemilihan kepala desa. Walaupun pemerintah kolonial berganti, aturan IGO tetap berlaku di masyarakat pada masa pendudukan Jepang. Dalam kurun tiga setengah tahun Jepang tidak banyak menetapkan aturan pemerintahan desa. Hanya dalam Osamu Seirei No. 7, yang menetapkan masa jabatan seorang kepala desa selama 4 tahun. IGO masih berlaku pula di perdesaan setelah Republik Indonesia terbentuk (Bayu, 1981:74–78).

Dengan terbentuknya kotapraja, otonomi desa tetap terbatas dalam batas-batas kotapraja, yang menunjukkan bahwa pada pemerintahan desa tetap disertai pengaturan kepentingan rumah tangga desa, termasuk perhatian bagi proyek-proyek umum seperti di bawah pengawasan pemerintahan negara. Dengan penyisihan dana dari sarana keuangan umum, demi kepentingan kotapraja yang dibentuk juga tidak ada uang yang diberikan untuk merawat proyek-proyek desa (Cobban, 1974: 403). Otonomi desa sangat efektif di desa pedalaman. Di perkampungan kota dengan penduduknya yang heterogen tidaklah demikian, karenanya keinginan penduduk pribumi di kampung kota untuk melakukan kerjabakti untuk desanya meluntur. Tidak adanya anggaran pemerintah kotapraja, padahal warga perkampungan dibebani pajak, mengakibatkan kotapraja

² Lihat: *Staatsblad van Nederlandch Indie* 1906 No. 83.

³ Tentang hal ini, lihat: *Staatsblad van Nederlandch Indie* 1907 No. 212. Untuk di Jawa Tengah dasar legalitasnya dapat dibaca: *Staatsblad van Nederlandch Indie* 1929 No. 227

⁴ Lihat: *Staatsblad van Nederlandch Indie* 1941 No. 356.

memiliki kelemahan di bidang keuangan untuk melakukan perbaikan dan perawatan kampung. Dengan kondisi ini, perbaikan kampung menjadi suatu persoalan khusus: keterbatasan dana (Flieringa, 1930: 171).

Kebijakan diterapkannya industrialisasi juga berdampak pada pemukiman di perkotaan. Pada tahun 1904 dibentuk *Departement van Landboum, Nijverheid en Handel* (Departemen Pertanian, Industri dan Perdagangan) (Yuliati, 1997: 284). Tak berbeda dengan kota besar lainnya, di Semarang tumbuh pabrik-pabrik. Industri yang memproduksi barang secara masal ini membutuhkan buruh tidak sedikit. Buruh yang bekerja selain masyarakat Semarang sekitar pabrik, juga ada buruh pendatang dari wilayah sekitar Semarang. Hadirnya industri modern ini memperbanyak industri yang telah ada, pengrajin. Kebijakan industrialisasi ini menjadi faktor tidak langsung pembangunan perumahan, yakni dengan migrasi penduduk ke kota. Selain para pekerja kasar yang datang ke kota, pekerja di sektor informal, pemodal dan pekerja berketrampilan juga eksodus ke kota-kota besar. Kebijakan pemerintah yang mendukung secara langsung pembangunan perumahan rakyat adalah kebijakan Politik Etis, yang mempercepat modernitas di negeri Hindia Belanda.

b. Lingkungan

Pada akhir abad ke-20 penduduk Semarang dalam mencari tempat tinggal tidak terkendali, karena belum ada regulasi dan pengawasan dari pemerintah tentang masalah pemukiman penduduk. Mereka cenderung memilih tempat-tempat strategis (dekat dekat perdagangan dan akses usahanya). Pada tahun 1898 masyarakat pendatang dari luar Semarang banyak membangun perumahan di daerah Peterongan, khususnya Sompok yang kondisi kesehatannya lebih baik. Terbukti, saat wabah penyakit menjalar Semarang 1904 di Sompok (Semarang Timur) menunjukkan angka rendah (Kakebeke, 1931:41). Wilayah ini dipilih masyarakat menjadi tempat mukimnya karena lingkungan yang sehat: tidak banjir, airnya sehat, dan

tanahnya stabil. Oleh karena itu, pemerintah Gemeente Semarang memanfaatkan wilayah ini sebagai tempat pembangunan kompleks perumahan. Selain faktor lingkungan, wilayah Sompok berdekatan dengan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan penghuninya masih sedikit.

Sompok berada di tengah antara wilayah perbukitan dan pesisir pantai Semarang. Termasuk daerah dataran rendah Semarang yang mempunyai ketinggian tanah berbeda-beda. Seolah-olah ada dataran tinggi di wilayah ini. Ketinggian kampung Jeruk dengan kampung Rambutan berbeda, kampung Rambutan lebih tinggi. Dari pintu masuk Peterongan ke Sompok Lama maupun Sompok Baru, jalan yang dilalui terdapat tanjakan. Dari yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah di tengah-tengahnya oleh Thomas Karsten dijadikan sebuah taman. Bentangan alam Sompok dilewati pula oleh aliran sungai (kali). Terdapat dua sungai yang cukup besar, kurang lebih panjangnya 5–6 meter, yakni kali Peterongan/kanal Peterongan (sebelah barat Sompok) dan kali Bajak/kanal Lamper (sebelah timur Sompok). Di tengah-tengah pemukiman yang sudah jadi terdapat juga sungai-sungai kecil, yang kemudian difungsikan sebagai irigasi perumahan (dari sebelah selatan ke sebelah utara melewati kampung Nangka, Rambutan dan Lamper Sari, serta kampung Jeruk dan Manggis). Sungai-sungai yang melewati pemukiman dinormalisasi, dengan menutupi pinggiran sungai dengan batu-batuan yang tertata rapi.⁵ Keberadaan Kali-kali kecil ini dulunya sebagai irigasi sawah yang ada di perkampungan ini. Sebagai modal operasionalisasi sawah mereka melaksanakan irigasi, hulu kali ini ada di kampung Lamper Kidul yang letaknya lebih tinggi. Kanal Lamper, setelah pembangunan kompleks perumahan Sompok digunakan sebagai modal produksi usaha pembuatan tempe. Sekarang ini, kali itu telah nampak berubah karena limbah rumah tangga dari perkampungan, dan tidak dapat digunakan sebagai tempat pembersihan kedelai sebagai bahan baku tempe, pengelepasan dari kulitnya.

⁵ Wawancara Legiman (75 th), 10-9-2004.

Kondisi lingkungan yang ideal untuk pemukiman penduduk ini, tak jauh berbeda dengan kondisi lingkungan tempat Gemeente Semarang membangun kompleks-kompleks perumahan: Mlaten, Kintelan, dan lain-lainnya.

c. Tuntutan Pasar

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan desentralisasi di akhir babak kekuasaan Kolonial Belanda, baik dilihat dari keinginan membuka *medezeggenschap* (memiliki hak suara) maupun dari kehendak untuk meringankan tugas-tugas pemerintah pusat, tidak mudah mencapainya. Bahkan, peraturan-peraturan yang dikeluarkan terkesan *trial dan error* (Wignjosoebroto, 2004: 25). J.H. Boeke mengomentari pelaksanaan kebijakan desentralisasi dalam suasana politik etis: Ketika pemerintah hendak menjadikan kemajuan taraf hidup rakyat sebagai basis kebijakannya yang utama, para penguasa ternyata masih risau dalam menempatkan kesejahteraan penduduk sebagai syarat utama bagi tujuannya. Betapapun ideal dan tingginya tujuan moral-etik pemerintah dalam upaya membayar kembali utang kehormatan kepada penduduk pedesaan Jawa, sumber dana yang diperlukan untuk maksud itu tidak mungkin kecuali datang dari para penguasa yang kapitalis (Wignjosoebroto, 2004: 46).

Keberhasilan pembangunan awal rumah-rumah di Sompok pada tahun 1914, sebagai tuntutan orang Eropa dalam memenuhi kebutuhan rumah sewa yang layak dan murah mendorong pemerintah Gemeente Semarang membangun rumah-rumah selanjutnya, 1918 dan awal 1920-an. Rumah-rumah yang dibangun selanjutnya tidak hanya diperuntukkan bagi orang Eropa, tetapi juga pribumi maupun orang timur asing (bagi yang mampu menyewa). Pembangunan perumahan skala besar untuk semua kalangan masyarakat (orang Eropa, Timur Asing, dan pribumi) yang mempunyai uang ini dapat dipahami juga sebagai pemenuhan tuntutan pasar. Artinya, pembangunan 30 rumah pada tahun 1914 merupakan upaya pembuatan produk percontohan. Ketika ke-30 rumah itu telah habis disewa, berarti telah ada pangsa pasar yang berminat.

Penawaran dan permintaan merupakan determinan yang menentukan dalam produksi, harga, dan pemasarannya. Di sini, rumah telah bergeser fungsinya, menjadi fungsi ekonomi: rumah adalah komoditi. Bahkan, pada tahun 1924 dengan bekerjasama pihak swasta Gemeente Semarang membentuk badan usaha di bidang perumahan NV Volkhuysvesting.

2. Kondisi Pemukiman Sompok Sebelum Pembangunan Kompleks Perumahan

Sebelum pembangunan kompleks perumahan gemeente Sompok, Lamper Lor masih berupa pemukiman penduduk yang sepi, areal pertanian, dan makam (Ngaglik dan Kesambi). Selain itu, juga terdapat bangunan yang tidak lazim di perkampungan pribumi: klenteng di kampung Lamper Krajan (Jalan Lamper Sari) dan makam orang Cina (*bong*) di Peterongan. Kompleks perumahan Sompok, yang dinamai berdasar nama-nama buah, termasuk wilayah Lamper Lor.

Saat itu, di kampung jarak rumah antarpenduduk masih berjauhan. Di kampung ini bangunan rumah-rumah rakyat berbentuk rumah Jawa (limasan bergaya pacul gowang/semarangan). Rumah-rumah yang dibangun sejak lama itu beberapa sampai sekarang masih ada. Bentuk rumah limasan yang dimodifikasi ini selain mudah membuatnya, juga cepat mendirikan. Satu hari mendirikan rumah dapat diselesaikan, dengan *sambatan* (kerja bakti mendirikan rumah di kampung).⁶ Rumah dalam hal ini merupakan perpanjangan dari berhuni, dan budaya berhuni ini membuat manusia mengenal dirinya sebagai insan sosial. Rumah di sini merupakan konsep orang Jawa dalam mengaktualisasikan diri, baik pribadi maupun sosial, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonominya. Dalam mendirikan rumah, tidak hanya didasari pada letak dan bentuk bangunannya, tetapi juga didasari pada perhitungan hari, yang dikaitkan dengan hari lahir penghuni (*weton*). Dengan menggunakan

⁶ Wawancara Soejono (75 th), 17-11-2004

unit-unit perhitungan antropometrik yang didasarkan pada tubuh pemilik rumah, menandakan rumah berhubungan dengan peran dia sebagai penghuni dan penguasa. Tak bisa dipungkiri dalam tradisi Jawa dalam membangun rumah tidak memerhatikan ruang publik (fasilitas umum/sosial). Kegiatan sosial mereka dilakukan di rumah balaidesa, milik kepala desa.

Pembangunan kompleks perumahan Sompok dengan membebaskan tanah subur di perkampungan Sompok telah menggeser fungsi tanah penduduk.

Mbiyen sawah lan dadabe Nyai Rus ombo, nang Manggistan saiki...

Lekku seng ngon Manggistan jenenge Sukiman mbiyen ngarap nang njeruk sampe tekan Lamper Krajan, cedak karo kali. Yo ditanduri macem-macem. Lha pas Jaman Jepang, dekke ketembak nang cedak klinteng, Lamper Krajan...wektu Jaman Jepang kabeh wong lanang podho ngungsi. Lek Sukiman orak ngungsi, tapi malah ngurusi tegalane. Pas ono Jepang seh muteri kampung, dekke konangan ngowo arit. Langsung ditembak.

Dulu sawah dan tegalan milik Nyai Rus luas, yang sekarang jadi kampung Manggistan (kompleks perumahan gemeente Sompok). Pamanku yang tinggal di Manggistan Sukiman dulunya bercocoktanam di Jeruk sampai Lamper Karajan, dekat dengan sungai (kali Bajak/kanal Lamper-pen). Lahannya ditanami macam-macam. Sewaktu Jaman Jepang, dia tertembak dekat dengan klinteng, Lamper Krajan...

Waktu Jaman Jepang seluruh pria muda mengungsi dari kampung. Pamanku Sukiman tidak mengungsi. Ia malah mengurus tanamannya. Sewaktu ada Jepang yang keliling kampung, dia kedatangan membawa arit (senjata tajam). Seketika itu ia ditembak.⁷

Kampung Manggis dan kampung Jeruk sebelum dijadikan kompleks perumahan merupakan areal pertanian dan pemukiman penduduk. Juga di kampung Cempedak, Durian dan Mangga (perluasan kompleks perumahan yang dilaksanakan pemerintah daerah Kota Besar Semarang). Di kampung Jeruk sawah dimiliki oleh penduduk dan desa (*bondo deso*). Tegalan yang dijadikan lahan bercocok tanam oleh Sukiman adalah milik kelurahan (sekarang

⁷ Wawancara Tohir (75 th), 19-5-2004.

telah menjadi pemukiman penduduk, Jeruk Gang VIII). Dia hanya mengelola. Sampai didirikannya perumahan, lahan yang digarap sebagian masih berupa tegalan; sebagian dijadikan bangunan rumah. Yang biasa ditanami di lahan itu adalah palawija: jagung dan ketela. Sedangkan tanah milik Nyai Rus letaknya berdekatan dengan Taman Sompok (sekarang dijadikan kantor kecamatan). Masyarakat di kampung Lamper Mijen pada awalnya berbasis di sektor pertanian. Aktivitas keseharian masyarakat tidak jauh berbeda dengan petani Jawa pada umumnya. Intensitas aktivitasnya bergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan, mulai pembibitan, mempersiapkan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Ditinjau dari pengolahan atau proses produksi, sawah dikerjakan dengan sistem irigasi dan tadah hujan. Hasil peninggalan irigasi sawah, sekarang telah menjadi kali-kali kecil (1–2 meter) sebagai irigasi rumah di kompleks perumahan Sompok. Akses atas tanah yang dimiliki masyarakat merupakan faktor penentu dalam pendapatan keluarga. Hubungan kepemilikan tanah yang digarap maupun disewakan akan menentukan tingkat pendapatan keluarga. Tidak memiliki lahan pertanian berarti tidak ada pendapatan keluarga dari akses tanah, dan untuk mendapatkan pendapatan mau tidak mau harus "banting setir" menggeluti pekerjaan baru. Selain difungsikan sebagai pemukiman, makam, dan lahan pertanian oleh penduduk pribumi, tanah di perkampungan Sompok juga dimanfaatkan oleh masyarakat Tionghoa.

Kira di permoeaan boelan Juli 1923 tatkala Gemeente bikin loeas kampoeng-kampoeng di Sompok, di bagian sebelah Wetan, di tengahnja groemboelan jang lebat telah diketemoekan satoe klenteng koeno, jang soedah tidak terawat lagi. Di kanan kirinja ini klenteng telah toemboeh poehon ringan jang besar, hingga itoe klenteng djadi mirip sebagi diboengkoes oleh ini pepohonan (Joe, 1931: 261).

Klenteng, tempat peribadatan kaum Tionghoa penyembah Taopekong itu berada di kampung Lamper Krajan (ujung Timur Lamper Sari). Saat ditemukan, dikenal dengan nama klenteng *tiban*, datang dari langit. Dari penelitian yang dilakukan Liem Thian Joe,

klenteng tersebut merupakan klenteng yang berdiri pada tahun 1907 (sebelum pembangunan perumahan), yang digunakan sebagai tempat upacara penyembahan. Dan sejak diketemukan tahun 1923, klenteng yang didirikan orang-orang Lam-oa dan Hoeia-ao (Hokkian) tersebut mulai dirawat sampai sekarang. Klenteng yang sampai sekarang masih dikunjungi orang bersembahyang tersebut bernama Hoei Tik Bio (Joe, 1931: 261). Sekarang, letak klenteng ini menjadi unik, karena tidak berada pada sudut jalan (tusuk sate). Umumnya, letak sebuah klenteng selalu berada pada posisi tusuk sate.

Jika awal abad ke-20, 1907, telah berdiri klenteng dimungkinkan aktivitas masyarakat kampung Lamper Karajan telah ramai. Di jalan utama kampung menuju jalan utama kota dinamakan Lamper Sari. Lamper yang sari (ramai). Bahkan tak jauh dari Lamper Sari terdapat makam orang Cina di Peterongan dan Wonodri. Hal ini karena berdekatan dengan perkebunan lada (abad ke-18), dan perkebunan kelapa (abad ke-19-awal ke 20) milik Mat Jasin, saudara Tasripian.⁸ Seperti keterangan Liem Thian Joe,

Compagnie poenja perdagangan lada roepanja itoe masa ada ada mad-joe pesat sekali, hingga keboen lada kepoenjaan Compagnie perlu diperluas lagi. Begitoelah antara lain-lain ada diseboet bahoea di sebelah wetannja Djomlang, Compagnie telah boeka banjak tegalan goena bikin lebih besar hasil tetaneman lada, sedeng di tanah jang sekarang diseboet Meritjan, ioe tempo ada satoe gedoeng dimana biasanja Compagnie simpen itoe hasil lada jang ia orang poengoet dari kebonnja atawa beli dari pendoedoek desa(Joe, 1931: 45).

3. Penyediaan Tanah dan Penggunaannya

Permasalahan anggaran untuk pembangunan telah menjadi bahan pembicaraan seru dalam rapat-rapat dewan kota, dicarikan jalan

⁸ Tasripian adalah pengusaha pribumi di Semarang yang mempunyai usaha kulit, penyewaan rumah, perdagangan kopra dan kapuk, serta perkebunan karet dan kelapa. Selain di Mrican, perkebunan kelapanya juga terdapat di Ungaran dan Srandol. *Regering Almanak* tahun 1900–1920 mencatat Mat Jasin (terkadang ditulis Matjasen) menyewa pada pengusaha Tionghoa untuk perkebunan kelapa di daerah Mrican.

keluarnya dengan berutang kepada pemerintah pusat. Tentu saja, setelah utang tahap pertama diselesaikan pada tahun 1911. Utang tahap kedua ini memberikan banyak kesempatan kepada pemerintah Gemeente Semarang untuk membangun infrastruktur kota, dalam menciptakan kota yang bersih. Dana utang itu digunakan untuk: pembangunan jalan-jalan menuju perumahan Candi Baru, pengadaan bus sebagai sarana transportasi, perbaikan pasar-pasar (termasuk pasar Peterongan), dan pembelian tanah di Sompok.

Te Sompok konden na langdurige onderhandeligen gronden worden aangekocht en bereikten den Raad reeds voorstellen om ze voor huiszénbouw geschikt te maken. (Kakebeeke, 1931: 68).

Di Sompok, sesudah pembicaraan yang panjang lebar telah dapat dibeli tanah-tanah, dan oleh Dewan telah tersusun peruntukan pembelian tanah tersebut, yaitu untuk pembangunan perumahan rakyat yang baik.

Dalam tahun 1916 sebagian rencana perluasan kota mulai dilaksanakan, dan upaya-upaya untuk memperluas kawasan perumahan terus dilakukan dengan menawarkan pembebasan lahan yang dimiliki warga. Kompleks persawahan Sompok yang telah dibeli kotapraja mulai dimanfaatkan, tetapi masih kurang memadai. Jalan menuju Sompok diperbaiki, untuk mempermudah akses masuk kompleks perumahan. Sebagian jalan utama dan jalan kampung lainnya dilengkapi dengan saluran air. Sesuai rencana, tanah itu akan dibangun jalan sepanjang 15 meter antara petak-petak rumah, dan lebar 3,5 m bagi jalan raya utama. Jalan kampung utama panjangnya 10 m dan lebar 2 m; jalan kampung umum panjangnya 7,5 m dan lebarnya 0,6 m. Selain itu, bagi setiap petak bangunan akan dibangun prasarana mandi dan cuci, sehingga air bisa mengalir lewat saluran yang membentang di belakang pekarangan. Pada saluran ini pada setiap dua pekarangan terdapat sebuah lubang yang dibangun sebuah kamar mandi.⁹

Tanah untuk kompleks perumahan Mlaten didapatkan setelah adanya regulasi tentang pembentukan NV. Volkhuysvesting, dengan

⁹ Lihat: *Verslag Gemeente Semarang 1917*.

membeli tanah pertikelir dengan harga f 75.000,- dan perusahaan ini mengelolanya menjadi kompleks perumahan. Letaknya sangat strategis, berdekatan dengan pusat perdagangan dan perkampungan Cina. Walaupun kondisi aliran airnya jelek dan jalannya becek kalau hujan. Tanah yang dibeli oleh perusahaan pemerintah ini masih terdapat 100 rumah sewa berpetak yang bangunannya sudah tua, dan perlu diganti. Langkah pertamanya adalah mengurugnya dengan pasir yang diambil dari sungai Banjir Kanal Timur.¹⁰

4. Pembangunan Kompleks Perumahan Sompok

Pada tahun 1916 Gemeente Semarang memulai pekerjaan besar dalam bidang rumah untuk rakyat. Keberhasilan menyewakan rumah-rumah percontohan kemudian disusul dengan pembangunan rumah-rumah selanjutnya. Tahap awal pembangunan pada tahun 1914 dengan membangun rumah percontohan sejumlah 30 untuk tempat tinggal penduduk Eropa yang mengeluh tingginya sewa rumah di pusat kota (Kakebeeke, 1931:76). Dari segi ekonomi, permintaan masyarakat Eropa terhadap rumah menjadi pendorong bagi Gemeente Semarang untuk melakukan investasi. Selain untuk memenuhi kebutuhan pasar rumah produk massal (*mass production*), sebagai cara untuk mengejar permintaan pasar yang besar, di samping juga sebagai pemasukan pendapatan daerah kota yang otonom.¹¹ Kebutuhan yang sangat besar terhadap rumah sehat dengan sewa murah tidak dapat dipenuhi di tengah pusat kota (kota lama) dan Candi. Wilayah pinggiran Semarang yang dianggap strategis merupakan pilihan, Sompok dan Mlaten. Kebutuhan rumah dalam jumlah besar ini telah membawa perubahan pada posisi pemukiman, dari posisi barang pesanan menjadi barang pasaran. Pada tahun 1919 rancangan pengembangan Sompok selesai

¹⁰ Lihat: *Locale Tehniek* Juli 1932.

¹¹ Pajak pendapatan Gemeente Semarang mulai intens dibahas dalam dewan kota pada tanggal 28 Januari 1916. Hal ini sebagai respons terhadap keberatan pemerintah pusat terhadap upaya dewan kota memungut kenaikan pajak pendapatan negara. Hasilnya, dewan kota memutuskan pemungutan pajak sendiri.

digarap. Pelaksanaanya mulai dikerjakan tahun 1920 dan rampung pada tahun 1923 (Kakebeeke, 1931: 261).

Pada akhir 1918 di kompleks ini telah terdapat 33 petak yang seluruhnya mencakup 9900 m² bagi pembangunan kompleks perumahan dan 4 petak seluruhnya 5785 m² bagi pembangunan rumah Eropa. Pada akhir tahun 1919 telah disiapkan 156 petak seluruhnya 28 ribu m² untuk pembuatan kampung; 8 petak seluruhnya 12078 m² untuk rumah orang Eropa. Pembuangan air di kompleks ini masih perlu diperbaiki, kanal pembuangan utama belum dipasang; rencana untuk ini telah diajukan namun belum disetujui oleh dewan kotapraja. Pada saat hujan deras lahan yang terletak paling rendah masih tergenang air.¹² Proyek yang dimulai oleh dinas kotapraja diteruskan dan diselesaikan. Tahun 1919 dirancang 81 rumah dan 21 rumah tipe II, 40 rumah tipe IV, dan 20 rumah tipe V. Percobaan yang dilakukan dengan tipe rumah baru di Sompok bisa dikatakan berhasil; bangunannya lebih kokoh, biaya perawatannya lebih murah dan lebih baik bagi ventilasi daripada rumah yang sebelumnya dibuat. Tipe II mempunyai kamar mandi, cuci dan kakus bersama. Tipe V mempunyai bangunan samping yang terdiri atas dapur, kamar mandi dan kakus; bangunan ini pada mulanya dihubungkan dengan jaringan saluran air kotapraja. Bangunan samping dari tipe ini sejauh mungkin disambungkan bagi 4 rumah kopel, sehingga untuk 8 rumah dengan 1 septitank cukup memadai. Pada umumnya rumah baru tipe II, IV, dan V dipilih di luar tipe lama A B dan D namun baik tipe lama maupun baru tanpa kesulitan laku disewa. Rumah-rumah ini sangat berbeda dengan apa yang dibangun pada tahun sebelumnya. Jadi, setiap rumah memiliki tembok setinggi kurang lebih 0,80 m, yang berkedalaman 0,30 m. Selain itu, bangunan temboknya lebih tinggi. Tembok penopang yang disebutkan di atas dipasang dengan tujuan agar dapat mencegah rapuhnya *gedheke* (anyaman bambu) di dekat tanah.

¹² *Verslag Gemeente Semarang 1918.*

Kondisi ini sangat menambah biaya bangunan, dari situ muncul kebutuhan untuk membatasi lahan jika sewanya tidak terlalu tinggi.

Luas tipe bangunan baru juga jauh lebih kecil daripada rumah lama, dengan harga sewa yang disesuaikan. Biaya bangun setiap rumah tipe baru ditafsirkan berikut ini; tipe II *f* 494, tipe IV *f* 703, tipe V *f* 773. Tipe III meskipun dirancang belum selesai dibangun. Dengan kenaikan tajam harga material angka-angka penafsiran ini dianggap berlebihan.¹³ Terjadi perubahan pelaksanaannya. Perbedaan antara rumah dengan uang sewa tinggi: kamar mandi dan kakus dibuat pada setiap pekarangan; dan jenis penduduk miskin mampu membayar uang sewa, dengan sambungan pada saluran air. Bagi rumah-rumah dengan nilai sewa tinggi, bangunan tambahan juga dibangun yang berukuran 4x4; dua kompleks juga akan menggunakan satu septiktank dengan dasar kerikil. Dengan demikian, seluruh panjang saluran pada kompleks itu akan diturunkan separuh; jumlah septiktank jauh lebih besar; dan berukuran lebih kecil. Bagi rumah murah rata-rata pada setiap 40 rumah dibuat sebuah bangunan mandi, kakus, dan cuci yang dihubungkan dengan septiktank dan kolam kerikil. Seluruh saluran bisa dihemat. Saluran seperti ini pada tahun 1917 dan 1918 dibuka, kini harus dihentikan.

Perubahan ini ternyata berjalan baik, namun dasarnya tidak diletakan kerikil untuk menyerap air. Dasarnya tidak banyak diperhatikan sebagai akibat dari kedangkalan air. Oleh Inspektur Kepala Dinas kesehatan dalam kunjungannya telah dianjurkan untuk menerapkan sistem drainase dengan rumah lain. Rumah-rumah itu dibuka dengan saluran pembuangan air hujan di bawah tanah, sementara antara sisi bawah saluran ini dan sisi atas saluran tanah akan digantikan dengan puing-puing, kerikil dan sebagainya. Drainase berfungsi dengan baik. Selain air tanah, juga cairan dari kolam kerikil pada septiktank mengalir. Di sini tidak ada kesulitan yang muncul mengingat saluran utama tempat cairan muncul tidak memberikan kesempatan bagi orang pribumi untuk mandi.

¹³ *Verslag Gemeente Semarang 1919.*

Pengalaman kedua rumah-rumah pertama yang dirancang di Sompok menunjukkan bahwa rumah yang dibangun terlalu dekat. Karenanya setiap tiga rumah ini ada satu yang dibongkar dan tanahnya dibagi rata, pada kedua pekarangan yang berbatasan dibangun. Rumah yang dibongkar dirancang pada petak baru. Pengalaman ketiga, menunjukkan bahwa pembongkaran bangunan samping sangat sulit. Pada akhir tahun 1918 dimulai pembuatan dapur dekat rumah. Namun, karena tidak ada dana yang disediakan, untuk sementara semua masih terbuat dari bambu. Walau itu tidak sesuai dengan tuntutan pemberantasan pes; rumah-rumah ini menurut tuntutan dinas didirikan. Menjelang akhir tahun 1919 dimulai pembangunan dapur dengan bahan dasar bambu. Pada rumah-rumah baru yang dibangun, segera diperhitungkan dengan pengalaman yang diperoleh. Sebuah kesulitan besar yang dialami di Sompok adalah bahwa aliran air hujan di lahan itu belum larut.¹⁴

Periode 1916–1922 merupakan waktu timbulnya inisiatif dan perkembangan. Masa yang penuh dengan pembangunan dan pengembangan. Dari segi perdagangan juga sangat menguntungkan, bahkan berkembang pesat. Imbasnya, pajak yang masuk sangat banyak. Sehingga pekerjaan pemerintah kota meningkat, dan pembangunan perumahan dilaksanakan diberbagai wilayah (Kakebeeke, 1931:11). Lahan yang tersedia di kampung Kintelan dan Lempongsari telah habis dibangun, sementara pembangunan lahan di kampung Sompok dengan cepat diteruskan. Pada tanggal 31 Mei 1920 dewan kotapraja memutuskan untuk membangun 519 rumah di kompleks Sompok; penafsiran biaya pembangunan berjumlah sekitar f 480 ribu (Kakebeeke, 1931:77). NV. Volkhuysvesting Semarang yang didirikan tahun 1924 kemudian mengambil alih pengelolaan perumahan kota lebih lanjut.

Pembangunan sejumlah rumah sebelum tahun 1920 dikenal sebagai Sompok Lama, dan pembangunan selanjutnya dikenal dengan Sompok Baru. Bangunan rumah-rumah di belakang rumah

¹⁴ Lebih lanjut lihat: *Verslag Gemeente Semarang 1919*.

di pinggir jalan itu dalam perkembangannya membentuk kampung/gang yang banyak dihuni oleh pegawai birokrasi rendahan, dan orang yang mampu menyewa. Penamaan kampung/gang di kompleks perumahan Sompok menggunakan nama-nama buah, yaitu kampung Mangistan, Jeruk, Rambutan. Di setiap kompleks kampung tersebut terdapat taman. Pembangunan perumahan gemeente dilakukan tanpa mengusir kampung lama yang sebelumnya ada. Misalnya: kampung (lama) Lamper Mijen yang berada di tengah-tengah kampung (baru) Jeruk, Manggistan; kampung (lama) Lamper Krajan berada di tengah-tengah kampung (baru) Cempedak dan Jeruk.



Gambar 10. Peta kompleks perumahan Sompok dan Semarang Timur

B. PEMBANGUNAN KOMPLEKS PERUMAHAN DI MLATEN

Bulan November 1923 Regeering menyarankan kepada Gemeente Semarang supaya mendirikan badan NV, dan dalam bulan Februari 1924 dibentuk NV. Volkhuysvesting. Maksud pendirian badan ini, sesuai yang tertera dalam artikel 2 di statuenya, yakni untuk memperbaiki keadaan-keadaan pemukiman rakyat di Semarang, yang tidak atau kurang terpelihara. Modal awalnya 2 milyon, yang terdiri dari: 150 aandeelen A dari f 10.000,- dan 50 aandelen B dari f 10.000,-. Aandeelen A dipegang oleh pemerintah pusat dan aandeelen B dipegang oleh pemerintah Gemeente Semarang. Pada hari pendirian usaha pemerintah ini diserahkan 10% dari modal keseluruhan.

Pada awalnya, rumah-rumah kecil disewakan f 2.5 per bulan. Akan tetapi, sewa sekecil itu dirasa merugikan perusahaan sehingga sewa paling terkecil dinaikkan menjadi f 3 per bulan. Dari perencanaan yang digarap Karsten, perusahaan berhasil membangun 48 rumah tipe 00; 51 rumah tipe 0; 18 rumah tipe I dan 14 rumah tipe I dengan kakus. Berdekatan dengan kumpulan rumah itu dibangun tempat pemandian, cuci pakaian, dan kakus umum. Di antara tipe 0 juga diatur warung. Akan tetapi, karena sisa tanahnya sempit, warung diatur di rumah tipe I. Pembangunan rumah selanjutnya mengikuti tipe di atas.

Rumah kecil tipe 00 beserta teras luasnya 18,75 m², yang terdiri dari satu kamar. Bahan bangunan yang digunakan untuk membangun sangat sederhana: dinding tembok setinggi ½ -1 m terbuat dari tanah diplester, dan disambung dengan kayu dolok. Rumah-rumah tipe III, IV, dan V pintu dan jendelanya dicat, dan perkakas kayu diteer. Di sini rumah kelas buruh dan kelas menengah diperlakukan dengan sarana yang sama, juga pembangunan rumah-rumah sewaan kecil oleh pemerintah dalam jumlah memadai menjadi sarana yang digunakan untuk memperbaiki kondisi perumahan orang pribumi.¹⁵

¹⁵ Lihat: *Locale Tehniek Juli 1932*

Selama kurang lebih 15 tahun pemerintah Gemeente Semarang telah membangun rumah sebanyak 1557. Tentunya, angka sebanyak ini masih kurang mencukupi kebutuhan rumah untuk rakyat di Kota Semarang. Hal ini dapat dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk (yang didasari kelas sosial) pada tahun 1930, dengan jumlah rumah yang diperuntukkan bagi kelas sosial tertentu. Jumlah penduduk di Semarang pada tahun 1930 sebanyak 217.796 jiwa, yang terdiri dari 175.457 pribumi, 27.423 etnis Tionghoa, 2.329 Timur asing, dan 12.587 orang Eropa. Apalagi dalam tahun-tahun selanjutnya, pembangunan perumahan ini sudah tidak sebanyak seperti angka di atas. Pada Tabel 5 menunjukkan jumlah rumah yang dibangun gemeente Semarang sampai tahun 1930 di beberapa kawasan.

Dibandingkan dengan kota-kota lain, Gemeente Semarang dalam upaya pembangunan perumahan boleh dikatakan cukup baik. Gawatnya, masalah pemukiman bagi kesehatan rakyatnya telah disadari benar oleh pemerintah. Konsekuensi dari urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang berimbas pada meningkatnya jumlah rumah tinggal oleh pemerintah disikapi dengan kebijakan lain di sektor pemukiman. Misalnya, perbaikan kampung (*kampongverbetering*).

C. BADAN PENGELOLA KOMPLEKS PERUMAHAN

Kompleks perumahan rakyat Semarang, seperti: Candi Baru, Kintelan, Sompok dan Semarang Timur pengelolaannya langsung oleh pemerintah daerah. Sejak 1909–1916 berada di bawah dewan kota dan pengelolaannya secara langsung oleh komisi, tetapi sejak 1916 perumahan rakyat dikelola walikota, yang secara teknis dengan pembentukan dinas. Dinas perumahan (*Woningdienst*) merupakan lembaga yang melaksanakan tugas sosial ekonomi kotapraja sehubungan dengan perumahan rakyat. Tugasnya meliputi mencari dan menerapkan sarana jalan, memenuhi kebutuhan bagi kesempatan

Tabel 5. Jumlah rumah yang dibangunoleh Gemeente Semarang Tahun 1916–1930

Kampung/ Kawasan	Tipe	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	s/d 1930
Kagok Semipermanen	VI						2					2
Ngaglik Semipermanen	B	7										7
Kintelan Semipermanen	A B D II IV V		10 25	28	13 12 1							10 25 28 13 12 1
Lemponsari Semipermanen	II IV V VI O I				35 40 23	26 3 16		1				61 43 39 1 1
Permanent	II V VI								26 11	1 36 18 3		36 44 11 3
Sompok Semipermanen	B D II IV V II IV V VI			15 18	21 40 20	65 32 10	62 22 35	35 20 6				15 18 183 114 71 12 25 3 7
SemarangTimur Semipermanen	II IV V VI II III IV V VI Toko						40 42 42 63	17 6 19		130 82		40 42 59 69 166 114 71 95 114 2
Permanent							27 17 32 2	17 41 12 1	32 6 39		60 42	
TOTAL		7	35	61	205	152	308	182	187	318	102	1557

Sumber: *Gedenkboek der Gemeente Semarang* (1931:176)

tinggal baik sekarang maupun masa depan, memperhatikan tuntutan yang diajukan oleh kesehatan baik dari perumahan maupun dari lingkungan rumah, lalu-lintas, industri, perdagangan dan sarana kehidupan lain bagi penduduk.

NV. Volkhuysvesting Semarang yang didirikan tahun 1924 mengambil alih pengelolaan perumahan kota lebih lanjut. Salah satu pembangunan kompleks perumahan rakyat yang dikelolanya adalah di kampung Mlaten. Biasanya rumah-rumah disewakan (sewa rumah dihitung dibebankan kepada perusahaan tanah oleh perusahaan perumahan), namun kemungkinan terbuka bahwa rumah-rumah itu juga bisa diperoleh lewat membeli. Pada saat itu, ditetapkan sebagai syarat bahwa pemiliknya juga harus tinggal di tanah yang disewakannya. Dengan ini nampak bahwa rumah-rumah itu dimiliki oleh para pengelola sewa rumah ini. Kecuali rumah-rumah buatan sendiri, kotapraja masih mempunyai rumah yang pada saat itu dinyatakan tertular pes. Di Semarang, oleh dinas pemberantasan pes dibongkar untuk bisa memindahkan penduduknya dari rumah-rumah yang harus dibongkar karena ancaman pes. Ketika masa itu berlalu, rumah-rumah yang dirancang sebagai rumah petak diserahkan oleh negara kepada kotapraja.

Pada tahun 1926, 1927, 1928 tidak ada rumah yang dibangun. Hal ini karena kebutuhan rumah dirasakan telah mencukupi, dan Gemeente Semarang mengonsentrasikan pada orientasi pembangunan di bidang industri lain. Rumah-rumah kota sampai tahun 1923 dibagi dalam empat tipe permanen dan tujuh tipe semi-permanen. Tipe-tipe besar kebanyakan dihuni oleh orang-orang Eropa. Di Semarang bisa dipahami adanya kelompok semi-permanen yaitu bangunan dengan pilar kayu, atap yang ditutup dengan genting, tertutup, tembok fondasi batu dan lantai batu. Untuk bangunan sementara, mereka terdiri atas bangunan dengan tonggak kayu, dinding gedek, atap genting, tidak memiliki bagian bawah batu dan tidak ada lantai batu. Rancangan (kerangka atap yang disiapkan sebelumnya) tidak lagi muncul pada bangunan baru karena tidak cocok untuk atap genteng (Flieringa, 1930: 182).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Persewaan rumah-rumah di kampung gemeente berkisar antara f 3 sampai f 35 per bulan. Sampai dengan tahun 1930 perusahaan perumahan ini berjalan lancar, dan memberikan pemasukan anggaran kotapraja. Kerugian tidak terjadi; pada tahun-tahun terakhir ini ada sedikit keuntungan diperoleh. Pada tahun 1929 hanya 2,05% untuk pembongkaran yang disusutkan. Secara perlahan-lahan dilakukan konstruksi bangunan permanen. Modal yang ditanamkan dalam usaha perumahan pada akhir tahun 1929 berjumlah 1,4 juta. Eksploitasi saat itu mencakup 580 rumah tinggal, 18 buah toko, 6 buah warung. Pendapatannya pada tahun 1929 sebanyak f 152.968,95; sementara pengeluarannya sebanyak f 149.508,90 (Ruckert, 1931: 163–169).

Ternyata orang dapat melihat perkampungan gemeente yang letaknya lebih baik itu dihuni oleh orang-orang yang lebih kaya. Kampung-kampung yang rumahnya tak layak huni, perlahan-lahan rumahnya dibongkar. Proyek perkampungan gemeente ini terjadi setelah di mana-mana terdapat lahan perumahan yang memadai. Proyek kotapraja di bidang ini telah menyita banyak perhatian, ada kesulitan dana, namun ada berkah bagi penduduknya.

Jika ditinjau lebih lanjut, perumahan rakyat dalam arti sempit, maka persoalan ini dapat ditetapkan oleh dua faktor utama: jumlah keluarga dan jumlah rumah yang tersedia. Di Semarang pada tahun 1928 sensus yang cermat diadakan. Jumlah penduduk meningkat dari 170.079 (1927) menjadi 185.717 (1928), atau kenaikan penduduk 6638 atau 37 per mil. Tinjauan daftar yang ada menunjukkan kembali kenaikan itu, yang ditampilkan per kelompok penduduk. Jumlah rumah naik dari 34516 (1927) menjadi 34974 (1928). Rata-rata jumlah penduduk pada tahun 1927 rumah dengan nilai sewa dari f 10 sampai f 20 per rumah adalah 4,7 dan untuk rumah dengan nilai sewa f 20 ke atas mencapai 5,9 per rumah.

Kenaikan dan penurunan jumlah rumah selama tahun 1928 maka kelebihan penduduk bisa ditampung pada 2.369 rumah yang bernilai sewa di bawah f 20 dan penurunan 280 rumah dengan nilai sewa di atas f 20 atau seluruhnya kenaikan 2089 penduduk,

sementara kenaikan penduduk yang sebenarnya lebih tinggi, yakni 6.638 orang. Dengan demikian, perbandingan antara jumlah rumah dan jumlah penduduk kurang menguntungkan, juga terbukti dari angka-angka menunjukkan penurunan jumlah rumah kosong dari 1152 pada tahun 1927 menjadi 955 pada tahun 1928 dan kenaikan jumlah mereka yang tinggal bersama.

Prosentase kekosongan pada jam-jam longgar adalah paling kecil dari rumah dengan harga sewa di bawah f 20 berjumlah rata-rata 2,2; dari rumah di bawah f 5 prosentasenya 1,6 sementara dari rumah di atas f 20 prosentasenya mencapai 5,6. Diduga bahwa bagi setiap kategori 3% rumah kosong harus dicadangkan pada permintaan dan penawaran normal, cadangan yang ada terbukti tidak memadai. Prosentase rumah bersama dalam rumah sendiri dan rumah sewaan pada tahun 1927 berjumlah 30%, kini berjumlah 33%; untuk kelompok rumah di bawah dan di atas f 20 berjumlah 35 dan 21,7%. Dari perbandingan jumlah rumah sendiri dan rumah sewaan 34974 (termasuk rumah kosong) dengan jumlah pengguna rumah 167214 (tidak termasuk pelayan penghuni) terbukti bahwa pada setiap rumah rata-rata 4,8 orang ditetapkan (Flieringa, 1930: 163–169). Dalam masa krisis, NV Volkhuysvesting bekerja ekstra keras. Banyak penghuni berpindah ke rumah sewa yang lebih murah per bulannya. Tipe-tipe kecil banyak diminati, sementara kuli-kuli yang dulunya banyak menghuni di tipe-tipe kecil mulai pindah ke kampung-kampung biasa.

Pada awal kemerdekaan, setelah usainya perjuangan fisik, timbul gagasan dari politikus untuk memikirkan masalah perumahan rakyat dengan menyelenggarakan Kongres Perumahan Rakyat Sehat, 25–30 Agustus 1950, di Bandung. Saat itu, pemerintah menyadari bahwa dalam bidang pemenuhan kebutuhan rumah untuk rakyat sangat tertinggal untuk sebuah bangsa yang telah merdeka. Akan tetapi, mereka juga sadar bahwa masalah ini bukanlah suatu masalah yang sederhana. Menjadi agenda pembahasan dalam kongres yang menjadi tonggak sejarah perumahan rakyat di Republik Indonesia ini antara

lain: teknologi pembangunan rumah, syarat teknis pembangunan rumah, pendanaan, dan lembaga pengelola (Sardjono, 1986:3).

Setelah kemerdekaan, kompleks-kompleks perumahan yang dulu dikelola NV Volkhuysvesting beralih ke Dinas Djawatan Gedung-Gedung Kota (besar) Semarang. Sejak tahun 1956 rumah-rumah negara itu dihuni warga yang sekarang (beberapa) masih menempati. Sementara itu, tanah-tanah yang masih kosong di sekitar bekas kompleks perumahan gemeente juga dikuasai oleh pemerintah kota, dan diperuntukkan bagi perumahan pegawai di akhir tahun 1950-an.

D. MASALAH YANG TIMBUL DALAM PEMBANGUNAN KOMPLEKS PERUMAHAN

1. Tanah

Walau dimaksudkan untuk sebuah niat yang baik bukan berarti pembangunan perumahan rakyat tanpa menghadapi masalah. Tanah/lahan merupakan masalah yang pelik dalam setiap tahap awal pembangunan.

Di Sompok, dalam melaksanakan rencana yang telah ditetapkan banyak menghadapi kesulitan. Saluran pembuangan yang dirancang tidak bisa dilaksanakan, karena tanah yang digunakan masih milik penduduk yang tinggal di rencana pembuatan saluran itu. Mereka bersedia melepaskan hak kepemilikan tanahnya asalkan dengan ganti rugi yang besar. Pekerjaan pembuatan saluran ini jadi tertunda, menunggu penyelesaian gantirugi. Masalah tanah lainnya, dalam pembangunan jalan masuk Sompok yang dirasakan terlalu jauh. Pemerintah Gemeente Semarang merencanakan pembuatan jalan masuk dekat persimpangan Jomblang-Tegalwareng, yang lebih dekat. Pembicaraan diadakan dengan para pemilik tanah yang diperlukan bagi jalan sambungan ini. Perundingan itu tidak mengarah pada hasil yang memuaskan, karena adanya tuntutan pemilik tanah Nyonya Kasteleyn, yang juga meminta penjelasan

bagi manfaat umum. Tanah lain di Sompok diperlukan pemerintah, tapi penduduk pada umumnya tidak merasakan keadilan. Perlu disebutkan bahwa setelah selesainya sebagian petak tanah itu, 30-an rumah dari pihak kotapraja didirikan, masih perlu lahan lagi untuk pembangunan selanjutnya.¹⁶

Dalam laporan pemerintah tahun 1917 masalah tanah untuk kompleks perumahan Sompok masih menghadapi masalah, tetapi dalam laporan setahun penebusan hak milik dari penduduk atas beberapa lahan untuk kompleks perumahan Sompok mencatat keberhasilan. Atas dasar hal itu dalam keputusan dewan tanggal 25 Januari 1918 nomor 11R kepada pemerintah diminta agar dapat memberikan penjelasan tentang manfaat umum demi kepentingan pembebasan kompleks itu.

Sebuah komisi yang terdiri atas para pejabat pemerintah dibentuk, penyelidikan bagi hak milik tanah pada kompleks ini dibuat. Komisi ini menyosialisasikan kepada penduduk bahwa menurut peraturan tanah-tanah di sepanjang jalan raya harus dibeli seharga f 1 per m^2 dan di luar jalan itu f 0,50 per m^2 . Penebusan hak milik atas lahan di sekitarnya berlaku antara f 700 dan f 1000 per bahu, yakni f 0,10-0,15 per m^2 . Pada awalnya, walau telah diberikan penjelasan oleh komisi yang dibentuk pemerintah, penduduk tidak bersedia melepaskan hak tanahnya. Akan tetapi, tak lama berselang, mereka bersedia melepaskan tanahnya untuk pembangunan kompleks perumahan, dengan harga normal. Pembangunan kompleks perumahan dapat terus dilakukan.¹⁷ Untuk pengembangan selanjutnya, perundingan dengan para pemilik tanah terus dilakukan untuk mencapai kesepakatan.

Jika pada tahun 1918 hampir tidak berhasil memperoleh lebih banyak tanah di Sompok, pada tahun 1919 muncul laporan keberhasilan yang lebih. Petak tanah yang diperlukan untuk membuka kanal pengairan setelah dengan susah payah bisa dikuasai oleh

¹⁶ Lihat: *Verslag Gemeente Semarang 1917*.

¹⁷ Lihat: *Verslag Gemeente Semarang 1918*.

kotapraja. Hanya satu lahan yang masih tetap menjadi penghambat, peruntukkan bagi akses jalan Sompok menuju jalan raya di Tegalwareng. Setelah tanah-tanah tersedia, jalan Sompok menuju jalan Mrican dibangun.

Kesulitan membebaskan tanah di Sompok ini tidak semudah pembebasan tanah untuk pembangunan perumahan Candi Baru dan Mlaten. Dalam upaya pembebasan tanah untuk pembangunan perumahan Candi Baru dilakukan dengan cara tertutup, untuk menghindari makelar tanah. Sementara itu, di Mlaten, NV Volkhuysvesting membebaskan tanah dari tuan tanah. Transaksi pemerintah dengan rakyat pemilik tanah dilakukan dengan memberikan jumlah uang yang lebih sedikit sebagai uang muka (*panjer*). Dengan persetujuan Residen Semarang, Soenario, seorang anggota *gemeenteraad* pribumi melakukan tawar-menawar dengan penduduk desa pemilik tanah. Pembelian hak-hak adat dari keturunan perorangan yang menjadi hak milik desa tidak mengalami kesulitan dan menyita waktu, dibandingkan dengan pembelian tanah milik perorangan yang bukan bagian dari tanah milik desa. Hak kepemilikan tanah diperiksa saat transaksi dilakukan. Dewan kota menyetujui harga pembebasan tanah sebesar $\frac{1}{2}$ sen per meter persegi. Seperti yang diutarakan Dr. W. T. de Vogel dalam *Gedenkboek der Gemeente Semarang* (1931), dalam kenangannya tentang seorang anggota dewan kota yang bertugas membebaskan tanah di daerah perbukitan itu.

*Soenario yang sangat menyetujui ide pembangunan perumahan di Candi ingin secepatnya mengajukan rencana pembebasan tanah kepada dewan kota, dan diberikan persetujuan. Soenario yang bangsawan ini mengutarakan masalahnya pada HF. Tillema bahwa jika masalah pembangunan Candi jika diseberluaskan akan memunculkan spekulasi tanah. Ia mengkhawatirkan, spekulasi ini akan menghambat kerja dewan kota. .. Soenario mengemukakan cara transaksi yang efektif dengan warga, yakni dengan jumlah uang yang sedikit (*gooespening/panjer*). Dengan *panjer* ini, ia berbak atas tanah rakyat.*

Setelah mendapat ijin dari Residen Semarang, Soenario bernegosiasi dengan penduduk desa. Transaksi ia lakukan di daerah-daerah yang belum ada bangunan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

rumahnya. Dengan bantuan HF. Tillema, daerah perbukitan dengan rumah-rumah penduduk dapat diselamatkan dari spekulasi tanah.

Pada awalnya, dewan kota tidak sanggup menanggung keuangan pembebasan tanah di kampung Gajahmungkur itu, termasuk tentangan dari penduduk Tionghoa yang menjadikan tanah perbukitan ini menjadi kuburan nenek-moyangnya. Tetapi karena tanah di daerah ini sangat dibutuhkan, dewan kota sanggup mengganti dengan harga 0,5 sen per m². Pembelian hak-hak adat dari keturunan perorangan yang seluruhnya adalah milik desa ini tidak terlalu banyak memakan waktu.

Selain bekerja sama dengan penduduk pribumi, pemilik tanah, pemerintah daerah Semarang juga dapat bekerjasama dengan penduduk etnis Tionghoa, pemilik tanah di Candi (untuk makam). Pada tahun 1908 dan 1909 masalah kuburan Cina di daerah Candi menjadi perhatian yang intens dewan kotapraja, karena peraturan tahun 1906 menimbulkan kesulitan (tentang peruntukan daerah Candi sebagai makam). Akan tetapi, pembicaraan yang panjang berakhir dengan rapat tanggal 27 Agustus 1909, yang memutuskan. Hasilnya:

1. Kuburan Mrican akan ditutup;
2. Di desa-desa Gajahmungkur, Genuk, Tegalwareng dan Nogosari akan diserahkan kepada keluarga pemilik mayat kepada keturunan pria yang merupakan garis lurus dan istrinya di makam itu;
3. Sebuah ketentuan serupa akan dibuat bagi kuburan Cina lainnya yang ditutup asalkan lahan kuburan bisa dibuat seluas 5 meter dari makam sebelumnya, semuanya dengan syarat bahwa kepentingan kotapraja tidak akan dirugikan di sini.

Dengan demikian, persoalan tanah di Candi Baru telah selesai, dengan mengeluarkan biaya tanggungan untuk usaha bagi penebusan dan pemindahan kuburan Cina dana sekitar f 57.500 (Flieringa 1930:196). Jual beli tanah kota di Semarang dimulai sejak datangnya Pemerintahan Belanda di Semarang, 15 Januari 1678, yang mulai ikut campur tangan dalam masalah tata kota di Semarang. Daendels mengambil tindakan untuk memperbaiki proyek-proyek perkotaan.

Namun, pemerintahan Daendels memerlukan dana bagi semua rencana program dan merealisasikannya. Untuk itu, dia menjual tanah-tanah. Walau demikian, campurtangannya membawa Kota Semarang mulai berkembang, dengan konsekuensi penjualan tanah-tanah. Di sana banyak tanah menjadi milik orang Cina dan Timur Asing di kampung Melayu. Gubuk-gubuk orang Arab, Melayu, Bugis dan Jawa yang oleh pemerintah diserahkan hak miliknya dengan harga murah. Dari situ tanah-tanah partikelir muncul di tengah kota dan kampung, yang menjadi hak milik partikelir. Pada saat itu banyak tanah negara dijual, termasuk tempat kuburan orang Cina, yang penjualannya sangat menghambat perluasan Semarang. Di bawah pemerintahan Inggris, penjualan tanah-tanah diteruskan; pada tahun 1812 tanah Candi dijual. Pada tahun 1816 oleh bupati Semarang bukit Bergota dibeli, yang sekarang ini menjadi kuburan orang Jawa (Flieringa, 1930: 158–159).

Secara umum, tanah wilayah kota-kota di Hindia Belanda dibedakan sebagai berikut ini (Flieringa, 1930: 158–159).

1. Tanah bebas milik negara, yakni tanah pemerintah pusat yang tidak ada hak orang lain yang bertumpu kepadanya;
2. Tanah wakaf, yakni tanah yang didapat melalui pelimpahan. Wakaf berarti: dibebaskan dari perdagangan;
3. Tanah dengan hak bangun, yakni tanah yang dimiliki pemerintah yang hak bangunnya telah diberikan kepada orang lain;
4. Tanah dalam hak milik pemerintah kota. Biasanya, kotapraja memperoleh tanah ini berdasarkan pasal 51 ayat 2 IS dengan pembayaran dari pemerintah. Pemerintah memperoleh tanah ini dari pembukaan lahan, khususnya tanah partikelir atau dengan pelepasan oleh pemegang hak.
5. Tanah-tanah partikelir;
6. Tanah kepemilikan orang Eropa dan Timur Asing. Mungkin juga orang pribumi ketika mereka membeli tanah ini atau menerimanya dari orang lain.
7. Hak milik agrarian;

8. Kepemilikan komunal desa. Menurut pasal 1 Keputusan Agraria (domein verklaring). Menurut teori, tanah ini juga merupakan hak milik pemerintah; namun secara praktis desa dianggap sebagai pemegang kepemilikannya. Ketika dari tanah milik desa ini diperlukan untuk membuka jalan, misalnya untuk fasilitas mandi dan kakus serta tujuan lain demi kepentingan umum, maka desa akan melepaskannya secara gratis. Dengan catatan, pemerintah kota akan membayar prasarana yang digunakan untuk jalan dan yang lain.

Pemerintah kotapraja dapat membangun sesuatu di perkampungan. Hal ini didasari pada pasal 1 Keputusan Agraria, bahwa tanah yang tidak dimiliki oleh orang Eropa, Timur Asing atau orang lain menurut hukum Barat menjadi tanah pemerintah atau hak milik negara. Jadi, di kota terdapat tanah pemerintah atau tanah negara, dan orang pribumi dapat bertahan di atas hak miliknya secara turun-temurun. Akan tetapi, orang pribumi dapat memiliki tanah, sedangkan pemerintah memegang hak kepemilikan tertinggi. Ketika kampung (gemeente) muncul, dengan memperhatikan ikatan kampung pada umumnya, muncul pertanyaan: dalam kampung seperti ini, hubungan sosialnya akan dibangun bersifat komunal atau individu. Menurut pasal 1 Keputusan Agraria menyatakan bahwa pemerintah berhak atas tanah itu, dan pengelolaannya dimiliki negara.

Kampung gemeente/kompleks perumahan adalah kampung yang hak milik tanahnya dimiliki pemerintah kota. Pemerintah gemeente dapat membangun kampung sehubungan dengan okupasi tanah. Yang selanjutnya, tanah disewakan kepada orang pribumi, yang digunakan untuk membangun rumah; atau pemerintah gemeente akan membangun tanah dengan kompleks perumahan dan menyewakannya kepada orang pribumi.

2. Dana

Dengan diberikannya otonomi untuk mengatur daerahnya, pemerintah daerah Kota Semarang tidak langsung dilepas secara finansial oleh pemerintah pusat. Bahkan mereka diberikan modal untuk mengatur kotanya. Namun, modal yang diberikan ini tidaklah mencukupi pembiayaan belanja rutin dan pembangunan sehingga dewan kota harus mencari kekurangan pembiayaan anggaran. Tahap pertama modal didapatkan dengan menjual aset pemerintah. Tanah di sekitar Bojong dijual kepada pihak swasta. Hasil penjualan tanah ini masih belum mencukupi. Pembiayaan selanjutnya pemerintah lokal mengutang kepada pemerintah pusat. Salah satu peruntukan dari utang yakni untuk membeli tanah di Sompok, yang didapatkan dari peminjaman pada anggaran belanja tahun 1911. Berkat usaha keras pemerintah dan lakunya rumah di kompleks perumahan, utang tersebut lunas pada tahun 1922.

Pada awalnya, dewan kota menolak memberikan dana pembangunan untuk perumahan, karena sebagai kota otonom baru modal pembangunan yang dimiliki tidaklah terlalu besar. Tahun 1906 modal yang diberikan pemerintah pusat sebesar f 196.000. Pembangunan kompleks perumahan-perumahan di Semarang merupakan bentuk keseriusan dewan kota dalam menata kotanya. Anggota dewan kota Dr. T. De Vogel merupakan salah satu manusia yang serius memikirkan pembangunan kompleks perumahan. Tanggal 29 Januari 1909, dalam sebuah pidatonya dalam rapat dewan kota untuk menyikapi ketidakadaan dana awal untuk pembangunan perumahan Candi ia menyarankan penjualan aset kota untuk modal pembangunan, tanah di dalam kota. Permasalahan dana awal ini telah berlangsung dua setengah tahun (Kakebeeke, 1931:44). Usulannya yang disetujui anggota dewan kota lainnya itu dilakukan karena belum disetujuinya usulan utang kepada pemerintah pusat maupun belum dibolehkannya pemerintah Gemeente Semarang memungut pajak.

Usulan utang kepada pemerintah pusat dan pemungutan pajak tambahan ditanggapi pemerintah pusat dengan dikeluarkannya surat

tertanggal 12 Januari 1911. Isinya: Komisaris Pemerintah untuk urusan Desentralisasi menyatakan bahwa Gemeente Semarang diperkenankan berutang sebanyak f 2.000.000,- guna pembangunan tahap selanjutnya di Semarang. Akan tetapi, usulan pungutan pajak tambahan tidak diperkenankan. (Kakebeeke, 1931:53).

Di Sompok dan Mlaten, negara telah melakukan intervensi di bidang pemukiman: dibangun kompleks perumahan di perkampungan penduduk. Tidak dapat dipungkiri kompleks perumahan telah mengambil peran penting dalam perkembangan sebuah kota. Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya, kompleks perumahan di kota modern menjelaskan andil fisik terbesar dari lingkungan buatan dan menempati sebagian besar ruang kota. Di masa akhir kolonial ini pemerintah tidak lagi memandang rumah sebagai upaya yang dibangun swadaya oleh warganya. Melalui program yang terarah dan kebijakan-kebijakan yang mendukungnya, serta didukung birokrat & teknokrat yang handal permasalahan rumah untuk rakyat kecil mendapat perhatian khusus. Akan tetapi, program ini segera berhenti dengan tidak stabilnya politik dan keamanan negara.

Negara baru yang menggantikan pemerintah kolonial dalam masa awal hegemoninya lebih memperhatikan urusan politik dan keamanan, dan perhatian terhadap program rumah untuk rakyat sedikit terabaikan. Bahkan pengembangan pembangunan perumahan rakyat secara berencana dan berkesinambungan baru dapat dilaksanakan pada pelita I (1969–1974), setelah stabilitasnya politik dan ekonomi. Saat ini, kota tak dapat dilepaskan dari perkembangan kompleks perumahan. Namun, pertumbuhan pesat perumahan bersifat sporadis dan sedikit perhatian terhadap kepentingan rakyat kecil.

Kawasan Mlaten merupakan penyempurnaan program Pemerintah Gemeente Semarang dalam usaha pembangunan rumah untuk rakyat di Semarang. Untuk membandingkan antara Kompleks Sompok dengan Mlaten kita dapat mengumpamakan melihat dua lukisan yang hampir sama, yang dibuat oleh orang yang sama (Thomas Karsten, sang arsitek). Secara proses pembangunan

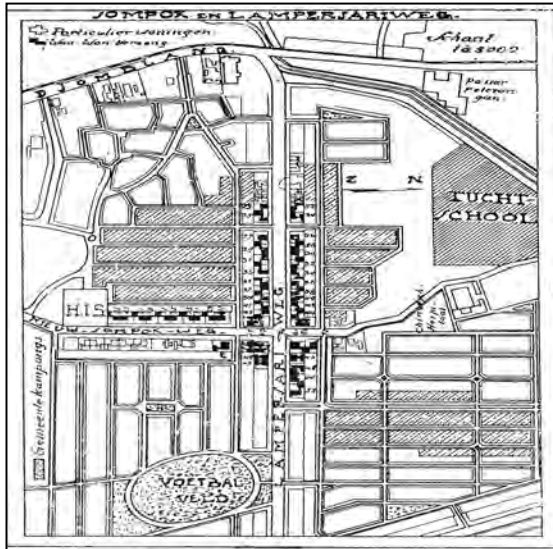
Buku ini tidak diperjualbelikan.

(penciptaan) kedua kompleks ini telah dijelaskan pada halaman-halaman awal bab ini.

Persoalan kebentukan kedua kompleks perumbahan ini dapat dilihat dengan berpatokan pada pembagian ruang, penentuan *center of interest*, keseimbangan, kesatuan dan konfigurasi. Secara prinsip, kebentukan kedua kompleks ini tidak ada perbedaan yang menyolok. Pembagian ruang atau pengkelasan tidak lagi didasari pada ras, tetapi didasari pada kelas ekonomi. Di Sompok dan Mlaten, Karsten memberikan kesempatan kepada semua kalangan untuk mengakses rumah sehat, baik masyarakat kelas ekonomis bawah, menengah dan atas. Rumah yang dihuni (disewa) bergantung pada kemampuan sewa si penghuni. Rumah untuk orang kaya dibangun di pinggir jalan, tetapi di Sompok karena di awal pembangunan menghadapi masalah pembebasan tanah rumah-rumahnya memiliki bentuk lebih beragam. Sementara itu, di Mlaten rumah untuk orang kaya mempunyai bentuk yang sama.

Mlaten sebagai penyempurna program tentunya memiliki keunggulan di beberapa hal, di antaranya: pembangunan lebih terstruktur, administrasi lebih rapi, dan kekuatan bangunan lebih tahan lama. Hal ini dapat terlihat dari sisa-sisa rumah yang ada sekarang, bahwa rumah yang dibangun pada permulaan pertama abad ke-20 ini masih kokoh berdiri.

Cukup lama rumah sehat yang diusahakan Pemerintah Gemeente Semarang hadir dalam pemukiman kota yang merangkak modern ini. Benturan semangat etis dengan kolonial konvensional yang terus berkembang dapat dijadikan satu faktor yang menyebabkan rumah sehat tak segera ditempati oleh masyarakat yang membutuhkannya. Hadirnya rumah sehat di kompleks perumahan seolah menemukan tempat hidup yang lebih manusiawi. Jalan-jalan utama kompleks perumahan dibangun dengan aspal, yang di pinggirnya ditanami pepohonan yang rindang. Penerangan menggunakan tenaga listrik, dan air sehat dengan menggunakan air ledeng.



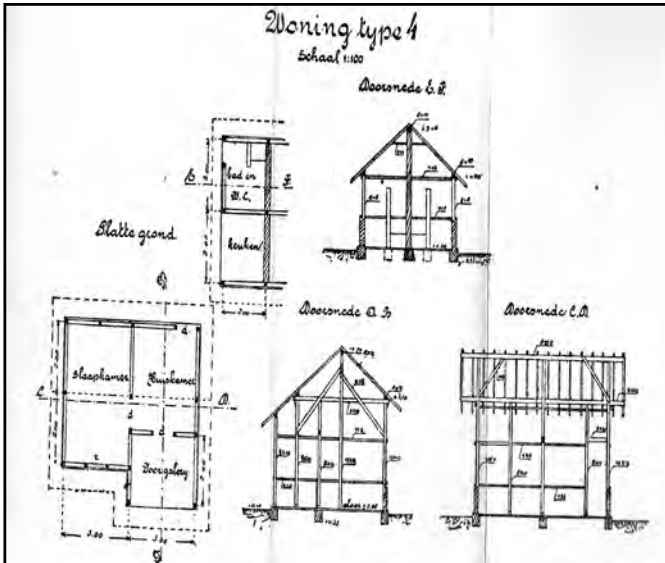
Sumber: Sejarah sosial Semarang (Tim Penyusun 1984)

Gambar 11. Peta rencana perluasan kompleks perumahan Sompok tahun 1922



Sumber: Verslag Gemeente Semarang Tahun 1918

Gambar 12. Salah satu rumah di kampung gemeente Sompok



Sumber: Verslag Gemeente Semarang Tahun 1919

Gambar 13. Bagan rumah tipe 4



Sumber: Locale Techniek Januari 1932

Gambar 14. Maket pembangunan kompleks perumahan Mlaten

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sumber: *Locale Techniek Januari 1932*

Gambar 15. Proses pengurugan tanah di Mlaten dan kondisi rumah penduduk pribumi



Sumber: *Locale Techniek Januari 1932*

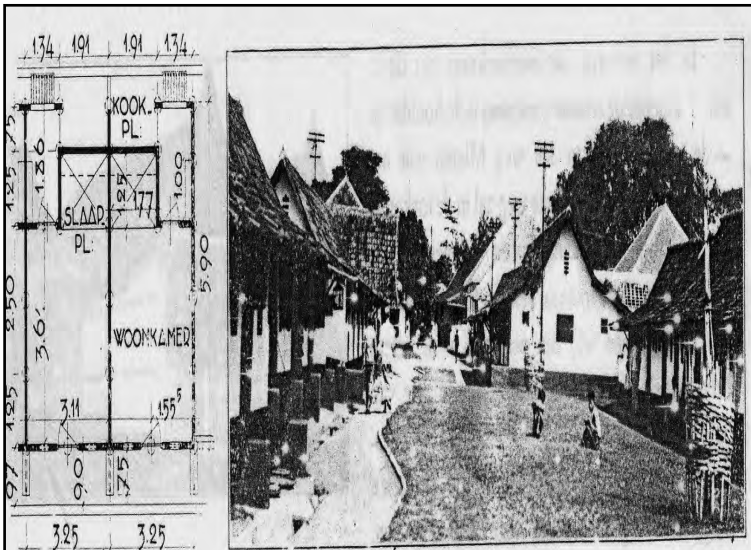
Gambar 16. Proses pendirian rumah di kompleks perumahan Mlaten

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sumber: *Locale Techniek Januari 1932*

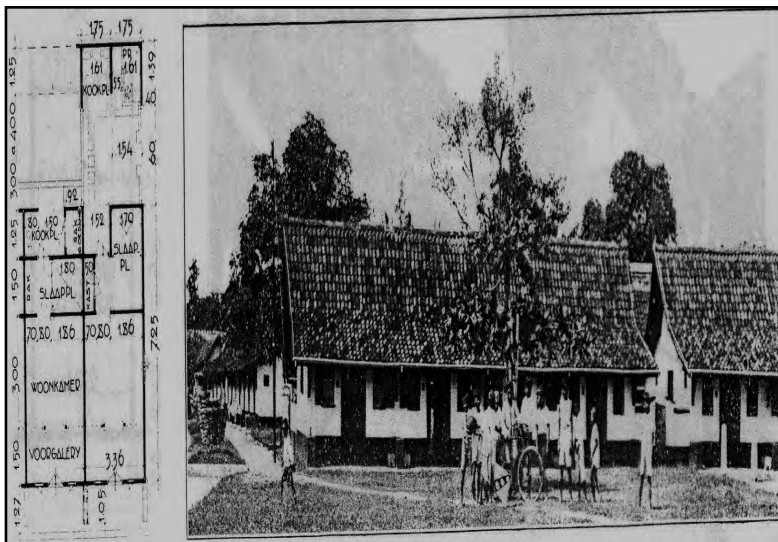
Gambar 17. Rumah tipe OO & O di Mlaten, & denah rancang bangunnya



Sumber: *Locale Techniek Januari 1932*

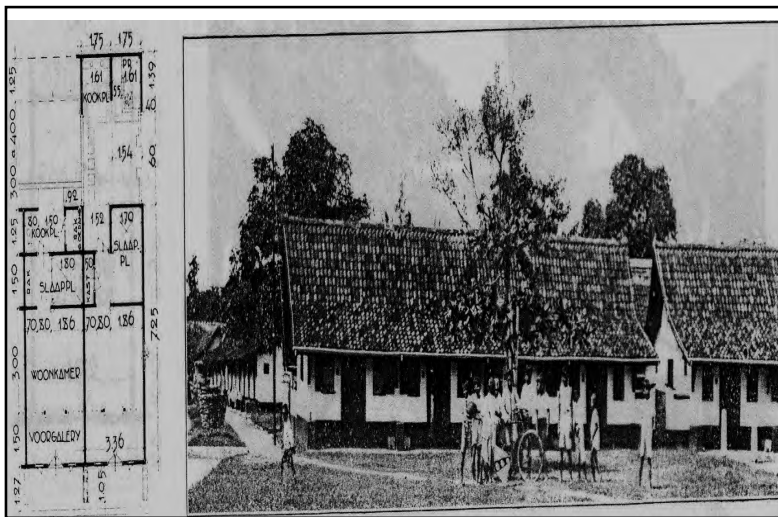
Gambar 18. Rumah tipe O (toko-toko di tengahnya) & denah rancang bangunnya

Buku ini tidak diperjualbelikan.



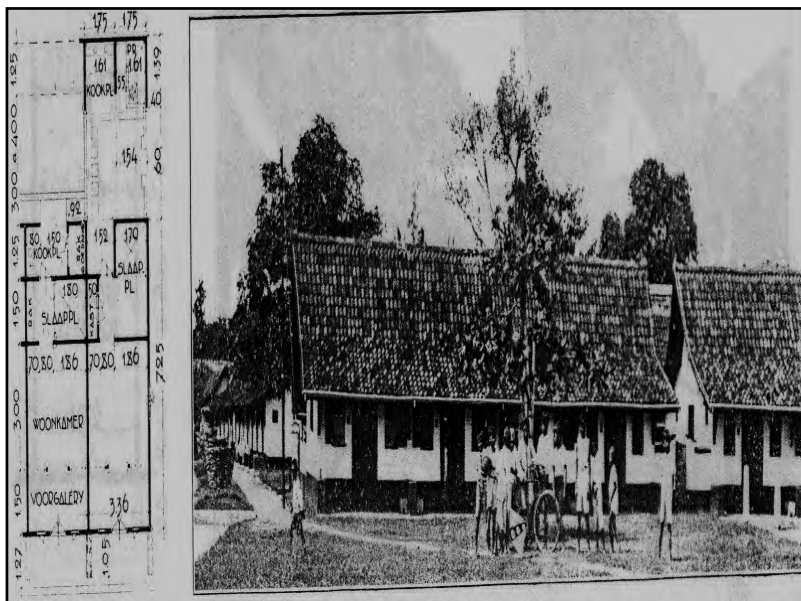
Sumber: *Locale Techniek Januari 1932*

Gambar 19. Rumah tipe I di kompleks perumahan Mlaten & denah rancang bangunnya



Sumber: *Locale Techniek Januari 1932*

Gambar 20. Rumah tipe III di kompleks perumahan Mlaten & denah rancang bangunnya



Sumber: *Locale Techniek Januari 1932*

Gambar 21. Rumah tipe IV di kompleks perumahan Mlaten & denah rancang bangunnya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DARA YANG PERGI:

Dari Kampung-Kampung Semarang Tahun 1930-1960

Di dalam sekoci menuju “Pulau Bras” itulah,
untuk pertama kalinya semenjak kami berangkat dari Bandung,
Joop dan saya berkesempatan untuk membicarakan
keadaan dengan tenang.. Di samping saya duduk seorang wanita,
dengan bayinya yang berumur delapan hari.
Tiba-tiba wanita itu berkata tanpa sebab,
"Jika masih bisa, saya ingin kembali"
(Bijkerk, 1988:258).

A. MASA AKHIR KOLONIAL (1930–1942)

Pada tahun 1930, sebagai awal dekade berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda. Kejadian di Semarang hampir tidak jauh berbeda dengan masa akhir di kota-kota kolonial lainnya. Pembangunan perumahan dan infrastruktur kota lainnya berjalan tidak semarak seperti di tahun-tahun sebelumnya.¹ Kebanyakan masyarakat perkotaan di Jawa menganggap, masa depresi adalah saat yang sulit, namun bukan malapetaka. Pemotongan gaji, keadaan ekonomi memburuk, kenaikan pangkat yang lambat dan pengurangan kesempatan kerja, diiringi dengan penurunan biaya hidup. Banyak yang kehilangan pekerjaan dan terpaksa menerima pekerjaan dengan gaji kecil, atau menambah penghasilan. Beberapa diantara mereka yang putus asa kembali ke desa, yang biaya hidupnya ditanggulangi bersama keluarga besarnya (Ingelson 2004:105). Masa depresi ini sangat cepat memengaruhi masyarakat terdidik di kota.

Dengan jatuhnya pasar hasil bumi ekspor, perusahaan mengurai pekerja di pabrik-pabrik pengolahan hasil bumi, di kereta api,

¹ Tentang hal ini dapat dibaca: *Verslag Gemeente 1931–1939*.

di pelabuhan, dan industri-industri yang bergantung pada hasil bumi. Para pengusaha juga mengurangi buruh trampil bergaji tinggi dengan buruh baru bergaji rendah, seperti di Surabaya (Ingelson 2004: 106). Perusahaan pemerintah merespons kondisi ini dengan membatasi buruh trampil lulusan sekolah Barat. Demi menghemat anggaran, pegadaian memecat pekerja sebanyak mungkin dengan alasan tidak pas untuk pekerjaan tersebut, dan bukan alasan kelebihan pekerja. Pegadaian hanya membayar *wachtgeld*, setengah gaji. Kondisi ini disikapi masyarakat terdidik dengan mencari pekerjaan alternatif dalam sektor formal maupun sektor non-formal. Banyak orang Indonesia terlatih dan terdidik yang terpaksa mencari pekerjaan dengan status dan gaji lebih rendah, yang lainnya beralih ke pekerjaan-pekerjaan keterampilan sebelumnya yang dibutuhkan oleh orang Tionghoa, Indo, atau orang Eropa. Proses ini berlangsung dalam beberapa dasawarsa, diperparah dengan Perang Dunia I. Banyak orang Eropa digantikan oleh orang Indonesia, terutama dalam industri jasa (perbankan, juru tulis, administrasi). Akibatnya, orang Eropa banyak yang menganggur, sedangkan orang Tionghoa berusaha di bengkel-bengkel atau pabrik (Ingelson 2004:112–113).

Namun, pertambahan penduduk Kota Semarang terus berjalan.² Hal ini menjadikan tingkat kebutuhan rumah pemukiman meningkat. Menyikapi kondisi ini Gemeente Semarang memberikan keleluasaan kepada warganya untuk membangun mencukupi kebutuhan rumahnya. *Gemeentelijke Grondbedrijf* bertugas mengatur pendirian rumah-rumah baru, yang mencakup luas bangunan dan mengontrol harga tanah. Selain itu, badan milik pemerintah kotapraja ini juga bertugas memelihara berdirinya rumah yang disewakan dengan harga rendah.

Bangunan rumah untuk orang Eropa dirasa cukup persediaannya. Jika akan membangun rumah baru maka bentuk bangunannya harus berdasar pada nilai kegunaan, karena selain persediaan lahan sudah mulai berkurang, hal ini juga akan menghemat biaya

² Jika jumlah penduduk dijadikan ukuran, terlihat bahwa pada tahun 1930 terdapat 175.457 jiwa dan sembilan tahun kemudian menjadi 221.000 jiwa (tabel 1).



Sumber: *Semarang beeld van een stad* (1995).

Gambar 22. Landscape modern kompleks perumahan Sompok dan Mlaten (Tahun 1930 Skala 1: 10000)

pembuatan. Sementara itu, permintaan rumah sewa dengan harga murah semakin banyak diminati masyarakat. Bahkan, orang Eropa kaya juga meminati rumah dengan sewa murah. Hal ini terjadi karena imbas depresi ekonomi yang memakan korban tanpa pandang suku, agama, jenis kelamin, maupun kaya-miskin. Pendirian rumah-rumah penduduk kampung dengan bahan bambu, perizinannya semakin diperketat. Tujuannya untuk menghindari kebakaran di perkampungan yang semakin padat, dan juga untuk menjaga kesehatan lingkungan.

Walau pemerintah telah membangunkan rumah-rumah sewa di kompleks-kompleks perumahan, dan warga diberi keleluasaan membangun rumah sendiri, tetapi kebutuhan rumah oleh penduduk

di kota masih kurang. Untuk menanggulangi ini pemerintah telah melakukan beberapa upaya (Poldervaart, 1932), di antaranya:

1. Pemberian premi untuk pendirian rumah;
2. Pemberian utang untuk pendirian rumah;
3. Pemberian tanah siap bangun;
4. Pemberian peralatan pendirian rumah;
5. Mengontrol harga tanah.

Pada tahun 1935, pemerintah lokal menyadari kekurangan rumah di kota-kota besar di Hindia Belanda akan menimbulkan masalah yang serius. Sementara itu, kerjasama yang diharapkan dari pihak swasta untuk pengadaan rumah untuk rakyat semakin berkurang. Untuk itu, kerjakeras dari aparat pemerintah sangat diharapkan. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah menjual tanah pekarangan dengan harga murah di kawasan kompleks-kompleks perumahan. Selama ini, tanah pekarangan di kampung gemeente itu merupakan komoditi yang harus mendapatkan keuntungan. Melihat dampak resesi ekonomi yang semakin menyengsarakan rakyat, maka harga tanah tersebut harus diturunkan agar orang kampung mampu membeli. Selain itu, harga jual tanah pekarangan ini harus dibebaskan dari pajak (*baatbelasting*) untuk pembangunan kampung gemeente. Tanah pekarangan itu diperuntukan bagi warga kota baru yang datang dari desa, penduduk kota yang ada di perkampungan yang padat, dan penduduk kota yang tak punya rumah (Abikoesno, 1935).

Permasalahan kampung di kota terus menjadi pembahasan Gemeente Semarang. Dalam kongres desentralisasi dibahas permasalahan teknis dan sosialnya, yang diajukan oleh *Vereeniging voor Locale Belangen*, kemudian oleh *Sociaal Technische Vereeniging*, dan terakhir diurus oleh *sociaal technische sektie*. Hal ini terus dibahas karena secara teknis pembangunannya dianggap belum beres, walau telah ada NV. Volkhuysvesting.³ Dampak depresi terhadap masyarakat perkotaan terus dipantau oleh pemerintah kolonial, yang merasa

³ Lebih jauh lihat: *Locale Technik Juli 1935*.

cemas bahwa kondisi perekonomian yang memburuk dapat menciptakan lahan yang subur bagi propaganda nasionalis. Ternyata hal tersebut tidak terjadi, yang kemudian mengejutkan banyak pejabat pemerintah, juga kaum nasionalis. Kajian yang dilakukan di Surabaya di awal tahun 1933 melaporkan bahwa angka kriminalitas tidak meningkat selama lebih dari lima tahun terakhir, tidak munculnya penyakit yang membawa kematian yang meningkat, dan jumlah orang yang menawarkan diri menjadi buruh domestik tidak lebih tinggi dari biasanya. Tidak ada kebutuhan mendesak di Kota Surabaya akibat depresi. Hasil kajian itu dikritik oleh kaum pers bahwa bukan berarti tidak ada kelaparan, kematian, atau penderitaan maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan (Ingelson, 2004:157–158).

Sementara itu, dalam kancah politik nasional dan internasional telah terjadi perubahan. Dengan semakin dewasanya aktivitas aktivis nasionalis, krisis ekonomi dunia, dan situasi politik dunia yang sedang berkecamuk menjadikan pemerintahan pusat merasa "cemas". Hal ini berpengaruh pada orientasi pembangunan yang dijalankan. Pemerintah melakukan tindakan-tindakan represif terhadap aktivitas warganya. Di Semarang pembangunan berskala besar mulai berkurang. Dalam catatan-catatan beberapa buku tentang Semarang, periode akhir masa kolonial ini boleh dikatakan nyaris tak terdengar. Sepertinya sejarah modern Semarang di bawah kolonial hanya ada di awal-sampai tiga dekade abad ke-20, setelah itu tiba-tiba digantikan dengan pendudukan Jepang, dan diteruskan ke Jaman Orde Lama. Secara garis besar, masa akhir kolonial adalah masa yang penuh kecemasan, baik yang dialami pemerintah maupun rakyatnya.

Kewenangan yang absolut yang dimiliki pemerintah, dan terbatasnya ruang gerak aktivitas pergerakan nasional merupakan ciri masa akhir kekuasaan kolonial Belanda. Para aktivis tidak dapat bertemu dengan konstituennya di desa (petani dan buruh). Mereka hanya dapat kesempatan mengorganiser diri secara terbatas dengan buruh-buruh di perkotaan, dan kelas menengahnya. Kondisi ini memengaruhi ketidakmatangan orientasi nasional masa di perdeasaan. Masa menjadi 'gelisah', dan menerjemahkan arah nasionalisme

secara mandiri. Kecemasan ini bertambah dengan buruknya basis ekonomi mereka. Dominasi peran negara tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana untuk pembangunan, tetapi juga berperan sentral dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan. Di samping tetap berfungsi sebagai pelindung terhadap usaha-usaha kapitalisme swasta di bidang perkebunan dan bidang lainnya. Sampai abad ke-20 perkembangan kapitalisme di Hindia Belanda berkembang pesat di sektor perkebunan. Kapitalisme di sektor ini sukses berkat mudahnya mendapatkan modal tanah dan buruh murah, selain jalinan kerjasama yang rapi dengan aparat negara. Aliansi antarkapitalis perkebunan dengan negara menimbulkan ciri-ciri yang khas terhadap peranan negara dalam proses pembangunan, sangat otoriter dan sentralistik. Sikap otoriter dan sentralistik ini berkaitan pula dengan sikap ekonomi nasional yang dikembangkan para kapitalis perkebunan. Karena produknya berorientasi ekspor, terjadi ketergantungan dengan pasar internasional. Hal ini menyebabkan harga komoditi perkebunan fluktuatif, yang berakibat pada labilnya ekonomi nasional (Soetrisno, 1988:16-17). Tak salah ketika terjadi malaise ekonomi dunia Hindia Belanda ikut merasakannya.

Menjelang tahun 1930, berdasarkan statistik tahun 1926–1932, menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi bangsa Indonesia mulai menurun. Antara tahun-tahun tersebut penghasilan rata-rata per orang di Jawa dan Madura terus menurun dari 47,6 gulden menjadi 20,3 gulden; dan di luar Jawa, dari 52,5 menjadi 18,8 gulden (Kahin, 1995:33). Jaman ‘meleset’ (malaise) yang menimpa dunia sejak tahun 1930 berimbas di Hindia Belanda. Secara umum ekonomi Hindia Belanda tahun 1930–1940 digambarkan sebagai berikut:

Jelas sekali betapa tiada berdayanya Hindia Belanda di bidang ekonomi, sebagai jajahan Kerajaan Belanda. Ia berfungsi terutama sebagai negeri yang mengeksport komoditi pertanian. Tidak ada industri dalam negeri yang pantas disebut, bahkan untuk barang-barang keperluan sehari-hari, seperti tekstil, kertas, ban sepeda, piring, cangkir, dan sebagainya didapatkan dengan mengimpor. Karena berhentinya perdagangan ekspor,

maka impor barang-barang yang dibutuhkan juga terhenti (Djojohadikoesoemo, 1990: 46).

Kecemasan pemerintah Hindia Belanda ini terwujud dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Pada tahun 1931, pribumi dipersilahkan masuk menjadi anggota *volkstraad*. Dari sinilah mulai didengarnya suara-suara pribumi dalam pengambilan keputusan besar. Di tingkat masyarakat bawah, ini berarti mereka mempunyai harapan terhadap nasibnya. Namun, dalam sebuah sidang *volkstraad*, menurut Soetardjo, terjadi pemelintiran peristiwa (pemberontakan) di kapal *De Zeven Provinciën*.⁴ Berawal peristiwa inilah, dengan *Gouvernementsbesluit* 27 Juni 1933 semua pegawai negeri dilarang menjadi anggota PNI dan Partindo (partai berhaluan ekstrem). Dua bulan kemudian, Soekarno ditangkap dan dibuang. Hal ini terjadi dengan didahului penolakan interplasi Moh. Husni Thamrin, *College van Gedelegeerden*. Interplasinya dianggap pemerintah membela partai-partai golongan ekstrem. Hubungan tidak harmonis antar-pemerintah dan tokoh-tokoh pergerakan ini menjadi semakin regang dengan dikeluarkannya Petisi Soetardjo. Pemerintah menjadi kalap, aktivis pergerakan nasional berhaluan lunakpun dikejar-kejar. Kebijakan-kebijakan yang muncul dari rasa kecemasan inilah yang kemudian menimbulkan rasa tidak suka rakyat terhadap pemerintah (Persada Senior, 1990: 145).

Hanya sedikit orang Belanda yang mendukung pejuang nasionalisme ke arah kemerdekaan. Sekelompok kecil orang yang sadar bahwa api nasionalisme telah membara. Kebanyakan mereka menganggap bahwa Hindia Belanda merupakan koloni yang terbaik di dunia. Tak ayal mereka menganggap sedikit perhatian kepada

⁴ Menurut Soetardjo peristiwa itu adalah menyangkut permasalahan perburuhan. Para buruh mogok karena akan ada pemotongan upah. Peristiwa itu dikenal dengan *müterji* (pemberontakan) para awak kapal perang pribumi. Padahal, pemimpin peristiwa itu adalah P. H. van den Eeckhout, seorang warga Belanda. Ia kemudian dihukum dan mendapatkan amnesti tahun 1937. Lihat: J. C. Bijkerk, *Selamat berpisah: Sampai berjumpa di saat yang lebih baik (Dokumen runtuhnya Hindia Belanda)*, (Jakarta: Djambatan, 1988), hlm. 48.

pribumi adalah sesuatu yang benar dan wajar. Mereka mempunyai simpati, bahkan mencintai kepada orang-orang pribumi, tetapi wujudnya bukan pemberian kebebasan, seperti yang digagas para pergerakan nasional di *Volkstraad*. Walaupun voting yang digelar dalam sidang Volkstraad mendukung Petisi Soetarjo (26 banding 20 suara). Di lingkungan masyarakat Belanda perjuangan ke arah kemerdekaan biasanya disikapi dengan ungkapan, "*Mereka belum matang dan belum siap untuk itu!*"

Resesi dunia membuat prihatin semua kalangan, karena telah menjadikan menurunnya taraf hidup pribumi. Oleh kebanyakan orang Belanda saat itu, dengan melihat angka statistik, masih merasa bangga dengan pemberian anggaran di bidang pendidikan. Pada tahun 1931, anggaran di sektor pendidikan di Hindia Belanda sebesar f 55.000.000,- yang merupakan anggaran terbesar dari sektor pembangunan lainnya. Dengan perhitungan, se-anak pribumi diberi subsidi sebesar f 5 setahun, dan se-anak Eropa subsidinya sebesar f 95 setahun. Tahun 1938 terdapat 21.000 sekolah umum dan 40% anak (6–9 tahun) pribumi bersekolah. Padahal, 95%-nya anak pribumi masih buta huruf. Hal ini membuat keprihatinan kalangan cendekiawan, baik dari pribumi maupun Indo, membuat sekolah liar (sekolah tanpa subsidi negara) (Bijkerk, 1988:77–79).

Akhir kekuasaan Hindia Belanda dipandang masyarakat pribumi sebagai masa represif dan otoriter. Hal ini seolah menghapus upaya-upaya balas budi pemerintah yang telah dilakukan sejak awal abad ke-20. Upaya-upaya mempercantik kota, dengan membangun kompleks perumahan salah satunya, seolah menjadi tak berbekas. Gemeente Semarang yang bersimbolkan seorang dara yang telah berbuat banyak membangun kota harus berpisah untuk selamanya dari bumi lahirnya.

B. MASA PENDUDUKAN JEPANG (1942–1945)

Perang Asia Pasifik menyebabkan perubahan di negeri Hindia Belanda, yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan ke tangan pendudukan

Jepang. Politik perang Jepang mempunyai dua tujuan. *Pertama*, eksternal, Jepang menekankan "pembebasan rakyat Asia", guna memperoleh legitimasi operasi-operasinya di negeri asing, dan dukungan dari kaum nasionalis. *Kedua*, internal, kampanye 'pembebasan Asia' untuk meyakinkan rakyatnya dalam memperpanjang perang dengan Cina. 'Kemakmuran Asia Timur Raya' berkembang menjadi alat untuk merangsang rakyatnya agar berjuang dan memikul berat beban perang (Nakamura, 1988:3).

Pada 1 Maret 1942 pasukan Jepang menyerbu Jawa. Tentara Belanda memberikan perlawanan yang tidak sepenuhnya sehingga kalah dalam waktu seminggu, tanggal 8 Maret. Bendera Jepang berkibar di mana-mana sebagai tanda babakan baru penjajahan di



Sumber: Djawa Baroe 1, 1 Januari 1945; *Women Creating Indonesia* (Lucas 1997:86).

Keterangan: Gadis berwajah Indo berpakaian Jawa di bawah angka penanggalan Jepang.

Gambar 23. Sebuah iklan bedak kecantikan di zaman Jepang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Indonesia. Bulan-bulan pertama mereka disambut suka-cita oleh masyarakat pribumi di kampung. “*Asem tenan, wektu iku aku karo bocah-bocah liyane, lungu nang Manggistan karo ngibar-ngibarke gendero puteh,*” kesal Tohir (75 th). (Sial, waktu itu saya dan anak-anak yang lain pergi ke Manggistan sambil mengibarkan bendera putih). Secara umum, kedatangan Jepang diterima rakyat dengan penuh semangat pada awalnya. Rakyat pribumi percaya bahwa Jepang datang untuk memerdekakan. Rakyat diperbolehkan mengibarkan bendera merah putih, serta melantunkan lagu Indonesia Raya. Kaum terpelajar sangat menerima kedatangan tentara Jepang, karena mereka memiliki status yang lebih meningkat (Kahin, 1995: 130).

Di awal pendudukan, Jepang bersikap lunak karena mempunyai tujuan menduduki Jawa sebagai "kelahiran kembali Jepang" di selatan, negeri leluhurnya. Jepang menganggap, keterbelakangan yang terjadi di Hindia Belanda karena politik pembodohan yang dilakukan pemerintah kolonial. Untuk itu, Jepang akan membangkitkan potensi masyarakat yang terbelakang ini: Jepang menciptakan suasana pendudukan sebagai sebuah reuni keluarga yang telah lama berpisah. Terciptalah suasana reuni keluarga. Contohnya, Letnan Jenderal Imamura sebagai panglima tentara ke-16 menolak kebijakan pendudukan yang keras seperti yang diusulkan Singapura dan Tokyo. Imamura meminta maaf kepada Soekarno yang dipukul oleh seorang tentara Jepang, begitu juga tentara yang memukul Soekarno (Nakamura, 1988:13–19).

Kebijakan yang ditetapkan pemerintahan militer Jepang bergantung pada situasi di medan perang. Dalam bulan Juni 1942, markas besar umum kerajaan (*daihonei*) memutuskan untuk bertahan di daerah pendudukan baru di selatan (luar Jawa), sebagai persiapan operasi militer. Kebijakan ini berakibat jumlah pasukan di Jawa dikurangi secara drastis dari 50.000 menjadi 15.000, hanya 8.500 pasukan tempurnya. Selain itu, di Singapura akan didirikan markas umum pemerintahan militer sebagai perencana dan pelaksana kebijakan-kebijakan regional yang terkoordinir (ekonomi, militer, administrasi penduduk, sistem transportasi, dan sistem komunikasi).

Kebijakan di Jawa harus seragam dengan markas umum pemerintahan militer di Singapura. Penurunan jumlah pasukan di Jawa mempunyai akibat langsung pada tindakan keamanan wilayah, terhadap serangan sipil Sekutu (orang Belanda) yang dianggap berbahaya. Warga sipil dicurigai sebagai sumber keresahan yang potensial, karena kehadirannya dianggap mengganggu ketentraman penduduk pribumi. Demi menjaga ketertiban umum, mereka yang dulunya menempati kelas tertinggi dalam sosial kemasyarakatan dipisahkan dengan kelas terendah. Tujuan ekonomi pemisahan mereka agar orang-orang sipil Sekutu dapat berswasembada, dan jangan menjadi beban keuangan bagi pemerintahan militer. Mereka dipaksa memproduksi makanan sendiri. Mereka juga dibatasi secara politis, dengan cara pengawasan militer secara langsung dan rutin. Untuk mencapai tujuan itu, dengan jumlah pasukan yang minim, satu-satunya jalan yang dianggap efektif adalah mengkonsentrasikan mereka dalam lingkungan pemukiman terbatas. Idealnya, di penampungan dekat dengan perdesaan yang masih terdapat lahan pertanian. Akan tetapi, pada realisasi pemusatannya tidak di perdesaan, tetapi malah di kompleks-kompleks perumahan. Bulan-bulan berikutnya menjadi hari-hari yang menakutkan dan membuat cemas banyak orang, terkhusus orang Eropa di Semarang. Sebuah komando yang menakutkan membuat malapetaka bagi orang Eropa. Mereka harus berkumpul di suatu tempat tertentu untuk didaftar. Mereka datang ke tempat pendaftaran harus membungkuk, sebagai tanda hormat. Formulir yang harus diisi: kebangsaan, negara kelahiran, usia, jenis kelamin, profesi, dsb. Tak lama kemudian, truk-truk militer datang untuk menjemputi orang-orang Belanda, sebagian besar orang Indo, dan sejumlah orang Kristen Indonesia yang dicurigai pro-Belanda. Mereka dibawa, mereka diintenir.

Sementara masyarakat kampung di Semarang dengan perubahan kebijakan politik tersebut menyikapinya dengan kewaspadaan dan kecemasan. Seperti warga kampung Sekayu, yang digambarkan oleh Nh Dini di dalam sebuah kisah kenangannya. Datangnya Jepang yang pada awalnya disambut gembira oleh masyarakat telah

mengubah wajah dan aktivitas di perkampungan Semarang, rusak dan mencekam.

Ayah diberi tahu oleh kakek bahwa ramalan Jayabaya akan terlaksana dalam waktu singkat. Dianjurkan agar keluarga tidak kekurangan sesuatu pun jika perang meletus di Pulau Jawa. Setiap malam, kuphatikan beberapa orang tetangga dan laki-laki lain datang setelah waktu makan. Mereka bersama ayahku mendengarkan radio besar yang ada di kamar depan, di samping pendapa. Bahasanya aneh, suaranya kurang terang. Menurut ibuku, mereka mengikuti siaran Radio Australia. Berita yang datang dari sana umumnya asli dan benar, karena tidak tersaring oleh pemerintah Belanda, demikian kata ibuku (Dini, 2002:78).

Pemerintahan militer Jepang di Semarang mengubah kompleks perumahan Sompok (Lamper Sari), Mlaten (Halmahera), dan Karang Panas. Mereka memagari lingkungan dan kompleks perumahan dengan pagar anyaman dari bambu, sebagai pemisah dengan lingkungan kampung penduduk. Kompleks-kompleks perumahan yang dibangun dengan rapi diubah menjadi sebuah penjara besar. Tindakan-tindakan represif menyelimuti Sompok, Mlaten, dan Karang Panas. Kamp Lamper Sari merupakan penjara paling mengerikan dan terbesar di seluruh Indonesia, yang dihuni anak dan perempuan. Pada bulan Januari 1944, tempat ini menjadi mutasi tawanan Jepang dari kamp lain. Semula wanita dan anak yang menghuni hanya 1.200, sampai di akhir kekuasaan Jepang bertambah menjadi 8.000–9.000-an (Fenton 69). Tempat-tempat yang dulunya manusiawi ini dijadikan tempat pelanggaran hak-hak asasi manusia. Wilayah yang indah itu disulap menjadi tempat penuh kekerasan. Di Sompok, di suatu tempat di lereng yang agak tinggi (bangunan *ambachtschool* sekitarnya) dijadikan pusat komando, terdapat kantor kamp (*de Benteng*) dengan beberapa blok bedeng. Tempat lainnya, di bagian agak rendah terdapat rumah-rumah penduduk kampung Rambutan. Bangunan yang terbuat anyaman bambu terdiri dari dua kamar. Ketika kekuasaan Jepang akan berakhir, satu rumah mungil ini ditempati sekitar 20–25 orang. Di antara bagian rendah dan tinggi terdapat lapangan berpasir, rumah sakit, dan tempat terbuka.

Di tempat terbuka itulah apel harian dan pembagian makanan dilakukan.⁵

Kebersihan kompleks perumahan dan kampung menjadi terbelengalai. Tidak ada lagi petugas yang membersihkan selokan, jalan-jalan, dan fasilitas kampung lainnya. Lalat, kutu busuk, dan tikus merajalela di mana-mana. Keadaan higienitas perkampungan modern ini dalam kurun tiga tahun menjadi sangat buruk. Upaya untuk menanggulangi keadaan ini oleh Jepang nyaris tidak ada. Di kompleks perumahan yang dijadikan penjara, anak-anak dipaksa membersihkan lingkungan perkampungan modern ini. Mereka menangkapi lalat-lalat yang beterbangan dalam lingkungan yang padat penghuni tawanan. Sementara tawanan orang dewasa berupaya membersihkan selokan-selokan dan fasilitas MCK.⁶ Dalam lingkungan yang tidak berprikemanusiaan itu telah banyak menelan korban. Salah satu korban penindasan yang dilakukan Jepang dalam praktik inteniran ini adalah Thomas Karsten, yang meninggal di inteniran Cimahi, Jawa Barat.

Kampung inteniran ini dimaknai berbeda oleh penduduk pribumi di sekitar kompleks perumahan: sebagai pasar. Karena hanya dibatasi dengan *gedhek*, dan didasari pada sama-sama butuh, masyarakat menukarkan bahan-bahan makanan dengan uang atau barang-barang. Di Sompok dan Mlaten, tidak hanya masyarakat kampung di sekeliling kamp (Rambutan, Peterongan, Jeruk, Lamper Mijen, Lamper Krajan), tetapi warga Semarang yang tempat tinggalnya berjauhan juga melakukan barter (jual-beli), misalnya dari kampung Tandang, Kedungmundu, dan lain-lainnya. Kampung modern yang berubah menjadi kampung inteniran berakhir seiring dengan kekalahan Jepang, dan beberapa saat setelah proklamasi kemerdekaan RI dikumandangkan. Akan tetapi, perang belum usai. Perang selanjutnya, terjadi antartentara Kolonial Belanda (dengan bantuan sekutu) melawan tentara pejuang kemerdekaan Indonesia.

⁵ Lihat: Anonim, “Kamp Lampersari”, dalam www.semarang.nl, download 11-4-2004.

⁶ Lihat: Anonim, “Kamp Lampersari”, dalam www.semarang.nl, download 11-4-2004.

Terjadi situasi paradoksial, tentara-tentara Jepang menjadi pelindung orang Eropa dari serangan pejuang republik. Kampung inteniran belum kosong dari tawanan, keamanan orang Eropa dijaga oleh tentara KNIL dari Ambon dari serangan pejuang republik.

Secara umum, pendudukan Jepang tidak membawa perubahan positif bagi pemukiman Kota Semarang. Di sekitar wilayah pertempuran lima hari di Semarang, perkampungan porak-poranda, terutama di pusat kota sekarang. Di perkampungan yang dianggapnya strategis mereka membangun fasilitas perang: pos penjagaan Jepang. Selain itu, di beberapa kampung penduduk mengungsi. Beberapa kampung menjadi sepi, dan kampung lainnya menjadi ramai. Di Kota Cirebon tentara Jepang membangun perkampungan: model Tjirebon-Si. Kampung yang dinamakan kampung kemakmuran (*Kjooei matji*) tersebut terdiri dari 57 rumah tangga. Bangunan rumahnya mementingkan syarat kesehatan, bentuknya elok, dan dihuni oleh penduduk.⁷ Dalam majalah propaganda Jepang itu memang semua tampak indah dan baik. Cerita indah dalam gambar majalah tersebut biasanya penuh rekayasa. Seperti cerita dalam inteniran perempuan di Ambarawa.

Pada suatu hari tersebar kabar berita bahwa biskuit akan didatangkan untuk anak-anak di kamp dan mereka harus berkumpul di dekat kantor guna menerima bagian mereka. Dalam sekejap, anak-anak itu sudah berada di sana, melompat riang menunggu gilirannya. Beberapa mereka bahkan tidak pernah melihat biskuit. Meja-meja dikeluarkan dan piring-piring berisi biskuit disusun rapi di atasnya, sangat menggoda. Anak-anak berkerumunan di sekitar meja dengan tatapan penuh selera. Seorang juru foto muncul dan mereka diperintahkan tersenyum. Segera setelah foto diambil, biskuit-biskuit itupun ditarik kembali. Ternyata semua aksi ini hanyalah sebuah propaganda yang penuh kepura-puraan. Anak-anak cukup beruntung jika mereka berhasil mendapat satu saja biskuit itu (O'Hare, 2003:55-56).

Di Semarang dengan militer *bestuur*-nya kepala daerah dipengang oleh *shitjo* dan didampingi *fuku shitjo* (wakil). Pemerintahan

⁷ Tentang hal ini lihat: *Jawa Baroe No 5*. Tahun 2604 [1944].

dijalankan langsung di bawah residen, kabupaten dan gemeente tidak dihapuskan. Kedudukan *shitjo* sangat kuat, lebih kuat daripada kekuasaan kolonial Belanda di masa akhir. Dibentuknya dewan kota yang berjumlah 20 orang (*hookookai*) hanyalah formalitas, seolah-olah mempunyai fungsi menasehati *shitjo* (Soekirno, 1952:68). Secara tidak langsung pemerintahan militer ini menghapus sistem hukum yang ditinggalkan pemerintah Hindia Belanda. Padahal, walau secara perlahan, hukum modern ala Barat di Hindia Belanda telah menampakkan corak desentralisasi yang jelas. Demi keefektifan penguasaan atas daerah yang dikuasainya, memudahkan dan meluncurkan berbagai sumberdaya yang dibutuhkan regulasi zaman kolonial banyak diubah. Pada tahun pertama pendudukan, perubahan difokuskan pada pemantapan pemerintahan sentralistik dan hierarkis di Jawa, hingga terkesan administratif Jawa-sentris. *Oendang-oendang No. 28 tentang Pemerintahan Syuu* (7-8-2602) mengakhiri asas pemerintahan desentralisasi kolonial Hindia Belanda. Regulasi tersebut berisi pembagian pulau Jawa menjadi tiga provinsi dihapus menjadi 17 daerah residensi (*syuu*). Tidak hanya mengganti administrasi pemerintahan, militer-bestuur Jepang juga mengubah simbol-simbol Barat di Indonesia. Dengan *Oendang-oendang No. 30 tentang Mengubah Nama Negeri dan Nama Daerah* (1-8-2602). Misalnya, nama Batavia dikembalikan menjadi Djakarta, Fort de Kock menjadi Boekitinggi (Wignjosoebroto, 2004:76).

Di tingkat kampung, regulasi yang menentukan perubahan adalah ditetapkan pemerintah militer Jepang *Oendang-oendang No 27 tentang Peroebahan Pemerintahan Daerah* (5-8-2606). Pemerintah pendudukan Jepang membentuk *tonarigumi* (rukun tetangga) dan *aza* (rukun kampung). Lembaga kontrol perkampungan ini juga berfungsi sebagai pengerahan tenaga-tenaga kerja paksa (*romusha*). *Tonarigumi*, atau rukun tetangga, secara resmi diperkenalkan di Jawa pada bulan Januari 1944. *Tonarigumi* terdiri dari 10 sampai 20 rumah tangga, yang berfungsi sebagai alat memperkuat cengkeraman pemerintah atas penduduk dan untuk meningkatkan komunikasi dengan mereka. Pengumuman resmi tentang pembentukannya

dikeluarkan pemerintah militer pada tanggal 11 Januari 1944, saat berlangsungnya Konferensi Residen Seluruh Jawa, yang kemudian disusun dengan asas-asas untuk menyempurnakan susunan rukun tetangga. Sebelum diumumkan, pemerintah telah mempersiapkan desa percontohan di Kabupaten Jatinegara, Jakarta, dan peserta konferensi dipersilahkan melihat langsung desa tersebut. Tonarigumi yang sangat efektif dalam melakukan kontrol penduduk di Jepang dipraktikan di daerah pendudukan Jepang di Asia (Kurosawa, 1993: 197–198).

Pemerintah pendudukan Jepang serius membentuk *tonarigumi* di kampung-kampung. Upaya-upaya sosialisasi untuk rakyat secara keseluruhan menekankan bahwa tonarigumi didasarkan pada semangat gotong-royong (semangat kerja Jawa). Para pejuang nasional dan pemimpin kalangan agama dijadikan agen sosialisasinya. Para kyai (57 orang) berkumpul di Jakarta dan melegalkan tonarigumi sesuai dengan ajaran agama Islam, dengan mengutip kitab suci Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35–36. Dengan legalisasi tradisi, agama dan agen tokoh nasional, tonarigumi berkembang pesat. Dimulai dari perkotaan upaya-upaya pembentukannya terus dilakukan, sampai ke perdesaan. Pada akhir April 1944 di Jawa telah terbentuk 508.745 dari jumlah rumahtangga 8.967.320. Angka ini mencapai target yang ditetapkan, tonarigumi yang beranggotakan 10–20 rumahtangga dengan jumlah *aza jokai* 64.777 dan jumlah desa 19.498, maka target 3–4 aza jokai dapat terlampaui. Tonarigumi telah terbentuk di kampung-kampung di Jawa (Kurosawa, 1993: 201).

Fungsi tonarigumi di Jawa sama dengan tonarigumi di negeri asalnya: menjaga keamanan, melakukan sosialisasi kebijakan negara, membayar pajak, mendistribusikan catu barang, membantu pemerintahan militer, dan kerja sosial. Keenam fungsi diharapkan sangat efektif untuk melanggengkan pendudukan. Dengan menggelar rapat rutin setiap 35 hari, fungsi-fungsi tersebut dijalankan. *Kumicho* (ketua tonarigumi) dan *azacho* (ketua *aza jokai*) tidak mendapatkan gaji, tetapi terkadang mereka mendapat pelatihan kemiliteran, pertanian dan sanitasi. Karena efektif membantu pendudukan, tonarigumi

terus digiatkan. Di tingkat karesidenan dilombakan tonarigumi terbaik, dan upaya-upaya sosialisasi pentingnya tonarigumi tak henti-hentinya dilakukan, dengan menggunakan sarana kesenian, lewat lagu dan film dokumenter (Kurosawa, 1993: 205–208).

Pendudukan Jepang membawa empat perubahan, *pertama* Hindia Belanda ditarik keluar dari ekonomi Eropa, dan dijadikan bagian ekonomi wilayah kekuasaan Jepang (Asia Timur Raya). *Kedua*, Kesatuan pemerintah dipecah-pecah. Kematangan pemerintahan Hindia Belanda dengan desentralisasi di awal abad ke-20 menjadi sirna. Jika sebelumnya ada pemerintahan pusat, yang mengatur seluruh urusan di wilayah yang luas. Oleh Jepang, diganti dengan pembagian tiga wilayah teritorial (militer): Jawa, Sumatra, dan Kalimantan. Sehingga, masing-masing daerah mementingkan ekonominya masing-masing. *Ketiga*, dikuasainya industri-industri oleh orang-orang yang tidak berkompeten, menjadikan semakin terpuruknya perekonomian. *Keempat*, dikesampingkannya kepentingan-kepentingan rakyat di Hindia Belanda (Bey, 1987: 36–41). Hal-hal itulah yang membuat penderitaan rakyat semasa pendudukan Jepang sangat memilukan dan memprihatinkan.

Sambutan hangat dari rakyat kepada Jepang sebagai pembebas dari penindasan kolonial tidak berlangsung lama. Perkosaan, perampokan, perdagangan gelap, dan keangkuhan rasial menimbulkan dendam yang meluas, serta kebencian terhadap teror yang dilakukan Kenpetai (Polisi Militer) malah bertambah besar karena setiap orang menyembunyikannya (Anderson, 1988: 56). Penentangan rakyat terhadap Jepang secara politik dilakukan oleh kelompok Amir Sjarifudin, yang berorientasi pada perjuangan internasional (antara kekuatan Sekutu dengan Negara Poros). Perjuangannya gagal, dan digantikan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah ini berorientasi pada ‘nasib segera’ dari bangsa Indonesia. Mereka tidak melakukan perlawanan fisik, tetapi berupa membaca situasi politik internasional, membahas hari depan, dan mengecam tindakan-tindakan Jepang. Kelompok-kelompok tidak resmi ini terdapat di kota-kota besar di Pulau Jawa (Anderson, 1988: 59–60). Di Semarang kekuatan

anti Jepang ini juga berkembang, dipelopori aktivis pergerakan yang sudah aktif menentang penindasan kolonialisme. Gerakan bawah tanah di Semarang ini mempunyai kontak dengan kelompok bawah tanah di Jakarta. Dr. Soebandrio yang gerak politiknya sudah tidak aman di Jakarta, pindah di CBZ Semarang. Dukungan gerakan ini lebih banyak didapatkan dari golongan pemuda, profesional yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan, dan para pelajar (Soewarno, 1977: 55–57).

Kota dan desa kekayaannya dikuras oleh tentara Jepang. Rakyat menderita kekuarangan pemenuhan barang-barang kebutuhannya. Rasa aman untuk hidup sangat menipis. Karena beras sukar didapat, penduduk memakan iles-iles, gogik, pati, gaplek, ketela serta dedaunan (yang merupakan makanan yang tidak biasa dimakan). Bahan pakaian merupakan barang yang mahal dan langka. Pada tahun pertama, kelambu, tirai, seprei, tutup meja, telah disulap menjadi pakaian rakyat. Karena semakin langka, masyarakat memanfaatkan karung goni (kantong pengemas), bagor dan atau tikar sebagai celana, bahkan ada celana yang dipakai masyarakat dengan memakai bahan karet sheet (Soewarno, 1977: 61–62). Tak jarang masyarakat hanya memiliki satu pakaian yang membalut tubuhnya, sehingga tak jarang muncul kutu di pakaian mereka (*tumo katbok*, kutu celana), karena sepotong pakaian mereka jarang dicuci.⁸

Penderitaan rakyat Indonesia ini terobati dengan berita proklamasi kemerdekaan. Setelah menerima berita dari Kantor Berita Domei Jakarta, seorang markonis Kantor Berita Domei Semarang meminta Sjarief Sulaiman menyampaikan kopian berita kepada Mr. Wongsonegoro yang sedang bersidang di gedung Djawa Hookookai. Dalam sidang yang dihadiri oleh perwakilan dari kabupaten di Jawa Tengah, Wongsonegoro membacakan dua kali naskah proklamasi dan memperbanyak, serta berusaha mengabarkan kepada masyarakat luas. Jaringan telepon menjadi sibuk setelah radio Semarang Hosokyo menyiarkan pengumuman kemerdekaan Republik

⁸ Wawancara Legiman (75 th), 10-9-2004; Soejono (75 th), 17-11-2004.

Indonesia, sebelum siaran langsung sholat Jum'at dari Masjid Agung Semarang. Walau siaran ini dihentikan tentara Jepang, tetapi berita sudah terdengar oleh masyarakat Semarang dan sekitarnya. Harian sore Sinar Baru yang diterbitkan oleh Djawa Sinbun (Gabungan Persuratkabaran Djawa cabang Semarang) memberitakan proklamasi sehari setelah Soekarno-Hatta membacakannya di Pegangsaan Timur. Sehari setelah itu Wongsonegoro menyiarkan lewat radio Semarang (Soewarno, 1977: 27–29). Kegembiraan dirasakan masyarakat Semarang. Namun, kegembiraan itu juga disertai pekerjaan berat, agar tidak larut dalam kegembiraan redaktur Sinar Baru pada tanggal 20 Agustus 1945 menyampaikan pesan kepada pembacanya.

Bagaimana djoega besarnja kegembiraan dalam penjamboetan “Kemerdekaan Tanah Air serta pembentoean “Pemerintah Republik Indonesia”, jaoeh lebih besar lagi rasa keinsjafan akan berat tanggoeng-jawab pendoeboek terhadap nasib Tanah Toempah Darah jang sekarang telah merdeka dalam keadaan jang genting itoe (Soewarno, 1977: 28).

C. MASA AWAL REPUBLIK INDONESIA (1945–1960)

Perang antara pejuang republik dengan tentara Jepang mengawali babak baru kisah perkampungan. Kini pemerintahan mulai berada di tangan anak Republik Indonesia. Nasionalisme menjadi semangat jaman di awal pemerintahan ini. Pemuda Semarang bergolak untuk mengambilalih kekuasaan jawatan-jawatan, dengan mengeluarkan pamflet-pamflet stensilan yang isinya ajakan untuk bertindak tegas dan berani mengambilalih barang-barang milik republik yang masih dikuasai Jepang. Ajakan pemuda yang bermarkas di Bodjong 89 ini mendapat sambutan masyarakat Semarang. Pada tanggal 1 Oktober 1945 telah banyak jawatan yang diambil alih, termasuk juga pabrik dan perusahaan. Misalnya, Perusahaan Listrik (Djawa Denki), Pabrik Es, Perusahaan Air Minum, jawatan keretaapi (Riyuku Sokyoku), dll. Dalam upaya pegambilalihan aset-aset di atas tidak terjadi persitegangan, kecuali pengambilalihan pelabuhan Semarang. Sejak

25 Agustus sampai 30 Agustus terjadi insiden antara pihak Jepang dengan Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI), Badan Keamanan Rakyat (BKR), dan Polisi Istimewa di bawah pimpinan Sabar Alim. Dalam aksi pengambilalihan jawatan, perusahaan, kantor-kantor pemerintahan yang juga ikut berjasa adalah Barisan Srobot (Soewarno, 1977: 92–94).

Pada 13 Oktober 1945 suasana di Semarang mulai memanas. Insiden-insiden kelompok-kelompok kecil pemuda dengan tentara Jepang semakin meningkat. Untuk itu, AMRI Semarang dan AMRI Jawa Tengah mengadakan pertemuan di gedung Angkatan Muda Jomblang, yang hasilnya mengamankan orang-orang Jepang dan kaki tangan Belanda di Penjara Jurnatan dan Bulu. Tentara Jepang yang semula dari Ambarawa diangkut dengan keretaapi, dengan kawalan Angkatan Muda Kereta Api (AMKA). Orang-orang Indo dan orang-orang Indonesia yang dianggap mempunyai hubungan dengan pemerintah kolonial Belanda juga diamankan di Balai Pertemuan Jawatan Kereta Api di Pandirikan (Soewarno, 1977: 107–108). Sehari setelah itu, persediaan air minum di Jl. Wungkal diisukan diracuni tentara Jepang. Drs. Kariadi sebagai kepala Laboratorium Rumah Sakit Purusara datang untuk mengecek kebenaran isu tersebut. Akan tetapi, di tengah jalan Drs Kariadi, yang kemudian namanya dijadikan nama Rumah Sakit Umum di Semarang, bersama sopirnya ditembak tentara Jepang. Peristiwa ini kemudian memicu perang besar di Semarang, yang sekarang dikenal dengan Peristiwa Perang Lima Hari di Semarang (14–19 Oktober 1945).

Di rumah pengamanan Bulu dan Jurnatan tentara Jepang melakukan perlawanan, Polisi Istimewa yang mengawal terdesak, dan melarikan diri. Para tentara Jepang yang tidak mengenal Semarang berhamburan di kampung-kampung, dan akhirnya terkonsentrasi di Candi Baru. Tak lama berselang, malam itu juga, para pemuda pejuang yang berkumpul di Jalan Bojong 98 mendengar kabar perlawanan tahanan. Para pemuda pulang ke kampungnya masing-masing, untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Sepanjang jalan dari Bulu ke Candi Baru, kampung-kampung yang

dilewati tentara Jepang menjadi medan pertempuran: Kampung Kalilangse, Kampung Randusari, Srandol, Ngaglik, Gunggung Sawo, Kintelan, Lemponsari, kawasan RS Purusra, Kalisari, Lemah Gempal, dan Wonodri. Korban berjatuhan di kedua belah pihak demi negara masing-masing. Dengan persenjataan sederhana seperti bambu runcing, tentara Jepang banyak yang tewas dibunuh pemuda pejuang, sedangkan para pemuda yang tertangkap tentara Jepang juga dibunuh dengan alat seadanya. Mayat-mayat yang berjuang untuk negaranya bergelimpangan di sepanjang jalan.

Kampung-kampung di sepanjang jalan Jomblang ke Bangkong menjadi medan pertempuran. Dari Jomplang tentara Jepang bergerak menuju pos polisi Bangkong, dan melanjutkan merebut pos BKR di Pandean Lamper. Gerak langkah tentara Jepang ini walau dihalau oleh pemuda setempat namun tentara Jepang malah berhasil meluaskan dominasinya untuk merebut kembali Semarang. Kampung Karangturi, Ambengan, dan Pandean menjadi kekuasaan Jepang dalam perang merebutkan teritori. Perlawanan masyarakat kampung di Mlatiharjo menghambat gerak langkah tentara Jepang. Medan pertempuran pun bergeser ke selatan, memperebutkan kampung inteniran Mlaten. Di inteniran Mlaten, yang semula menjadi rumah yang nyaman ini tentara Jepang menghentikan gerak langkah perangnya, dan mundur ke Jomblang dan Pandean Lamper. Di Balai Pertemuan Jomblang pasukan Jepang menjadikan tempat pengaturan strategi untuk gerakan pembersihan di kampung-kampung di sekitar kompleks perumahan Sompok. Gerakan pembersihan ini mendapat perlawanan dari pemuda di daerah Mrican (Soewarno, 1977:107–108). Perang memperebutkan teritori ini disertai dengan korban berjatuhan dari kedua belah pihak yang meyakini kebenaran masing-masing. Konflik senjata antarpenduduk kampung dengan tentara Jepang menelan korban juga kampung tempat tinggal mereka, yang hangus terbakar dan terpaksa ditinggalkan penghuninya. Gambaran kerusakan kampung-kampung di Semarang dikisahkan Rosihan Anwar yang meliput dampak perang di Semarang pada tanggal 7 Januari 1946:

“Semarang menderita. Pada tanggal 15 Oktober 1945 petjah pertemporan antara pemoeda-pemoeda dengan pasoean Djepang di bawah pimpinan Major Kido. Lebih koerang 2000 pendoedoek mendjadi korban. Pada tanggal 17 November meletoes pertempuran dengan tentara Sekoetoe dan sebagian pemerintahan kota menjingkir keluar kota. Sedjak itoe, segala alat pengatoer kehidoepan rakjat menjadi ambroek. Polisi Indonesia berantakan dan tentara Sekoetoe tak berdadja mendjaga keamanan. Perampokan meradjalela, kekatjaoean mendjadi-djadi. Dalam pertemporean banjak kampoeng dibakar dan didjelmakan djadi aboe. Lempoengsari, Ngaglik, Kintelan, hanjalah beberapa tjontoh.”⁹

Sejak tanggal 18 November 1945 hingga tanggal 27 Desember 1949 Kota Semarang kembali diduduki oleh tentara Belanda. Pemerintahan belum ada, yang masih berjalan hanya Djawatan Pekerjaan Umum, masuk dalam lingkungan OWMJ (*Openbare Werken Midden-Java*). Anak republik baru dapat memerintah kotanya mulai tanggal 27 Desember 1949, Slamet Soebroto sebagai walikotanya, sampai Februari 1950. Selama dua bulan selanjutnya militer memegang kendali Kota Semarang, di bawah Major Suhardi. Kembali ke tangan warga sipil, Mr. Kusubijono Hadinoto, pegawai tinggi dari Kementrian Dalam Negeri, di Yogyakarta. Susunan organisasi pemerintahan anak negeri memakai sistem sentralisasi. Hal ini didasari pada kondisi politik, agar pemerintah pusat lebih mudah mengontrol, dan regulasi yang digunakan adalah Undang-undang dasar 1945. Dalam sistem pemerintahan ini, Mr. Kusubijono Hadinoto (utusan dari pemerintah pusat) mulai kembali dilakukan penataan kota: menyusun jawatan/dinas-dinas administratif dan melengkapi fasilitasnya. Pembangunan kota pun kembali dilakukan, dengan membersihkan pasar, membersihkan kota, pembangunan kolam renang, menutup selokan dan perumahan rakyat (Soekirno, 1952: 69).

Kompleks-kompleks perumahan yang dulu dibangun Gemeente Semarang berubah kepemilikan menjadi milik Kotamadya Semarang. Dinas Djawatan Gedung-Gedung menjadi salah satu instansi yang mengelola rumah-rumah yang ditinggalkan penghuninya. Sejak tahun 1956 rumah-rumah negara itu dihuni warga yang sekarang sedang

⁹ Lihat: *Merdeka*, Januari 1946.

menempati. Sebelumnya, dalam situasi yang tidak aman bagi orang Eropa, beberapa rumah mereka ditinggalkan dan dititipkan kepada orang yang mereka kenal. Ada juga rumah yang dihuni orang Eropa diambil oleh para pejuang republik. Sementara rumah yang dihuni orang pribumi, mereka dibolehkan memiliki rumah, dengan cara mencicil harga yang telah ditetapkan.¹⁰ Saat itu rumah-rumah negara berada di bawah wewenang Djawatan Gedung-Gedung Kota Semarang.¹¹ Di Lamper Sari rumah-rumah dan tanah yang ditinggalkan oleh orang Eropa dihuni aparat kepolisian. Dasarnya, surat penunjukan dari dinas jawatan, dan Surat Izin Perumahan dari Dinas Perumahan Swatantra Jateng, serta SK Mendagri No. 135/Dja/1977, tertanggal 4 Oktober 1977. Mereka menempati areal seluas 42.153 meter persegi, yang merupakan bekas hak Eigendom Perponding Nomor 4448. Menurut UU No. 1 Tahun 1958 tanah hak Eigendom berubah menjadi milik negara. Pada tahun 1977 Dinas Djawatan Gedung-Gedung menyerahkan penunjukan penghuni rumah-rumah itu kepada Komdak IX Jateng, yang sekarang bernama Polda Jateng (Kepolisian Daerah Jawa Tengah).¹² Sebelum diserahkan kepada Komdak IX Jateng, Dinas Djawatan Gedung-Gedung telah mengatur peruntukkan bekas kawasan kompleks perumahan jaman kolonial. Selain di Lamper Sari untuk kepolisian, kawasan Mangga diperuntukkan bagi Dinas Kehakiman, kawasan Nangka untuk Dinas Perhubungan.¹³

Tanah-tanah yang masih kosong di sekitar bekas perumahan gemeente juga dikuasai oleh pemerintah kota. Pada tahun 1950-an penduduk yang berminat memiliki tanah tersebut diperbolehkan

¹⁰ Wawancara Paijo (70 th), 23-4-2005.

¹¹ Sampai saat ini beberapa rumah masih belum lunas pembeliannya, dan yang menangani permasalahan ini adalah Dinas Tata Kota Semarang. Sangat disayangkan, data-data yang jumlahnya terbatas ini yang dapat menjelaskan proses pemindahan kepemilikan rumah ini tidak berhasil penulis dapatkan, karena tidak diberikannya ijin oleh kepala dinas saat itu.

¹² Lihat lebih jauh tentang masalah ini: *Suara Merdeka* 26-6-2003.

¹³ Wawancara Sediono (56 th), 28 Juli 2004.

membeli kepada Kotapraja Semarang. Sejak itu pula, pembangunan rumah-rumah di perkampungan Sompok dimulai lagi oleh Pemerintah Kota Besar Semarang. Seolah-olah melanjutkan pembangunan rumah-rumah tahun 1920-an, pembangunan rumah tahun 1950-an menempati tanah-tanah petak yang tersedia. Kampung-kampung yang mulai ramai lagi dibangun adalah Kampung Blimbing, Kampung Nangka, Kampung Mangga, Kampung Durian, dan Kampung Cempedak Selatan. Sampai dengan pergantian rezim Orde Lama, pembangunan rumah-rumah di perumahan Sompok terus berjalan, di Cempedak Utara.¹⁴ Sementara itu, pertambahan penduduk yang meningkat tentu saja kebutuhan rumah juga meningkat. Oleh karena tidak didukung dengan kepemilikan uang yang cukup, penduduk melakukan *onwettige grond-occupatie*. Okupasi tanah yang mereka lakukan meliputi tanah kotapraja dan tanah partikelir. Gubug-gubug sebagai rumah mereka dibangun dengan ala kadarnya.

Di kompleks Sompok, salah satu bidang tanah yang kosong di belakang bangunan *Ambachtschool* (sekolah pertukangan), juga bekas intenan, dikuasai oleh penduduk yang berdatangan ke Semarang. Mereka pada awalnya menyewa kepada sesepuh kampung Peterongan. Dalam perkembangannya penghuni yang semakin ramai, terbentuk sebuah kampung yang padat. Karena profesi orang-orang yang menempati sepetak tanah ini di sektor informal (pengemis, pengamen, tukang becak), oleh warga setempat dikenal dengan nama kampung Gang Waas.¹⁵ Pada tahun 1958 kampung Gang Waas hanya terdapat kurang lebih 10 bangunan rumah sangat sederhana yang dihuni penduduk pendatang. Masyarakat menempati tanah-tanah kosong di pinggiran kota semakin marak pada tahun 1950-an, berlanjut sampai tahun 1960-an awal. Makam Cina yang berada di sepanjang kali Peterongan dijadikan rumah-rumah penduduk, dan bangunan balai rakyat (sekarang SDN Peterongan III-IV). Rumah-rumah yang dibangun berdinding anyaman bambu

¹⁴ Wawancara Tarman (75 th), 27 Juli 2004.

¹⁵ Wawancara Legiman (75 th), 10 September 2004.

dan beratap daun. Sekarang rumah-rumah gedhek itu sudah tidak terdapat lagi di kampung ini, berganti menjadi bangunan permanen dan semi permanen (kayu papan dan batu-bata). Tentu saja pendirian gubug-gubug oleh warga menimbulkan masalah. Higienitas penghuni dan kerapian kota menjadi alasan utama bagi pemerintah kota untuk memberikan tempat yang layak bagi mereka. Jadi pemerintah tidak hanya mengusir penghuni dari gubug mereka, tetapi bagaimana menampung mereka. Pertambahan gubug-gubug yang terus bertambah ini menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan bersama antarwalikota dengan DPRD, yang terbentuk pada 7 Desember 1950. Dalam sebuah sidang, walikota menjelaskan kepada anggota DPRD yang beranggotakan 34 orang (5 di antaranya perwakilan dari DPD).

Sebelum DPRDS Kota Semarang terbentuk, Kotapraja Semarang telah berusaha memindahkan rumah-rumah yang didirikan dengan tjara tidak sjah diatas tanah-tanah yang disediakan untuk rumah-rumah Djawatan Perumahan Rakyat. Usaha ini dimulai dengan membuat dahulu taman kanak-kanak di sebelah Stadion, atas tanah milik Javasche Bank yang diberikan dengan tjuma-tjuma kepada Kota-besar Semarang. Ketika orang-orang yang menempati tanah-tanah setjara liar itu mengetahui pegawai-pegawai Kotabesar Semarang akan mengerjaknja, maka mereka segera menanam ketela dan pisang dan mengatakan, bahwa mereka dilarang pergi dari situ oleh BTI (Barisan Tani Indonesia, organisasi underbouw Partai Komunis Indonesia [PKI]—pen). Berhubung dengan itu, kepala daerah berdamai dengan BTI, supaya bersama-sama memberantas pemakai tanah kotapraja setjara tidak sjah (*onwettige occupatie*) serta mentjegah pembangunan rumah-rumah tanpa izin. Pengurus BTI menjanggupkan untuk kerdja bersama dengan Kota-besar Semarang, akan tetapi kemudian BTI menuntut kerugian yang sangat tinggi untuk pemindahan para *onwettige occupatie* itu, ialah bagi tiap-tiap rumah yang dipindahkan, pemiliknja minta diberi kerugian selama berdiam disitu sebanjak Rp3,- tiap harinja. Kota-besar Semarang tidak mungkin memenuhinja, sebab tidak ada uang untuk itu, sehingga pekerdjaan itu terpaksa tidak dapat dijalankan (Soekirno, 1952: 72).

Dari uraian yang disampaikan Walikota Semarang tersebut dapat dilihat betapa sulitnya masalah okupasi tanah-tanah perkotaan

saat itu. Di satu sisi pengadaan rumah bagi warganya merupakan kewajiban pemerintah. Di sisi lain, hal itu melanggar peraturan. Pemerintah tidak hanya menggusur penduduk, tetapi mereka juga berkeinginan memberikan tempat buat penduduk. Selain itu, masalah okupasi ini telah menjadi komoditi politik. Keputusan bijaksana harus diambil. Menanggapi lontaran permasalahan walikota tersebut, DPRDS (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara) Semarang dalam sidangnya tanggal 15 Maret 1951 memutuskan:

1. Memberi kekuasaan kepada Walikota dan Dewan Pemerintah Kotabesar Semarang untuk mengambil tindakan seperlunya, dengan bijaksana, dalam menyelesaikan soal-soal pemakaian tanah secara tidak sah tersebut, dan apabila perlu menggunakan alat-alat kekuasaan negara;
2. Mengesahkan rencana perumahan rakyat di lima tempat sebagai salah satu bagian dari rencana Perumahan Rakyat Kotabesar Semarang. Kelima tempat yang dimaksud yaitu: Rejosari Kidul, Pekunden Wetan, Hawa (sekitar Halmahera, Seteran, Batan-miroto), Peleburan, dan taman kanak-kanak di selatan Stadion;
3. Rumah-rumah/gubug-gubug yang didirikan tidak sah harus dipindahkan menurut rencana kotapraja;
4. Pemindahan rumah-rumah/gubug-gubug yang belum dijalankan tidak mendapat ganti rugi, demikian pula tanaman pangan yang ditanam di halaman mereka;
5. Pemindahan rumah-rumah/gubug-gubug warga yang dianggap tidak mampu akan mendapat sokongan dari kotapraja.

Pada 1 Juli 1951, R.M. Hadisoebeno menjadi Walikota Semarang, menggantikan M.R.K. Hadinoto (Soekirno, 1956:59). Dalam masa walikota Hadisoebeno, permasalahan di bidang pemukiman menunggu penyelesaian selanjutnya. Terdapat kurang lebih 20.000 penduduk yang tinggal di gubug-gubug. Berdasar kewenangan yang diberikan DPRDS Semarang, pemerintah kotapraja Semarang memindahkan penghuni gubug-gubug ke tempat yang telah disediakan. Kebanyakan mereka bersedia, tetapi penghuni yang juga membuka tempat

usaha di gubugnya kebanyakan tidak bersedia. Tindakan tegas harus diambil pemerintah, dengan pendekatan persuasif mereka meminta mereka pindah dengan biaya dari pemerintah. Bagi yang masih bersikukuh bertempat tinggal di gubugnya akan dikenakan denda sebesar Rp.10–Rp20, setelah diultimatum 14 hari. Secara berangsur-angsur mereka bersedia pindah ke tempat-tempat yang telah disediakan (Soekirno, 1956: 73–74). Salah satu tanah partikelir yang digunakan pemerintah untuk program perumahan untuk rakyat adalah tanah milik Oie Tiong Ham di daerah Bulu Lor, Semarang Barat. Pada tahun 1957 Tim Penertiban Umum dari Kotapraja Semarang memetak-metakkan tanah yang luas menjadi tanah kavling. Tanah-tanah yang dipetak itu diprioritaskan bagi pegawai negeri dan ABRI. Terdapat tiga jenis kavling (Tim Peneliti, 1972: 65–66):

1. Tanah kavling Merah berukuran 20m x 50m, yang diperuntukkan bagi gedung-gedung besar yang permanen;
2. Tanah kavling Jambon berukuran 15m X 25m, yang diperuntukkan bagi bangunan semipermanen;
3. Tanah kavling Kuning berukuran 10 x 15 m, yang diperuntukkan bagi bangunan rumah dari kayu atau bambu.

Kebebebasan rakyat mengakses kota merupakan fenomena yang ada pada tahun 1950-an, dengan munculnya kampung-kampung baru di pusat kota (belakang pertokoan, gedung-gedung, dan villa). Sayang sekali, situasi politik dunia telah membawa bangsa ini menuju trauma sejarah berdarah 1965, yang memenangkan pemerintahan militer-kapitalistik (Pratiwo, 2003). Okupasi (*reclaiming*) tanah di pusat-pusat kota itu dihentikan dengan kebijakan pemerintah Kotamadya dalam menciptakan mitos keindahan kota. Pada tahun 1971 praktik pembersihan kampung-kampung baru (pemukiman liar) ciptaan masyarakat berhasil dilakukan. “Pemukiman-pemukiman liar” itu ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (Sekda, 1972:181).

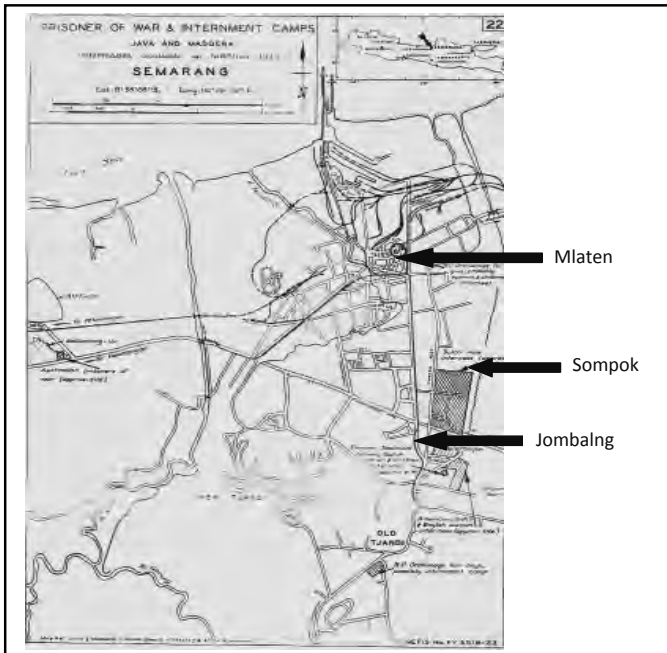
Dalam upaya membangun perumahan rakyat, untuk mempersiapkannya pemerintah Kotapraja Semarang melakukan

pembicaraan-pembicaraan dengan tuan-tuan tanah. Kesepakatanannya, para tuan tanah bersedia tanahnya dipakai untuk keperluan perumahan rakyat dengan harga tertentu. Keputusan pembelian tanah-tanah partikelir ini diputuskan dalam *begrooting* tahun 1951, dengan melibatkan kementrian dalam negeri. Pemerintah merencanakan perumahan rakyat itu dengan pembangunan rumah-rumah petak (*kopelhuizen*) seharga a Rp.2.500,- bagi pekerja. Pegawai rendahan dan menengah dengan harga a Rp.4.000,-. Harga yang ditetapkan per rumahnya juga dipengaruhi oleh kualitas dan letak bangunan rumah. Rumah-rumah di tepi jalan besar dibangun dari batu, dan kalau telah ada bangunan rumah yang dibangun dari tidak batu maka akan dipindahkan 50 dari jalan raya (Soekirno, 1952: 72). Pendanaan pembangunan ini didapatkan dari Pusat Djawatan Gedung-gedung sebesar Rp.700.000,- dan sumbangan dari perusahaan-perusahaan asing. Selain itu, pemerintah membuka undian untuk modal pembiayaan perumahan rakyat. Berdasar keputusan DPRDS Semarang tanggal 11 September 1951 No. 29/Pew/1951, undian yang akan digelar memperebutkan uang Rp.500.000,- dengan biaya per kupon Rp.10. Nama undiannya adalah Undian Rumah Kota-besar Semarang. Hasil undian ini setengahnya diperuntukkan bagi pendanaan pembangunan rumah-rumah sebagai hadiah pemenang undian; separonya lagi akan disumbangkan kepada organisasi sosial, rumah yatim dan miskin, yang tentunya sudah dipotong biaya-biaya lain. Pelaksanaan undian 3–4 bulan sekali, menunggu jadinya rumah-rumah hadiah (Soekirno, 1952:74).

Masing-masing pemegang kekuasaan negara dalam masa transisi (1930–1960) memiliki peran strategis dalam proses perubahan yang terjadi. Tahun 1920–1942 pemegang kekuasaan mengambil kebijakan strategis dalam bidang pembangunan kota adalah Dewan Kota Semarang (*Gemeenterad van Semarang*) yang beranggotakan 23 orang (15 orang Eropa, 5 orang pribumi, dan 3 orang Timur Asing). Pada tahun 1916 terpilih walikota Semarang, berakhir posisi strategis Dewan Kota sebagai pelaksana pembangunan kota. Peran Dewan Kota Semarang terhadap perubahan di perkampungan

Sompok adalah mempersiapkan tahap awal pembangunan perumahan (perizinan dan pembebasan tanah). Peran walikota (*burgermeester*) terhadap perubahan di perkampungan Sompok adalah melaksanakan pembangunan selanjutnya (pembangunan rumah-rumah, penyewaan dan pemeliharaan). Peran lurah, sebelum tahun 1911 adalah membantu proses pembebasan tanah; dan setelah tahun pembangunan perumahan, 1916, lurah berfungsi seperti awalnya mengurus desanya, tanpa dibebani urusan-urusan perumahan baru di wilayahnya. Sementara itu, masyarakat kampung yang menghadapi perubahan fungsi lahan di daerahnya memulai kehidupan baru. Mereka menata kembali kehidupannya, mereka berbenah. Yang dulunya mempunyai lahan untuk digarap, harus memulai hidupnya dengan tanpa sawah. Mereka tidak lagi kerja di sawah. Mereka harus berkreasi, berkarya, demi kelangsungan hidupnya, dalam lingkungan yang berubah. Warga kompleks perumahan memulai kehidupan di dunia modernnya.

Kekuasaan tertinggi di Kota Semarang yang dipegang orang Eropa berakhir dengan datangnya Jepang. Perubahan sosial yang diharapkan oleh orang-orang Eropa, dalam pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, berhenti. Dalam masa Jepang ini, kekuasaan tertinggi kota berada di bawah walikota Jepang Arima Hikokichi. Politik yang dijalankan adalah politik perang. Hal ini jelas mengubah tatanan yang sebelumnya telah ada, termasuk kehidupan di pemukiman kampung Sompok. Di Sompok-Lamper Sari dan beberapa kompleks perumahan lain (kampung gemeente), Jepang menjadikan sebagai rumah tawanan (kampung inteniran), Gambar 22 & 23. Masyarakat kampung menghadapi perubahan fungsi wilayah di lingkungannya. Tak jauh dari perkampungan ini terdapat pos militer Jepang, di kampung Jomlang. Bergantinya penguasa menjadikan perubahan pada fungsi guna wilayah. Hal ini dapat dipastikan akan merubah tatanan kehidupan masyarakat sebelumnya. Oleh Ania Loomba, kedatangan Jepang di daerah ini juga merupakan proses “membubarkan” untuk membentuk kembali komunitas yang sudah ada (Loomba, 2003:2).



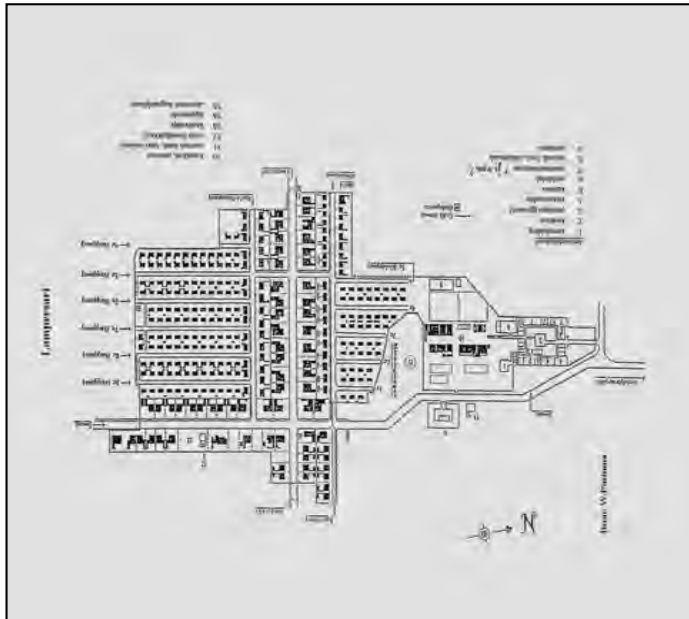
Sumber: *Semarang Beeld van Een Stad* (Broomer et.al. 1995: 50).

Gambar 24. Peta letak interniran di Semarang

Perubahan yang diinginkan oleh Pendudukan Jepang hanya berumur jagung (1942–1945). Masyarakat kampung telah menyesuaikan dengan situasi yang berubah seumur jagung itu. Setelah Belanda dan Jepang yang berkuasa, dengan kolonisasi yang berbeda, proklamasi yang dilantangkan Soekarno-Hatta mengantarkan penguasa Semarang berada di tangan orang pribumi, secara perlahan. Kepemimpinan anak pribumi ini menandai adanya harapan perubahan. Pada awalnya adalah kebebasan yang hampir tanpa batas (*euforia*) di lingkungan kampung. Kegembiraan ini sesaat kemudian menjadi ketakutan dengan adanya perang teritori antara tentara Jepang yang ingin mempertahankan wilayah pendudukan-nya melawan rakyat yang ingin bersegera merasakan kemerdekaan. Dalam situasi yang berubah ini masyarakat kampung mengalami juga perubahan, guna menyikapi kondisi yang dihadapi.

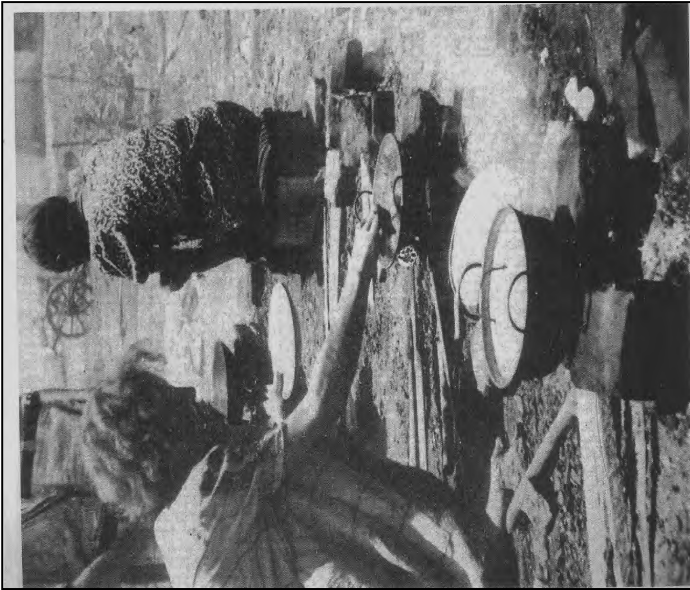


Sumber: www.japanseburgerkampen.nl
Gambar 25. Denah Inteniran Lamber Sari (Sompok)



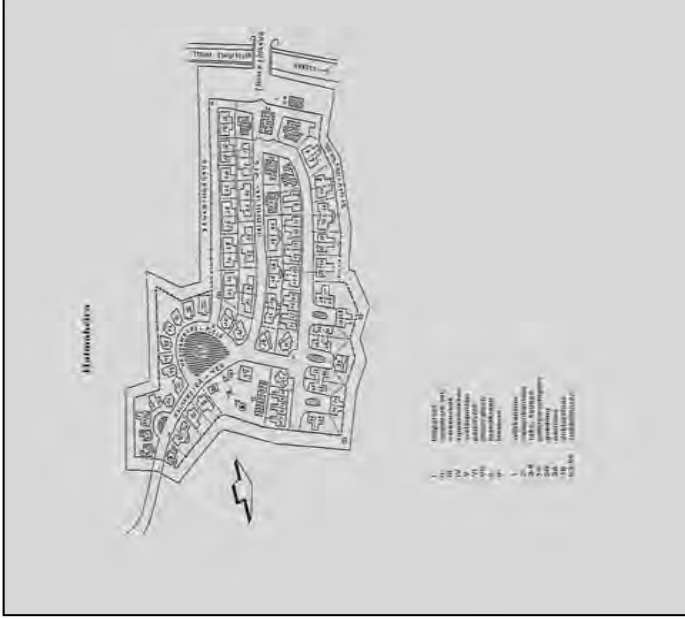
Sumber: www.japanseburgerkampen.nl
Gambar 26. Denah Inteniran Halmahera (Mlaten)

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sumber: Kon ik maar weer... (Vermeer 1999:xx)

Gambar 27. Suasana dapur umum di sebuah inteniran perempuan di Semarang



Sumber: Kon ik maar weer... (Vermeer 1999:xx)

Gambar 28. Suasana dapur umum di sebuah inteniran perempuan di Semarang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB VI

KOMUNITAS YANG BERUBAH: **Warga Kompleks Perumahan Sompok**

... bangunan mandi, cuci dan kakus
sangat sedikit digunakan,
karena warga lebih suka melakukannya di ruang terbuka
(*Verslag Gemeente Semarang, 1919*).

Masalah kompleks perumahan yang dihadapi oleh penghuninya sangat luas dan dalam, baik struktural (antara konsumen dan produsen) maupun horisontal (antarkonsumen). Termasuk di dalamnya yaitu penawaran perumahan, pemilikannya, sewa-menyewa, kualitas dan lingkungannya, dan lain sebagainya. Karena luasnya cakupan masalah konsumen perumahan dalam bab ini hanya diuraikan kehidupan penghuninya (hubungan horizontal).

A. MEMASUKI KOMPLEKS PERUMAHAN, MEMASUKI PEMUKIMAN MODERN

Dalam sebuah majalah bergambar, *Oedaja 10/1928*, dua orang kontributornya menggambarkan kondisi pemukiman di Semarang yang telah berdiri pemukiman modern (kompleks perumahan) di tengah pemukiman tradisional (kampung). Selama saya tinggal di Semarang, kota ini telah jauh melebihi kota-kota lainnya, khususnya menyangkut perumahan rakyat. Kampung Candi Baru membuat Semarang begitu terkenal, dengan proyek pengairan dan pemasangan riol sebagai ciri keunggulannya, dan bangunan sekolah dagang kotapraja dan bangunan lainnya. Perusahaan perumahan Kotapraja Semarang bagi perumahan rakyat baru muncul belakangan ini. Terdapat empat lahan pembangunan: Semarang Timur, Sompok,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Lemponsari dan Kintelan.¹ Rumah-rumah ini dibangun berbagai jenis dan harga sewa. Ada pengelompokan dalam tipe Eropa, pribumi dan campuran, misalnya rumah batu dan batu sebagian yang diteruskan dengan gedek atau bilik. Pada saat itu juga disediakan bangunan khusus untuk warung dan toko besar. Nilai sewa yang ditetapkan berkisar dari f 3,50–35 per bulan. Harga sewa rumah senilai f 11,25 dan selebihnya dilengkapi dengan infrastruktur kamar mandi dan WC, yang ditanggung perusahaan perumahan. Sebagai kewajibannya, si penyewa harus membayar uang jaminan penyambungan sebesar f 2,50, dan setiap bulannya membayar pajak sebesar 75 sen per 12 m^3 ditambah untuk setiap 15 sen per m^3 . Rumah dengan nilai sewa di bawah f 11,25 dibangun kamar mandi dan WC umum yang terpisah dalam jarak tertentu (pria dan wanita disendirikan). Air bersih diberikan secara gratis. Jalan-jalan yang dibangun merupakan jalan kereta kuda yang diaspal atau jalan setapak dari beton. Penerangan jalan tidak selalu sama, yakni penerangan listrik atau penerangan gas. Selain menyediakan rumah sewa, perusahaan rumah juga menyediakan rumah untuk dibeli (Amaloedin dan Soedarsono, 1928).

Di sebuah buku promosi pariwisata *Nederlandsch-Indie*, pemukiman di Kota Semarang dipresentasikan dengan bangunan rumah-rumah modern di daerah Candi Baru. Kondisi ini berbeda dengan gambaran rumah di tahun-tahun sebelumnya, seperti yang digambarkan oleh H.F. Tillema dua puluh lima tahun yang lalu, lewat gambar-gambar fotonya mengenai pemukiman di Semarang.² Kesan pemukiman yang indah, nyaman, dan layak dihuni benar-benar dirasakan oleh para penghuni dan penduduk sekitar pemukiman modern ini.

¹ Selain empat kawasan di atas, pemerintah Gemeente Semarang juga membangun perumahan di tiga kawasan lainnya yaitu di Kagok, Ngaglik, dan Mlaten.

² Tentang hal ini, lihat lebih jauh: *Kromoblanda (1915–1916)*, *Riolina (1911)* dan *Van wonen en bewonen, van bouwen, huis en erf (1913)*.



Sumber: Koleksi pribadi peneliti.

Keterangan: waktu pengambilan bulan Juni 2004.

Gambar 29. Rumah di Jalan Raya Sompok³

Di Sompok itu tempat perumahan orang Belanda, ya elit-elit Belanda ya, iya orang-orang kaya Belanda dulu. Ya di mBlimbing itu dulu yang menempati itu orang-orang yang kaya. Dulu teratur, itu pilihan kok dulu itu. Pilihan, kalo orang biasa gini tu ndak boleh menempati rumah itu itu, yang nempati ya orang yang (be)kerja di tempat-tempat Belanda gitu. Itu khan rumah seperti sekarang tu rumah apa namanya, kalo sekarang kayak rumah.. seperti Tlogosari, rumah itu namanya perumahan.⁴

Kondisinya dulu itu masih bagus. Soalnya penataannya bagus. Kalo Jaman Belanda itu kan *nganu* tho,.. Jaman Belanda itu kalo (m)bikin perumahan serba baguslah. Bikin sungai bagus, ada kawatnya, dipagari kawat. Terus rumah ini cuma...kecil. Jadi ukuran enam kali empat, tapi halaman belakang depan terus samping kanan kiri itu ditata sedemikian rupa bagus sekali. Terus jaman dulu dibagi per gang. Ada Manggis satu, dua, tiga terus sini lima. Taman Sompok itu taman itu bagus dulu, di-

³ Wawancara Jong Kie Tio (72 th), 14 April 2005; Tasiman (75 th), 2 Mei 2004; Birsirkulin (78 th), 5 Juni 2004

⁴ Wawancara Said [77 th], 10-6-2004.

tata rapi begitu. Ya, pokoknya untuk rekreasi anak-anak, ya pas pagi-pagi jalan-jalan. Orang-orang Belanda tu biasanya memilihnya ya di jalan besar. *Straat* yang besar itu dulu semuanya (dihuni orang—pen) Belanda. Jadi yang rumahnya besar-besar itu dulu Belanda-Belanda yang punya: dulu tuan Walkarde, tuan anu..tuan Boat, yang sebelah situ siapa ya (bu Masilah).⁵

Pemukiman modern, yang tergambar di atas, yang dibangun pada awal dekade abad ke-20 perencanaan dan pembangunannya bukanlah masalah yang sederhana. Apalagi pengadaan perumahan modern untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sebelum dibangunnya pemukiman modern itu, masyarakat tinggal dalam rumah-rumah yang mereka bangun sendiri: rumah tradisional di kampung, yang merupakan suatu unsur budaya yang tumbuh-kembang bersama dengan masyarakatnya. Kampung menjadi bagian identitasnya. Setelah mereka menghuni pemukiman modern itu, identitasnya berubah menjadi seolah-olah manusia modern. Hal itu tak lepas dari ‘kesungguhan’ Gemeente Semarang yang membangun dan mengubah pemukiman masyarakat. Perubahan yang terjadi di pemukiman dengan dibangun di atasnya rumah-rumah modern (kompleks perumahan) menyebabkan pergeseran terhadap wujud-wujud kebiasaan yang dianut masyarakat.

Kesan-kesan yang muncul dari masyarakat pribumi di atas (generasi yang masih memunyai keterikatan kuat dengan budaya tradisional) mencerminkan bagaimana pemukiman di Semarang telah berubah. Bangunan rumah menjadi teratur, baik ukurannya maupun bentuk bangunannya. Rumah-rumah disertai dengan fasilitas yang sebelumnya tidak ada: adanya fasilitas mandi, cuci dan kakus, yang disertai air ledeng dan listrik. Juga ada taman perumahan yang indah. Selain itu, dibangun fasilitas jalan, pembuangan limbah air, dan penerangan jalan. Dapat dipastikan, hampir semuanya itu merupakan hal-hal baru bagi masyarakat: unsur-unsur budaya baru telah masuk dalam kehidupan masyarakat. Pemukiman kampung di Semarang telah mendapat pengaruh unsur-unsur modernitas.

⁵ Wawancara Suparno [61 th] 28-6-2004.

Pada mulanya, rumah merupakan kegiatan perorangan (masyarakat). Perencanaan dan pembangunannya dilakukan secara swadaya oleh individu (masyarakat), yang terkadang melibatkan keluarga dan tetangga terdekat: mereka membangun rumah untuk mereka. Kompleks perumahan merupakan rumah yang sudah menjadi bagian komoditi, mereka hanya sekedar mengonsumsi (menggunakan). Mereka tidak terlalu ‘pusing’ memikirkan rencana dan membangunnya. Asal memiliki uang yang mencukupi untuk ongkos sewa, rumah dapat dihuni. Masuknya unsur-unsur baru di dalam pemukiman tentu saja menyebabkan pergeseran tatanilai, citra, dan persepsi tentang rumah. Arus perubahan masyarakat berubah dari paguyuban (*gemeinschaft*) ke masyarakat patembayan (*gesellschaft*), dari tradisional ke modern, dari pola kehidupan desa ke pola kehidupan urban (Budihardjo, 1986: 69).

Syarat utama pendirian perumahan yang sehat adalah terjaminnya air bersih yang sehat, agar dapat dikonsumsi. Masalah ini telah menjadi perhatian Gemeente Semarang, yang berbarengan dengan program pembangunan perumahan kawasan Candi Baru. Sebelumnya, sebuah perusahaan swasta telah beroperasi untuk menyuplai air bersih di Candi Lama. Di kota bawah diupayakan sumur-sumur artesis. Sementara itu, di selatan Kota Semarang, perbatasan Ungaran, telah ditemukan sumber mataair yang debitnya sangat besar dan kualitasnya baik. Pada awalnya, diupayakan bekerja sama dengan pihak swasta, untuk modal pengadaan pipa-pipa penyalur, air bersih dan sehat dari Ungaran agar dapat dialirkan ke kompleks-kompleks perumahan. Akan tetapi, modal dari swasta tidak didapatkan. Modal untuk pengadaan air ledeng dan untuk modal pembangunan lainnya didapatkan dari utang sebesar 1,5 juta sampai 2 juta gulden dari pemerintah pusat (Kakebeeke, 1931: 49). Dengan pembangunan abatoir di Srandol air ledeng dapat dinikmati warga kompleks perumahan Sompok dan kawasan perumahan lainnya. Utang dari pemerintah pusat juga digunakan untuk pengadaan listrik di kompleks perumahan, berbarengan dengan pembangunan perumahan Candi Baru. Pada awalnya, penerangan jalan dan rumah

ditangani oleh pabrik gas setempat. Akan tetapi, seiring semakin meningkatnya permintaan, pemerintah terus mengupayakan penambahan pengadaannya. Pengadaan tambahan listrik ini diserahkan kepada sebuah perusahaan tenaga listrik, NV. *De Algemeene Nederlandsch Indische Electriciteits Maatschappij* (ANIEM) (Kakebeeke, 1931: 49).

Secara umum gambaran kompleks perumahan Sompok dengan fasilitas modernnya adalah sebagai berikut:

Heke (Iya) masih inget. Perumahan Sompok dulu itu perumahan guminte (maksudnya gemeente). Ya ... itu (orang yang tinggal), ya orang-orang yang kerja di kontar Belanda. Dan, orang sini *ndak* bisa masuk rumah gitu he ... Pegawai itu, *tho* pegawai kota itu *tho* dapat rumah Sompok. Itu kampung airnya juga mengalir terus. Dikosek saben hari di kampung itu sama orang bale kota (balaikota). Rumah kontrakan, *lha*, itu itu saben hari dikosek airnya mengalir. *Ndak* boleh (apa itu) orang *mbuang-mbuang* kotoran. *Ndak* ada. Ada WC umum. Ya *tho*, ledeng umum juga ada. Sumur umum *sampeke* (sampai) sekarang sumurnya masih sekarang, tapi WC-nya sudah *ndak* ada. *Lha* (air) ledeng umum itu sudah *ndak* ada dulu situ tempate. Di depannya Bu Lastri tu dulu ada ledeng umum, tapi ledengnya tu ... kecil itu *lho*. *Kayak* jarum, tapi *milinya* (mengalirnya) besar sekali, *ndak* seperti sekarang.⁶

Saluran irigasi pembuangan limbah terorganisasi lebih baik. Bantaran kali ditemboki dengan batu, di kali Peterongan dan kali kecil yang melewati kampung-kampung gemeente. Kali-kali kecil itu melintasi setiap kampung baru, yang berfungsi menampung limbah-limbah cair hasil aktivitas masyarakat di perumahan, dan mengalirkannya ke muara kali yang lebih besar. Dari ujung selatan irigasi mengalir ke arah utara. Hasil limbah cair rumah tangga di kampung Mangga melewati Jalan Lamper Sari mengalir di kali yang menghubungkan kampung Rambutan, Jeruk dan Manggis. Hasil akhir pembuangan limbah-limbah itu dibuang di kanal Lamper (Kali Bajak) dan kanal Peterongan. Sementara untuk limbah rumah tangga di kampung Blimbing dan Mangga saluran akhirnya dibuang di kanal Peterongan. Kondisi kompleks perumahan Sompok yang

⁶ Wawancara Said [77 th], 10-6-2004.

dibangun pada dekade awal abad ke-20 kini telah berubah, menjadi pemukiman yang sangat padat. Masuk kompleks perumahan Sompok dari arah barat, sebagai pintu masuknya, dapat dilakukan lewat jalan MT. Haryono (Sompok Lama) atau lewat jalan Sriwijaya (Sompok Baru). Memasuki areal ini di sebelah kanan dan kiri jalan akan terlihat sisa-sisa rumah yang dibangun pada jaman belanda dan kebanyakan telah dibongkar menjadi rumah-rumah baru. Kurang lebih 1000 meter dari ruas jalan MT. Haryono, sebagai pintu masuknya, di sebelah kiri setelah Taman Sompok (sekarang kantor kecamatan Semarang Selatan) terdapat kampung gemeente Manggis, dan menyeberangi jalan ke arah kanan akan ditemui kampung gemeente Rambutan dan Jeruk. Dari jalan Sriwijaya, tak jauh dari situ sudah terlihat sisa rumah-rumah yang dibangun awal abad ke-20 (jalan Lamper Sari).⁷

Di sepanjang jalan besar (kurang lebih 8–10 m) antarkampung gemeente itu terdapat rumah-rumah berukuran besar, yang dulunya banyak dihuni oleh orang Belanda. Masuk ke gang di belakang rumah itu terdapat kampung-kampung gemeente yang dihuni pegawai rendah pemerintah kotapraja: Manggis, Rambutan, dan Jeruk.

Tabel 6. Jumlah rumah di kompleks Sompok sampai Tahun 1929

Jenis	Tipe	Jumlah
Semipermanen	B	15
	D	18
	II	183
	IV	114
	V	71
Permanen	II	12
	IV	25
	V	3
	VI	7
Total		448

Sumber: *Gedenkboek der Gemeente Semarang* (1931:176).

⁷ Wawancara Jong Kie Tio (72 th), 14 April 2006)

Tabel 7. Macam-macam Rumah Semipermanen yang dibangun Gemeente Semarang (untuk orang Eropa)

Type	Luas Bangunan (m ²)	Luas tanah (m ²)	Biaya pembangunan (dalam gulden)	Sewa rumah & tanah/bln	Sewa Tanah/ bln	Ket.
A	33		450	5.70	1.70	
B	35		490	5.90	1.70	
D	42 + 18		675	7.40	1.70	
II	27	140	600	5.45	1.16	
IV	44 + 8	280	900	9.20	1.40	
V	44 + 8	280	1000	11.65	1.98	
VI	49 + 10		1450	19.10	2.25	

Sumber: *De zorg voor de volkhuysvesting...Flieringa (1930:183).*

Tabel 8. Macam-macam Rumah Permanen yang dibangun Gemeente Semarang (untuk orang Eropa)

Type	Luas Bangunan (m ²)	Luas tanah (m ²)	Biaya pembangunan (dalam gulden)	Sewa rumah & tanah/bln	Sewa Tanah/bln	Ket.
IIb	27	240	700	5.75	1.16	
IVb	33 + 8	210	1185	9.75	1.40	
Vb	44 + 13	294	1435	14.50	1.98	
Vib	41 + 13	385	2030	30.00	2.25	

Sumber: *De zorg voor de volkhuysvesting...Flieringa (1930:182).*

Tabel 9. Macam-macam Rumah untuk Pribumi yang dibangun Gemeente Semarang

Type	Luas Bangunan (m ²)	Luas tanah (m ²)	Biaya Pemb. (gulden)	Sewa rumah & tanah/bln	Sewa tanah/bln	Ket.
K O	17	80-100	385	3.00	0.60	
K I	21	90-120	506	4.45	0.65	
K II	28	110-150	725	7.50	0.95	
K III	35	140-200	1030	11.25	1.15	
K IV	42	175-225	1260	14.50	1.35	
K V	60	225-300	1570	20.00	1.65	
K VI	74	275-400	2170	30.00	2.25	

Sumber: *De zorg voor de volkhuysvesting...Flieringa (1930:184).*

Maraknya pembangunan rumah modern di kompleks-kompleks perumahan berarti telah mengubah pemukiman rakyat yang tidak hanya kampung (tradisional) Kota Semarang, tetapi juga kampung (gemeente) yang modern. Dari segi arsitektur, bangunan-bangunan rumah tersebut merupakan bangunan bergaya modern yang terus berkembang pada tahun 1930-an, saat para akademisi dan praktisi dari Belanda mengembangkan gaya *Indisch-Tropisch*.⁸

B. MENJADI WARGA KOMPLEKS PERUMAHAN, MENJADI MANUSIA MODERN

Salah satu hal yang muncul dalam kehidupan awal modern di kampung gemeente ini adalah birokrasi. Dalam lingkungan kampung modern ini masyarakat mulai mengenal birokrasi dalam proses awal menjadi warga kompleks. Ketika mereka akan menghuni sebuah rumah, mereka tidak langsung mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tidak otomatis seorang yang bekerja di instansi pemerintah dapat rumah dinas. Ada proses pendaftaran, dan seleksi dari pejabat yang berwenang.

Periode tahun 1930-an, pemerintah Hindia Belanda lebih menekankan pemerintahan daripada politik, menitikberatkan keahlian teknik dan perkembangan ekonomi sebagai nilai utamanya. Penekanan pada pemerintahan yang modern, efisien, dan yang mementingkan perkembangan telah mencapai puncaknya. Pemerintahan saat itu mendekati cita-cita *beamtenstaat*, negara sebagai suatu mesin birokrasi yang efisien (McVey, *Beamtenstaat di Indonesia*: xxxx :1). Pemerintah mencitrakan tentang modernitas, yang mensahkan adanya perbedaan-perbedaan dalam kebudayaan, dan kekuasaan antara masa dengan elit penguasa. Pencitraan modernitas di awal abad ke-20 ini memberikan kesempatan kepada penduduk ikut

⁸ Lihat: Widodo dan Wong, "Modern Architecture in Indonesia - A Visual Database on the Discourse in Tropicality and Identity", dalam www.geocities/j.widodo.com

menikmati keuntungan darinya, dan berubah dari kawula menjadi warganegara. Ketentraman dan kemakmuran masyarakat di atas segala-galanya, sebagai kuncinya adalah keahlian organisasi, teknik dan ekonomi. Penduduk harus percaya pada dedikasi penguasanya, yang akan membimbing rakyat jelata ke kemakmuran material. Selain itu, penduduk dicekoki dengan rahasia kebudayaan modern, kunci untuk menjadi manusia seutuhnya (McVey, *Beamtenstaat di Indonesia*:xxxx:9).

Birokrasi kemudian menjadi mesin untuk menjalankan pemerintahan Indonesia. Mesin ini sudah berakar sangat kuat dan sulit untuk diubah. Setiap saat yang berganti hanya operatornya. Sebagai gambaran: pada tahun 1930 jumlah personal birokrasi kolonial berjumlah 145.000 orang, dan pada tahun 1950 jumlah personal birokrasi sebanyak 420.000. Dalam kurun 20 tahun jumlahnya bertambah 275.000 orang, atau 13.750 prang per tahun. Setelah itu banyak bekas pejuang masuk memasuki dunia birokrasi RI. Pada tahun 1960 jumlah keseluruhan personal birokrasi berjumlah 800.000 (Ricklef, 1994: 358).

Selain dapat dijadikan mesin politik, birokrasi juga mengajarkan keteraturan (disiplin). Birokrasi dibentuk untuk menjamin kepastian hukum, kejelasan batas tugas dan tanggungjawab. Karena pemerintahan demokratis juga membutuhkan birokrasi, maka menurut Max Weber birokrasi harus berjalan dengan baik, profesional, netral, dan bebas dari kepentingan, serta mementingkan efektifitas dan efisiensi kerja semata. Pelakunya pun harus orang yang baik hati, *lempeng-lempeng* (Wirosardjono, 2004:456). Birokrat hasil pengkaderan pendidikan kolonial terkenal dengan kekakuannya, *saklek*. Belajar keteraturan (kedisiplinan) yang lain didapatkan warga dari kegiatan bulanan membayar uang sewa. Jika masyarakat tidak mampu membayar sewa per bulannya, maka harus keluar dari kompleks perumahan.

Waktu saya kecil kan *ndak* ada surat kelahiran, *ndak* ada akte. Jadi di sini... ya.. lahir saya itu sebetulnya Jaman Belanda. Sebelum Jepang belum masuk saya sudah ada. Tapi saya masih kecil. Masih kecil ya ... terus di

situ bapak saya *khan* kerjanya di pemerintahan. Di pemerintahan sini (dapat) rumah di sini.. ya rumah Manggis, Jeruk, Blimbing. Itu (semua) rumah pemerintah. Dulu sini tu disewakan, gitu. Disewakan ... jadi tiap bulan itu ditarik begitu.⁹

Selain mengajarkan kedisiplinan, pembayaran sewa rumah dalam hitungan bulan ini juga memengaruhi bagaimana masyarakat menggunakan kalender. Semula menggunakan kalender Jawa, menjadi kalender Masehi campuran Jawa. Masyarakat Barat menyebutkan nama-nama hari dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu (nama-nama hari dalam sistem penanggalan Masehi). Masyarakat Jawa menggunakan penghitungan hari dengan *Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon* (nama-nama hari dalam sistem penanggalan Jawa). Mereka menyampurkan dua sistem penanggalan tersebut, misalnya hari Senin-legi, Selasa-pon, dll. Penggunaan hari dengan menggunakan dua sistem kalender (masehi dan Jawa) juga untuk menyebutkan angka bulan dan angka tahun. Hal ini menjadi sedikit masalah ketika mereka menjawab pertanyaan kapan mereka dilahirkan, atau menjawab pertanyaan kapan peristiwa-peristiwa penting lainnya (menyangkut dirinya) terjadi. Mereka biasanya tidak dapat menjawab secara tepat (kapan tahun dan bulan), tetapi mereka hanya dapat menjawab persis harinya. *Wethon*, hari lahirnya, disebut dengan menggunakan dua sistem penanggalan.

Penggunaan penanggalan Masehi ini mulai dikenal secara umum oleh pribumi Jawa sejak pemberlakuan sistem penggajian kepada pejabat pribumi. Ketika para pejabat digaji dengan ukuran bulanan, berarti para pembantu di bawahnya juga demikian. Pemberian gaji ini pula menjadikan para pejabat mentoleransikan ketentuan yang dianggap baik dan berguna sesuai kehendak atasan. Para priyayi baru yang diangkat ini harus mematuhi perundangan kolonial yang berlaku. Selain digaji, mereka juga mendapatkan rumah dinas. Rumah yang mereka tempati adalah rumah yang dide-sain ala Barat. Sehingga, pembangunan rumah priyayi ini menjadi proyek pemerintah (Soekiman, 2000: 200-1).

⁹ Wawancara Sunarto Padimin [75 th] 15-6-2004.

Kelayakan hasil proyek pembangunan kompleks perumahan untuk tempat tinggal, sebagai bagian modernisasi, memang tak terbantahkan. Bahkan, banyak orang yang menginginkan tinggal di salah satu rumah di kompleks itu. Akan tetapi, tidak semua orang dapat tinggal di salah satu rumah itu. Karena sewanya bulanan, tentu saja orang yang tinggal di situ merupakan orang-orang yang berproduksi dengan hitungan (bulanan) pula, sehingga yang banyak menempati kampung modern ini tentunya orang yang berpenghasilan tetap (pegawai). Proses produksi (kepegawaian) menentukan pola konsumsinya. Pada tahun 1930-an awal, gambaran sebuah keluarga pribumi (modern) membelanjakan gajinya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya.

Rumah tangga kami mulai berjalan teratur, kami sudah punya tekad untuk sementara tidak akan ikut pertemuan-pertemuan apabila ada pesta. Melihat bioskop pun tidak. Kami hanya main tenis, olahraga kegemaran kami, demi untuk menjaga kesehatan kami. Gaji pertama yang diterima suami saya sebesar 174 gulden. Perincian penggunaannya sebagai berikut. Sewa rumah 15 gulden, bayar listrik 2 gulden, bayar pembantu rumah tangga 1,5 gulden, bayar supir 5 gulden, membayar anggsuran mesin jahit 5 gulden, angsuran dinamo 3 gulden, lauk pauk sehari 20 sen (sebulan 6 sen), 40 kati beras (1 kati 2 ½ sen), dan menabung 100 gulden tiap-tiap bulannya (Sutopo:305).

Pegawai kelas menengah dengan gaji 174 gulden per bulan termasuk kehidupan mewah bagi kalangan pribumi kebanyakan. Mereka tentunya sudah dapat menikmati tontonan modern yang sangat digemari masyarakat pada saat itu, bioskop: seolah-olah telah bergaya hidup modern. Bergaya hidup modern juga mereka perlihatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada suatu hari kira-kira pukul sebelas siang, pekerjaan saya sudah selesai. Kami bertiga duduk di serambi muka kamar dan mengembangkan tikar di atas tangga (*trap*). Emmy main pasaran dengan bakul kecil berisikan daun-daun warna-warni dan bermacam-macam bunga yang diambil dari halaman sekolah. Nenek, karena panasnya tidak memakai baju, hanya mengenakan kain panjang penutup dada, *kemben*. Dan tidak lupa dengan permainan kesayangannya dakon. Saya sedang menyele-saikan sulaman di lingkaran lengan celana (*speel-pak*) yang saya buat dari blacu (*macao*) (Sutopo:305).

Dari gambaran yang disampaikan sebuah keluarga kelas menengah di atas memperlihatkan, gaya hidup yang mereka jalani telah bercampur dengan budaya Barat. Menjahit sulaman merupakan kegiatan perempuan Barat untuk mengisi waktu luangnya. Dalam masyarakat pribumi kebanyakan, waktu luang biasanya diisi untuk kegiatan-kegiatan produksi membantu suami. Misalnya, menanam tanaman palawijo dan merawatnya di pekarangan rumah.

Gaya hidup campuran antara budaya pribumi dengan budaya Barat telah ada sejak abad ke-18. Gambaran gaya hidup campuran lain dapat disimak pada penuturan Rooda yang menginap di Pesanggrahan Tjiampea, dekat Bogor. Pada awal abad XIX, ia menulis dalam catatan singkatnya tentang kehidupan tuan tanah pemilik pesanggrahan:

“... Pagi hari jam 05.30 kami dibangunkan dengan bunyi lonceng. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, para tamu segera memakai sarung dan kebaya tipis. Kami menuju serambi belakang untuk bersantai sambil minum kopi atau teh ditemani manisan dan buah-buahan.

Usai mandi para lelaki dengan menunggang kuda atau kereta mengelilingi kebun. Kemudian dilanjutkan membaca surat-surat, surat kabar, menulis, atau membaca. Makan pagi yang mewah dan enak pun sudah dihidangkan. Hidangan yang semacam ini di Eropa biasanya untuk makan siang.

Sambil menikmati suguhan, telinga kami dihibur suara gamelan dan musik Eropa yang merdu. Para perempuan kemudian ke toilet dan tuan-tuan menuju ke meja bilyar. Di sini orang mendengar orgel putar yang merdu diselingi dengan piano sambil merokok cerutu, omong-omong, dan minum anggur pagi.

Kurang lebih pukul 13.00 adalah waktunya orang makan dengan piring lengkap, yang terdiri antara lain jenis-jenis makanan Indis. Seperti kare dari sarang burung atau sup kura-kura, nasi, sayur-sayuran, buah-buahan, berbagai daging sapi, kijang, ikan, rempah-rempah, acar, nanas, mangga dan berbagai jenis buah-buahan, mentimun, dan macam-macam manisan yang direndam dengan minuman anggur. Pelayannya adalah para budak dan pembantu perempuan muda.

Makan siang ini diiringi dengan lagu-lagu musik Eropa. Sementara itu pelayanan tuan rumah sangat bersahabat, tidak dibuat-buat dan dengan penuh kegembiraan sehingga hidangan selalu menjadi kenangan. Usai makan ada sementara tamu yang beristirahat sebentar, ada pula orang-orang yang minum teh dan kue-kue. Disusul acara perjalanan keliling dengan naik kuda atau keretakuda.

Setelah puas berkeliling disuguhkan kopi, selanjutnya para tamu muda berdansa dan yang tua-tua main kartu di meja permainan. Pada pukul 10.00 malam berkumpul orang-orang itu untuk makan malam. Baru pada tengah malam pergilah masing-masing ke tempat tidurnya” (Soekiman, 2000:155-156).

Tentu saja kehidupan para priyayi yang menghuni kompleks perumahan berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Sebagai gambaran perbandingan, berikut kehidupan seorang guru di awal tahun 1930-an.

Saya punya tetangga seorang guru. Keluarganya terdiri atas bapak-ibu, 3 orang putra dan seorang kemenakan. Keluarga ini setiap hari membuka kaleng sarden. Di tempat sampah kaleng sarden sampai bertumuk seperti gunung. Karena ingin tahu, saya memberanikan diri bertanya. Jawabnya logis sekali. Keluarga ini ternyata setiap bulan hanya membeli kecap dan setiap harinya beli cabe rawet serta satu kaleng sarden. Semua itu sudah cukup untuk keluarga, harganya 12½ sen. (Ny. Sutopo dalam Lasmidjah, 1981:305).

Kebanyakan yang menjadi warga kompleks perumahan ini memang masyarakat kelas menengah, priyayi. Namun di kompleks perumahan juga terdapat kehidupan pegawai rendahan. Mereka di kompleks Sompok tinggal di kampung (*gemeente*) Manggis, Jeruk dan Rambutan. Di kompleks Mlaten mereka tinggal di kampung *gemeente* Krakatau, Hawa dan Hiri. Pengkelasan masyarakat ini membawa gaya hidup lewat pola konsumsi mereka. Masyarakat kompleks perumahan/kampung *gemeente* seolah-olah menjadi manusia modern.

... terus pegawai balekota (balaikota) itu *tho* orang rendahan. Ya ... sana (di) Maggistan sana. Serkarang *khan* dibikin gedong-gedong. Manggis itu (untuk) orang rendah, itu pegawai yang *ngosek* (membersihkan) got itu *khan* belinya dirumah itu. Jadi kalo orang orang penggede ... ya orang

gede-gede tu di Lamper Sari . Rumahe Jeruk, Jeruk apa itu.. banyak yang orang yang pegawai balekota (balaikota). Pegawai rendahan ada, yang besar ada, tapi yang penting bagus ya. *He'e* (iya) *kehan* (di) sana *kehan* bagus-bagus semua sekarang, sudah dibikin bagus, sudah dijual sama yang make (menguhuni) dulu. Misalnya ini, (rumah) yang saya pake, juga yang mbangun itu¹⁰

Memang yang membawa modernitas di Indoneisa adalah golongan kelas menengah. Kekagetan budaya, dari kawula menjadi orang yang ditinggikan, menjadikan mereka mengambil sikap dan meniru gaya hidup orang di atasnya. Masyarakat priyayi baru ini masih tetap menganggap perlu tetap adanya budaya masa lampau yang dibanggakan. Mereka menganggap perlunya menggunakan budaya Barat demi karier jabatan dan prestisenya dalam hidup masyarakat kolonial. Hal semacam ini tampak, misalnya dalam cara mereka bergaul, dalam kegiatan hidup sehari-hari, seperti menghargai waktu, cara dan disiplin kerja, dsb.¹¹ Anggap saja, modernitas adalah sebuah nilai yang netral. Akan tetapi, jika yang membawanya adalah golongan yang mengukuhkan status kekuasaan hal ini akan membawa pada modernitas yang menindas. Sama halnya dengan agama, ketika digunakan oleh penguasa maka ia mempunyai sifat yang menindas. Namun, modernitas adalah sebuah dogma yang menuntun ke arah tertentu. Modernitas tidak bebas nilai, dan di Hindia Belanda malah melahirkan kelas menengah di Indonesia, yang bersumber pada revolusi industri. Setelah merdeka, posisi mereka lebih istimewa, karena jumlah mereka masih sedikit. Mereka mencitrakan dirinya hebat dan berwibawa. Situasi ini masih sangat terasa sampai sekarang. Para penghuni kompleks perumahan yang ada di gang elit (Lamper Sari, Halmahera), sering meremehkan penghuni di gang yang dihuni golongan menengah ke bawah (Manggis, Hawa, Hiri, Krakatau, Jeruk, Rambutan).

¹⁰ Wawancara Said [77 th], 10-6-2004. Pembagian kelas tipe rumah juga ada di kompleks perumahan lain di Semarang. Di Mlaten, kompleks untuk golongan menengah ke bawah ada di kampung Krakatau dan Hiri (Wawancara Pajjo [70 th], 23-4-2005).

¹¹ Gambaran tentang priyayi baru yang bergaya seolah-olah modern dalam sastra modern Hindia Belanda, salah satunya adalah *Salah Asoeban*, karya Abdoel Moeis (1928).

C. DALAM KOMPLEKS PERUMAHAN MODERN

1. Kehidupan kompleks perumahan

Kehidupan warga yang menghuni di perumahan ini menghadapi hal-hal baru, sikap dan perilaku ketradisional mereka bercampur dengan modernitas. Bahkan terjadi semacam keagetan budaya. Pada awalnya mereka tidak terbiasa dengan kondisi rumah yang difasilitasi kakus di kompleks perumahan. Seperti laporan dalam *Verslag Gemeente 1919* banyak penduduk yang belum terbiasa menggunakan fasilitas kesehatan modern itu.

Rumah-rumah yang dibangun pertama di Sompok dengan sistem pembuangan limbahnya, seperti yang dirancang semula, belum selesai dibangun. Berulang kali warga mengeluhkan kondisi tersebut kepada dinas kesehatan umum. Sistem semula yang memasang saluran tertutup pada setiap blok bangunan di sepanjang sisi belakang rumah, di atasnya dibangun kakus pada setiap pekarangan (MCK umum—pen). Di ujung atas terdapat bangunan cuci dan mandi di mana air yang datang harus dialirkan lewat saluran itu. Pada sisi bawah terdapat tempat buangan. Hasilnya: bangunan mandi dan cuci sangat sedikit digunakan karena warga lebih suka mandi di ruang terbuka. Saluran air dengan cara ini tidak bisa digunakan, dan diganti dengan menggunakan lubang kakus. Penduduk juga lebih suka berak di tanah sebuah lobang pekarangan, setelahnya mereka segera menimbun yang seolah-olah seperti lubang kakus.

Betapa canggungnya orang pribumi Jawa yang hidup secara tradisional di kampung, kemudian pindah untuk bertempat tinggal di dalam rumah gedung di dalam gang atau kompleks dengan suasana rumah bergaya Barat yang modern. Tempat yang dibangun di setiap gang perumahan itu dimaksudkan agar masyarakat penghuni memunyai kebiasaan hidup bersih, juga agar kampung gemeente tetap bersih, tidak seperti di kampung biasa pada umumnya. MCK umum itu selalu dijaga kebersihannya oleh penjaga di bawah dinas kesehatan kotapraja. Selain membersihkan MCK petugas dinas ini juga membersihkan selokan tempat pembuangan limbah cair rumah tangga. Limbah rumah tangga berbentuk padat (sampah) juga

diambil rutin oleh petugas dari kotapraja. Dalam lingkungan yang bersih ini masyarakat hanya berkontribusi sewa bulanan.

Desain rumah bersih di kampung gemeente ini merupakan perpaduan antarbudaya pribumi dan Barat. Pada awalnya, orang yang lahir di Belanda sebenarnya tidak terbiasa mandi setiap hari. Akan tetapi, setelah berinteraksi dengan masyarakat pribumi dan berada di cuaca tropis kebiasaan mandi setiap hari menjadi kebiasaannya. Interaksi sudah terjadi sejak awal munculnya modernisasi di Eropa (abad ke17). Pada saat itu bangunan rumah yang berukuran besar biasanya terdapat bangunan-bangunan samping yang dipergunakan untuk gudang, tempat menyimpan kayu bakar, tandon air minum, beras, minyak, dsb. Biasanya bangunan rumah samping bertingkat, ruang tingkat atas digunakan untuk tempat tinggal para budak. Kebiasaan menyediakan tempat tinggal untuk budak tidak dikenal di Belanda. Para budak ini kesehatannya tidak terurus dengan baik. Hal demikian juga terjadi pada ruang-ruang pembantu di rumah induk milik para penguasa Belanda yang juga jarang dijaga kebersihannya. Sebagai contoh, budak yang tinggal di dalam rumah van Riemsdijk di Tijgergracht. Di rumah ini bertempat tinggal tidak kurang dari 200 orang budak, yang terdiri atas anak-anak, orang tua atau muda yang tinggalnya berjejal. Saluran pembuangan limbah (*rioolering*) sulit diadakan, saat itu (1689). Rumah berukuran kecil hanya memiliki sebuah kakus (*gemackstoel*) yang tempat tinjanya dapat diangkat, yang dibuang ke kali setiap malam. Cara pembuangan demikian sangat menyusahkan, kemudian didapatkan pemecahan. Dengan menempatkan pintu belakang menuju kali. Kondisi ini pun juga menyusahkan, karena rumah-rumah kecil dibangun berderet dan saling membelakangi. Akhirnya, dibangun tempat pembuangan yang terpisah (Soekiman, 2000:145).

Kebiasaan mandi tiap hari pribumi Jawa berpengaruh orang Barat. Di rumah van Riemsdijk terdapat bangunan berbentuk rumah-rumahan kecil yang terbuka (*speelhuisje*), yang terletak di tepi kali (tempat untuk mandi penduduk pribumi). Kemudian,

van Riemsdijk menggunakannya sebagai kamar tunggu para tamu dengan menghilangkan jenjang tangga yang menuju ke arah kali. Terdapat dua buah rumah kecil berkubah yang terletak di sungai di depan rumah Gubernur Jendral Van der Parra (Jalan Veteran sekarang). Diletakkannya satu perangkat tempat duduk pada ruangan rumah kecil berkubah ini untuk bersantai, bahkan juga dipergunakan untuk menerima tamu-tamunya. Ambang pintu diletakkannya dekat dengan *wastrap* (tempat membersihkan kaki sebelum naik ke tangga). Bagian dalam ruang ini diusahakan berpenampilan sebagus mungkin. Dengan demikian, Paduka Tuan Gubernur Jenderal di pagi hari leluasa mengamati setiap orang yang mandi di kali (Soekiman, 2000:146).

Selain tidak ada kakus, di rumah Jawa juga tidak dikenal ruang khusus bagi keluarga dengan perbedaan umur, jenis kelamin, generasi, famili, bahkan di antara anggota dan bukan anggota penghuni rumah. Fungsi ruang tidak dipisahkan atau dibedakan dengan jelas. Pembagian ruang-ruang di dalam rumah dengan fungsi yang khusus di dalam rumah dimaksudkan agar privasi terjamin (persepsi Barat). Konstruksi rumah campuran itu menjadikan makin canggungnya orang pribumi untuk tinggal di dalam rumah barunya itu, pada awalnya. Persepsi Jawa, rumah adalah model alam mikrokosmos tidak didapatkan pada alam pikiran Eropa. Jelas, tempat tinggal orang Belanda tidak dihubungkan dengan kosmos dan tidak mempunyai konotasi ritual seperti pandangan dan kepercayaan Jawa. Memang, orang Eropa mengenal peletakan batu pertama dan pemancangan bendera di atas kemuncak bangunan rumahnya yang sedang dibangun dengan diikuti pesta minum bir, tetapi hal semacam ini adalah peninggalan budaya lama mereka.

Gaya hidup dan bangunan rumah campuran pada awalnya cenderung banyak bercirikan budaya Belanda. Hal ini terjadi karena para pendatang bangsa Belanda pada awal datang ke Indonesia membawa kebudayaan murni dari Belanda. Pengaruh afektif kebudayaan Belanda yang sangat besar lambat laun makin berkurang, terutama setelah anak keturunannya dari hasil perkawinan dengan

bangsa Jawa makin banyak. Seperti rancang desain bangun di kompleks perumahan Mlaten. Masyarakat pribumi pun sudah dapat menyesuaikan dengan perpaduan budaya campuran itu. Pada perumahan Mlaten kakus telah dianggap sebagai bagian integral dari rumah. Ketika desain rumah sewa ringan dirancang tidak dengan kakus, maka banyak calon penghuni membayar lebih kepada pemerintah agar dibangun kakus.

Bangunan rumah-rumah sederhana itu sangat diminati penduduk, sehingga hampir tidak ada rumah sewa yang kosong penghuninya. Bahkan banyak penyewa rumah yang membayar lebih, untuk mendapatkan MCK sendiri. Sekitar 663 rumah NV. Volkhuisvesting di kampung Mlaten itu penghuninya adalah: 207 bangsa Eropa; 505 bangsa Tionghoa; 1180 bangsa bumiputra; dan 7 bangsa timur asing. Sedangkan penghuni dari masyarakat kuli mulai sedikit.¹²

Baik kelas menengah maupun kelas bawah, kehidupan mereka boleh dikatakan berubah setelah bertempat tinggal di kompleks perumahan. Bagi kalangan kelas bawah, walau sebenarnya masih susah, tetapi mereka merasa senang tinggal di kampung modern. Mereka sering menyontoh kehidupan di gang-gang yang lebih mapan penghasilannya, yang hidup dalam kemewahan.

Hidup seolah melihat orang lain lebih enak (*nawang-sinawang*) dalam dunia modern yang sudah ramainya kapitalisme percetakan dan visual menjadikan mereka tidak hanya melihat lingkungan di sekitarnya. Koran, majalah, dan terakhir bioskop menjadi media untuk melihat, yang seolah lebih baik, selain sebagai hiburan. Standar idealnya adalah media, tetapi standar realitasnya adalah lingkungan sekitarnya. Akan tetapi wayang dan kesenian rakyat lainnya masih dijadikan sebagai hiburan, guna melihat sesuatu yang indah-indah. Misalnya, model pakaian, alat kecantikan, atribut, dan sesuatu yang baru lainnya seolah-olah menjadi bagian dari kenyataan dirinya. Hal-hal baru yang dilihatnya berdampak pada perilaku dan gaya hidup masyarakat, dampak lebih jauhnya adalah pada pola

¹² Lihat: *Locale Tehniek Juli 1932*.

konsumsi. Seolah bertempat tinggal di kompleks merupakan bagian dari priyayi, dengan pola hidupnya.

Dalam interaksi antar penghuni tidak dapat terjadi seperti dalam lingkungan kampung biasa. Apalagi antarpenduduk pribumi dan Barat. Sementara pergaulan di lingkungan perkotaan antarorang Eropa dapat terjadi dengan mudah.

Dalam waktu singkat kami telah diterima di dalam pergaulan masyarakat Bandung. Pengalaman Hindia saya sebelum ada di perkebunan, tetapi saya berpendapat bahwa di dalam pergaulan tak banyak terjadi perubahan. Nyatanya ada tiga kelas: bangsa pribumi yang jutaan jumlahnya, pergaulan kami dengan kelompok ini terbatas hanya pada pelayan-pelayan; kelompok indo Eropa dan kelompok Eropa Totok, yang terbagi menjadi kelas-kelas kecil lainnya (Bijkerk, 1988:53).

Bahkan, ketika partai ekstra nasionalis dari Belanda (NSB), yang menonjolkan superior ras, datang di Hindia Belanda dapat diterima dengan antusiasme kalangan orang Eropa. Hal ini menandakan bahwa walau telah terjadi campuran kebudayaan tetapi dalam lingkungan pergaulan sosial akrab. Salah satu penyebabnya adalah tenaga-tenaga yang datang di Hindia Belanda adalah orang totok yang hanya punya niatan mengurus dirinya sendiri.

“Sampai perang dunia pertama masyarakat Eropa di Hindia Belanda terutama terdiri dari suatu ‘kelompok penetap’ yang memunyai segi-segi khas dan warna tersendiri. Hal ini dapat berubah karena beberapa hal. Tenaga-tenaga yang dikirim dari Barat ke negeri ini kebanyakan orang totok, beserta keluarganya. Mereka mendapat cuti Eropa, gaji dan fasilitas yang baik: terbentuklah ‘kelompok yang hanya singgah’. Mereka hidup ala Eropa di kota-kota besar Hindia Belanda. Sehingga, mereka tidak memunyai keterikatan dengan negeri Hindia Belanda, muncul pembatas pergaulan (jurang). Dan dapat dimengerti bahwa orang-orang Barat yang diberikan jabatan itu secara otomatis memunyai perasaan lebih tinggi, yang tidak dialami di negeri asalnya (Belanda). Jadi, mereka sangat senang dengan kedudukan istimewanya, sehingga mereka lupa akan kenyataan. Bahkan, sampai sekarangpun dapat ditemui orang-orang di Den Haag orang-orang tua bekas di Hindia Belanda dulu saling menyapa,”Selamat pagi tuan Gubernur”, dan “Apa kabar tuan Residen” (Bijkerk, 1988:66-67).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Komunitas dalam kampung gemeente ini berubah, seiring kedatangan penyelamat palsu dari kolonialisme Hindia Belanda. Dengan kecepatan dan kesiapan berorganisasi, pemerintahan tentara Jepang menata kembali komunitas hidup penduduk. Ketika pendudukan Jepang mempersiapkan pemerintahannya, banyak penduduk kota di Semarang menjarah barang-barang di gedung-gedung yang tak lagi dijaga petugas keamanan pemerintah Hindia Belanda.

Penyambutan rakyat yang penuh sukaria kepada penyelamat palsu tak berlangsung lama. Seperti yang diceritakan dalam buku kenangan Nh Dini, tentara Jepang dengan seenaknya masuk ke rumah penduduk jika memerlukan sesuatu.

Pada suatu hari, lima orang serdadu Jepang tiba-tiba berada di belakang kampung ...

Lalu, dua di antaranya mendekat lagi. Dan tanpa tingkah kesopanan sedikit pun, mereka mematahkan bilah-bilah bambu serta tanaman yang menjadi pagar ...

Waktu kedua tentara itu menggulungkan kawat, aku sempat memperhatikannya dari dekat. Itulah tentara yang dikatakan Bapak penyelamat dari penjajah! (Dini, 2002:ix).

Perubahan sikap masyarakat kampung terhadap pendudukan Jepang memang drastis, tak terkecuali masyarakat di kompleks perumahan. Yang paling tragis adalah warga kompleks perumahan yang menempati rumah-rumah di pinggir jalan. Mereka yang kebanyakan adalah orang-orang Eropa memiliki dua pilihan yang sama-sama tidak enak, meninggalkan rumah mereka dengan segala kehidupan modernitas atau menjadi tawanan perang. Status sosial mereka pun berubah. Kehadiran Jepang di kompleks perumahan Sompok, maupun di Mlaten merubah tatanan komunitas yang berlangsung hampir dua dekade.

Sementara itu, penduduk pribumi status sosialnya pun juga berubah. Yang paling drastis adalah kelas menengah, menjadi setara dengan tentara Jepang. Apalagi, jika mereka bersedia bekerja sama dengan pihak Jepang dan memiliki masa (misalnya kyai).

Hubungan-hubungan sosial juga berubah diantara pribumi kelas menengah dan kelas rendah. Telah terjadi perombakan komunitas sosial yang besar pada masa pendudukan Jepang. Walaupun demikian, kehidupan keseharian rakyat keseluruhan pada masa ini sangat memprihatinkan. Perubahan yang terjadi di kelas menengah penduduk pribumi di Semarang dapat kita lihat pada kisah kenangan Nh. Dini.

Ayah tetap bekerja di Jawatan Keretaapi. Gajinya semakin hari semakin tidak menyukupi. Perubahan ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga kami. Seluruh tanah air ini menderita. Keadaan dan sistem sosial bergerak bersama dengan propaganda bahwa semua orang sama derajatnya, dengan semboyan “Jepang-Indonesia sama-sama”, “Kemakmuran bersama Asia Timur Raya”, dan sebagainya. Ibuku membiasakan diri dengan panggilan “Bu” yang ditujukan kepadanya. Sebutan dari tetangga-tetangga di kampung yang dulu memanggilnya “Den atau nDoro” (Dini, 2001:xi).

2. Sosialisasi Warga Perumahan Dengan Wong Kampung Sekitar

Hubungan sosial yang terjadi di kompleks perumahan tidaklah statis dalam 30 tahun. Di akhir masa kolonial, ketegangan situasi hubungan antara rakyat dengan pemerintah di bidang politik tidak begitu memengaruhi hubungan sosial yang terjalin sebelumnya. Di kompleks yang dihuni kalangan menengah mendapat perlakuan istimewa dalam hubungan sosialnya dengan penghuni di kompleks kalangan bawah. Apalagi, dengan masyarakat kampung sekitar kompleks perumahan mereka mendapat perlakuan istimewa. Misalnya, untuk orang Belanda dipanggil dengan sapaan *Tuan, Nyonya, Sinyo*; sedang pribumi kelas menengah dipanggil dengan *nDoro, Den, Jeng*. Datangnya Jepang merubah komunitas di perumahan. Akan tetapi, perubahan komunitas itu tidak berlangsung lama. Di awal masa pemerintahan anak negeri, hubungan sosial yang terjalin antara warga perumahan dengan *wong* kampung di sekitar perumahan kembali seperti pada masa penjajahan. Seperti pengakuan salah seorang perempuan pribumi yang menikah dengan orang Belanda.

Ya tinggalnya di sini, tetap di sini. Kawinnya juga di sini, sampe sekarang. Belanda itu gimana.. *khan* katanya orang *khan* penjajah, tapi baik-baik semua. Ndak ada *anu* keluhan apa-apa. Ya kita orang baik-baik, saya di sini itu sudah puluhan tahun. Tapi ya, ndak pernah apa itu berkelahi. Sama tetangga juga kita orang baik. Sama orang-orang yang miskin baik-baik saja. Kita orang *khan* mesti baik-baik wong mereka juga baik-baik.¹³

Hubungan baik yang dimaksud adalah sesuai dengan komunikasi yang terjalin dalam komunitas masa kolonial. Sementara itu, sosialisasi warga perumahan yang terjalin dengan wong kampung terjadi dalam pernikahan. Tidak tahu kapan mulai ada asrama KNIL di Sompok, yang pasti di awal tahun 1940-an salah seorang wong kampung menikah dengan penghuni asrama KNIL di Sompok. Secara tidak langsung, keluarga yang menikah dengan tentara KNIL ini menjadi akrab dengan kalangan penghuni asrama lain. Bahkan, hubungan mereka menjadi interaksi yang saling mengenakkan.

Pada waktu saya masih kecil, saya tu paling enak. Sebab apa ya.. kakak saya itu kebetulan dari KNIL. KNIL *khan* di sini, di asrama Sompok (sekarang SMPN 39). Ya.. dulu itu *pake* anu kakak saya kan di situ. Ya.. istilahe bukan kakak saya, (tapi) mbakyu saya dapat tentara KNIL, kakak ipar. Itu, jaman dulu disegani. Saya di kampung itu bahkan *sok sampe* dikatakan anteke londo. *Iki anteke londo!* (Ini kroninya Belanda!, menirukan ejekan temen sekampungnya). Kalo di kampung tu gitu. Memang betul jaman dulu itu bila ada penjajahan Belanda itu juga menyusahkan, (tapi) juga ya tidak. Karena apa, kalo (tinggal) dekat asrama Belanda itu juga dibantu sama orang-orang (penghuni asrama KNIL), (mereka) seperti kita, pribumi. Itu ya.. nanti kalo punya roti banyak ya sudah.. diberikan. Saya ngalami tu Belanda tahun 1950-an, dan saya kebetulan itu kumpulnya sama sinyo-sinyo. Itu kalo kumpulnya sama sinyo-sinyo berarti lebih enak lagi. Kalau sinyo-sinyo itu main apa itu istilahnya.. sepatu roda saya hanya ngawasi, dengan membawa ketapel.¹⁴

Hubungan kerja juga terjalin di antara warga perumahan dengan wong kampung. Para penguni perumahan menggunakan jasa wong

¹³ Wawancara Bisirkulin [78 th] 5 Juni 2004.

¹⁴ Wawancara Margono [70 th] 1-6-2004.

kampung untuk mengerjakan di sektor domestik dan luar domestik. Misalnya, menjadi pembantu rumah tangga.

Hubunganya baik-baik sini. Misalnya, (orang) Belanda anu ada istilahnya mbabulah (pekerja rumah tangga). Bahkan, ada babu terus diambil orang Belanda, yang (kemudian) melahirkan seperti (anak) belanda itu. Bagus- bagusya hubunganya sama rakyatnya ya bagus. Di sini ada tuan Mengrut, (ia) ambil babunya (yang) melahirkan (dan) sekarang dibawa ke Belanda sana. (Tapi), sudah meninggal tuan Mangrutnya.¹⁵

Kedinamisan hubungan sosial antarwarga perumahan dengan wong kampung semakin meningkat seiring dengan pengembangan perumahan Sompok oleh Pemerintahan Kotabesar Semarang, 1958. Penghuni pribumi menjadi semakin banyak, karena perumahan yang dibangun di Nangka dan Mangga memang diperuntukkan bagi pegawai kotapraja.

Sebelumnya, di kompleks perumahan ini juga telah bertambah dengan penghuni pribumi dengan diambilalihnya rumah-rumah di Lamper Sari oleh militer pada masa setelah revolusi. Pengambilalihan rumah-rumah yang dulunya dihuni oleh orang Barat juga terjadi di kompleks-kompleks perumahan yang dibangun pada jaman kolonial. Komunitas yang terbentuk antarwarga kompleks perumahan yang multietnis dan kelas (ekonomi) dengan wong kampung merupakan proses dialog antarnilai budaya, tradisional (Jawa) dengan modernitas (Barat), yang melahirkan sebuah komunitas yang sampai sekarang terus berproses. Paling tidak di antara keduanya telah mengenal persamaan dan perbedaan. Hasil dari dialog, yang melintasi tiga kekuasaan yang berbeda, telah melahirkan suatu sistem yang universal. Sistem ini menempatkan komunitas ini dalam proses individualisasi, efisiensi, dan fungsional.[]

¹⁵ Wawancara Suparo [60 th] 25-2-2004.

KOMUNITAS YANG BERBENAH: Wong Kampung di Sekitar Kompleks Perumahan Sompok

Jeneng Sompok iku soko kesompoken. Pas perang krutuk dbanyang Lamper karo dbanyange Peterongan krutuke tekan neng Gunung Krutuk, Kedungmundu.

Nama Sompok berasal dari kesompoken [keblabasan]. Saat perang krutuk (lempar-lemparan batu) antara penguasa Lamper dan penguasa Peterongan, batunya sampai ke Gunung Krutuk, Kedungmundu.¹

Tidak semua pembangunan yang dilaksanakan negara dapat menjangkau semua kalangan masyarakat. Tidak terkecuali pembangunan di sektor perumahan rakyat. Padahal, perumahan rakyat mempunyai nilai strategis dan memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Pemukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemukiman juga mencerminkan dan melambangkan kepribadian manusia, baik kepribadiannya sebagai anggota masyarakat (individu) maupun dalam kebersamaan sosial.

Keadaan pemukiman di suatu tempat mencerminkan tempat berteduh bagi manusia, pemberi ketentraman hidup, dan sebagai pusat kegiatan. Di dalam rumah dan lingkungannya, seseorang dibentuk dan berkembang menjadi manusia yang berkepribadian. Rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, serasi dan teratur akan turut meningkatkan kualitas manusia dan dapat menunjang kehidupan sosial masyarakat yang tertib, aman, damai, tentram, dan sejahtera, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja sebagai manusia.

¹ Wawancara Tasiman (75 th), 2-5-2004.



Sumber: Koleksi Hermintoyo Wajib

Keterangan: Perayaan kemerdekaan RI selalu diperingati dengan seremonial perlombaan-perlombaan di tiap kampung. Di belakang kerumunan orang, yang bersiap untuk lomba lari (menang untuk kemerdekaan?), nampak dua buah rumah: di sebelah kanan, rumah yang belum tersentuh dengan pengaruh arsitektur modern, sedangkan rumah di sebelah kiri, rumah yang telah tersentuh arsitektur modern. Tak jauh dari peserta lomba lari (50 m) dapat memasuki kawasan kompleks perumahan Sompok (Jeruk). *Apakah bangunan rumah-rumah yang ada di kampung terpengaruh arsitektur di perumahan Sompok?*

Gambar 30. Suasana perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di kampung Lamper Mijen Tahun 1988

Pembangunan pemukiman (kompleks perumahan) mempunyai keterikatan yang luas dengan pembangunan sektor lainnya. Pembangunan kompleks perumahan juga melibatkan dan mendorong pengembangan berbagai kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan yang besar. Dalam proses teknis pembangunannya berbagai kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan di antaranya: pengembang, kontraktor, konsultan, produsen, dan pedagang bahan bangunan, pengusaha jasa angkutan, serta kuli dan tukang bangunan. Pascatahapan teknis

pembangunan, setelah kompleks perumahan mulai ditempati, juga membuka berbagai kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan, seperti misalnya: pekerjaan domestik (pembantu rumah tangga [*babu* dan *jongos*]), tukang becak, dan lain-lainnya.

Pembangunan kompleks perumahan juga merupakan pendukung pertumbuhan wilayah sekitarnya, tentunya beserta warganya. Tak dapat disangkal, kompleks perumahan merupakan pembangunan yang integral dengan wilayah sekitarnya, dan harus mendapat perhatian yang serius dan tulus. Hal ini karena kebijakan pembangunan pemukiman ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, guna memiliki dan atau menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Bab ini melihat kehidupan masyarakat kampung di sekitar kompleks perumahan Sompok, yang terkena pengaruh pembangunan kompleks Sompok, baik langsung maupun tak langsung.

A. WONG KAMPUNG

1. Penguasa kampung

Manusia bertempat tinggal, akan menjalani hidup bersama: mendirikan rumah dalam kelompok. Dalam hidup bersama melahirkan tatacara hidup yang berkembang menjadi adat, yang ditaati oleh segenap anggotanya. Adat, sebagai hukum tak tertulis ada seiring dengan lahirnya hidup bersama. Oleh karena itu, masyarakatnya dinamakan masyarakat hukum dan daerahnya dinamakan daerah hukum. Dengan demikian, setiap manusia yang hidup bersama di daerah tertentu memiliki adat-istiadat, yang mengatur bagaimana hidup bersama dan yang dipimpin pengaturnya, termasuk di pemukiman kampung.

Pola pemukiman kampung di sekitar kompleks perumahan Sompok, sebagai satu kesatuan hidup setempat (*community*), berbentuk desa. Satu kesatuan tempat bermukim ini menjadi pengikat utama. Desa sebagai satu kesatuan hukum, mempunyai pemerintahan

dan peraturan. Dalam sistem pemerintahan desa di Jawa dikenal seorang pemimpin yang disebut kepala desa/lurah. Seorang lurah merupakan pemimpin yang mengatur dan melaksanakan pemerintahan sehari-hari di desa, yang dibantu beberapa orang (peran formal). Selain itu, lurah juga berfungsi sebagai bapak' bagi seluruh penduduk desa (peran informal) (Ijptoherijanto dan Prijono, 1983: 36–42). Tidak terjadi perubahan yang menyolok dalam aturan pemerintahan desa setelah proklamasi kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945. Didasari pada UU No. 22 Tahun 1948 tentang Otonomi Daerah, desa menjadi tulang punggung pelaksanaan ketetapan regulasi tersebut. Untuk kontribusi dalam melaksanakan tugasnya tersebut lurah dan pamongdesa (carik, bekel, kabayan, modin, dan ulu-ulu) mendapatkan *siti* (tanah) bengkok (Poerwopranoto, 1952:23). Bengkok lurah Lamper Lor berada di wilayah kampung Cempedak (sekarang menjadi pemukiman penduduk). Sedangkan bengkok lurah Peterongan berada di wilayah kampung Gang Kolem (sekarang menjadi perumahan pegawai bea dan cukai).

Sejak pendirian pemerintahan desa di bawah kolonial, posisi lurah desa Lamper Lor selalu dipegang oleh mereka yang tinggal di kampung Lamper Lor. Lurah dipilih oleh pejabat birokrasi pribumi (wedono). Pada tahun 1930–1940-an terjadi dua kali pergantian lurah: Amat dan Kahar. Pamong desa ditunjuk langsung oleh lurah. Salah satu pamong desa yang ditunjuk lurah terdapat penduduk Lamper Mijen. Misalnya, carik Kasipan semasa lurah Amat, dan modin Pak Soleh semasa lurah Kahar.²

Kantor lurah berada di rumahnya (Schulte Nordholt, 1997: 259). Pada tahun 1945–1946 kampung Lamper Mijen dijadikan perwakilan kelurahan. Karena lurah Lamper Lor mengungsi, masyarakat yang tidak menghendaki kevakuman bapak kampung mengadakan pemilihan lurah secara langsung. Lurah Tirtonadi (penduduk Lamper Mijen) menjadi lurah dalam masa transisi, yang otomatis memindahkan pusat pemerintahan di kampung Lamper

² Wawancara Soejono (75 th), 17 September 2004 dan Tohir (75 th), 19 Mei 2004.

Mijen. Lurah Tirtonadi tidak lama memimpin desa Lamper Lor, pada tahun 1949 pengungsi kembali ke kampungnya masing-masing, termasuk Lurah Kahar. Dirasa lebih *sepuh*, kendali kampung dikembalikan ke tangannya.³ Kondisi ini hampir sama di Kelurahan Peterongan, Lurah Broto yang mengungsi di Demak saat pendudukan Jepang, digantikan carik Pringadi.⁴ Pusat kekuasaan berpindah dari kampung Peterongan Kobong ke kampung Gang Kolemes.

Masa kepemimpinan lurah berlaku seumur hidup. Pada tahun 1954, berbarengan dengan masuknya partai-partai di kampung, Lurah Kahar meninggal dunia. Saat itu pula, dimulailah sistem pemilihan lurah dengan berlatarbelakang partai politik secara langsung. Ada tiga calon lurah yang bersaing, yaitu: Salikin (bergambar kendi) asal kampung Lamper Mijen dari Partai Nasional Indonesia, Sumadi (bergambar pacul) asal kampung Rambutan dari Partai Komunis Indonesia dan seorang dari Nahdatul Ulama asal kampung Gang Kolemes. Lewat pertarungan seru diliputi kebersamaan, Salikin (PNI) menang mutlak.⁵ Bergembiralah warga kampung Lamper Mijen, karena tradisi *apit* akan digelar di kampungnya. *Apit* merupakan pagelaran wayang setahun sekali yang digelar di rumah lurah di desa Lamper Lor, dengan *lakon* (judul cerita) yang sama. Di bawah kepemimpinan lurah ini peristiwa Gestapu di kelurahan Lamper Lor tidak terjadi peristiwa berdarah, walau di kampung Lamper Mijen banyak warganya simpatisan/anggota PKI.⁶ Lurah yang akomodatif ini tidak mengijinkan pihak keamanan dari pihak luar untuk memasuki kampung-kampung yang dipimpinnya. Para kader dan simpatisan PKI hanya ditahan, dan dilepaskan kembali. Sempat terjadi teror terhadap rumah-rumah kader partai, tetapi berhasil diredam olehnya dan pamongdesa lainnya.

³ Wawancara Soejono (75 th), 17-9-2004 & Tohir (75 th), 19-5-2004.

⁴ Wawancara Tarman (75 th), 27-7-2004 & Legiman (75 th), 10-9-2004.

⁵ Wawancara Soejono (75 th), 17-9-2004.

⁶ Wawancara Hermintoyo Wajib (62 th), 6-9-2004.

Lurah Salikin yang menjabat seumur hidup merupakan lurah terakhir pilihan rakyat, karena setelah peristiwa Gestapu kepemimpinan lurah di desa Lamper Lor diambil alih oleh militer. Hal ini berlaku juga di wilayah Peterongan, Lurah Pringadi ini memimpin Peterongan sampai terjadinya geger 1965. Ia digantikan oleh Lurah Kirno (militer). Di bawah lurah militer ini kampung-kampung di Lamper Lor struktur organisasi Rukun Kampung (RK) ‘dirapikan’, guna membantu laju pembangunan Orde Baru: mengoptimalkan pembangunan fisik dan menjadi juru kampanye Golongan Karya (Golkar). Pada tahun 1966–1968 sebagai kepala RW Lamper Mijen adalah Pak Sukir; Karjono (1968–1970); Sunardi (1970–1972); Sumadi Idris (1972–1976); Yatno (1976–1985); Hermintoyo Wajib (1985–1992); Sulkani (1992–1999).⁷ Seorang kepala RK ini membawahi 5 RT, yang terdiri kurang lebih 30-40 kepala keluarga. Pada pertengahan tahun 1980-an dilakukan perluasan RT, karena semakin banyaknya warga (per RT mengurus 50–90 warga), menjadi 14 RT. Sedangkan di kampung Peterongan perluasan RT dilakukan pada tahun 1970-an, semula hanya 2 RT menjadi 5 RT.⁸

Dalam kurun waktu 1930-an sampai 1960-an di kampung Lamper Mijen rumah-rumah yang didirikan semakin banyak. Pada tahun 1989 masyarakat memadati hampir 85% luas tanah yang ada (luas keseluruhan 90.000 m persegi). Secara alami karena anak-anak dari generasi tua mulai menginjak usia pernikahan. Sekarang ini generasi tua rata-rata berusia 60–80 tahun. Ketika sudah menikah mereka membangun rumah di sekitar rumah orangtua. Luas lahan yang tersisa biasanya hanya bisa membangun dua rumah baru, sementara generasi tua memiliki anak lebih dari tiga, yang telah menikah. Salah satu dari anaknya ada yang berpindah ke kampung lain atau ke perumahan baru. Selain itu, kepadatan penduduk di kampung ini juga disebabkan pendatang yang semakin banyak.⁹

⁷ Wawancara Hermintoyo Wajib (62 th), 6-9-2004.

⁸ Wawancara Suwito (64 th), 11-9-2004.

⁹ Naskah Lomba K3 RW V Kelurahan Lamper Lor. Sebagai gambaran, pada tahun 1988–1989, ada sekitar 50 orang pindah di kampung ini.

Di Peterongan, kepadatan penduduk mulai terasa pada tahun 1950-an. Saat itu, pendatang semakin banyak di kampung ini. Makam-makam Cina dibongkar oleh penduduk pendatang, dibangun rumah-rumah dan fasilitas kampung (balai rakyat). Lapangan bola yang berubah menjadi tegalan didirikan rumah-rumah penduduk. Tanah-tanah kosong yang ada hampir tak tersisa, kalau toh belum dibangun rumah tetapi sudah diklaim milik warga. Di belakang gedung *Ambachtsschool* dibangun pemukiman penduduk pendatang. Di tanah yang luasnya tidak lebih dari 500 meter persegi ini menjadi rumah sewa bagi pendatang.

2. Stratifikasi Sosial

Dalam konsepsi orang Jawa tentang pelapisan sosial, masyarakat desa (kampung untuk perkotaan) menduduki lapisan paling bawah, lapisan wong cilik, orang kecil. Lapisan di atasnya adalah pegawai atau priyayi, dan pedagang kaya (saudagar). Sedangkan lapisan tertinggi adalah penguasa (bangsawan). Untuk masyarakat perkampungan Sompok pengaruh lapisan tertinggi Jawa ini tidak begitu kuat, yang tergantikan oleh pejabat pemerintah dan orang Eropa.

Sebagai masyarakat yang diposisikan terrendah ini, dalam kehidupan masyarakat kampung pun, ke-wongcilikan-nya, juga terdapat pembedaan kelas, yang didasarkan pada kelas ekonomi: kelas orang punya (yang disebut priyayi kampung) dan kelas orang biasa. Kelas priyayi kampung ini terdiri dari: pedagang kaya, petani pemilik lahan luas, dan pejabat desa; kelas orang biasa terdiri dari: pedagang, buruh, pembantu rumah tangga, pedagang pasar, tukang becak, pengamen, dan lain-lain. Kehidupan mereka sangat kontras, baik dari segi sosial-ekonomi maupun sosial-budaya keseharian. Berdasarkan gambaran yang disampaikan Sojoeno, Tohir, dan Hermintoyo Wajib, pada tahun 1940-an masyarakat Lamper Mijen dalam strata kelas kampung 80 berada di kelas kedua. Pada tahun 1940–1970-an petani yang mempunyai sawah hanya satu, kebanyakan telah menjadi pembuat dan pedagang tempe. Pedagang

tempe mulai banyak di kampung ini sejak tahun 1920-an, sampai tahun 1980-an. Sementara itu, mereka yang dulunya menjadi petani penggarap berubah menjadi pekerja borongan (tukang serabutan), yang kerjanya tidak pasti. Sampai tahun 1970-an yang menempati strata orang biasa di kampung Lamper Mijen mencapai 90%.¹⁰

Di kampung Peterongan, khususnya Peterongan Tengah sekarang (letak kampung Gang Waas), pada tahun 1950-an hampir 95% masyarakatnya menduduki strata terrendah kelas di kampung. Orang kaya di kampung ini dapat dihitung dengan jari. Melihat peninggalan rumah yang sekarang masih ada, tidak lebih ada 10 rumah yang dibangun secara semi permanen dan permanen. Pada tahun 1950-an penduduk di kampung ini kurang lebih 325 jiwa, jika 10 rumah itu terdiri dari kira-kira 3 orang maka hanya 7% penduduk orang kaya. Sedangkan di Gang Waas dapat 100% berada pada posisi strata kelas terrendah di kampung.

3. Keluarga Besar

Keluarga di Jawa abad ke-20 tidak hanya terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Selain sepasang suami-istri dan anak, dalam satu rumah juga terdapat anggota keluarga yang lain, dari batih yang lain atau lainnya. Keluarga yang ada sekarang merupakan hasil kontruksi sejarah dan budaya (Shirasahi, 2001:7). Di Masa Orde Baru keluarga menjadi ikatan kejahatan (kolusi) yang maha besar. Soeharto dalam kontra-revolusinya melawan hubungan bapak-anak yang revolusioner, demi mempertahankan kebahagiaan keluarganya: dengan mempraktikan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Kelurga juga menjadi lembaga tempat struktur kekuasaan diwujudkan atas nama cinta dan tanggungjawab. Dalam hubungan ini, lahir kekeluargaan dalam ruang birokrasi dan bisnis (Shirasahi, 2001:262–263).

¹⁰ Wawancara Soejono (75 th), 17-11-2004, dan wawancara Hermintoyo Wajib (62 th), 10-9-2004. Untuk mendapatkan keterangan ini, peneliti menggunakan metode gambar peta kampung kosong, yang kemudian diisi narasumber. Mereka mengisi dengan fungsi tanah, bentuk bangunan rumah, jumlah penghuni rumah, dan pekerjaan orang yang menghuni rumah.

Memahami kepadatan perkampungan Sompok pada abad ke-20 faktor keluarga sangat memegang peranan, karena tanah dan rumah dalam tradisinya menjadi harta waris. Di kampung Lamper Mijen, hampir seperlima wilayahnya ditempati oleh satu keluarga yang telah lama bermukim di tempat ini. Hubungan kekeluargaan tidak sebatas orangtua-anak-cucu-buyut-cicit sekandung, tetapi juga anak-cucu-buyut-cicit bawaan (keturunan tiri). Pada tahun 1930–1940-an terdapat 7–8 keluarga besar (*brayat*) di kampung Lamper Mijen. Adalah brayat dari buyut Nyai Rus yang menempati tanah terluas: hampir 1/5 kampung Lamper Mijen (mencakup dua RT dari 14 RT). Di kampung yang pada tahun 1938 dilewati pembangunan tiang listrik ini, anak-cucu-cicit-cuyut kandung dan tirinya sekarang tinggal. Brayat yang dulunya juga memiliki lahan yang digunakan kompleks perumahan Sompok ini tinggal di sebidang tanah yang luas, berdekatan dengan Kanal Lamper dan jembatan Lamper.¹¹

Sejak awal abad ke-20 wilayah ini memang telah berdiri banyak rumah-rumah milik petani yang lahan garapannya berada di luar kampung, misalnya di kampung Kabluk dan Manggistan. Pada tahun 1940-an tanah milik Nyai Rus hanya berdiri 5 rumah.¹² Sekarang semua tanah kosong yang tercatat pada tahun 1940-an tidak ada yang tersisa: menjadi bangunan rumah milik keluarga besar Nyai Rus dan sebagian kecil pendatang. Nyai Rus nikah dua kali (lampiran 1). Dari perkawinan pertamanya, almarhumah mempunyai tiga orang anak, semua ikut dengannya. Sedangkan perkawinan keduanya tidak diketahui berapa anak yang dipunyai. Dari ketiga anaknya, semua perempuan, anak bungsunya tinggal

¹¹ Jembatan yang menghubungkan kampung yang terpisah dengan kompleks perumahan Sompok ini sekarang ada dua. Pertama, jembatan yang dibangun jaman kolonial, dan kedua jembatan yang dibikin th 1960-an. Jembatan pertama dikenal dengan jembatan talang, semasa Pendudukan Jepang tak jauh dari situ dibangun pos penjagaan. Jembatan kedua dikenal sebagai jembatan persahabatan, karena dengan jembatan ini hubungan kaku antarkampung di Perumahan Sompok dan kampung Lamper Mijen menjadi lebih harmonis. Sekarang jembatan ini sebagai jalan penghubung utama.

¹² Wawancara Tohir (75 th), 19-5-2004.

di kampung Lamper Mijen, Nyai Tinah. Anak pertamanya, Nyai Sini menikah dan memiliki tiga anak, tetapi tinggal di kampung Lamper Kidul. Sedangkan anak keduanya menikah mempunyai anak bernama Suliyah, tinggal di Lamper Mijen.

Nyai Suliyah menikah menghasilkan empat orang anak: Kuat, Slamet, Sukarman, dan Kasipah. Nyai Tinah yang juga tinggal di Lamper Mijen menikah dengan Rasidin (duda asal kampung Tandang yang telah mempunyai dua anak, Salipin dan Kasri), dan menghasilkan putra: Mat Samat. Mat Samat melanjutkan tempat tinggal pendahulunya menikah menghasilkan 6 anak, hanya 2 yang hidup Kasmini (76 th) dan Tohir (75 th). Sepeninggalnya Nyai Tinah, Rasidin menikah dengan Rasipah, janda asal kampung Siwalan yang mempunyai dua anak dan satu keponakan. Kedua anak yang dibawa Rasipah: Sumarti, Asnah, dan keponakan Sarman (anak dari kakaknya, sekarang keturunannya tinggal di Ambarawa). Hasil perkawinan Rasidin dan Rasipah menghasilkan satu orang anak: Marsipah (meninggal tahun 2004 dalam usia 94 th). Anak bawaan Rasipah, Sumarti, dinikahkan dengan Kasri, anak bawaan Rasidin menghasilkan Tuminah dan Samat.¹³ Ketiga dan keempat turunan Nyai Rus lah yang sekarang menempati 1/5 bagian wilayah kampung Lamper Mijen. Hanya sebagian kecil yang pindah dari kampung ini.

Berbeda dengan keluarga di Peterongan (Gang Waas), yang kebanyakan merupakan keluarga pendatang. Anak-cucu mereka banyak yang meninggalkan kampung Peterongan. Misalnya keluarga Karto Dikromo, yang pindah ke kampung Peterongan pada awal abad ke-20. Saat menempati kampung ini, almarhum membeli tanah dari seorang makelar seluas 8X16 meter. Dari hasil perkawinannya dengan Badrah, seorang dukun bayi kampung, pekerja kebersihan jalan kota ini mempunyai dua anak: Kemisem dan Legiyem. Keduanya mendapat bagian yang sama saat Karto Dikromo meninggal dunia, 1980-an. Kemisem menikah dengan Slamet, seorang buruh

¹³ Wawancara Tohir (75 th), 19-5-2004.

pabrik dan *nyambi* menarik becak, mempunyai tujuh orang anak. Rumah dan tanah seluas 8X8 meter tersebut, dalam harta warisan, harus dibagi menjadi 7 bagian. Kemisem (80 th) belum meninggal, tetapi anak-anaknya yang sudah besar (semuanya telah berkeluarga) membutuhkan tempat tinggal. Harta waris belum dibagi, beberapa anak pasangan Slamet-Kemisem pindah dari kampung Peterongan. Hanya dua anaknya yang menempati tanah seluas 8x8 meter, Kasinem (60 th) dan Ginah (54 th).

Kasinem yang menikah dengan Suwito (64 th) mempunyai anak 6, satu meninggal. Lima anak yang masih hidup itu, ketiganya sudah menikah dan pindah dari kampung tempat tumbuh dan berkembangnya mereka. Sementara adiknya, Ginah dari hasil perkawinannya mempunyai anak 5, dan semuanya telah berkeluarga. Dua dari lima anaknya pindah ke kampung lain.¹⁴ Selain karena sempitnya lahan untuk tempat tinggal di kampung Peterongan, faktor yang memengaruhi keluarga pindah dari kampung adalah kemampuan ekonomi. Contoh ketidakmampuan pindah kampung dari Peterongan karena faktor ekonomi adalah keluarga Legiman (75 th). Mantan tukang becak ini, sekarang menjadi dukun pijat syaraf, dari hasil dua kali pernikahannya menghasilkan tiga orang anak, satu meninggal. Ia yang lahir di kampung Peterongan sekarang meng-huni bangunan rumah seluas 4X7 meter bersama kedua anaknya yang telah menikah dan mempunyai anak. Jadi, dalam ruang 4x7 meter itu hidup tiga keluarga. Contoh lainnya, adalah keluarga Yatin (68 th). Mantan pegawai tata usaha sebuah sekolah negeri di Semarang yang menjadi korban ‘kebrutalan’ awal rezim Orde Baru ini pindah di kampung Gang Waas tahun 1970-an. Dari hasil kerasnya berjualan di pasar Peterongan, setelah dipecat sebagai pegawai TU, ia membeli salah satu rumah anyaman bambu (*gedheke*) seluas 5x8 meter. Lulusan sekolah kejuruan setingkat STM ini sekarang tinggal bersama empat anaknya yang telah berkeluarga, dan masing-masing telah memiliki anak. Rumah permanen berbatu-bata tak dilesternya

¹⁴ Wawancara Kasinem (60 th), 17-8-2004.

itu menjadi bangunan tertinggi di kampung yang memang telah penuh sesak itu, berlantai dua.

4. Mata Pencarian

Dalam situasi kehidupan seseorang sangat tergantung pada tanah, kehilangan akses terhadap kepemilikan telah menjadi sebuah "penyeritaan" yang berlangsung terus-menerus, dan turun-temurun. Kehilangan tanah bagi petani merupakan kehilangan jatidiri. Keresahan menjadi bagian kehidupan selanjutnya. Namun, keresahan yang menyelimutinya tidak boleh berlangsung berlarut-larut. Ia harus secepat kilat melangsungkan kehidupannya, berbenah bekerja di tempat yang lain. Pada saat itu, keresahan yang terwujud dalam bentuk konflik dan pemberontakan tak muncul, yang ada hanya merubah diri menjadi dirinya yang baru. Seorang petani harus berubah, menjalani profesi lain.

Dampak pembangunan memang dapat bersifat positif dan negatif. Dampak negatif yang terjadi, harus dapat diperkirakan dan dicarikan pemecahannya. Pembangunan juga telah menyebabkan beban tanggungan menjadi lebih berat bagi masyarakat, dan dari warga masyarakat timbul berbagai upaya untuk melepaskan atau mengurangi tekanannya. Dalam pembangunan kompleks perumahan gemeente Sompok salah satu yang menjadi 'korban' adalah keluarga Nyai Rus dan keturunannya di kampung Lamper Mijen, karena tanah sawahnya dibebaskan untuk pembangunan. Menurut cerita cicitnya, Tohir (75 th), Soejono (75 th), dan Soekima (67 th), Nyai Rus menjadi pembuat tempe dan memperdagangkannya di pasar Dargo. Suaminya berganti menjadi tukang serabutan. *Ora obah ora mamah* (tidak berusaha, tidak makan), prinsip inilah yang dipakai oleh bekas keluarga petani dalam menghidupi keluarga dengan tiga orang anak. Beban hidup mereka ditanggung bersama, 3 anaknya yang masih usia sekolah (belasan tahun) juga menjadi pemasar tempe. Ia menggeluti profesi barunya sampai akhir hayatnya. Usahanya dilanjutkan oleh ketiga anaknya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dua anaknya yang telah menikah tetap bermukim di kampung Lamper Mijen. Nyai Tinah dan kakaknya (narasumber lupa dengan nama neneknya), anak Nyai Rus, walau telah menikah tetap berusaha di bidang pembuatan dan penjualan tempe. Sampai memiliki anak (satu laki-laki, Mat Samat) Nyai Tinah tetap menggeluti bisnis warisan keluarganya. Anaknya membantunya sampai usia remaja, karena seorang laki-laki remaja lebih cepat mendapat kesempatan bekerja di luar rumah. Usaha kerasnya pembuatan tempe berakhir saat ajal menjemputnya. Suaminya Rasidin kembali menjadi duda. Tak berlangsung lama, duda dengan tiga anak ini menikah dengan Rasipah (duda dengan dua anak).

Walau keturunan Nyai Rus telah tiada, usaha pembuatan tempe diteruskan oleh keluarga Rasidin dan Rasipah. Usahnya dibantu oleh keenam anaknya, hasil pernikahan mereka menghasilkan seorang anak Marsipah (lahir tahun 1910). Marsipah inilah pembuat tempe terakhir yang hidup di kampung Lamper Mijen, wafat bulan September 2004. Usaha pembuatan tempe terus berlangsung dalam brayat Nyai Rus. Anak-anak pasangan Rasidin dan Rasipah, semua ikut terjun di dalam usaha ini. Usaha keluarga ini tidak mengenal jenis kelamin, semua anaknya membantu dari proses beli bahan baku, proses produksi, dan distribusi. Bahan baku utama kacang kedele didapatkan dari pasar Dargo sepulang mereka menjual tempe. Pada tahun 1940-an, kacang kedele dapat dibeli di daerah Mrican, di sebuah toko milik pedagang Tionghoa. Proses produksi dilakukan di kali Lamper (Kanal Lamper) dan rumah, yaitu membersihkan kedelai dari kulitnya. Kegiatan ini dinamai *ngidak-ngidak dele* (menginjak-injak kedele, sebagai proses awal produksi). Distribusi dijual di pasar Dargo dan pasar Peterongan. Pada tahun 1930-an sampai 1940-an proses produksi usaha keluarga ini bisa menghabiskan 5–8 kg kacang kedele.¹⁵

Jepang menguasai Kota Semarang, juga menguasai kampung Lamper Mijen. Kehadirannya bersama *Tonorigumi* dan *Aza*-nya

¹⁵ Wawancara Tohir (75 th), 27-7- 2004.

di Kampung Lamper Mijen mengakibatkan aktivitas masyarakat sangat tegang dan kaku. Di kampung Lamper Mijen didirikan pos penjagaan tentara Jepang. Setiap melewati pos penjagaan masyarakat harus memberikan hormat. Keberadaan bangunan yang tak lebih dari lima meter persegi ini sangat mengganggu keseharian masyarakat.

*Jaman Jepang, kampung Lamper wong-wong podo keweden. Opo maneh lewat ngon pos jogone nang Talang. Yen liwat kono, kudu mbungkuk. Aku kadang dodol, kadang yo orak. Soale kabeh-kabeh angel. Wah, yen liwat pos jogo ora mbungkuk, lan seng jogo ngerti bakal dibukum.*¹⁶

(Di masa jaman Jepang, Kampung Lamper (maksudnya kampung Lamper Mijen) orang kampung pada ketakutan. Apalagi lewat di pos penjagaan di Talang (sebuah tempat di utara kampung Lampermijen). Kalau melewati pos penjagaan kita harus memberikan hormat, membungkukkan badan. Saya terkadang jualan, terkadang tidak. Karena sudah mendapatkan barang dagangan. Dulu, kalau penjaga tahu ada warga melewati pos penjagaan tanpa memberikan hormat, ia akan diberi hukuman.

Di masa yang sama, Suami Marsipah, Almarhum Satiyan (meninggal tahun 1979, 76 th), satu-satunya petani pemilik dan penggarap di Kampung Lamper Mijen, menjadi pelayan tentara Jepang di rumahnya sendiri. Rumahnya, yang penuh dengan bahan makanan dan binatang ternak sering didatangi tentara Jepang. Saat kunjungan inilah usaha tempe Marsipah tidak beroperasi. Tentara Jepang selalu minta makanan enak-enak, dan Marsipah terpaksa menjadi kokinya. Penyebab lain berhentinya produksi tempe adalah situasi keamanan kota. Ketika aman mereka dapat bekerja dan berjualan. Tak jarang, pasar sebagai tempat pemasaran usaha pembuatan makanan penuh protein ini sering tutup, tidak ada penjual dan sepi pembeli.¹⁷

¹⁶ Wawancara Marsipah (94 th), 7-2- 2004.

¹⁷ Wawancara Soekima (69 th), 8 -9-2004.

Ketika pasar satu tutup, selalu ada pasar lain yang buka.

Pas aku dodolan tempe nang pasar nDargo. Aku sering digoda sama tentara Jepang. Nang kono, aku karo Mbok Pah dipaidoni karo seng dodolan nang kono. "Wong Lamper kok dodolan nang kene", ngono. Aku ngejarke omongan koyok kuwi amargo pasar liyane tutup.

Sewaktu saya jualan tempe di pasar nDargo. Saya sering digoda sama tentara Jepang. Di sana, saya dengan Mbok Pah (panggilan untuk Marsipah) diomelin pedagang lain. "Orang Lamper kok berdangan di sini", begitu omelannya. Saya membiarkan omelan itu karena pasar lainnya tutup.¹⁸

Tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi dan keseharian masyarakat kampung, kehadiran tentara Jepang yang kebanyakan masih muda, juga melakukan pelecehan seksual pada orang kampung. Baik saat mereka sedang di kampungnya maupun di luar kampungnya. Saat ramai-ramainya perang di Semarang (14-19 Oktober 1945), produksi industri tempe terpaksa berhenti. Usaha keluarga dan kekeluargaan ini berlanjut saat kampungnya berada di bawah kepemimpinan pemerintahan Republik Indonesia. Dalam masa-masa awal kepemimpinan republik ini, produksi tempe mengalami peningkatan. Hal ini berakibat semakin banyaknya masyarakat yang menjadi pembuat tempe, juga keluarga brayat Nyai Rus. Apalagi pekerjaan pembangunan kota masih jarang dilakukan, banyak masyarakat yang menganggur, dan usaha tempe ini menjadi penyelamat ekonomi mereka. Hanya pekerja harian dan pegawai tetap yang dapat bekerja, tidak untuk tukang serabutan. Usaha ini mengalami masa keemasan pertengahan 1950-an sampai akhir 1960-an. Produksi berjalan lancar dan pasar dalam situasi aman. Tahun 1970-an usaha ini mulai sepi. Mereka mulai beralih menjadi pedagang di pasar. Produksi tempe menurun dikarenakan sedikitnya minat pembeli. Hal ini berkaitan dengan semakin beragamnya makanan rakyat yang lain. Awal tahun 1980-an Tuminah menjadi pembuat tempe terakhir di kampung ini. Perempuan yang dimadu mantri pembangunan kota ini meninggal tahun 1983.¹⁹

¹⁸ Wawancara Kasmini (76 th), 7-9-2004.

¹⁹ Wawancara Rohadi (57 th), 31-7-2004

Usaha ini tidak berlanjut sampai sekarang. Usaha penyelamat ekonomi kampung yang telah berubah ini telah berjalan hampir 60 tahun, sejak tahun 1920-an. Ikatan keluarga menjadikan usaha ini menurun kepada generasi setelahnya. Tidak ada rahasia perusahaan, siapa yang bersedia dapat memproduksinya. Resep, modal awal, bimbingan pembuatan diberikan secara cuma-cuma kepada pemain baru pembuat tempe. Makanan rakyat ini telah mengikatkan hubungan kemanusiaan dan kekeluargaan dalam menghadapi perubahan yang harus mereka hadapi di kampung tempat tumbuh dan berkembangnya mereka. Saat kedua orang Tohir (75 th) meninggal dunia, *bulek* (adik perempuan orangtua) tirinya mengajak membantu memproduksi tempe. Tohir kanak-kanak berhenti dari sekolah karena ditutup Jepang. Setiap hari ia membantu marsipah (94 th) berbelanja ke dele di Mrican. Selain Tohir (75 th), keponakan lain yang ikut (*melu*) dengan Marsipah membantu membuat dan menjual tempe adalah Soejono (75 th), Soekima (68 th), Kasmini (76 th) dan Kasipah (76 th). Bahkan, bantuan yang diberikan Marsipah berlanjut sampai ke anak cucu keponakan mereka.

Selain strategi industri rumah tangga untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi keluarga, penduduk Lamper Mijen yang telah berubah menjadi kampung non-agraris, bergelut pada profesi tukang serabutan. Dari gambaran yang disampaikan Soejono (75 th), pada tahun 1940-an penduduk kampung Lamper Mijen yang menggeluti profesi bermodal tenaga dan kemampuan individu ini hampir 80% dari total jumlah penduduk $\pm$ 120 kepala keluarga. Industri rumah tangga pembuatan tempe hampir mencapai 50%: selain memproduksi tempe (yang biasa dilakukan oleh perempuan, istri), suami bekerja sebagai tukang serabutan. Saat tidak ada *pocokan* (kesempatan bekerja), suami membantu penuh proses pembuatan tempe. Pekerjaan serabutan yang biasa mereka lakoni adalah pendirian rumah (kuli bangunan), petugas kebersihan, penyapu jalan, berdagang, dll.²⁰

²⁰ Wawancara Soejono (75th), 17 -9-2004, & Rubai (77 th), 16-9-2004.

Pocokan didapatkan karena ajakan seseorang. Awal tahun 1940-an di kampung Lamper Mijen pegawai tetap yang menghuni ada 5 orang. Salah satu orang yang sering mengajak mereka adalah Sukiman, sehingga ia sering dijuluki Mantri Bangunan. Kehidupan ekonominya dalam masa yang berubah di kampung ini sangat mapan. Mereka yang mendapat pocokan dibayar sesuai pekerjaan, setelah pekerjaan selesai. Awal 1940-an banyak proyek yang dikerjakannya, sehingga masyarakat yang diajaknya pun banyak. Proyeknya benar-benar berhenti saat Jepang datang.

Almarhum Sukiman yang beristri dua menjadi pegawai kotapraja saat Republik Indonesia berdiri. Jabatannya kepala proyek, mandor. Tak berbeda dengan jaman sebelum Jepang datang, Sukiman mengajak orang kampungnya bekerja. Saat Kota Semarang dalam masa membangun, 1950–1960-an,²¹ para tukang serabutan ini mendapatkan kesempatan yang lebih. Kerja mereka hampir tiap hari. Saat rezim Orde Baru dengan pembangunan di segala bidang untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tukang serabutan generasi awal di kampung ini sudah tidak banyak yang bekerja. Mereka sudah banyak yang meninggal. Rezim Orde Baru berkuasa, beberapa tukang serabutan dan buruh pabrik di kampung ini ditangkapi, karena dituduh anggota PKI. Tidak pandang bulu, rezim ini juga yang menuduh dan memenjarakan beberapa anggota masyarakat kampung yang tercatat sebagai pegawai negeri Kota Besar Semarang.

Ada empat orang yang mempunyai kehidupan baik pada masa Orde Lama, dengan tuduhan sebagai anggota partai terlarang berubah menjadi tukang serabutan. Soejono (75 th), juru tulis di sebuah instansi pemerintah dituduh *arbeid*. Ia dipenjara dalam

²¹ Pada tahun 1953 Kota Besar Semarang membangun dan mengembangkan pasar dan fasilitas air minum. Dalam berita instansi yang diterbitkan Djawatan Penerangan Kota Besar Semarang menyebutkan bahwa di bulan pertama th 1953 DPD Kota Besar Semarang telah membangun 219 rumah, membesarkan 48 rumah, memperbaiki 44 rumah, membangun 2 kandang mobil, dan memasang 11 pagar halaman (*BERISI No. I/III/1953*).

beberapa waktu, dan kariernya sebagai juru tulis berhenti. Ia kembali menjadi tukang serabutan. Santoso (70 th), seorang dokter hewan karena namanya tertukar oleh nama temannya ditangkap dan dituduh sebagai anggota PKI. Karier seorang anak kaya di kampung Lamper Mijen sebagai dokter hewan berakhir. *Om San* (panggilannya) menyendiri, menjaga jarak dengan masyarakat kampung. Rumahnya terlihat sangat angker. Hidupnya bergantung pada pohon-pohon pisang di depan rumahnya. Dua orang lainnya Almarhum Suparmin dan Pak Ari. Dua orang ini kembali menjadi tukang serabutan. Dengan mengorbankan lebih satu juta orang meninggal, Orde Baru memimpin negeri ini. Pembangunan fisik kota marak dilakukan. Ke-sempatan bagi tukang serabutan semakin banyak. Pada tahun 1970-an, para tukang serabutan di kampung Lamper Mijen banyak yang menjadi kuli bangunan (*kuli batu*), dan mereka sering membangun ke luar kota (*kemandah*) Semarang.

Ajak-mengajak tetangga untuk bekerja sebagai *tukang mbatu*, baik sebagai kuli maupun tukang, berlanjut pada generasi ketiga di kampung ini. "*Kowe ngarap di?*" (Kamu mengerjakan di mana?) menjadi sapaan laki-laki dewasa di kampung pada tahun 1970–1980-an. Kini yang melakoni pekerjaan keras ini adalah generasi yang terlahir pada akhir tahun 1940-an sampai awal 1980-an. Mereka yang terlahir 1930-an–1940 awal telah menjadi orang-orang tertua di kampung. Jika mereka mendapat penghargaan dari negara, pensiun, misalnya, maka kerja kerasnya, dengan membanting tulang sejak kecilnya demi hidupnya sehari-hari akan terasa indah di usia senjanya. Namun, mereka bukan Soeharto, dengan masa lalunya "memaksakan" sebagai presiden. Orangtua-orangtua itu, yang tidak mendapat kesempatan untuk menjadi sesuatu yang dianggap penting negara, oleh pemegang negara sekarang, dengan masa lalu yang begitu besar bagi dirinya, keluarganya, dan negara sampai sekarang masih berjuang untuk sekedar hidup. Hanya keluarga yang menghargai masa lalu yang keras itu.

Pada tahun 1940–1970-an penduduk kampung Lamper Mijen juga ada yang bekerja sebagai buruh negeri. Salah satunya Sukiman, yang mempunyai julukan di kampung *Pak Mantri*. Tidak diketahui bagaimana Almarhum Pak Mantri ini dapat menjadi salah satu pekerjaan yang dulu diharamkan bagi orang kampung.

Bapakku ki semongso wektu dadi pegawe negeri kuwi ketoke yen jaman mbiyen celukane Pak Mantri. Mantri Pembangunan. Aku pernah diajak koyok contone Gedung Manggala. Gedung Manggala iku seng ngarap Bapakku, mbiyen, sak kelinganku. Bapaku yo mborong. Setelah jam balek, bapaku niliki proyekke.

(Bapakku itu waktu jadi pegawai negeri, sepertinya jaman dulu, disebut Pak Mantri. Mantri Pembangunan. Saya pernah diajak, seperti contohnya melihat Gedung Manggala. Gedung Manggala (Maksudnya bangunan dulu, sebelum dibongkar. Terletak di Jalan Gajahmada, Semarang) itu yang membangun Bapakku, dulu, seingatku. Bapakku juga jadi pemborong. Setelah jam kerja selesai, ia melihat proyeknya.²²

Dalam bekerja Pak Mantri yang selalu mengajak tetangganya, sebagai buruh pocokan, tak jarang juga memproses dari buruh harian menjadi buruh harian, dan atau pegawai negeri. Salah satunya Tohir. Ia yang meniti karier di dinas pemerintah ini sebagai buruh harian yang mengerjakan tempat tidur dari bambu di Genuk, Semarang, untuk tempat penampungan pengungsi pada tahun 1947. Saat itu ia mendapat upah 8 ece 2 sen per hari.²³ Jatah makan siang-nya berupa bubur kacang merah. Tahun 1947–1948 Tohir bersama dengan buruh harian kotapraja yang lain mengerjakan perbaikan gedung-gedung pemerintah di Jalan Sriwijaya. Karena ketekunannya, tahun 1950 ditempatkan di Dinas Pengairan Semarang Barat, yang bertugas membersihkan dan membuat lancar aliran sungai di

²² Wawancara Rohadi (56 th), 31-7-2004.

²³ Menurutnya itu merupakan upah yang berjumlah kecil. Akan tetapi, karena ia merasa masih muda dan belum mempunyai tuntutan kebutuhan yang banyak, ia terpaksa menerima pekerjaan itu. Ia merasakan kerja pertamanya seperti main-main saja. (Wawancara Tohir, 28 Juli 2004), sedangkan menurut Surat Edaran dari Kantor Urusan Pegawai Negeri No 1158/A Th 1949 perihal Perhitungan Upah Harian menetapkan upah harian 1/30 dari Rp200,-. (Koesnodiprojo, 1952: 36).

kali-kali Semarang Barat. Setiap bekerja, dari rumahnya di Lamper Mijen, yang menumpang *bulek* (tante) tirinya setelah kedua orangtuanya meninggal, ke Semarang Barat (kurang lebih 10–15 km) dengan berjalan kaki. Tohir dan buruh harian yang lain tidak pernah membolos, kecuali sakit atau ada urusan keluarga. Di dinas inilah Tohir mendapat kepercayaan sebagai mandor.

Saat Kotapraja Semarang membangun Tugu Muda,²⁴ simbol perlawanan rakyat Semarang atas Jepang dalam Peristiwa Lima Hari 1945, tahun 1954–1955, bapak satu anak ini menjadi tukangbatu pembangunan pondasi. Bersama 25 pekerja lainnya membangun tugu yang sekarang menjadi simbol Kota Semarang. Di tahun yang sama, Tohir dan pekerja lainnya memperbaiki jembatan-jembatan yang rusak di Semarang. Tahun 1958, buruh harian Kotapraja ini diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Gajinya yang kecil ditutupi dengan berjualan beras di rumahnya, awal tahun 1960-an sampai sekarang.

Setelah diangkat menjadi pegawai yang bergaji tetap, pekerja yang jujur ini bersama pekerja keras lainnya membangun Simpanglima, sebuah pusat kegiatan bisnis di Semarang. Simpanglima yang semula rawa dan tanah kosong, atas usulan Presiden Soekarno, oleh Pemerintah Kotapraja Semarang dijadikan pusat kegiatan masyarakat. Buruh Kotapraja yang pensiun tahun 1985 ini, bersama buruh yang lain, meng-*urug* rawa Simpanglima.²⁵ Setelah pekerjaan merubah lahan penuh menjadi lahan siap pakai, pekerjaan selanjutnya: membendung sungai-sungai yang alirannya mengarah ke Simpanglima.

²⁴ Simbol perjuangan masyarakat Semarang terhadap penjajahan ini dikelilingi dengan simbol-simbol kebanggaan kolonial, misalnya lawang sewu.

²⁵ Simpanglima, pusat kegiatan masyarakat Semarang, penggagas pertama adalah Presiden Soekarno, 1962. Pembangunan secara fisik dimulai Maret 1965. Proyek politis ini sempat diboikot oleh PKI. Pengurugan rawa dilakukan sampai 40%, dan dilanjutkan th 1967–1968. Proyek pembangunan dapat diselesaikan th 1969, dan tanggal 1 Juli 1969 dengan protokoler militer Lapangan Pancasila ini diresmikan. Kini pusat kegiatan politis itu telah berubah menjadi pusat bisnis di Semarang.

Orde Baru berkuasa, Tohir dan pekerja keras lain di dinasny sering menerima penugasan dari Pemerintah Kotapraja untuk membangun proyek-proyek aset militer. Contohnya: pembangunan tempat parkir di Gereja Randusari, yang merupakan aset Kodam, untuk parkir mobil saat peringatan Peristiwa 5 Hari di Semarang (1984–1985); pembangunan pelebaran Jalan Pandanaran (1972–1973). Contoh lainnya: pembangunan Tugu Soeharto, di Sampangan-Semarang, sebagai tempat bertapa Presiden Soeharto; pembangunan patung Diponegoro di Universitas Diponegoro, Semarang (1974–1975). Seperti orang yang mengajaknya bekerja, Sukiman, Tohir (75 th) pun setelah mendapatkan posisi yang dipercaya selalu mengajak orang kampung bekerja di jawatan pemerintah. Namun, dari sekian banyak (10-an orang) pemuda kampung yang diajaknya, hanya dua orang yang mampu bertahan: Tukimin dan Tukijo.

Tukijo adalah mantan penjual rokok di pasar, yang menerima ajakan Tohir sebagai pekerja harian. Sebelum bersedia diajak kerja, lelaki yang telah meninggal ini berkonsultasi dengan orang yang mengajaknya *boro* ke Semarang. “*To, kowe nak golek rezeki iku koyok thuk, mili terus banyuni. Ojo ngolek rezeki koyok kali nak banjir, deres terus rak mili banyuni sithik* (To, kamu kalo mencari rezeki itu seperti sumber mata air, airnya mengalir terus. Jangan mencari rezeki seperti banjir, banyak selanjutnya airnya sedikit)”.²⁶ Walau dengan gaji pas-pasan, almarhum *boro* asal Wonogiri ini menerima dan terus bertahan bekerja sebagai buruh kotapraja, dan mengajukan pensiun dini tahun 1976.

Masa transisi telah memberikan kesempatan pada wong kampung (*wong cilik*) untuk menempati posisi pekerjaan yang sebelumnya tidak diperkenankan. Menjadi pegawai negara dalam masa pemerintahan Hindia Belanda hanya diberikan kepada pribumi yang mempunyai akses di birokrasi. Walaupun posisi mereka tidak jauh berbeda dengan keadaan kesehariannya. Pas-pas, atau bahkan kekurangan.

²⁶ Wawancara Wahyuni (44 th), 29-7-2004

Di kampung Peterongan orang yang mendapatkan kesempatan menjadi pegawai kotapraja adalah Karto Dikromo (meninggal tahun 1984 [108 th]). Pendatang dari Boyolali, Jawa Tengah, semasa pemerintahan Hindia Belanda ini pernah direkrut rodi ke Suriname dan menjadi buruh perkebunan di Deli, Sumatra Utara. Sepulang dari Deli, penganut *kejawen* (kepercayaan yang mengagungkan norma Jawa) ini pindah ke Semarang. Setelah lama bekerja sebagai penyapu jalan, ia memasuki babakan baru dengan diangkat sebagai pegawai Gemeente Semarang, dengan profesi yang sama. Paska perjanjian Konferensi Meja Bundar, statusnya tetap menjadi buruh negeri Kota Besar Semarang. Tugasnya membersihkan Jalan di Pasar Johar, Jalan Gajahmada dan Jalan Jomblang. Setiap hari ada dua shift kerja: pagi dan sore. Menjelang pensiun ia menjadi mandor penyapu jalan. Dengan sepeda, ia menjaga kebersihan sepanjang jalan di Pasar Johar, Jalan Gajahmada dan Jalan Jomblang. Tugas paginya dikerjakan berangkat dari rumah jam 04.00 dan pulang jam 09.00.²⁷

Banyak pendatang lain yang tinggal di kampung Gang Waas tidak se-*mujur* (beruntung) Karto Dikromo, atau menantu cucunya Suwito (64 th, bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan). Masyarakat di kampung Gang Waas lebih banyak bekerja di sektor informal. Plesetan yang sering muncul untuk menyebut kampung ini adalah *loji* (*wong olo dadi siji*: orang jelek jadi satu). Pada tahun 1950-an sampai 1960-an penduduk yang menghuni lahan reklamasi di belakang bekas sekolah pertukangan kompleks perumahan Sompok seluas tak lebih dari 500 meter ini kurang lebih 50 kepala keluarga. Hampir semua penduduk pendatang ini mempunyai profesi sebagai pengamen, pengemis, tukang becak, pedagang pasar, kuli batu, dan tukang serabutan. Pada tahun 1950–1970, pengamen biasa bekerja berkelompok (3–6 orang) beroperasi keliling kampung, termasuk di kompleks perumahan Sompok. Tahun 1970-an banyak pengamen yang beralih profesi menjadi buruh-buruh di perkantoran, sebagai

²⁷ Wawancara Kasinem (60 th), 28-7-2004

tukang bersih-bersih kantor. Pada tahun 1980-an para pengamen sudah tidak ada di kampung Gang Waas, mereka banyak yang pindah ke kampung Kedungmundu, Semarang. Tak berbeda dengan pengamen, pengemis di kampung ini mulai berkurang pada tahun 1980-an. Sebelumnya, pada tahun 1960–1970-an mereka biasa beroperasi di pasar-pasar dan pusat keramaian lainnya.²⁸

Pada tahun 1950-an sampai 1960-an tukang becak biasa *mangkal* (menunggu penumpang) di salah satu ruas Jalan Sompok (sampai sekarang masih digunakan tempat mangkal). Di ruas jalan ini penumpang lebih banyak, dan tak jarang memberikan *tarikan* (tempat yang dituju) yang jauh, misalnya ke pasar Johar (jarak Sompok ke pasar Johar kurang lebih 12 km). Di ruas jalan ini pula, selain dekat dengan bangunan sekolah, juga berdekatan dengan pintu masuk perkampungan kompleks perumahan Sompok. Becak yang mangkal mencapai 3–7 buah.²⁹ Pada tahun-tahun itu penghasilan mereka lumayan banyak, karena selain tukang becak yang masih sedikit juga transportasi kendaraan bermotor masih sepi. Penghasilan mereka dapat memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan biaya menyewa becak (*setoran*).

Suharjo (68 th) mengayuh becak sejak tahun 1958 sampai tahun 1977. Tempat mangkalnya di ruas jalan Sompok. Mengayuh becak siang malam, kalau pagi berangkat jam 07.00 sampai *surup* (jam 18.00). Malamnya berangkat lagi, bila tidak capek. Becak yang mereka jadikan alat produksi adalah becak sewaan, milik pengusaha becak di Pandean Lamper (Pak Mul). Selain mengayuh becak, Suharjo juga menjalani pekerjaan keras lainnya, misalnya tukang batu, menganyam bambu (1963–1976). Pada tahun 1977, keturunan bangsawan kraton Surakarta ini beralih profesi, menjadi pengantar (*loper*) koran.

Becak-becak yang dimiliki Pak Mul, yang semula 3 buah, bertambah kian banyak. Sampai tahun 1980-an jumlahnya sampai

²⁸ Wawancara Suwito (64 th), 11-9-2004.

²⁹ Wawancara Legiman (75 th) dan Suharjo (68 th), 10-9- 2004.

ratusan. Salah satu penyewa becak lain yang bertempat tinggal di kampung Gang Waas adalah Legiman (75 th). Legiman mulai mengayuh becak sejak mengakhiri profesinya sebagai tukang bersih kantor di sebuah perkantoran di kompleks perumahan Sompok. Pria dari keluarga *broken home* ini tidak melanjutkan pekerjaan *office person* karena kantornya sering berpindah-pindah. Saat kantornya dipindah ke Weleri, ia memutuskan berhenti, dan memulai hidup sebagai tukang becak yang mangkal di Sompok, 1949. Dengan becaknya ini pula ia menghidupi keluarganya sampai tahun 1985.³⁰ Pengayuh tukang becak lain dari kampung Gang Waas adalah al-marmhum Slamet, suami dari Kemisem (80 th). Dengan mengayuh becak tiap malam, sejak tahun 1941 sampai tahun 1960, ia berhasil membangun keluarganya dengan tujuh orang anak.

Gerak usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya semakin *kaya gabah dan interi* (seperti gabah ditampi), pekerjaan-pekerjaan tukang pembuat tempe, penjual tempe, tukang serabutan, pekerja negeri rendahan, pengamen, pengemis, dan tukang becak telah membentuk etos profesi di masyarakat yang sedang menghadapi perubahan jaman. Profesi masyarakat kampung ini sama dengan petani dengan sawahnya. Tempat-tempat usaha mereka ibarat sawah yang harus dijaga. Ketika lepas dari pasangannya, mereka akan resah, kehilangan jatidirinya.

5. Sosial Budaya

Cerita tentang lika-liku pekerja jalanan (kasar) ini tak terhitung jumlahnya, baik yang berhasil maupun yang gagal. Acapkali kehidupan mereka diidentifikasi sebagai manusia kotor, kasar, tidak tahu tata krama, bicaranya kasar dan bertindak tidak senonoh. Sebab kalau diselidiki lebih *suntutuk*, tidak sedikit di antara mereka yang menjunjung tinggi norma-norma kemanusiaan, bahkan secara nyata mereka mengamalkan ajaran agama tertentu. Di kampung Gang

³⁰ Wawancara Legiman (75 th), 10-9-2004.

Waas, pada tahun 1959, saat berdiri 10 rumah salah satu bangunan yang ada adalah mushola (yang sekarang telah dibangun permanen).

Dalam tubuh tukang becak terpatri bahwa jalanan merupakan sawah dan ladang mereka, yang harus dijaga kesuciannya. Legiman (75), Suharjo (68), tukang becak yang masih hidup di kampung Gang Waas, secara moral selalu menjaga berbuat baik. Kepercayaan mereka kepada Tuhan, pembagi rezeki, diwujudkan dalam kerja keras mereka, siang-malam. Jika siang mereka tidak mendapatkan rezeki yang cukup, mereka melanjutkan kerjanya di malam hari. Jika mereka capek dengan pekerjaannya, mereka beristirahat pulang ke rumah walau tak mendapat hasil yang cukup. Juga tukang serabutan, walau dalam kurun waktu yang lama, saat geger 1945–1946 dan geger 1965, mereka tetap sabar menunggu: bahwa rezeki akan datang di lain waktu, saat suasana aman.

Di kampung Lamper Mijen, sampai sekarang telah berdiri tigamushola besar, dan tiga mushola kecil, serta sebuah gereja. Pada tahun 1930–1960, rumah-rumah ibadat (mushola) yang masih berukuran kecil itu telah menjadi tempat bagi proses belajar bagi warganya: mengaji, dalam upaya mencapai keadaman hati dan kesabaran hidup. Bangunan-bangunan dari kayu itu menjadi saksi *keluh-kesah* warganya terhadap perubahan jaman yang terjadi, di hadapan Sang Khalik.

Selain itu, dalam situasi ‘keterbatasan’ mereka masih bisa berkreasi, untuk menghibur diri dalam bentuk kesenian-kesenian. Pada tahun 1940-an, Tasiman dan kawan-kawan sekampungnya telah membentuk sebuah kelompok musik keroncong Jawa.³¹ Pada tahun 1946–1949 setiap tahun di Lamper Mijen selalu diselenggarakan pagelaran wayang Apit. Pagelaran apit digelar di depan rumah kepala desa. Karena tahun 1945–1949, Lurah Kahar mengungsi, posisinya digantikan Lurah Tirtongadi (penduduk Lamper Mijen). Pagelaran wayang dengan lakon yang sama ini, berlangsung kembali di kampung Lamper Mijen pada tahun 1955–1965, saat kepemimpinan

³¹ Wawancara Tasiman (75 th), 2-5-2004.

lurah dipegang oleh penduduk kampung Lamper Mijen, Salikin. Kesenian nanggap (mementaskan) wayang ini berakhir sejak pada tahun 1965. Di kampung Gang Waas, kesenian telah menjadi profesi, yang dikomersilkan. Kesenian berupa cokekan, siteran, dan kroncongan, mereka gelar setiap hari sebagai penyambung hidupnya.

Memahami masyarakat dengan pendekatan budaya dilakukan dengan cara memperlajari, mendefinisikan tindakan-tindakan dan hasil-hasil tindakan-tindakan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan emik: kebudayaan dilihat dan diperlakukan sebagai seperangkat sistem referensi, atau acuan bagi identifikasi untuk interaksi, dorongan-dorongan, dan perwujudan tindakan-tindakan para pelakunya di dalam menghadapi lingkungannya. Sebagai seperangkat referensi, kebudayaan terdiri atas sistem kategorisasi, untuk mengkategorisasikan dirinya dan lingkungan yang dihadapinya. Sistem pengkategorisasian menghasilkan konsep: teori dan metode (Suparlan dalam Thohir, 1999: xiii). Dalam memahami sejarah kebudayaan masyarakat, maka melihat operasionalisasi kebudayaan yang masih berlangsung dan pengkisahan operasionalisasi kebudayaan yang sudah punah menjadi penting.

Operasionalisasi kebudayaan masyarakat dilakukan melalui pranata-pranata yang ada. Di kampung Lamper Mijen terdapat operasionalisasi kebudayaan daur hidup manusia. Daur hidup kelahiran: *mithoni*, *babrahan*, *puputan*, dan *selapanan*. Mithoni adalah upacara syukuran atas keselamatan usia tujuh bulan bayi dalam kandungan. Upacara ini hanya dilakukan pada kehamilan anak pertama, dalam usia kandungan tujuh bulan. *Mithu* (bhs. Jawa) berarti tujuh, mithoni berarti upacara pada bulan ketujuh. Babrahan adalah upacara syukuran kelahiran bayi, di hari yang sama. Puputan adalah upacara syukuran atas terlepasnya bekas saluran makanan bayi (pusar). Selapanan adalah syukuran atas genapnya bayi dalam usia 35 hari, biasanya berbarengan dengan pemberian nama bayi. Selain ritual daur lahir, juga ada ritual daur kawin dan mati.

Berkaitan dengan pendirian rumah di kampung, di Lamper Mijen masyarakat mempraktikkan budaya *sambatan* (kerja sosial/sukarela guna mendirikan rumah). Tradisi ini dilakukan dalam waktu sehari, yang penetapannya berdasar tahun Jawa: hari baik. Pesertanya lelaki dewasa. Sebelum dimulai dilakukan prosesi *slametan* (memohon restu pada Tuhan), yang dipimpin oleh modin kampung. Dalam slametan dilengkapi *sajen* (benda/makanan pelengkap upacara). Sajen berupa pisang raja, gabah padi, dan daun-daunan. Setelah Republik Indonesia merdeka sajen untuk prosesi slametan pendirian rumah bertambah dengankain merah putih atau bendera, yang dipasang di kayu *blandar* (rangka atap rumah joglo). Prosesi slametan selesai, diiringi makan jajanan pasar sambil memulai pengerjaan pendirian rumah. Peserta telah tahu tugasnya masing-masing, oleh karena itu mereka membawa peralatannya sendiri (pacul, palu, gergaji, dll.). Dalam sambatan, selalu ada ahli bangun rumah (seolah menjadi kepala proyek).³² Tradisi ini kini telah tiada, selain di kampung Lamper Mijen tidak ada pembangunan rumah baru, juga kecenderungan umum tradisi yang punah karena perubahan jaman.

Sementara rumah yang didirikan berbentuk joglo limasan pacul gowang (Ismunandar, 2003:122). Bentuknya: bangunan persegi yang berukuran empat sampai sepuluh meter persegi. Rangka rumah dari tiang-tiang kayu (biasanya kayu jati) dan penyangganya, dindingnya dari kayu atau anyaman bambu (*gedbek*), dan atapnya genting dari tanah liat maupun daun. Bagian dalam rumah terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, dan kamar. Dapur dan kamar mandi terpisah dengan bangunan rumah utama. Pintunya ada di tengah-tengah dua jendela, dan daun pintunya ada dua. Ventilasi udara selain jendela depan dan samping, juga ada lubang di atas dinding. Jarak antar-rumah kurang lebih 5–10 meter.³³ Rumah yang didirikan sebelum tahun 1930-an di kampung Lamper Mijen, bahan bakunya kayu jati

³² Wawancara Soejono (75 th), 17-11-2004.

³³ Hasil pengamatan langsung, 7 Februari 2004, 5 Maret 2004, 22 April 2004, 12 Juni 2004, dan 4 Juli 2004. Di kampung Peterongan rumah Jawa bergaya semarangan masih terlihat beberapa, lebih sedikit dibandingkan dengan di kampung Lamper Mijen.

dan anyaman bambu (gedhek). Rumah dari kayu jati merupakan rumah orang kaya kampung, dan rumah dari gedhek sebaliknya. Setelah tahun 1930–1950-an banyak rumah dibangun dengan bentuk sama, tapi tidak dengan kayu jati. Pendirian rumah tahun 1970-an sudah banyak yang meninggalkan bentuk joglo limasan, sampai sekarang. Rumah yang didirikan tahun 1970-an lebih banyak menggunakan bahan batubata.³⁴

Perubahan suatu lingkungan mengakibatkan terjadinya perubahan kebudayaan. Kebudayaan mengenal ruang, tempat tumbuh, tempat berkembang, mengalami perubahan, penambahan dan pengurangan. Dengan kebudayaan yang dimilikinya, suatu masyarakat akan mengatur perilaku mereka dalam hubungannya dengan lingkungannya, demikian pula interaksi sosial maupun dengan dunia supranatural. Jika terjadi perubahan kebudayaan, tidak selalu berada pada tingkat perubahan yang sama; suatu waktu ada perubahan besar dalam suatu kebudayaan, sementara itu pada kebudayaan lainnya hanya ada sedikit perubahan (Poerwanto, 2000: 139–140).

Perpadatan kampung yang diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal telah menghilangkan tradisi sambatan dan bentuk rumah joglo limasan. Rumah yang dibangun tidak lagi mempraktikkan prosesi sambatan dan bentuknya pun berubah, seolah yang penting berdiri dan dapat dihuni sebagai tempat tinggal

B. MEMANDANG KOMPLEKS PERUMAHAN SOMPOK

Sisa-sisa rumah yang dibangun dalam proyek perumahan untuk rakyat pada jaman kolonial di Sompok dan Mlaten kini masih terlihat. Hal ini menjelaskan bahwa di beberapa kawasan di Semarang pada masa akhir kolonial telah berdiri kompleks-kompleks perumahan. Akan tetapi, kesan sebagai kompleks perumahan kini nyaris hilang. Apalagi jika kita membandingkan dengan bangunan

³⁴ Wawancara Tohir (75 th), 19-5-2004.

rumah di kompleks-kompleks yang dibangun sekarang yang lebih menonjolkan fungsi ekonomis.

Namun, kesan bahwa di Sompok maupun di Mlaten dulunya merupakan sebuah kompleks perumahan masih dirasakan oleh masyarakat Semarang yang pernah bersinggungan dengan dua kawasan tersebut. Apalagi warga perumahan dan wong kampung sekitar komplek perumahan. Seperti Said (77 th) yang masih terkenang dengan hubungan sosial antara warga kompleks dengan wong kampung.

Itu jaman dulu *keban* terpisah antara orang yang mampu sama orang yang *ndak* mampu. Kalau orang-orang mampu *keban* biasanya kerja di kantor. *Undang-undangnya* (panggilannya) itu Raden. Kalau *ndak* ya itu.. nDoro. *Kalan ndak* diundang ndoro ndak mau. Kalau sama orang seperti saya *kalis*. *Kalis* itu dulu saya masih kecil ndak boleh mainan di tempatnya situ. Kalau yang kerjanya sama Belanda *pake* titel ndoro. Berhubungan dengan anak kompleks anak kampung ndak boleh,

Interaksi sosial antara wong kampung dan warga perumahan memang jarang terjadi, apalagi dengan priyayi dan orang Barat. Hal ini terjadi selain masih kuatnya budaya feodal juga karena memperkuat pencitraan pemerintah kolonial tentang dirinya. Selain menciptakan kesan kewibawaan aparaturnya, pengambilan jarak interaksi antarkomunitas di pemukiman berkenaan dengan status sosial.

Kekaguman akan modernitas kompleks perumahan sangat dirasakan oleh komunitas kampung. Mereka pada awalnya hanya dapat menyaksikan saja akan hal-hal baru buat mereka itu. Dalam proses perubahan kebijakan negara dan kepemimpinan akhirnya mereka boleh menikmati. Kedatangan Jepang, menjadikan mereka mempunyai interaksi yang lebih dengan penghuni-penghuni kompleks Sompok yang diubah menjadi kampung inteniran. Dalam kampung inteniran ini mereka dapat menikmati kemodernan perumahan dan bergaul dengan komunitas modern yang sebelumnya tidak tersentuh, orang Eropa. Dengan itu pula, mereka

dapat menikmati barang-barang modern milik penghuni penjara, setelah ditukar dengan bahan makanan. Setelah merdeka, interaksi antarwong kampung dengan warga perumahan kembali lagi kaku, dan seolah beku karena penghuni-penghuni baru merasa derajatnya lebih tinggi. Mereka membatasi diri dalam pergaulan dengan wong kampung. Komunitas wong kampung ini terus membenahi dalam berinteraksi dengan priyayi-priyayi baru (militer, pejabat, dan pegawai) yang dapat langsung menikmati kemerdekaan.

Pembenahan wong kampung untuk menghadapi modernitas terus berjalan, tetapi mereka seolah ditakdirkan untuk tertinggal. Buktinya, fasilitas-fasilitas higienitas modern di awal abad ke-20 (MCK) sampai sekarang beberapa wong kampung belum memilikinya. Mereka masih menggunakan kali sebagai jambannya. Ini berarti bahwa masalah pemukiman sehat untuk rakyat, masih perlu diupayakan oleh semua kalangan, terkhusus pemerintah yang harus lebih serius dan tulus.



Sumber: Koleksi pribadi Hermintoyo Wajib

Gambar 31. Sebuah rumah di kp. Lamper Mijen yang akan dibenah dengan tradisi *sambatan*

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sumber: Koleksi pribadi Hermintoyo Wajib

Gambar 32. Pelaksanaan tradisi sambatan di kp. Lamper Mijen

Buku ini tidak diperjualbelikan.

SIMPULAN

Ada yang membeli, ada yang memberi.

Manusia saling bertemu dalam cara-cara yang berbeda.

Barangkali itulah yang membuat sejarah tak sepenuhnya sejarah kemerdekaan, tapi juga tak sepenuhnya represi

(Goenawan Mohamad..)

Kebijakan pemerintah Gemeente Semarang dalam melayani rakyatnya di sektor perumahan pada dasarnya telah mencanangkan bahwa pemukiman untuk rakyat, terutama rakyat miskin, harus diselesaikan dengan dasar keterjangkauan nilai penjualannya. Untuk mewujudkan program mulia ini pemerintah lokal di zaman kolonial telah menunjukkan upaya-upaya keseriusan dan ketulusan. Walau dalam praktik pendistribusiannya tidak merata. Namun upaya-upaya untuk mendukung perumahan untuk rakyat ini juga telah dilakukan dengan mesin birokrasi dan teknokrasi yang handal. Bahkan, masalah pemukiman yang gawat bagi kota yang menuju modern ini disikapi dengan optimisme yang tinggi terhadap pemecahan masalahnya. Hal ini berbeda dengan periode pendudukan Jepang yang tidak terlalu intens mengeluarkan kebijakan di bidang pemukiman untuk rakyat. Upaya serius untuk menyukupi kebutuhan papan rakyatnya juga dilakukan pemerintah Kotapraja Semarang dengan mengagendakan pemukiman untuk rakyat dalam program kerjanya. Upaya serius itu diwujudkan dengan bentuk pelegalan undian untuk mendapatkan dana pembangunan program pemukiman untuk rakyat.

Pada awal abad ke-20, sejarah masyarakat Indonesia memasuki zaman perubahan, dari tradisional ke modern ala Barat. Perubahan tersebut terjadi karena intensifikasi politik kolonialisasi, melalui birokratisasi, komersialisasi, yang berakibat pada berubahnya sebuah wilayah. Modernisasi telah mengubah masyarakat perdesaan dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

perkotaan. Juga perubahan pada morfologi kota: perdesaan menjadi semi perkotaan, maupun semi perkotaan menjadi perkotaan. Di pemukiman kota, dibangunnya bentuk pemukiman baru berupa kompleks perumahan, memunculkan sebuah komunitas sosial baru. Ketika komunitas perumahan berinteraksi dengan masyarakat kampung di sekitar perumahan, hal ini merupakan komunitas baru yang lebih luas. Komunitas sosial baru di pemukiman ini (kampung dan kompleks perumahan) berubah dalam perjalanan waktu. Karena mereka berhadapan dengan perubahan penguasa (akhir masa kolonial, zaman Jepang dan awal Republik Indonesia).

Di pemukiman Sompok dan Mlaten negara telah melakukan intervensi yang kuat, melalui paket-paket kebijakan dan pelaksanaannya. Sebuah perkampungan di timur Kota Semarang, pemerintah membangun kompleks perumahan dan memfungsikannya secara maksimal. Tidak dapat dipungkiri, kompleks perumahan telah mengambil peran penting dalam perkembangan Kota Semarang. Bahkan kompleks perumahan modern ini ikut andil besar dalam perubahan lingkungan fisik kota, dan menempati sebagian besar ruang kota.

Pembangunan kompleks perumahan di Kota Semarang diawali dengan mengembangkan kawasan Candi Baru, terletak di selatan Kota Semarang, yang memunyai ketinggian 80 m dari permukaan laut. Penggagasnya adalah Dr. Der Vogel, seorang dokter yang juga anggota dewan kota yang sangat memperhatikan kondisi pemukiman rakyat kebanyakan. Dewan kota yang lain yang sangat peduli dengan kondisi pemukiman penduduk adalah HF. Tillema. Pensiunan pengusaha kaya ini berhasil meyakinkan kepada khalayak luas tentang kondisi buruk di pemukiman kampung Kota Semarang, lewat karya-karya fotonya. Perancang pengembangan kawasan Candi Baru adalah Herman Thomas Karsten. Pada awalnya pengaruh gaya Eropa sangat dominan. *Garden city* dengan rumah bertaman dan halaman yang luas menjadi tren di awal pembangunannya. Kemudian, Karsten merancang bangunan rumah, taman dan ruang terbuka, dengan didasari pada topografi, kemiringan dan belokan-belokan.

Tidak hanya pemukiman Candi Baru yang dirancang, Karsten juga merancang pengembangan daerah Pekunden dan Peterongan. Pada tahun 1916 Karsten juga mengembangkan kompleks perumahan Sompok, dan tahun 1924 ia melengkapi karya terbaiknya di bidang pemukiman dengan merancang kompleks perumahan Mlaten. Pembangunan kompleks perumahan oleh Gemeente Semarang juga dilaksanakan di kawasan Kintelan, Lempongsari, Pendrikan, Seteran, Semarang Timur, Ngaglik dan Bulu.

Keberhasilan pembangunan di sektor perumahan ini menjadikan Kota Semarang sebagai pelopor pembangunan kota pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda. Tidak hanya itu, keberadaan kompleks-kompleks perumahan menjadikan tata ruang kota Semarang menjadi lebih teratur rapi. Pembagian wilayah (zona) Kota Semarang menjadi lebih jelas dan terkendali. Zona pemukiman, berada di kompleks-kompleks perumahan dan perkampungan. Walaupun penghuni dibedakan berdasar pada kelas sosial-ekonomi, tetapi pemukiman dihuni oleh berbagai ras sosial (multietnis).

Selain zona pemukiman, penzoningan dilakukan juga pada sektor perniagaan, industri, dan perkantoran. Sebagai pusat-pusat perdagangan, pasar dibangun dan dikelola dengan baik oleh gemeente. Dengan konsep modern, pasar tradisional diperbaiki dan dibangun pula pasar-pasar baru. Pembangunannya sangat memerhatikan asas higienitas. Sebagai basis masyarakat modern di perkotaan, pemerintahan Gemeente Semarang mengembangkan industri modern, di samping industri pribumi yang berskala kecil juga beroperasi. Pada tahun 1909 masih tercatat berbagai industri pribumi: batik (kampung Batik), pewarna biru, pembuatan alat-alat logam (kampung Sayangan, Pandean), pembuatan alat-alat gerabah (kampung Pekunden), penyamakan kulit (kampung Kulitan), pakaian, dan pembuatan gong (kampung Kuningan). Industri-industri pabrik menggunakan mesin uap, gas, dan listrik, perkembangannya cukup pesat. Pada tahun 1905 di Semarang terdapat 22 jenis industri pabrik dengan mesin-mesin modern. Sementara perkantoran pemerintah, sebagai mesin operasi birokrasi negara modern dibangun

di tengah-tengah kota (Bojong, sekarang Jalan Pemuda). Namun penzonongan yang berlangsung selama kurang lebih setengah abad itu berakhir pada tahun 1976, seiring pemekaran Kota Semarang pada zaman Orde Baru.

Dampak pembangunan kompleks perumahan Kota Semarang terhadap penataan kota, tidak hanya pada bentuk fisik kota dan sarana kota. Dampak sosial yang muncul akibat pembangunan pemukiman adalah lahirnya sebuah komunitas sosial yang baru. Ketika sebuah komunitas telah terbentuk di sebuah kawasan, ketika itulah hadir apa yang dinamakan gaya hidup (*life style*). Inilah yang terjadi di kompleks perumahan Sompok, dan kompleks perumahan yang lain pada awal abad ke-20. Properti komersial dan residensial yang terbangun hasil tuntutan pembangunan di awal abad ke-20 oleh pemerintah Gemeente Semarang adalah manifestasi atas gaya hidup yang lahir di kompleks-kompleks perumahan. Wujud gaya hidup yang muncul di kompleks perumahan ini dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam kebiasaan mandi. Mereka, yang terbiasa berak di ruang terbuka (kali), menjadi terbiasa berak di dalam ruangan rumah (kakus). Adanya listrik, menjadikan kehidupan di rumah mereka menjadi hidup pada malam hari. Sementara itu, pola konsumsi mereka pun berubah mengikuti perkembangan teknologi. Perubahan juga terjadi dalam komunitas ini dalam bidang bahasa, tatapergaulan, selera makan, harga diri, kesadaran ruang dan waktu, kepantasan, kegagahan, kekuasaan, keindahan, etos kerja, wibawa dan harta. Para penghuni kompleks perumahan ini menjadi priyayi baru bergaya hidup modern, termasuk penghuni di kompleks pegawai rendah.

Komunitas sosial yang lebih luas lahir di kompleks perumahan Sompok adalah perpaduan antara tradisional dan modern, antara masyarakat kampung dan kompleks perumahan. Antara kedua nilai budaya itu menghasilkan budaya yang dapat diterima bersama oleh komunitas baru itu. Sistem yang berlaku adalah *teposlir* (menerima plus-minus) antarbudaya. Akan tetapi, dalam pola produksi kapitalis, seperti sekarang ini, komunitas mereka adalah komunitas komoditas.

Dengan keseharian yang menghayati percampuran budaya, mereka dalam pola produksi kapital besar hanya menjadi bagian modal. Mereka dapat memproduksi (berkarya), tetapi tidak dapat memiliki mesin produksi dan hasil produksinya. Mereka dalam industri modern hanya berperan sebagai buruh atau birokrat, yang perannya tak bisa dianggap kecil dalam pengembangan kapitalisme dan kapitalisnya. Dengan kerja keras komunitas ini berarti telah membantu perbaikan sistem kapitalis dan memperkaya para kapital. Dengan itu pula, para kapital telah berhasil mengembangkan usaha, yang mungkin para kapital itu mengorbankan ratusan kampung, laut, udara, air dan hutan. Serta, mungkin mereka mengeksploitasi buruh di kampung-kampung dengan upah murah.

Dalam perkembangannya, jumlah mereka semakin banyak dan pamornya naik. Mereka berada di posisi tengah-tengah, tidak sebagai pemodal dan tidak sebagai buruh. Dalam hidup keseharian mereka kadang menjadi buruh, kadang menjadi majikan. Gaya hidup mereka berubah seiring jam produksinya. Ketika di tempat kerja mereka menjadi buruh yang ditindas dengan target produksi, tetapi di luar kerja mereka menjadi majikan dengan bergaya hidup glamour. Kondisi lupa posisi inilah yang mempersulit adanya ke-seriusan mengurus komunitas miskin.

Wilayah-wilayah kompleks perumahan yang dibangun semasa pemerintah kolonial juga sebuah fenomena. Dapat dikatakan bahwa sekarang ini kawasan-kawasan tersebut menjadi hunian yang padat penduduk. Jika awal pembentukannya sebuah kompleks diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kini kompleks itu telah berubah menjadi kompleks elite, yang seolah mengikuti kompleks-kompleks elit yang sejak awal dibangun oleh pemerintah kolonial. Misalnya, di kompleks Manggis, Rambutan, Jeruk (Sompok), Krakatau, Hiri, dan Hawa (Mlaten). Kondisi ini tak lepas dari perubahan kepemilikan yang mulai diterapkan setelah kemerdekaan: rumah sewa menjadi rumah milik. Uang sewa yang setiap bulannya dibayarkan pada masa kolonial berubah menjadi angsuran (membayar kredit) pada masa republik.

Keberadaan kompleks perumahan Sompok juga sebuah fenomena pengaruh-mempengaruhi pola pemukiman. Tentunya, jumlah kampung semakin banyak, dan kepadatan penduduk pun semakin tinggi. Selain itu, sebuah kampung lama Lamper Mijen, masyarakat yang tanahnya (lahan pertanian) terbeli untuk pembangunan perumahan, kehidupan generasi penerusnya berubah menjadi bukan lagi sebagai petani, sebagai pekerja di sektor informal kota. Mereka bukan lagi menjadi generasi agraris, dan memasuki sistem produksi modern.

Brayat Nyai Rus pemegang prinsip *ora obah, ora mamah* (tidak berusaha, tidak makan), sebuah keluarga besar yang kehilangan tanah untuk pembangunan perumahan mencari jalan untuk menafkahi keluarganya. Membuat tempe dan menjualnya di pasar menjadi pilihan. Usaha ini dan usaha kreatif lainnya dapat menyelamatkan ekonomi keluarga di masa-masa pergantian rezim. Hampir seluruh keturunannya mengikuti dan berkecimpung dalam pola kerjanya, selama kurang lebih 60 tahun (1920–1980-an). Usaha yang telah menyelamatkan dua generasi ini tidak berlanjut pada generasi selanjutnya. Mereka lebih menyukai bekerja sebagai buruh (seolah menuntut sesuai pendidikan yang mereka kenam). Selain juga karena masuknya pemain-pemain baru dalam usaha pembuatan tempe di Semarang. “Penderitaan” yang dideritanya bukan lagi menyangkut soal keringat, melainkan penderitaan batin. Bagi mereka, beban lahiriah masih sanggup dipikul. Namun, beban batiniah niscaya tidak tertanggguhkan, walau dapat ditutupi dengan kesibukan dalam kontinuitas kehidupan mereka. Kehidupan kampung mereka yang dulunya bersifat agraris telah berubah karena pembangunan Perumahan Sompok. Perubahan ini telah menyulap kampung mereka bukan lagi sebagai tempat hidup yang tentram, tetapi menjadi tempat bekerja. Setiap kegiatan masyarakat di kampung adalah untuk bekerja (*rak kerjo rak urip*, tidak kerja tidak hidup).

Di kampung lain yang terletak di sekitar kompleks perumahan, yang lebih dulu menjadi tempat kerja, keberadaan kompleks perumahan Sompok malah mempercepat perpindahan penduduk.

Kampung di belakang kompleks itu dijadikan tempat tujuan pendatang. Pada tahun 1950-an, para penghuni awal menyewakan dan menjual tanah kosong di belakang sebuah bangunan perumahan. Para penyewa adalah bekas petani dan masyarakat dari luar Semarang (dulunya berbasis ekonomi di sektor agraris) yang telah berprofesi sebagai tukang becak, pengemis, pengamen, tukang serabutan. Mereka tidak menyewa dan membeli kepada negara, seperti penghuni di depan rumah mereka. Karena profesinya, tempat mukim ini kemudian disebut kampung Gang Waas (*loji: wong olo dadi siji*, tempat orang hina). Dalam kampung baru Gang Waas, sebagai tempat tinggal pelarian petani, profesi yang mereka miliki di sektor informal berlanjut ke generasi selanjutnya (kedua), dengan kualitas yang berbeda. Profesi mereka tidak berlanjut pada generasi ketiga (sekarang). Kehidupan dalam dua rezim, tidak terlalu banyak mengubah kehidupan mereka. Profesi yang digeluti masyarakat di kampung baru ini sebagai pekerja pabrik, dan penjaga toko, pedagang pasar, pembantu rumah tangga, pegawai swasta, tukang, dan lain lainnya.

Di kampung berbeda berhadapan dengan ruang, waktu dan penguasa yang sama menghasilkan perubahan sama. Kampung Lamper Mijen dan kampung Gang Waas-Peterongan adalah sebuah contoh permukiman yang terpinggirkan oleh kota yang terkapitalisasi. Kampung Lamper Mijen, sebagai wilayah lama, berhadapan dengan modernitas perumahan Sompok dalam masa pergantian rezim masyarakatnya berubah menjadi di "luar" generasi pendahulunya: bukan lagi menjadi petani. Kampung Gang Waas, sebagai wilayah baru, yang berhadapan dengan modernitas perumahan Sompok dalam masa pergantian rezim masyarakatnya berubah menjadi di "luar" generasi pendahulunya, yang telah mereka tinggalkan sebelumnya: tidak dapat menjadi pekerja yang tentram. Kedua kampung itu telah menjadi tempat bekerja, yang terkadang menghilangkan hubungan-hubungan sosial yang ada.

Perpadatan yang disebabkan oleh faktor internal (pertumbuhan penduduk) dan eksternal (pertambahan penduduk) di kampung

Lamper Mijen telah menghilangkan tradisi *sambatan* dan bentuk rumah *joglo limasan*. Perubahan sosial yang terjadi di kampung-kampung ini merupakan proses kontinuitas kehidupan manusia. Artinya, mereka harus bertahan di ruang sama, yang dipaksa difungsikan berbeda, oleh kekuasaan berbeda. Tahun 1916–1942 mereka di bawah kekuasaan Kolonial Belanda yang telah mengubah perkampungan mereka menjadi perumahan; tahun 1942–1945 mereka berada di bawah kekuasaan Pendudukan Jepang yang sangat keji telah "mengganggu" kehidupan perkampungan; tahun 1945–1960 mereka berada di bawah kekuasaan rezim anak negeri, yang memberikan keleluasaan kepada warga kampung. Generasi-generasi yang dilahirkan oleh generasi pendahulunya kini telah memiliki lahan-lahan lain, yang telah dijaga kesuciannya. Tukang becak dengan jalanan sebagai ladangnya, penjual tempe dengan pasar sebagai ladangnya, tukang dengan tempat-tempat yang dibangunnya sebagai ladang baginya. Berkat menjaga kesucian lahan barunya, mereka dapat menghadapi zaman dan mengharap generasi penerusnya dapat memiliki lahan baru yang lebih baik. Mereka pun harus tetap berharap, karena zaman telah berganti lagi: ladang-ladang yang tidak dirampas oleh penguasa, seperti tanah yang dulu mereka garap.[]

DAFTAR PUSTAKA

Arsip, Artikel, dan Buku

- Abikoeso, R. 1935. “Pemandangan tentang preadvies2 tentang pembangoenan kampoeng perdiaman ra’jat dalam kota.”, dalam *Locale Techniek Mei 1935*.
- Amaloedin & Soedarsono. 1928. “Volkhuisvesting te Semarang”, dalam *Oedaja 10*.
- Anderson, Ben (penerjemah Jiman Rumbo). 1988. *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944–1946*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Anonim. 1972. *Encyclopedia Americana Vol. VII*.
- , 1931. “Personalijke herinnering,” *Gedenkboek der Gementee Semarang 1906–1931*. Semarang: N.V. Dagblad de Locomotief.
- , 1934. *Volkstelling, 1930 deel II, Inheemsche bevolking van Midden van Jawa en vorstenlanden*. Batavia: Departement van Economische Zaken.
- , 1990. *Sejarah perkebunan di Indonesia: Kajian sosial ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Aditya Media.
- , *Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1990 Seri D No2 tentang Perubahan pertama peraturan daerah kodya daerah tingkat II Semarang No5 Tahun 1981 tentang Rencana Kota Semarang tahun 1975 sampai Tahun 2000 (Rencana Induk Kota Semarang)*. Semarang: Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- , 1979. *Semarang: masa lalu masa sekarang, dan masa mendatang*. Semarang: Pemda Dati II Semarang.
- Anonim. 1987. *Tata ruang perkotaan*. Bandung: Alumni.
- , 2004. “Kamp Lampersari”, dalam www.semarang.nl, download 11-4-2004.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 1977. *Memori serah jabatan 1921-1930 (Jawa Tengah)*. Jakarta: ANRI.

- Bagoes, A. Wiryomartono. 1995. *Seni bangunan dan seni bina kota*. Jakarta: Gramedia.
- Berlege, H.P. 1910. *Studies over bouwkunst stijl en samenleving*. Rotterdam: W.L.B.J. Brusse.
- Bey, Arifin (edt.). 1991. *Pendudukan Jepang di Indonesia; Suatu ungkapan berdasarkan dokumen pemerintah Belanda*. Jakarta: Kesaint Blanc.
- Bijkerk, J.C. 1988. *Selamat berpisah: Sampai berjumpa di saat yang lebih baik (Dokumen runtuhnya Hindia Belanda)* (penerjemah Moehardanus). Jakarta: Djambatan.
- Bogaers, Erica & Peter de Ruijter. 1986. “Ir. Thomas Karsten and Indonesian town planning, 1915–1940”, dalam Peter. J.M Nas (edt.) *The Indonesian city: Studies in urban development and planning*. Doordrecht & Cinnaminson: Foris Publication.
- Boomgaard, Peter. 2004. *Anak jajaban belanda: sejarah sosial dan ekonomi Jawa 1795–1880*. Jakarta: Djambatan, KITLV.
- Broomer, B. (ed.). 1995. *Semarang beeld van een stad*. Nederland: Asia Moir.
- Budiardjo, Eko. 1986. *Arsitektur dan kota di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Budiman, Amen. 1978. *Semarang riwayatmu dulu*. Semarang: Penerbit Tajung Sari.
- Budi, Revianto Santoso. 1999. *Omah: Membaca makna rumah Jawa*. Yogyakarta: Bentang.
- Budiman. 1979. *Folklor Betawi*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Burke, Peter. 2003. *Sejarah dan teori sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Cobban, James L. 1974. “Uncontrolled urban settlement: The kampongs question in Semarang,” dalam *Bijdragen tot de taal, land en volkunde 130-4*. (Leiden: KITLV).
- Colombijn, Freek. 1994. *Patches of Padang: The history of an Indonesian town in 19 th century and the use of urban space*, (Leiden: Research School CNSW).
- , 2003. *Sejarah permukiman di Surabaya, 1930-1960*. (Makalah pada Seminar Institut Teknologi Surabaya, Laboratorium for Housing and Human Settlements, 29-4-2003).
- , (ed.). 2005. *Kota lama kota baru: Sejarah kota-kota di Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, Uniar, NIOD.
- Coote, Joost. 1997. “Toward an Architecture of Association. HF. Tillema, Semarang and the discourse on the colonial slum”, dalam Peter J.M. Nas, *The Indonesian town revisited*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.
- Departemen Pendidikan Nasional. 1989. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Dini, NH. 2002a. *Sebuah Lorong di Kotaku: Cerita Kenangan*. Jakarta: Gramedia.
- . 2002b. *Padang ilalang di belakang rumah*. Jakarta: Gramedia.
- Djojohadikoesoemo, Margono. 1973. *Reminiscences from 3 historical periods*. Jakarta: Indira.
- Fakih, Mansour. 2003. *Runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi*. Yogyakarta: Insist Pres dan Pustaka Pelajar.
- Fenton, Shirley Huie. Xxxx. *The forgotten ones: Women and children under Nippon*. -:Angus & Robertson.
- Flieringa, G. 1930. *De zorg, voor volkhuysvesting in de stadgemeenten in Nederlandsch Oost Indie in het bijzonder in Semarang*. Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Fooley, John Miles. 1986. *Oral tradition in literature*. Columbia: University of Missousi Press.
- FS Undip. 2002. “Profil Kota Semarang 1900-1965”, dalam *Resi yang menyepi: Kumpulan karangan persembahan untuk Prof. Dr. Karyana Sindunegara*, Semarang: FS Undip.
- Gottschalk, Louis. 1983. *Mengerti sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Handry. 1995. *Bintang stamboel*. Semarang: Multimassa Citra Fiksi.
- Herlianto. 1995. *Urbanisasi, pembangunan dan kerusuban kota*. Bandung: Alumni.
- Indische Staatsblad. No. 120*
- Ingelson, John. 1986. *In search of justice: Workers and unions in central Java 1908-1926*. Singapura: Oxford University Press.
- Ismunandar K, R. 2003. *Joglo: Arsitektur rumah tradisional Jawa*. Semarang: Daharaprize.
- Jellinek, Lea. 1994. *Seperti roda berputar: Perubahan sebuah kampung di Jakarta*. Jakarta: LP3ES.
- Kahin, George McTurnan. 1995. *Refleksi pengumpulan lahirnya republik: Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia* (penerjemah Nin Bakdi Soemanto). Solo: UNS Press dan Sinar Harapan.
- Kakebeeke, H.C. 1931. *Gedenkboek der Gementee Semarang 1906-1931*. Semarang: N.V. Dagblad de Locomotief.
- Kerchman, F.W.M. (edt). 1931. *25 jaren decentralitatie in Nederlandsch Indie*.
- Koesnodiprojo. 1952. *Himpunan: peraturan pegawai negeri 1949*. Djakarta: S. K. Seno.
- Kolonial Verslag 1905.
- Kolonial Verslag 1915.
- Kolonial Verslag 1923.
- Kolonial Verslag 1925.

- Komunitas Bambu. 2004. *Kaki dan tangan terikat; dinamika buruh, serikat kerja dan perkotaan masa kolonial*. Jakarta.
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kurosawa, Aiko. 1993. *Mobilisasi dan Kontrol*. Jakarta: Grasindo.
- Kusno, Abidin. 2000. *Behind the poscolonial: Architecture, urban space and political cultures in Indonesia*, (London & New York: Routledge).
- Laksono, P.M. 1993. “Yogyakarta berhati nyaman” dalam *Buletin Antropologi No. 17 th VII/ 1993*.
- Liem Thian Joe. 1931. *Riwayat Semarang 1416-1931: Dari jamannya Sam Poo sampe terhapoesnja Kong Koan*. Batavia: Boekhandel Kiem Yoe.
- Lombard, Denys. 2000. *Nusa Jawa: Silang budaya 1; Batas-batas pembaratan* (penerjemah Wintarsih, dkk). Jakarta: Gramedia.
- Loomba, Ania. 2003. *Kolonialisme/Pascakolonilisme* (penerjemah Hartono Hadikusumo). Yogyakarta: Bentang.
- Lucas, Anton. 1997. “Images of the Indonesian woman during the Japanese occupation”, dalam Jean Gelman Taylor (edt) *Women Creating Indonesia*. Monash: Monash Asia Institute.
- Madiasworo, Taufan. 2001. *Pengaruh kebudayaan banjar terhadap bentuk rumah panggung masyarakat Banjar di kampung Melayu Semarang*. Tesis Pascasarjana Teknik Arsitektur Undip: tidak diterbitkan.
- McVey, Ruth T. Xxxx. *Beamtenstaat di Indonesia*.
- Menno, S dan Mustamin Alwi. 1994. *Antropologi perkotaan*. Jakarta: PT Ragrafiti Persada.
- Mrazek, Rudolf. 2005. “Kenecisan Indonesia: Politik pakaian pada akhir masa kolonial 1893-1942”, dalam Henk Schulte Nordholt (ed.) *Outward Appearances: Trend, identitas, kepentingan*. Yogyakarta: LKiS.
- Nakamura, Mitsuo. 1988. *Jenderal Imamura dan periode awal pendudukan Jepang*. Jakarta: YOI.
- Nas, Peter JM. 1997. *The Indonesian town revised*. (Munster: Lit & Singapore: Institute of Southeast Asian Studies).
- Ny. P. 1931. “Semarang”, dalam *Gedenboek der Gementee Semarang 1906-1931*. Semarang: N.V. Dagblad de Locomotief.
- Ny. Sutopo. 1982. “Ny. Sutopo”, dalam Lasmidjah Hardi, *Sumangsib bagi pertivi (Kumpulan pengalaman & pemikiran) I*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Ongbokham. 1996. “Gelandangan Sepanjang Jalan” dalam *Gelandangan: Pandangan ilmuwan sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Pemda Semarang. 1979. *Sejarah Kota Semarang*. Semarang: Pemda Tk. II Semarang.

- Poerwanto, Hari. 2000. *Kebudayaan dan lingkungan; Dalam perspektif antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poerwopranoto, S. 1952. *Pembimbing pamong (pegawai)desa*. Semarang: Astana-buku Abede.
- Poeze, Harry A. 2000. *Tan Malaka: Pergulatan menuju republik 1897–1925*. Jakarta: Pustaka Grafiti.
- Poldervaart, A. 1932. “Persediaan roemah dalam kota-kota besar: Pemandangan dari erti technisch-econimisch-nja”, dalam *Locale Tehniek Juli 1932*.
- Pranger, J.J. 1931. “Eenige...”, dalam *Gedenkboek der Gementee Semarang 1906–1931*. Semarang: N.V. Dagblad de Locomotief.
- Pratiwo. 2003. *Kota dalam perubahan jaman*, Makalah Pelatihan LIPI-NIOD, Sejarah 15 September–18 Oktober 2003.
- Regeeringalmanaak 1898–1920*
- Reitsma, S. Xx *Van stochem’s traveller handbook for Dutch Indies*
- Ricklefs, M.C. 1981. *Sejarah modern Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Roorda, PP van Eysinga. 1842. *Handboeck der lands en volkunde enz. III boek, deel III*.
- Ruckert, JJGE. 1931. “Volkhuisvesting II”, dalam Kerchman, F.W.M. (edt), *25 jaren decentralitatie in Nederlandsch Indie*.
- Ruff-O’Hare, Jan (pent: Sulitno Harahap). 2003. *Rintihan dalam kebiasaan*. Jakarta: Progres.
- Sardjono. 1986. "Menuju tinggal landas pembangunan nasional di bidang perumahan rakyat", dalam *Prisma* No. 5 1986. Jakarta: LP3ES.
- Sasaki, Saya Shirasahi. 2001. *Pahlawan-pahlawan belia: Keluarga Indonesia dalam politik* (penerjemah Tim Jakarta-Jakarta). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Schulte Nordholt, N. G. 1997. *Ojo dumei: Kepemimpinan lokal dalam pembangunan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Schulte, Henk Nordholt (edt.). 2005. *Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan*. (penerjemah M Iman Aziz) Yogyakarta: LKiS.
- Senior, Persada. 1990. *Suka duka pelajar Indonesia di Jepang: Sekitar perang pasifik 1942–1945*. Jakarta: Antarkarya.
- Sekda Semarang. 1972. *Mengenal Kotamadya Semarang II*. Semarang: Sekda Kotamadya Semarang.
- Shirasahi, Takashi. 1997. *Zaman bergerak: Radikalisme rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Pustaka Grafiti.
- Sho Hok Gie. 1990. *Di bawah lentera merah: Riwat Sarekat Islam Semarang 1917–1920*. Jakarta: Frantz Fanon Foundation.

- Silas, John. 2005. “Perjalanan panjang perumahan Indonesia dalam dan sekitar abad XX”, dalam Freek Colombij (et.al), *Kota lama, kota baru: Sejarah kota-kota di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, Unair, NIOD.
- Simarmata, Ricardo. 2002. *Kapitalisasi perkebunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soedarsono. 1986. “Landasan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan pemukiman”, dalam C. Djemabut Blaang (et.al), *Perumahan dan permukiman sebagai kebutuhan dasar*. Jakarta: YOI.
- Soejatmoko (ed.). 1995. *Historiografi Indonesia: Sebuah pengantar*. (Jakarta: Gramedia).
- Soejono. 2004. *Mengenang masa dulu*. Catatan pribadi: tidak diterbitkan.
- Soekiman, Djoko. 2000. *Kebudayaan Indis dan gaya hidup masyarakat pendudukan di Jawa (abad XVIII-medio Abad XX)*. Yogyakarta: Bentang.
- Soekirno. 1952. *Propinsi Djawa Tengah*. Semarang: Djawatan Penerangan Djawa Tengah
- Soetrisno, Loekman. 1988. “Negara dan peranannya dalam menciptakan pembangunan desa yang mandiri”, dalam *Prisma No.1 tahun XVII*. Jakarta: LP3ES.
- Staatsblad van Nederlandsch Indie 1906, No. 121-126.*
- Staatsblad van Nederlandch Indie 1906 No. 83.*
- Staatsblad van Nederlandch Indie 1907 No. 212.*
- Staatsblad van Nederlandch Indie 1929 No. 227*
- Staatsblad van Nederlandch Indie 1941 No. 356.*
- Suara Merdeka*. 1975. “Lahirnya Semarang; Kaligawe dan Kaliwungu”, dalam *Suara Merdeka 24-1-1975*.
- Suara Merdeka*. 1975. “Asal muasal nama Smg”, dalam *Suara Merdeka 7-3-1975*.
- Suara Merdeka*. 1975. “Wajah pertama Kota Smg”, dalam *Suara Merdeka 14-3-1975*.
- Suara Merdeka*. 1975. “Dari Demak-Pajang-Mataram Smg jatuh ke tangan kompeni”, dalam *Suara Merdeka 11-4-1975*.
- Suara Merdeka*. 1975. “Rona Semarang setelah digadai kompeni”, dalam *Suara Merdeka 25-4-1975*.
- Suara Merdeka*. 1976. “Kota Semarang sejak jaman pandanarang” dalam *Suara Merdeka*, 19-5-1976.
- Suara Merdeka*. 1975. “Mataram tak rela Semarang digadai kompeni” dalam *Suara Merdeka*, 25-4-1975.
- Suara Merdeka*. 1976. “Awak terus cahya jati: Semarang 500 tahun”, dalam *Suara Merdeka*, 4-8-1976.

- Suara Merdeka*. 1976. “Serba Semarang; Sandyhakala ning Semarang”, dalam *Suara Merdeka*, 18 -8-1976.
- Suara Merdeka*. 1976. “Masyarakat Eropah waktu itu”, dalam *Suara Merdeka*, dalam 30-1-1976.
- Sujarwo. 1985. “Lautan”, dalam Darmanto Jatman (et.al), *Sebutlah ia bunga*. Semarang: FS Undip & Effhar Coy.
- Sullivan, John. 1986. “Kampung and state: The role of government in the development of urban community in Yogyakarta”, dalam *Indonesia No. 41 Tahun 1986*.
- Sumalyo, Yulianto. 1993. *Arsitektur kolonial belanda di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gajahmada Press.
- Sumarsono dan Djenan. 1986. *Perkampungan di perkotaan sebagai wujud adaptasi sosial daerah Jawa Tengah*. Jakarta: Depdikbud.
- Surianingrat, Bayu. 1981. *Pemerintahan dan administrasi desa*. Jakarta: Aksara Baru.
- Surbakti, Ramlan. 1984. “Kemiskinan di kota dan program perbaikan kampung” dalam *Prisma 6*. Jakarta: LP3ES.
- Suryo, Djoko. 1989. *Sejarah sosial pedesaan karesidenan Semarang 1830-1990*. Yogyakarta: PAU Studi Sosial UGM.
- Suwarno (Panitia Penyusun Sejarah Pertempuran Lima Hari). 1977. *Sejarah Pertempuran Lima Hari di Semarang*. Semarang: Suara Merdeka.
- Thohir, Mudjahirin. 1999. *Wacana masyarakat dan kebudayaan Jawa pesisiran*. Semarang: Penerbit Berkibar.
- Tillema, H. F. 1913. *van wonen en bewonen, van bouwen, huis en erf*. Semarang:--
- Tim Penyusun. 1984. *Sejarah sosial Kota Semarang (1900–1950)*. Jakarta: Depdikbud.
- Tim Peneliti Lembaga Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Satya Wacana. 1973. *Perkembangan Kota Semarang. Laporan sosiologis dari presurvey yang dilaksanakan atas permintaan Gereja Kristen Jawa (GKD) Semarang Barat dalam rangka pelayanan masyarakat Kota di Semarang*. Salatiga: tidak diterbitkan.
- Tjiptoherijanto, Prijono & Yumiko M. Prijono. 1983. *Demokrasi di pedesaan Jawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Topatimasang, Roem (ed). 2000. *Merubah kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyu, Sri Sarjanawati. 2000. *Epidemi dan tata ruang kota Semarang (1879-1930)*. Tesis Pascasarjana UGM: tidak diterbitkan.
- Wajib, Hermintoyo. 1989. *Menguak etos pembangunan RW VII Lamper Mijen Kel. Lamper Lor*. Naskah Lomba K3: tidak diterbitkan.

- Weber, Max. 1966. *The city*. New York: The Free Press.
- Wertheim, WF. 1958. *The Indonesian town studies in urban sociology*. The Hague: W. van Hoeve Ltd: 1958.
- , 1999. *Masyarakat Indonesia dalam transisi: Studi perubahan sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Widodo, J. 2002. "Modern Architecture in Indonesia - A Visual Database on the Discourse in Tropicality and Identity", dalam www.geocities.com/j.widodo.com
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2004. *Desentralisasi dalam tata pemerintahan kolonial Hindia Belanda: Kebijakan dan upaya sepanjang babak akhir kekuasaan kolonial di Indonesia (1900-1940)*. Malang: Bayumedia.
- Varmeer, Carla van Berkum. 1999. Kon ik maar weer een gewoon meisje zijn; Dagboek van een kind in Japankampen. Amsterdam: Forum
- Verslag van den toestand der ementee Semarang over 1915*. Semarang-Soerabaia-Den Haag: Typ. Boekh. En Drukkerij V/H G.C.T. van Dorp & Co.
- Verslag van den toestand der Gementee Semarang over 1916*. Semarang-Soerabaia-Den Haag: Typ. Boekh. En Drukkerij V/H G.C.T. van Dorp & Co.
- Verslag van den toestand der Gementee Semarang over 1917*. Semarang-Soerabaia-Den Haag: Typ. Boekh. En Drukkerij V/H G.C.T. van Dorp & Co.
- Verslag van den toestand der Gementee Semarang over 1918*. Semarang-Soerabaia-Den Haag: Typ. Boekh. En Drukkerij V/H G.C.T. van Dorp & Co.
- Verslag van den toestand der Gementee Semarang over 1919*. Semarang-Soerabaia-Den Haag: Typ. Boekh. En Drukkerij V/H G.C.T. van Dorp & Co.
- Verslag van den toestand der Gementee Semarang over 1920*. Semarang-Soerabaia-Den Haag: Typ. Boekh. En Drukkerij V/H G.C.T. van Dorp & Co.
- Verslag van den toestand der Gementee Semarang over 1925*. Semarang-Soerabaia-Den Haag: Typ. Boekh. En Drukkerij V/H G.C.T. van Dorp & Co.
- Verslag van den toestand der Gementee Semarang over 1930*. Semarang-Soerabaia-Den Haag: Typ. Boekh. En Drukkerij V/H G.C.T. van Dorp & Co.
- Yeoh, Brenda SA. 2003. *Contesting space in colonial Singapore: Urban relation and the built environment*. (Singapore: Singapore University Press).
- Yudhohusodo, Siswono. 1991. *Rumah untuk rakyat*. Jakarta: Gramedia.
- Yuliati, Dewi. 1997. "Industrialisasi di Semarang abad XX", dalam *Lembaran sastra No. 23*. Semarang: FS Undip.
- , 2003. "Analisis historis tentang faktor-faktor pendorong munculnya kesadaran kelas buruh di Semarang dalam era Kolonial Belanda", dalam *Lembaran sastra No. 4 Tabun XXVII*. Semarang: FS Undip.
- Yusuf, Trias PUT. 1996. "Mitos air dalam sastra lisan Jawa pesisiran", dalam *Lembaran sastra No. 20/1996*. Semarang: FS Undip.

- 1915-6a. *Kromo Blanda: Over 't vraagstuk van "het wonen" in kromo's grote land deel I.* 's Gravenhage: NV. Electr. Drukerij en Uitgaven Mij "de Atlas".
- 1915-6b. *Kromo Blanda: Over 't vraagstuk van "het wonen" in kromo's grote land deel II.* 's Gravenhage: NV. Electr. Drukerij en Uitgaven Mij "de Atlas".
1956. *Semarang.* Semarang: Djawatan Penerangan Kota Besar Semarang.

Koran, Majalah, dan Website

BERISI No. I/III/1953

De Locomotief, 10 April 1913

De Locomotief, 14 Juni 1915

De Locomotief, 3 Juli 1915

De Locomotief, 24 Juli 1915

Djawa Baroe No 1, (1 Januari 1945)

Jawa Baroe No 5. Tahun 2604 (1944)

Kompas, 8 Februari 1995

Locale Tehniek Januari 1932

Locale Tehniek Juli 1932

Merdeka, Januari 1946

Slomporet Melajoe, 19 Juni 1875

Soeara Merdeka, 21 Oktober 1965

Suara Merdeka, 26 Juni 2003

Tempo, 14 Mei 1994

www.japaneburgerkampen.nl

www.londoh.com

www.kitlv.nl

www.kompas.com

www.mesias.8k.com

www.semarang.go.id.

www.semarang.nl,

Wawancara

Bisirkulin [78 th] , warga kompleks Manggis, 5-6-2004.

Hermintoyo Wajib (62 th), pejabat kp. Lamper Mijen 6-9-2004, 10-9-2004.

Jong Kie Tio [72 th], kolektor & semarangolog, 14-4-2005.

Kasinem (60 th), wong kp. Peterongan, 17-8-2004.

Kasmini (76 th), wong kp.Lamper Mijen, 7-9-2004.
 Legiman (75 tahun), wong kp. Gang Waas-Peterongan, 10-9-2004.
 Maria Gumita Indarti (75 th), warga kompleks Manggis, 26-5-2004, 27-5-2004
 Margono [70 th], warga kompleks Manggsi, 1-6-2004.
 Marsipah (94 th), wong kp. Lamper Mijen, 7-2-2004, 27-7-2004.
 Paijo [70 th], bekas warga kompleks Krakatau II, 23-4-2005.
 Rohadi (57 th), wong kp.Lamper Mijen, 31-5-2004.
 Rubai (77 th), wong kp.Lamper Mijen, 16-9-2004.
 Said (77 th), wong kp. Peterongan, 10-6-2004.
 Soejono (75 th), wong kp. Lamper Mijen, 15-9-2004, 17-9-2004, 17-11- 2004.
 Soekima (69 th), wong kp.Lamper Mijen 8-9-2004.
 Suharjo (68 th), wong kp. Peterongan, 10-9-2004.
 Sunarto Padimin (75 th), warga kompleks Manggistan III, 15-6-2004
 Suparo [th], warga kompleks Manggis, 25-2-2004.
 Suwito (64 th), wong kp. Peterongan, 11-9-2004.
 Tarman (75 th), warga kompleks Blimbing, 27-7-2004.
 Tasiman (75 th), wong kp.Lamper Mijen, 2-5, 2005 & 20-5-2005,
 Tohir (75 th), wong kp Lamper Mijen, 19-5-2004, 27-7-2004.
 Wahyuni (44 th), wong kp.Lamper Mijen, 29-7-2004.

BIODATA PENULIS

Radjimo Sastro Wijono, lahir di Semarang 24 Juni 1974 adalah staf peneliti Masyarakat Indonesia Sadar Sejarah (Mesiass). Pernah aktif di beberapa LSM, diantaranya LBH Semarang, Indonesian People's Forum (IPF), dan Jaringan Akar Rumput Banten. Menyelesaikan S1 di Jurusan Sejarah Universitas Diponegoro Semarang (2000). Karya tulisnya berupa buku antara lain: *Main Kayu Pembangunan: Potret Kotor Industrialisasi di Jawa* (2004), *Wong-wong Cilik dalam Menghadapi Globalisasi: Dari Bali ke Johannesburg* (2004), "Kampung Ramah Anak: Pemukiman di Semarang abad ke-20" dalam *Kota Lama, Kota Baru Sejarah Kota-Kota di Indonesia* (2005). Menulis artikel di beberapa jurnal ilmiah dan koran serta mengikuti berbagai pertemuan ilmiah di dalam negeri dan luar negeri.